MENGGAUNGKAN SUARA MARGINAL

Cerita dari Kawasan Timur Indonesia

Menggaungkan Suara Marginal:
Cerita dari Kawasan Timur Indonesia

Kumpulan riset enam organisasi masyarakat sipil dalam program "Membunyikan Bukti: Riset Aksi untuk Partisipasi Inklusif" oleh VOICE dan CIPG.

Menggaungkan Suara Marginal: Cerita dari Kawasan Timur Indonesia

Terbit pertama kali dalam Bahasa Indonesia

Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG)

Indonesia Sustainability Centre

Kompleks Harmoni Plaza Blok B-5

Jl. Suryopranoto No. 2, Harmoni

Jakarta Pusat 10130

Indonesia

Desain sampul oleh Anesthesia H. Novianda. Hak cipta dilindungi.

Cara mengutip buku ini:

Farhan, F., Esti, K., Sudrajat, D., Novianda, AH. (Ed.). 2019. Menggaungkan Suara Marginal: Cerita dari Kawasan Timur Indonesia Jakarta: CIPG.

Ucapan Terima Kasih

Buku Menggaungkan Suara Marginal: Cerita dari Kawasan Timur Indonesia ini merupakan bagian dari proses memanfaatkan data/bukti untuk pengambilan kebijakan demi terciptanya partisipasi inklusif di wilayah masing-masing lembaga masyarakat sipil di lokasi terkait.

Kegiatan ini didanai oleh VOICE Global melalui OXFAM Novib dan HIVOS. Penelitian yang terdapat dalam buku ini digarap oleh Active Society Institute Makassar (Sulawesi Selatan), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), Komunitas Pasir Putih (Nusa Tenggara Barat), Yayasan Maupe Maros (Sulawesi Selatan), Yayasan Amnaut Bife "Kuan" (Nusa Tenggara Timur), dan Yayasan Wali Ati (Nusa Tenggara Timur). Selama proses penelitian, para mitra didampingi oleh Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Jakarta dan tiga fasilitator lokal yakni Anhar Putra Iswanto, Nurhady Sirimorok serta Pantoro Tri Kuswardono.

Tim pendamping dari CIPG terdiri dari Daya Sudrajat dan Anesthesia Novianda untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Ferzya Farhan untuk wilayah Sulawesi Selatan (sekaligus sebagai koordinator tim), serta Klara Esti untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.

Selama proses penyusunan buku ini, tim pendamping menerima bantuan dan dukungan dari sejumlah pihak: para mitra masyarakat sipil serta individu-individu yang berpartisipasi dalam studi bersama ini melalui survei, wawancara, diskusi terbatas, maupun lokakarya. Secara khusus, kami berterima kasih kepada peserta pelatihan CREAME (*Critical Research Methodology*) di Makassar, 2017.

Sampul laporan didesain oleh Anesthesia H. Novianda. Ferzya Farhan mengatur tata letak buku ini dan disunting akhir oleh M. Amirudin Aziz.

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

Daftar Tabel

MENGGAUNGKAN SUARA MARGINAL: SEBUAH PEMBUKA

Membunyikan bukti, riset aksi untuk partisipasi inklusif.

Pembuatan kebijakan publik idealnya dilakukan secara integral, menyeluruh pada setiap aspek yang berpengaruh. Partisipasi publik merupakan prasyarat absolut untuk memastikan proses tersebut berjalan secara inklusif. Maka, perumusan kebijakan publik berbasis bukti, terutama dalam konteks lokal, perlu didorong dengan mendasarkan pertama-tama pada pengetahuan lokal oleh para aktor lokal.

Walaupun demikian, warga, khususnya yang terpinggirkan, tampak kesulitan untuk berpatisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Tidak jarang, suara mereka disisihkan karena dianggap tidak cukup kuat. Kehadiran organisasi masyarakat sipil, dalam hal ini, sangat penting dalam membantu menyuarakan kepentingan kelompok terpinggirkan ini. Pun, hal ini bukan tanpa persoalan. Organisasi-organisasi tersebut juga memiliki berbagai keterbatasan perihal tata organisasi mereka, termasuk dalam hal kapasitas[1]. Satu hal yang berpengaruh dalam usaha mereka menyuarakan kepentingan kelompok marginal terdapat pada absennya data yang memadai serta kemampuan menganalisis secara sistematis, sehingga kredibilitas hasil kerja organisasi-organisasi tersebut kerap dipertanyakan.

Beranjak dari hal itulah, CIPG melalui program VOICE merancang sebuah program untuk meningkatkan kapasitas dan kredibilitas organisasi masyarakat sipil demi menyokong advokasi yang bersandar pada bukti. Harapannya, melalui pembekalan melakukan riset kritis secara metodologis, organisasi-organisasi tersebut dapat menyuarakan kepentingan kelompok marginal dengan penyajian yang runtut dan berlandaskan pada bukti sahih.

Agar suara marginal dapat terhimpun dengan baik, organisasi-organisasi tersebut harus terlebih dahulu mengenal bagaimana melakukan riset. Maka, pelatihan *Critical Research Methodology* (CREAME) menjadi langkah awal. Secara umum, pelatihan lima hari ini menawarkan materi seputar keterampilan riset kritis dan bagaimana menyebarluaskan hasil riset

1 Antlöv, Hans & Brinkerhoff, Derick & Rapp, Elke. (2010). Civil Society Capacity Building for Democratic Reform: Experience and Lessons from Indonesia. Voluntas. 21. 417-439. 10.1007/s11266-010-9140-x.

tersebut kepada pengambil kebijakan serta masyarakat. Dua orang peserta dari tiap organisasi ikut serta dalam pelatihan ini.

Pascapelatihan, masing-masing peserta kembali ke organisasinya dan melanjutkan proses riset. Selama proses riset sepanjang kurang lebih delapan bulan, CIPG melakukan pendampingan jarak jauh maupun kunjungan berkala untuk memastikan para mitra melalui proses riset berjalan dengan lancar. Di samping itu, para fasilitator lokal juga tetap bekerja mendampingi para mitra secara intensif.

Hasil dari riset-riset tersebut, yang versi ringkasnya dapat segera Anda baca, akan dipergunakan oleh organisasi-organisasi yang berkaitan untuk menjalankan diseminasi dan/atau advokasi kepada para pengambil kebijakan dan publik di masing-masing daerah.

Setelah program ini berakhir, kami berharap keenam organisasi ini dapat memberikan efek pengali kepada organisasi-organisasi lain dan kepada publik melalui tulisan-tulisan serta kegiatan yang kelak mereka hasilkan.

Selamat menikmati keenam cerita ini!

Jakarta, Januari 2019

PROFIL ORGANISASI DAN SINOPSIS PENELITIAN

Active Society Institute atau yang sering disebut AcSI, berdiri pada tahun 2004 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. AcSI fokus mendorong berbagai komunitas lokal untuk berpartisipasi aktif dalam penentuan kebijakan daerah, membentuk komunitas untuk anak muda urban, maupun bekerja sama dengan komunitas urban lainnya. Riset mereka mengulas strategi penghidupan pedagang perempuan di Pasar Terong, salah satu pasar induk besar di Makassar.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumbawa berdiri pada tahun 1999 dan merupakan bagian dari jaringan AMAN Indonesia. Bermarkas di Sumbawa Besar (Pulau Sumbawa, NTB), AMAN Sumbawa memfokuskan kerja mereka pada advokasi hak-hak masyarakat adat di Sumbawa. Riset mereka membahas dinamika kepemilikan tanah dalam komunitas adat Cek Bocek Selesek Rensuri atau juga dikenal sebagai Suku Berco.

Komunitas Pasir Putih bergiat sejak tahun 2009 dengan menggandeng anak-anak muda di Pemenang, Lombok Utara (Pulau Lombok), NTB. Pasir Putih fokus menggarap literasi warga dan mendorong partisipasi warga dalam berbagai isu lokal melalui berbagai kegiatan seni budaya serta produksi video dokumenter. Riset mereka mengulas pengaruh pembangunan pariwisata budaya terhadap kearifan lokal warga adat Segenter, Lombok Utara.

Yayasan Amnaut Bife "Kuan" (Yabiku) lahir tahun 2002 di Kefamenanu, Timor Tengah Utara (Pulau Timor), NTT. Sesuai namanya (frasa *Amnaut Bife "Kuan"* berasal dari Bahasa Dawan, artinya Peduli Perempuan "Kampung"), Yabiku fokus pada isu perempuan; bergiat dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan serta akses perempuan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan penentuan kebijakan. Riset mereka mengupas faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Kuanek dan Desa Maubesi, dua desa dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi sepanjang 2015-2017.

Yayasan Maupe Maros dibentuk pada tahun 2003 di Maros, Sulawesi Selatan. Maupe berikhtiar mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, memperjuangkan peran aktif perempuan pada aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya melalui pendidikan demokrasi untuk rakyat, serta

pengembangan media alternatif untuk penguatan kesadaran kritis warga. Riset mereka mengupas faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan di lingkup Kabupaten Maros.

Yayasan Wali Ati (Yasalti) terbentuk pada tahun 2002 dan bermarkas di Waingapu, Sumba Timur (Pulau Sumba), NTT. Sejak berdiri hingga kini, Yasalti fokus pada isu pembangunan inklusif, termasuk akses kaum marginal terhadap layanan dasar, efektivitas pelayanan publik, dan tata kelola berkelanjutan. Riset mereka mengungkap aspirasi remaja penenun di Desa Lairuru, salah satu desa penghasil tenun *hikung* khas Sumba sekaligus desa yang hampir semua warganya menganut kepercayaan minoritas, yakni Marapu.

Pumpunan enam cerita ini merupakan hasil proses enam lembaga di atas, tiga fasilitator lokal, dan CIPG dalam memahami suara-suara marginal yang ada di wilayahnya. Keenam tulisan ini dibagi menjadi tiga bagian besar. *Bagian pertama*, membahas suara masyarakat adat yang ditulis oleh AMAN Sumbawa dan Komunitas Pasir Putih, keduanya berasal dari wilayah Nusa Tenggara Barat. *Bagian kedua*, mengulas suara perempuan korban kekerasan. Bagian ini dibahas oleh Yayasan MAUPE Maros di Sulawesi Selatan dan Yabiku di Nusa Tenggara Timur. Kemudian *bagian ketiga*, menyajikan tulisan mengenai suara pemuda dan lansia yang ditulis oleh Yasalti di Nusa Tenggara Timur dan AcSI di Sulawesi Selatan.

Setelah pemaparan enam cerita oleh enam lembaga tersebut, kami juga memuat pembahasan reflektif dari fasilitator lokal dan CIPG yang mendampingi mitra-mitra tersebut selama beberapa bulan proses riset ini dilakukan. Pumpunan hasil riset ini merupakan upaya untuk menyebarluaskan bukti yang akurat dan kontekstual untuk pembuatan kebijakan yang inklusif.

MASYARAKAT ADAT:
BERSUARA DI ARUS ZAMAN

AMAN Sumbawa

Komunitas Pasir Putih

SEBUAH PENGANTAR

Masyarakat adat kerap kali disangkal keberadaannya di Indonesia, walaupun *de facto* komunitas masyarakat adat sendiri telah hadir sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia. Adanya putusan MK No 35/PUU-X/2012 yang membahas tentang hak wilayah adat belum dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat seperti: hak asasi manusia, kesejahteraan ekonomi dan sosial, atau kerusakan lingkungan tanah leluhur. Sama seperti warga negara lainnya, masyarakat adat memiliki hak untuk dilindungi. Selain itu, sebagai warga negara yang diakui, penting untuk melibatkan suara masyarakat adat dalam proses pembuatan kebijakan.

Dalam laporan ini, Komunitas Pasir Putih dan AMAN Sumbawa mencoba untuk memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat Segenter dan Cek Bocek. Komunitas Pasir Putih menjelaskan bagaimana masyarakat adat Segenter mencoba mempertahankan nilai budayanya melalui rumah adat, di mana pada saat ini akses terhadap bahan bangunan rumah adat sendiri sudah sulit untuk dipenuhi. Sedangkan AMAN Sumbawa mencoba menjelaskan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat dari masyarakat adat Cek Bocek. Penelitian ini setidaknya bermanfaat kepada dua aspek: *pertama*, penelitian ini bemanfaat tentang bagaimana memahami masyarakat adat sebagai kelompok rentan. Pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang memerlukan perhatian dari pemerintah. *Kedua,* kebijakan daerah memainkan peranan penting sebagai bukti penerapan konstitusional untuk pemajuan hak-hak masyarakat adat.

Selamat menikmati,

Anesthesia H. Novianda

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumbawa

Tim peneliti:

Jasardi Gunawan

Irawansyah

DINAMIKA KEPEMILIKAN TANAH MASYARAKAT ADAT CEK BOCEK

AMAN Sumbawa

1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adat Cek Bocek berada di Desa Lawin, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat adat Cek Bocek telah membentuk pemerintahannya pada tahun 1512 di masa pemerintahan kedatuan pertama Dewa Awan Mas Kuning yang mengepalai 140 kepala keluarga[2]. Adapun wilayah persekutuan adat Cek Bocek terdiri dari wilayah Dodo, Selesek, Sury, Lebah, Beru, dan Jeluar yang merupakan wilayah taklukan pertama Kedatuan Dewa Awan Maskuning yang saat ini berada di Desa Lawin, Kabupaten Sumbawa.

Secara wilayah, masyarakat adat Cek Bocek memiliki luas 28.975,74 hektar dan berada pada koordinat geografi antara 117◦ 18’ BT s/d 117◦ 30’ BT antara 8◦ 52’ LS s/d 9◦ 04’. Batas wilayah utara Cek Bocek terletak pada wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Lang Remung, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah barat melintasi wilayah hulu DAS Babar, DAS Lampit dan DAS Presa, sebelah timur melintasi sungai Sengane[3].

Keberadaan wilayah adat Cek Bocek belum diakui oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten Sumbawa. Wilayah adat yang diklaim oleh masyarakat adat Cek Bocek juga bagian klaiman oleh negara sebagai hutan negara. Sampai saat ini belum ada pengakuan yang dikeluarkan oleh pemerintah atas keberadaan masyarakat adat Cek Bocek beserta wilayah adatnya. Versi masyarakat adat Cek Bocek adalah wilayah adat, sedangkan versi negara merupakan tanah negara atau hutan negara. Oleh sebab itu, wilayah klaiman Cek Bocek yang merupakan wilayah turun-temurun yang meliputi Blok Dodo, Blok Sury, Blok Selesek, tidak dapat digunakan dengan bebas baik untuk perkebunan, berburu, dan lain sebagainya. Namun, di sisi lain pemerintah memberikan izin kepada PT Newmont Nusa Tenggara melalui kontrak karya pada tahun 1986 yang meliputi wilayah Dodo, Selesek, dan Sury yang

2 Lalu Manca, Sumbawa Pada Masa lalu (suatu tinjaun sejarah) Cetakan I, Rinta Surabaya, 1984.

3 Febriyan Aninidita, Masyarakat Adat CekBocek Selesek Reen Sury, Tak Diakui, Dirampok, Terancam: Laporan, Sayogyo Institute, 2014.

merupakan wilayah adat Cek Bocek, dengan luas konsesi pertambangan 16.568,54 hektar[4].

Konsensi pertambangan PT Newmont Nusa Tenggara pada awal tahun 1986 memulai kegiatan survei regional di wilayah masyarakat adat Cek Bocek (Selesek, Sury, dan Dodo) ketika masyarakat melakukan aktivitas produksi gula merah dari air enau yang biasa disebut *bajalit* yang tersebar 150 titik *jalit*. Masyarakat adat Cek Bocek diminta untuk berhenti melakukan aktivitas *bajalit* karena ada aktivitas pertambangan yang akan masuk. Masyarakat adat Cek Bocek mulai merasa dirugikan dengan adanya pemberhentian ini, karena tidak ada kejelasan pertambangan yang akan masuk, sedangkan aktivitas mereka berhenti dengan begitu saja di lapangan. Masyarakat adat kemudian mengadukan permasalahanya kepada Pemerintah Desa Lebangkar, namun jawaban dari Pemerintah Desa Lebangkar yaitu aktivitas ini diminta berhenti oleh bupati karena menggangu aktivitas perusahaan pertambangan.

Seiring perjalanan waktu, semenjak 1986 sebagian masyarakat adat aktif kembali melakukan aktivitas *bajalit*, berburu, mencari madu, kemiri, jahe, tapi tetap dibatasi aksesnya oleh pemerintah karena adanya perusahaan pertambangan. Masyarakat adat tidak bisa leluasa untuk melakukan aktivitas-aktivitas lapangan seperti sebelum hadirnya perusahaan pertambangan.

Bupati Sumbawa berstandar pada titah Sultan Sumbawa seperti lansiran pernyataan Bupati Sumbawa "Tidak Ada Tanah Adat di Sumbawa." Pernyataan yang termuat dalam media lokal Rungan Lingkar Tambang Senin, 9 Januari 2012, tanah adat tak pernah ada di Sumbawa. Sumbawa hanya mengenal adat dari "Kesultanan Sumbawa" dan kehadiran Komunitas Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury tidak lepas dari keberadaan investasi besar PT NNT[5].

2. Tujuan Penelitian dan Metode

2.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, kami tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam terhadap bagaimana dinamika kepemilikan tanah masyarakat adat Cek Bocek.

4 Data Eksplorasi Elang Dodo Tahun 2004.

5 Titah Sultan Sumbawa, *Sumber media lokal Rungan Lingkar Tambang,* 9 Januari 2012, hal. 10.

2.2 Metode Penelitian

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam proses penelitian ini adalah:

a. Observasi
   Observasi dilakukan untuk mengamati langsung tentang dinamika atas kepemilikan tanah masyarakat adat Cek Bocek, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengelolaan tanah, pola interaksi, ritual-ritual adat, wilayah adat yang dipertahankan, serta lingkungan sosial kehidupan masyarakat adat.
b. Wawancara
   Adapun wawancara ini dilakukan pada pemimpin adat masyarakat adat Cek Bocek, para tokoh adat, pemuda adat dan perempuan adat, serta pemerintah Desa Lawin.
c. Kajian Pustaka
   Kajian pustaka dilakukan untuk menggali kembali penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masyarakat adat Cek Bocek.

3. Studi Pustaka

3.1 Pengertian Masyarakat Adat

Secara definitif pengakuan masyarakat adat masih dalam proses perancangan Undang-Undang, akan tetapi secara implisit pengakuan akan masyarakat adat telah terkandung dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yakni:

Pasal 18 B (2) UUD 1945 (amandemen ke-2, 2000): "Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang".

Pasal 28 I (3) UUD 1945 (amand. ke-2, 2000): "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Mendukung yang tertera dalam UUD 1945, masyarakat adat telah disebutkan dan fungsi akan wilayahnya disebutkan dalam Undang-Undang (UU).

Pertama, UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup; Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum[6].

Kedua, UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum[7].

Ketiga, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 97 ayat 1, poin (a). Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogi, maupun yang bersifat fungsional, (b). Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat, (c). Kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia[8].

Selain itu, menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), masyarakat adat merupakan sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya, serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat (pasal 10 ayat 2) tahun 1999[9].

6 Workshop, AMAN; Pengembangan Kebijakan Tata Cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat, Kearifan Lokal Dan Hak Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Jakarta, Kamis, 3 Desember 2009.

7 UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

8 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

9 Gaung AMAN Suara Masyarakat Adat, *Jalan Terjal pengakuan Masyarakat Adat.* edisi Oktober-Desember, 2017, Hal 17

Pandangan lainya juga datang dari antropolog R. Yando yang menyebutkan bahwa aturan yang bersifat nasional untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat (hukum) adat berawal dari pemberlakuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 5 Tahun 1999. Kebijakan pertama yang "mengatur" pengakuan hak masyarakat atas tanah selepas pengaturan di bawah tingkat konstitusi dan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Agraria tahun 1960 dengan hak asasi manusia[10].

3.2 Wilayah Adat, Hutan Adat, dan Hak *Ulayat*

Wilayah adat menurut Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat, yang ditetapkan oleh masyarakat adat itu berdasarkan partisipatif secara turun-temurun yang tata kelolanya diatur oleh masyarakat adat secara kebersamaan[11].

Berdasarkan Putusan MK N0.35/PUU-IX/2012, hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat sudah hidup dalam penguasaan tata kelola kehidupan sendiri, baik dalam penguasaan tanah yang sering diistilahkan hak petuaan, tanah adat, atau hak *ulayat*.

Adanya hak *ulayat* itu tidaklah mengurangi anggapan yang menyebut hak milik pribumi (*inlandsch bezitrecht*) sebagai hak subjektif tertinggi atas tanah. Sebab melekatnya hak milik pribumi pada hak *ulayat* itu muncul dari "ketentuan adat" (*adatregeling*). Tanah *ulayat* adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak *ulayat* dari suatu masyarakat hukum adat tertentu[12].

4. Temuan Penelitian

4.1 Sejarah Singkat Masyarakat Cek Bocek

Pada tahun 1520, awal mula terbentuknya pemerintahan kedatuan Dewa Awan Mas Kuning. pemerintahan pertama yang digagas oleh Dewa Datu Awan Mas Kuning atas hasil kesepakatan *"rapulung adat"* yakni pemerintahan kedatuan Awan Mas Kuning. Kepala pemerintahan

10 Pengaturan Pengakuan Tanah Masyarakat Adat: Meluruskan logika hukum yang keliru, jurnal bahan yang dipersiapkan untuk proses perumusan rancangan UU PPMA oleh DPD RI Februari 2018.

11 Permendagri No.52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

12 Sajogyo Institute, *Orang Indonesia dan Tanah Airnya,* Cetakan I, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2013, hlm 3

dipimpin langsung oleh Dewa Datu Awan Mas Kuning yang juga disebut sebagai Balang Kelap dan wakilnya adalah Cek Bocek. Atas mandat dari Dewa Datu Awan Mas Kuning, maka dalam menjalankan roda pemerintahan Cek Bocek membentuk kementerian yaitu: Kementerian Teme Dodo, Selesek (Cek Bocek), Kota Kedatuan Sury, Lebah (Kanurunan Lebah), dan Beru – Jeluar (Panyeberu).

Seluruh jalannya roda pemerintahan ini dikontrol oleh wakil Dewa Datu Awan Mas Kuning, yaitu Cek Bocek. Seiring dengan berjalannya roda pemerintahan sampai pada tahun 1622, Dewa Datu Awan Maskuning mempertegas wilayah adat dengan membuat wasiat dalam bahasa Berco:

> *He….reko, ahi, anak, lar lamat ka aSegalabere'kakili sampar bentengJangka atu balamung lar lamat ka aIta tino kuasaKakili bapak DatuTurun-temurun jangka sempu pituKaseratan Datu Awan Mas Kuning, Wilaya Sury reen selesek kakili nelu seribu telu rates lima pulu baluTin stambul datu awan mas kuning nyan tana selesek asal kakili buin lalaJendre buin racen keringking, pamali, tuhhung, ai nunuk, kamasar, samaning, teme, salaparang, huja, batu balamung, kebun, talo uma balik lang lede, selesek dodojangka sampar laun do…do…jangka do. Sury, leba, baru, jeluar, lawangrare , kamilas, sampar banteng, lar lamat ka a kakili datu awan mas kuning jangkalo maika tetap ya sising adat istiadat Cek Bocek[13].*

Perkembangan zaman yang mulai berubah, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pada tahun 1935 mulailah komunitas adat melakukan perpindahan ke lokasi permukiman baru yang dipimpin oleh H. Damhuji Bin Tunru. Masing-masing warga melakukan perpindahan, warga adat Dodo pidah ke Lebangkar, warga Lebah dan Jeluar pindah ke Babar Lunyuk, warga adat Beru pindah ke Ledang Lamurung, dan warga adat Selesek-Sury pindah ke Lawin yang saat ini menjadi tempat pusat pemerintahan adat Cek Bocek. Masing-masing berada dalam administrasi yang berbeda, masyarakat adat Cek Bocek berada dalam administrasi Desa Lebangkar. Masyarakat adat Cek Bocek yang berada pada administrasi Desa Ledang, Desa Lamurung, dan Desa Lunyuk akan berdampak besar pengaruhnya atas kekerabatan masyarakat adat Cek Bocek karena sekat

13 Artinya (kepada seluruh komunitas adat keturunan dari Dewa Datu Awan Maskuning bahwa wilayah adat Kedatuan Awan Maskuning sangat luas yang meliputi wilayah buin lala Jendre buin racen keringking, pamali, tuhhung, ai nunuk, kamasar, samaning, teme, salaparang, huja, batu balamung, kebun, talo uma balik lang lede, selesek, dodo, Sury, leba, baru, jeluar, lawangrare, kamilas, sampar banteng, lokasi ini merupakan dari keturunan ke satu sampai keturunan ketujuh tetap milik kedatuan Selesek).

yang memisahkan mereka cukup jauh dan semakin dijauhkan dengan hubungan leluhur mereka, kecuali hanya masyarakat adat Cek Bocek yang tinggal di Desa Lawin yang sangat dekat dengan kampung tua mereka. Tidak seperti sebelum masuknya pemerintahan desa mereka, Cek Bocek masih utuh bersatu dalam kesatuan wilayah tua mereka seperti Dodo, Selesek, dan Sury yang tidak ada intervensi sedikitpun oleh pemerintah kesultanan sebelum pada tahun 1935, sebelum mereka melakukan perpindahan ke permukiman baru saat ini.

Selain itu, perubahan juga tampak pada dibukanya lahan baru sebagai lokasi garapan pertanian dan perkebunan masyarakat. Hal ini tentu membutuhkan usaha dan tenaga yang kuat di lahan yang akan dijadikan sebagai sumber penghidupan. Jika dibandingkan jenis lahan di kawasan sebelumnya dengan yang ada saat ini, tentu jauh lebih bagus lahan sebelumnya, karena jenis tanah memungkinkan untuk ditanam banyak jenis tanaman atau buah-buahan. Sementara di dataran saat ini, dengan lokasi yang sangat kecil hanya mampu ditanam apa adanya.

Seiring dengan perjalanan waktu pemerintahan berjalan, mulailah masuk sistem pemerintahan resmi, ketika adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang menyamaratakan sistem adat menjadi sistem desa. Ketika mulai diberlakukannya undang-undang tentang pemerintahan desa pada tahun 1979, selanjutnya komunitas yang dipindahkan secara paksa ke lokasi masing-masing secara administratif diubah menjadi Desa Lebangkar, Desa Babar, Desa Lamurung, dan Desa Ledang.

Tuan Raja Hasbullah menjadi pemimpin adat Selesek Reen Sury sampai pada tahun 1996, kemudian digantikan kepada Suhada dari tahun 1996 sampai 2018. Suhada merupakan nama asli, namun ketika bergelar adat pada tahun 2001, seluruh warga adat menobatkan Suhada diberikan gelar menjadi Dato' Sukanda. Dato' Sukanda ini adalah gelar baru adat yang diberikan oleh komunitas adat Selesek Reen Sury. Di masa pemerintahan Dato Sukanda pertama kali menggunakan nama komunitas adat Selesek Reen Sury menjadi komunitas Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury. Nama Cek Bocek diambil dari nama wakil ketua kedatuan Awan Mas Kuning. Setelah Datu Sukanda memimpin adat, masyarakat mulai kembali menata adat istiadat.

4.2 Fungsi Wilayah Adat Cek Bocek

Tanah adat bagi Cek Bocek merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka, selain untuk kebutuhan ekonomi, juga digunakan untuk kebutuhan religius.

4.2.1 Wilayah Adat Untuk Kebutuhan Ekonomi

Penghasilan masyarakat Cek Bocek didapat dari bertani, berladang, berkebun, berternak, dan memanfaatkan hasil hutan adatnya seperti mencari madu, rotan, dan kemiri. Dalam konteks berkebun, masyarakat adat Cek Bocek rata-rata memiliki kebun kopi. Kopi adalah salah satu penghasilan sampingan masyarakat adat yang ditunggu setiap tahunnya. Selain itu, sebagian masyarakat adat Cek Bocek membuat gula aren atau memproduksi gula merah dari air enau (air dari pohon aren). Pola ini dilakukan oleh masyarakat adat Cek Bocek secara turun-temurun. Akan tetapi, yang menjadi sumber penghasilan utama yang mampu membantu pendapatan masyarakat adalah tanaman jenis kopi.

Hasil wawancara dengan Pak A. Wahab selaku Mudum Desa dan juga masyarakat adat Cek Bocek tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah adat.

> *...di samping itu wilayah adat Cek Bocek yang juga disebutkan sebagai tanah adat atau Oman. Adanya wilayah adat dari dulu sangat membantu kami, karena lahan adat yang tersedia kami gunakan sebagai tempat mata pencaharian, sungai yang tersedia di tengah hutan ini kami manfaatkan, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tempat berburu, mencari udang, ikan, hasil hutan buat cari madu dan tempat aktivitas* bajalit *(produksi gula merah). Hasil-hasil hutan seperti kemiri selain dijual juga untuk kebutuhan makan sehari-hari. Akan tetapi, ikan di sungai ini semakin berkurang, sementara jenis tanaman yang kami tanam di lahan adat sangat membantu ekonomi kami, selain itu kami juga persembahkan untuk ritual rutin setelah panen adat, seperti menyembelih hewan, berdoa bersama, dan makan-makan.*
>
> *(A. Wahab, Cek Bocek, 2018)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, lahan yang tersedia selama ini sangat membantu masyarakat adat Cek Bocek dalam menopang kegiatan ekonomi. Selanjutnya Rombok juga menambahkan bahwa:

...walaupun demikian kami tetap bersyukur dengan keadaan yang sekarang. Seperti sampai saat ini saya sendiri tetap masih menjalankan praktek Bajalid *(Produksi gula merah).*

(A. Wahab, Cek Bocek, 2018)[14]

Salah satu tradisi turun-temurun Cek Bocek adalah *mandre/mane*. *Mandre* adalah kegiatan membuat parang, pisau, dan alat-alat perladangan sebagai tambahan penghasilan rumah tangga. Kegiatan *mandre/mane* adalah pembuatan parang, pisau, dan alat-alat perladangan. Parang, pisau, dan alat perladangan sulit didapatkan karena hanya terdapat di pusat kota Sumbawa ke Brang Bara atau ke Desa Talowa Moyo Hulu yang jarak tempuhnya hampir 100 kilometer dan memakan waktu berhari-hari. Membuat sendiri parang, pisau, dan alat perladangan sehingga dapat dibeli warga tanpa harus ke luar daerah tentu lebih ekonomis. Kegiatan *mandre/mane* ini bahan-bahanya hanya didapatkan di wilayah adat, seperti bambu-bambu besar (*petung*) yang digunakan hanya didapatkan di wilayah adat. *Petung* ini digunakan sebagai pengatur api yang dipompa oleh pemandre.

4.2.2 Kebutuhan Sosial Budaya dan Religi

Wilayah adat bagi masyarakat adat Cek Bocek mempunyai arti penting, bahwa wilayah adat tidak semata-mata digunakan untuk kebutuhan ekonomi seperti berladang, bertani, berkebun, atau memanfaatkan hasil hutan; akan tetapi yang paling penting bagi mereka adalah kebutuhan religius seperti upacara-upacara adat yang sudah dilakukan sejak turun-temurun.

a. Sedekah Zakat

Sedekah zakat ini merupakan ritual adat masyarakat hukum adat Cek Bocek Selesek Reen Sury yang wajib hukumnya dilakukan. Proses ritual ini sebelumnya dilakukan setelah panen hasil pertanian atau kebun. Dinamakan ritual adat sedekah zakat sebagai wujud rasa syukur masyarakat adat Cek Bocek kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan hasil pertanian yang telah dihasilkan. Sedekah zakat ini dilakukan pada pertengahan tahun antara bulan 5 (lima) atau sampai bulan 6 (enam).

Sebelum melakukan proses ritual adat, maka tugas peran kelembagaan adat *"Parenta Ne Adat Cek Bocek"* harus memastikan apakah sudah atau belum

---

14 Wawancara dilakukan pada Tanggal 20 April 2018

selesainya aktivitas bertani atau memanen para petani tersebut. Jika semua warga adat sudah tidak ada aktivitas pertanian di lapangan maka dirapatkan dalam rapulung adat untuk menentukan tanggal, waktu, dan persiapan-persiapan lainnya terhadap para tamu-tamu yang diundang. Setelah ada kesepakatan waktu yang telah ditentukan, dibentuklah panitia pelaksana kegiatan yang terdiri dari warga masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury dan warga Desa Lawin secara umumnya.

Kegiatan ini dilakukan di masjid, para ibu-ibu atau kepala keluarga membawa nasi atau dulang ke masjid untuk proses kegiatan ritualnya.

b. Jango Kubur Leluhur (Ziarah ke Makam Leluhur)

Pada awal bulan Syawal, ritual ini dijalankan dan diikuti oleh seluruh komunitas masyarakat adat Cek Bocek, sebagai suatu penghormatan terhadap para leluhur yang telah mewariskan segala ilmu dan wilayah adat yang subur, serta sebagai ajang tali silaturahmi di kalangan warga masyarakat Cek Bocek yang telah berpisah.

Biasanya sehari sebelum ritual, warga komunitas adat yang telah tinggal terpencar-pencar akan berkumpul di pemukiman Lawin, mereka menginap dan bersilaturahmi di kalangan kerabat-kerabatnya sendiri, — bagi kaum wanita akan menyiapkan perbekalan untuk esok harinya. Ritual adat dilakukan di pemakaman Dewa Datu Awan Mas Kuning di Lawang Sasi dan makam-makam di lokasi Dodo Aho, Selesek, Kesek, dan Dodo Baha. Dengan masuknya PT NNT ini tradisi ritual *sersi kuber* menjadi hilang karena lokasi tersebut sudah steril, sehingga tidak boleh lagi ada aktivitas apapun di atas wilayah tersebut atau areal pertambangan PT NNT.

c. Eneng Uran (Meminta Hujan)

Pada saat menjelang musim tanam padi sekitar awal bulan Desember, jika hujan yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang, masyarakat melakukan ritual memanggil hujan. Prosesi ini dilalui dengan musyawarah untuk menyepakati hari yang baik melakukan pemanggilan hujan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam ritual pemanggilan hujan di antaranya menyiapkan kembang 7 rupa, 7 ekor ayam putih, minyak khusus yang disiapkan oleh pawang atau *sandro*. Ritual akan dipimpin oleh seorang pawang hujan yang diwariskan turun-temurun. Perlengkapan yang disediakan oleh pawang hujan hanya berupa *tampah* yang dibacakan mantera-mantera.

Pada hari yang telah ditentukan, pukul empat pagi sebagian masyarakat berangkat menuju suatu tempat yang dikenal sebagai Tihu Maring (disekitar kawasan Dodo). Lokasi ini dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama satu hari, ketika tiba pada sore hari warga Cek Bocek akan bermalam di lokasi dan mulai bersiap melakukan ritual khusus ini. Setelah ritual dilakukan selama satu hari, selanjutnya mereka akan berkemas untuk segera berangkat pulang menuju pemukiman Lawin. Dalam perjalanan pulang ini biasanya hujan turun dengan derasnya sebagai pertanda berhasilnya ritual tersebut. Demikian pun dengan hari-hari selanjutnya, akan menjadi hari-hari yang selalu dirundung hujan deras, hal ini merupakan berkah dari penguasa alam semesta.

d. Barajak Nganyang/Mainasu (Berburu)

Pada masa lampau, ritual ini biasa dilakukan oleh warga komunitas adat pada minggu-minggu menjelang akhir tahun sebagai acara hiburan dan olahraga untuk mempererat kekerabatan di kalangan warga komunitas adat. Setiap warga yang memiliki anjing pemburu berkumpul dan segera bermusyawarah untuk menentukan lokasi-lokasi buruan. Semua kelompok yang hadir mendapatkan arahan tentang lokasi buruan dan titik-titik pertemuan serta waktu yang ditentukan untuk mengakhiri perburuan. Biasanya perburuan dilakukan selama beberapa hari sampai mendapatkan hewan buruan.

Hasil buruan itu akan segera dibawa ke pemukiman Lawin dan segera diolah oleh kaum wanita setelah semua peserta hadir di pemukiman Lawin. Sejak zaman Dewa Datu Awan Mas Kuning, cara berburu suku Berco sudah menggunakan anjing peliharaan untuk menggiring buruannya. Mereka umumnya memiliki 4 – 6 ekor anjing. Umumnya para pemburu ini hanya dua orang ditemani 5 – 6 ekor anjingnya. Medan berbukit membutuhkan tenaga ekstra keras untuk mengejar hewan buruan dengan bantuan anjing-anjing.

Ada juga ritual-ritual adat tertentu yang akan dilakukan, seperti pada ritual yang dilakukan pada tanggal 20 April setiap tahunnya merupakan ritual untuk keselamatan atas dampak wilayah adat yang digunakan oleh perusahaan PT AMNT dalam tahap kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi ke depan. Ditambah lagi oleh Bulkiah bahwa tempat-tempat ritual adat sudah ditempatkan oleh polisi dan brimob padahal perusahaan tersebut kemungkinan besar tidak memiliki izin operasional di lapangan berupa izin eksplorasi.

Akan tetapi, pelaksanaan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara tidak selamanya berjalan dengan baik karena terjadi banyaknya sengketa. Sengketa tersebut adalah sengketa antara masyarakat etnis Samawa[15] dengan PT Newmont Nusa Tenggara dan sengketa antara pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan PT Newmont Nusa Tenggara, yang berkaitan dengan divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara sebesar 7%[16].

4.3 Pembagian Wilayah Cek Bocek

Wilayah adat Cek Bocek pertama kali dibagi dan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Tata Ruang Wilayah Adat (RTRWA). RTRWA ini disusun oleh masyarakat adat Cek Bocek sendiri secara partisipatif pada tahun 2010. Sebelumnya pembagian wilayah adat Cek Bocek hanya dilakukan dengan kesepakatan hukum adat saja tanpa harus dituangkan dalam peta partisipatif, hanya menggunakan batas alam sebagai bentuk kesepakatan penggunaan lahan, seperti menggunakan batu, batas kali, dan pohon-pohon tertentu. Namun, untuk mempertegas kembali penggunaan wilayah adat, masyarakat adat Cek Bocek menyusun dokumen perencanaan Tata Ruang Wilayah Adat. Pembagian ruang wilayah adat ini sebagai bentuk kesiapan masyarakat adat Cek Bocek dalam menghadapi adaptasi mitigasi perubahan iklim yang terjadi di atas wilayah adat mereka. Di samping itu, untuk mempermudah wilayah kelola masyarakat adat Cek Bocek dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

15 Etnis samawa merupakan kelompok komunitas masyarakat adat Cek Bocek yang menempati dan sebagai pemilik wilayah dari desa Lawin

16 Salim H.S. & Idrus Abdullah, Hasil Penelitian Penyelesaian sengketa Tambang: Studi kasus sengketa Antara masyarakat samawa dengan PT Newmont Nusa Tenggara, 2005, hal. 2.
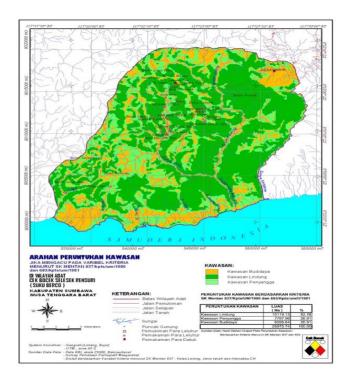
GAMBAR 1 PETA WILAYAH ADAT DAN PEMBAGIAN MASYARAKAT ADAT CEK BOCEK

Sumber: Hasil pemetaan partisipatif masyarakat Cek Bocek (2010)

Masyarakat adat Cek Bocek membagi wilayah adat sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya serta berdasarkan klasifikasi wilayah adat, luas wilayah adat Cek Bocek secara keseluruhan seluas 28.975.74 hektar yang perinciannya, 151.119.13 hektar atau 52,18% untuk kawasan lindung, 7797.96 hektar atau 26, 91%, dan kawasan budi daya 6058,64 hektar atau 20, 91%.

Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya di wilayah Adat Cek Bocek mengacu pada ketentuan dan arahan fungsi yang tertuang dalam PP No. 26/2008 Tata Ruang Nasional. Kebijakan dalam penyusunan tata ruang menggarisbawahi keseimbangan antara pola ruang dan fungsi ruang, yaitu keseimbangan antara kawasan lindung dan lahan budi daya. Untuk perencanaan pembagian ruang wilayah adat Cek Bocek lebih jauh dalam pembagian wilayah atau kesesuaian lahan yang dibutuhkan oleh masyarakat adat. Secara teknis lahan budi daya dan kawasan lindung

terintegrasi dalam satu kesatuan rencana administratif provinsi dan kabupaten.

Kawasan budi daya Cek Bocek merupakan faktor utama produksi dan objek pembangunan yang tidak berdiri sendiri. Lahan budi daya tidak akan berfungsi secara optimal tanpa perlindungan fungsi ekologi dari kawasan lindung, sehingga sangat penting untuk dikelola secara konservasi dengan arahan sebagai berikut.

- Diperlukan diversifikasi kegiatan industri untuk mengurangi ketergantungan pada industri pengolahan sumber daya alam (*resource-based*);
- Mengembangkan komoditi perkebunan dan peternakan yang memiliki nilai kompetensi tinggi agar menguntungkan masyarakat adat;
- Pengembangan kegiatan industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan hasil hutan dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat adat;
- Pengembangan pertanian tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan beras sebagai wujud strategi ketahanan pangan; dan
- Pengembangan kegiatan masyarakat adat dan menciptakan kesempatan kerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.

Implementasi penetapan ruang kelola kawasan lindung, kawasan penyangga, dan kawasan budi daya merupakan bentuk pengelolaan dengan pengembangan aktivitas yang saling mendukung seperti:

- Pengembangan potensi sungai pada wilayah-wilayah yang sangat sesuai untuk lahan budi daya berdasarkan potensi pertanian masyarakat adat dalam mengurangi ketergantungan terhadap investasi skala besar;
- Aglomerasi pemukiman yang mengelompok di wilayah yang potensial mengikuti jaringan jalan setapak serta pengembangan wilayah kelola masyarakat adat; dan
- Penetapan wilayah lindung khusus untuk menopang kepentingan sumber daya masyarakat adat.

Selain tiga pembagian klasifikasi wilayah adat, ada peruntukan kawasan lindung, budi daya juga secara khusus diperuntukkan untuk hutan keramat

atau hutan adat. Masyarakat adat Cek Bocek dari tiga lokasi berupa hutan lindung, hutan penyangga, dan hutan budi daya juga diambil untuk hutan adat yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Hutan adat ini dikhususkan oleh masyarakat adat Cek Bocek untuk melakukan kegiatan ritual adat keselamatan hutan adat *pungka inu*, yaitu kegiatan ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat adat Cek Bocek setiap tahunnya pada bulan April yang dimulai prosesnya dari penanaman pohon di dalam hutan adat. Ritual adat *Pungka inu* secara khusus memiliki penjaga hutan adat yaitu Pak Mareh. Luas area khusus hutan adat sekitar 400 hektar yang meliputi tiga blok wilayah yaitu Dodo, Selesek, dan Sury.

Dalam pembagian wilayah adat Cek Bocek, masyarakat adat Cek Bocek merupakan penentu utama dalam pembagian wilayah. Pemerintah desa sama sekali tidak terlibat dalam pembagian wilayah adat ini. Misalnya, wilayah adat yang sudah disusun bersama dalam perencanaan yang dimuat dalam Tata Ruang Wilayah Adat sebagai dokumen resmi, maka dokumen ini menjadi acuan program masyarakat adat dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Seperti halnya pada area yang sudah disepakati, misalnya membuat waduk itu direncanakan pada wilayah *Oman Toke,* perencanaan sawah baru, kebun kopi, kebun kemiri, kebun nangka, pusat titik *jalit* (produksi gula aren), peternakan, dan lain sebagainya tersebar dalam wilayah adat Cek Bocek yang meliputi wilayah Sebunga, Bolon Sebu, Kemilas, Semaning, Selesek, Sury, dan Dodo.

Di samping itu, secara khusus oleh masyarakat adat Cek Bocek makam-makam tua direncanakan dijadikan kawasan cagar budaya. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan diri dengan para leluhurnya. Pada masing-masing makam dibersihkan dan dibangun sebuah pondok yang agak besar atau dipindahkan di sekitar permukiman agar memudahkan dalam perawatan serta tidak jauh jika ingin berziarah.

Wilayah-wilayah makam leluhur Cek Bocek meliputi wilayah Selesek Bakal Bila, Beru, Matang Kesek, Aho, Lang Lede, Sury, dan Dodo dengan jumlah makam tua leluhur sebanyak 1.525.

4.4 Konflik Masyarakat Adat Cek Bocek dengan PT Newmont Nusa Tenggara

Banyak hal yang terjadi sejak kehadiran PT Newmont Nusa Tenggara. PT NNT melakukan aktivitas eksplorasi di Blok Elang Dodo, Selesek, dan Sury yang kini merupakan wilayah komunitas adat Cek Bocek. Hadirnya

PT NNT mengundang perhatian khalayak banyak, ada yang mendukung dan ada pula yang kontra terhadap pertambangan. Pihak komunitas adat sangat tidak setuju dengan hadirnya pertambangan di wilayah adatnya tanpa ada kompromi atau persetujuan dengan komunitas adat Cek Bocek. Ketidaksetujuan juga datang dari masyarakat Sumbawa bagian tengah karena dianggap akan menghilangkan sumber air di beberapa waduk di Sumbawa seperti Bendungan Batu Bulan dan Waduk Mama.

Pada tahun 1986 aktivitas survei regional pertama yang dilakukan oleh PT Newmont di blok Elang Dodo berhasil menemukan potensi emas di wilayah masyarakat adat Cek Bocek. Mengetahui adanya aktivitas survei tersebut, pemerintah desa meminta kepada masyarakat adat Cek Bonek untuk segera menghentikan sementara aktivitas maupun ritual adat yang sedang dilakukan di wilayah hutan adat.

Di tahun 2008, komunitas masyarakat hukum adat Cek Bocek Selesek Reen Sury pada tanggal 3 November dengan nomor surat 07/CBRS/X/2008 perihal pemberitahuan kepada Gubernur NTB menulis agar pemerintah dapat menghentikan aktivitas PT NNT dengan tidak mengeluarkan izin didirikannya PT NNT di wilayah tersebut, karena merupakan satu-satunya wilayah menggantungkan hidup untuk kebutuhan ekonomi dan ritual adat masyarakat hukum adat Cek Bocek Selesek Reen Sury.

Adapun fakta-fakta yang memengaruhi adalah perusahaan tambang emas PT Newmont Nusa Tenggara melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atas tanah yang terletak di Desa Lawin, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa berdasarkan izin kontrak kerja dari Departemen Pertambangan dan Energi No. B-43/PRES/II/1986 tanggal 6 November 1986. Menurut Dinas Kehutanan Sumbawa bahwa wilayah tersebut masuk dalam kawasan hutan, namun komunitas masyarakat hukum adat Cek Bocek Selesek Reen Sury masih mengakui wilayah yang dimaksud adalah tanah hak *ulayat* kedatuannya, sehingga harga tanah menjadi mahal.

Konflik yang sudah ada diperkeruh dengan adanya pembentukan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) pada tahun 2011 yang merupakan lembaga adat yang didirikan oleh pemerintah daerah yang mandatnya untuk menjaga adat istiadat Sumbawa, menempatkan Sultan Sumbawa di dalamnya, dan mengakui hanya satu masyarakat adat di Sumbawa yaitu masyarakat LATS saja. Hal ini dipertegas dalam Perda No. 9 Tahun 2015 Tentang Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), sehingga berdampak pada

sedikitnya ruang untuk adanya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat Cek Bocek.

4.5 Dampak Konflik Masyarakat Cek Bocek dengan PT Newmont Nusa Tenggara

Konflik yang terjadi dari tahun 1986 sampai penelitian ini dilakukan (2018) telah berlangsung selama 32 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, dampaknya sangat besar bagi keadaan wilayah, keadaan ekonomi, dan keadaan sosial budaya masyarakat adat Cek Bocek.
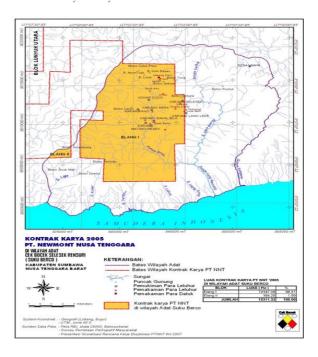
GAMBAR 2 PETA WILAYAH PERTAMBANGAN PT NEWMONT NUSA TENGGARA

Sumber: Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara (2005)

4.5.1 Berkurangnya Wilayah Kegiatan Ekonomi Masyarakat Adat Cek Bocek

Seperti yang telah disebutkan tentang kegiatan *bajalit*, kehadiran PT NNT yang sedang melakukan survei meminta agar masyarakat yang melakukan aktivitas *bajalit* untuk mengosongkan lapangan. Warga adat yang aktif melakukan aktivitas *bajalit* pun berhenti untuk meninggalkan *jalit* atas

perintah Pemerintah Desa Lebangkar Syamsuddin Mursyid[17]. Adapun total titik *jalit* sejumlah 150 buah yang tersebar dalam wilayah adat. Aktivitas *bajalit* berhenti sebagian dari tahun 1986 sampai tahun 1996. Dari 150 titik *bajalit* hanya yang tersisa 16 titik (Blok mundur, Sampak, Muling, Elang Penaru, Kapait, Pare, Pelamende, Kebun Nangkom, Jalit Treng, Tiu Budak, Tiu Nesrida, Tihu, Tihu Danan, Sekot Hulu, Bayan, Uma Balek). Wilayah pencarian madu, berburu, petik kemiri, dan kegiatan pengambilan rotan berkurang 3 wilayah, yaitu di daerah Selesek, Sury, dan Dodo sebesar 10.311 hektar dari 28.000 hektar.

4.5.2 Ritual Adat di Kawasan PT Newmont Nusa Tenggara

Terdapat tiga situs ziarah atas makam tua yang sering disebut oleh masyarakat adat sebagai makam keramat para leluhur. Situs ziarah tersebut merupakan makam Dewa Awan Mas Kuning yang berada di Selesek, makam Pun Tahe di Sury, dan makam Lawang Sasi di Dodo. Makam Dewa Awan Mas Kuning sebagai leluhur tertua dari masyarakat adat Cek Bocek menjadi situs makam terpenting bagi masyarakat adat Cek Bocek. Masyarakat adat Cek Bocek kehilangan satu ritual *jango kubur* leluhur ke Dewa Awan Mas Kuning, yaitu penghilangan hubungan secara leluhur dan ritual yang tidak dapat digantikan, karena bentuk masyarakat adat Cek Bocek yang masih berhubungan dengan leluhur dan kepercayaan ritual adatnya. Selain ritual pembersih kubur (*seresi kubir*), ritual keselamatan hutan adat dari bencana (*pungka inu*), juga terdapat ritual yang sering diadakan pada setiap tahunnya atau menjelang musim panen, yaitu ritual permainan berburu di tengah hutan adat (*main asu*). *Main asu* ini hanya dilakukan sekali dalam setahun, ritual ini adalah ritual turun-temurun Cek Bocek yang wajib dilakukan untuk menjaga nilai adat istiadat yang sudah tertanam dari turun-temurun.

Akan tetapi ritual-ritual adat ini tidak bisa dilakukan lagi karena sudah berada di willayah kerja PT NNT, seperti ritual adat *sersi kubir* berada di blok Dodo pusat kuburan tua Cek Bocek, di sini sudah tidak dapat lagi dilakukan karena sudah dipagar oleh PT NNT dan merupakan lokasi *base camp* PT NNT, sehingga kalau masyarakat adat Cek Bocek akan melakukan ritual adat harus izin terlebih dahulu kepada PT NNT, itu pun dikawal dengan ketat oleh aparat dan penjagaan PT NNT. Ritual adat ini dilakukan dengan memberikan persembahan kepala kambing yang ditaruh diatas makam tua sebagai bentuk persembahan terhadap roh leluhur Cek Bocek.

---

17 Hasil wawancara dengan Kepala Adat Cek Bocek, April 2018

Dengan tidak begitu bebasnya ritual adat ini, maka akan berdampak negatif kepada masyarakat adat Cek Bocek; seolah-olah titipan leluhur tidak dapat dijaga dengan baik yang dapat menyebabkan fungsi kelembagaan adat tidak dapat berjalan dengan baik seperti tabib adat yang bertugas untuk menjalankan ritual-ritual adat ini.

Selain dilarangnya *jango kubur* ke makam leluhur, ritual adat lainnya yang dilakukan secara terbatas dan harus diawasi secara ketat oleh PT NNT adalah kegiatan *eneng uran* yang berada di Tiu Mareng, kawasan Olat Trong. Ketika musim kemarau panjang melanda kawasan masyarakat Cek Bocek, maka kegiatan *eneng uran* wajib dilakukan oleh masyarakat adat. Dibatasinya kegiatan tersebut menjadi hambatan besar bagi masyarakat adat Cek Bocek.

Bagi masyarakat adat Cek Bocek wilayah adat, hutan adat, hak *ulaya* —atau apapun namanya—merupakan bagian utama dari kehidupan masyarakat adat Cek Bocek. Tanah adat bagi masyarakat adat Cek Bocek merupakan napas kehidupan masyarakat adat Cek Bocek karena dianggap ibu kandung bagi masyarakat adat Cek Bocek, maka kalau hilang wilayah adat sejengkalpun sama dengan hilang ibu kandung mereka.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Hadirnya perusahaan PT NTT di wilayah komunitas adat Cek Bocek, memiliki dampak yang sangat besar pada Blok Dodo, Selesek, Sury, Lebah, Beru, dan Jeluar. Pasalnya wilayah ini merupakan wilayah adat masyarakat adat Cek Bocek yang selama ini digunakan untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari seperti digunakan sebagai tempat berburu, bertani kebun/tanam kopi, kemiri, membuat gula aren dari air enou, peternak madu, peternak sapi (*lar*), *oman* (sawah), kelola gaharu, dan lain-lain. Bagian paling penting kegunaan wilayah adat Cek Bocek dapat digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan ritual adat seperti ritual adat *pungka inu*, *ngajang*, *eneng uran*, *jango kuber*, dan *zadakah zakat* yang dilakukan setiap musimnya. Kegiatan ritual adat tersebut adalah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan antara masyarakat adat Cek Bocek dengan wilayah adatnya sejak turun-temurun.

Selain dari dampak ekonomi masyarakat, adanya PT NNT berdampak pada tatanan nilai-nilai adat istiadat yang selama ini masyarakat praktikkan di wilayah tersebut. Jadi tidak heran ketika terjadi konflik antara pihak perusahaan PT NNT dengan masyarakat Cek Bocek, sehingga saat ini masyarakat merasa kehilangan adat atau tradisi yang selama ini mereka praktikkan di wilayah tersebut. Sementara itu dari pihak pemerintah Kabupaten Sumbawa belum ada iktikad baik terhadap masyarakat adat Cek Bocek, justru masyarakat adat Cek Bocek dianggap musuh oleh pemerintah daerah. Buktinya pemerintah sama sekali tidak memfasilitasi apa yang menjadi keinginan masyarakat adat Cek Bocek dengan perusahaan. Atau sebaliknya, PT NNT menghargai apa yang menjadi hak-hak masyarakat adat di lapangan, seperti dibornya kuburan leluhur, padahal masyarakat adat Cek Bocek selalu meminta perlindungan kepada pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerah belum kelihatan adanya niat baik.

5.2 Rekomendasi

a. Segera dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Cek Bocek. Dengan adanya Perda ini, maka hak-hak masyarakat adat Cek Bocek dapat terlindungi, seperti hak atas wilayah adat, hak atas hutan adat, hak atas sumber daya air mineral, kearifan masyarakat adat, hak-hak ritual adat, dan sejenisnya. Selain itu secara otomatis akan menjadi milik masyarakat adat Cek Bocek sepenuhnya.
b. Pemerintah Sumbawa harus berani mengambil sikap untuk segera berhentikan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT NNT di wilayah masyarakat adat karena aktivitas tersebut menimbulkan konflik antara masyarakat adat Cek Bocek dengan pihak PT NNT selama ini. Adanya konflik ini tentu sangat mengkhawatirkan kedaan sosial masyarakat Sumbawa pada umumnya.
c. Segera disahkan RUU Masyarakat Adat agar masyarakat adat Cek Bocek maupun masyarakat adat di seluruh Indonesia mendapatkan jaminan atas hak perlidungan dan kepemilikan hutan adat yang selama ini mereka jaga sebagai warisan dari nenek moyang. Dengan adanya RUU masyarakat adat, tentu pihak yang luar yang ingin melakukan aktivitas di dalam kawasan masyarakat adat tidak dapat serta merta melakukan aktivitas walaupun mendapatkan izin dari pemerintah daerah.

d. Penelitian lebih lanjut difokuskan tentang perlindungan dan kekerasan terhadap masyarakat adat.
e. BIG mengakomodir peta wilayah adat yang dilakukan oleh AMAN.

Daftar Pustaka

Anindita, Febriyan. 2014. *Masyarakat Adat CekBocek Selesek Reen Sury, Tak Diakui, Dirampok, Terancam*. Laporan, Sayogyo Institute.

Gaung AMAN Suara Masyarakat Adat. 2017. "Jalan Terjal pengakuan Masyarakat Adat". edisi Oktober-Desember

Institute, Sajogyo. 2013. *Orang Indonesia dan Tanah Airnya.* Cetakan I, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Manca, Lalu Manca. 1984. *Sumbawa Pada Masa Lalu (suatu tinjaun sejarah).* Surabaya: Cetakan I, Rinta Surabaya.

Salim H.S. & Idrus Abdullah. 2005. *Hasil Penelitian Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi kasus Sengketa antara Masyarakat Samawa dengan PT Newmont Nusa Tenggara*

Titah Sultan Sumbawa, dalam *Rungan Lingkar Tambang,* 9 Januari 2012

Workshop AMAN; *Pengembangan Kebijakan Tata Cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat, Kearifan Lokal Dan Hak Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;* Jakarta, Kamis, 3 Desember 2009.

KOMUNITAS PASIR PUTIH

Tim peneliti:

Ahmad Ijtihad

Ahmad Rosidi

Muhammad Sibawaihi

PENGARUH PERUBAHAN ARSITEKTUR RUMAH ADAT TERHADAP PARIWISATA DAN BUDAYA.

Studi Kasus Masyarakat Adat Segenter Bayan, Lombok Utara.

Komunitas Pasir Putih

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Lombok Utara, semua tempat memiliki keunikan dan ciri khas meskipun karakter setiap tempat berbeda. Desa Bayan misalnya, dikenal dengan adat budaya yang kental. Hal itu bisa dilihat dari berdirinya bangunan masjid kuno maupun masyarakatnya yang sampai saat ini masih memegang adat dan budaya Sasak, Lombok Utara[18].

Bayan merupakan sebuah kecamatan yang memiliki potensi kebudayaan yang besar. Kecamatan ini menyimpan sejarah Lombok Utara. Terdapat banyak manuskrip dan peninggalan sejarah yang menarik untuk digali dan dipelajari, seperti Masjid Kuno Bayan, Masjid Kuno Semokan, Suling Dewa di Desa Sembalun, dan beragam peninggalan sejarah yang lain. Salah satu yang kemudian menjadi daya tarik kebudayaan dan pariwisata di Kecamatan Bayan dan yang akan kita bahas lebih lanjut adalah rumah tradisional Dusun Segenter. Dusun Segenter menjadi sangat menarik untuk dibahas karena terjadi beberapa perubahan setelah berkembangnya pariwisata. Selain itu, dari sekian dusun yang ada di Lombok Utara, Dusun Segenter memiliki rumah adat yang menjadi representasi dari Lombok Utara pada masa silam.

Masyarakat Dusun Segenter merupakan salah satu komunitas masyarakat yang masih kental memegang teguh tradisi leluhur. Dalam laku kehidupan sehari-hari, masyarakat masih percaya dengan karma alam, di mana warga masih meletakkan alasan hukum secara prinsip dari bahasa alam dan Tuhan. Misalnya, tidak sedikit dari warga yang percaya jika terdapat pohon yang tumbang, hal tersebut merupakan pertanda bahwa bumi sedang makan. Pohon yang tumbang tidak boleh diambil atau dimanfaatkan, ia akan dibiarkan lapuk hingga menjadi tanah[19]. Kepercayaan ini masih

18 Sibawaihi Muhammad, Bangsal Dulu Kini dan Nanti, akumassa.org, 2015 (http://akumassa.org/id/bangsal-dulu-kini-dan-nanti/)

19 Wawancara Amaq Nursaneh, 1 Maret 2018.

berlaku di Hutan Adat Semokan yang merupakan asal-muasal leluhur keturunan warga masyarakat Bayan, termasuk Dusun Segenter.

Secara umum, masyarakat Dusun Segenter berprofesi sebagai petani, peternak, dan pedagang. Pola kehidupan masyarakat memengaruhi bagaimana masyarakat menjalani kehidupannya. Setiap kepala keluarga di Dusun Segenter memiliki 1 hektare (Ha) lahan perkebunan dan satu kandang ternak. Selain tentang kehidupan, yang menarik adalah masyarakat Dusun Segenter tentang mempertahankan rumah tradisionalnya, meskipun secara geografis Dusun Segenter tidak berada di pusat kebudayaan, yakni Bayan Beleq.

Rumah tradisional Segenter merupakan salah satu destinasi wisata budaya yang tentu ingin dinikmati. Wisatawan dapat melihat bagaimana keunikan rumah adat dan segala hal yang menyangkut kehidupan masyarakat Dusun Segenter. Benturan antara pariwisata sebagai konsep modern dengan adat istiadat dan kebudayaan masyarakat lokal sebagai sebuah nilai akan sulit menemukan titik terang—sebab keduanya memiliki karakter yang berbeda dan masyarakat adat bertumpu pada nilai-nilai dan norma budaya adat istiadat suatu daerah (secara teritorial).

Pariwisata memiliki kecenderungan eksploitatif, sedangkan adat istiadat memiliki kecenderungan defensif. Namun bagaimanapun, tidak bisa dihindari istilah wisata adat/wisata budaya menjadi cukup diminati di dunia pariwisata, sebab ia menawarkan eksotisme kebudayaan lama kepada manusia zaman modern.

Pariwisata masyarakat adat pun menjadi cukup diminati di kalangan wisatawan, baik sebagai destinasi wisata spiritual[20] ataupun wisata teritorial[21]. Seperti pariwisata yang terdapat di Lombok Tengah yaitu wisata budaya Desa Sade yang menampilkan atraksi kebudayaan lokal, arsitektur rumah tradisional Suku Sasak, dan menjual produk-produk kebudayaan lokal. Begitupun halnya pariwisata budaya rumah tradisional di Dusun Segenter[22].

Dusun Segenter sendiri menjadi unik disebabkan masyarakatnya masih memiliki ciri arsitektur rumah tradisional. Rumah tradisional masyarakat

20 Wisata spiritual: merupakan wisata yang mengandung nilai-nilai dan norma seperti nilai kebudayaan, keagamaan, kemanusiaan dan yang lainnya

21 Wisata teritorial: merupakan destinasi wisata yang mengutamakan keindahan, kekhasan suatu tempat seperti perbukitan, pantai, bangunan megah dan sebagainya

22 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 9 tahun 2011 dalam pasal 26 ayat 1-2 menyebutkan "kawasan peruntukkan pariwisata (kawasan budaya) adalah kawasan budaya yang meliputi; Dusun Selelos, Masjid Kuno Sesait, Desa Tradisional di Dusun Segenter, Desa Tradisional Senaru dan Masjid Kuno Bayan Beleq."

Dusun Segenter dibangun dengan atap yang terbuat dari daun ilalang, dinding dari anyaman bambu, dan pintu yang terbuat dari kayu seperti pintu biasa. Bangunan tersebut merupakan kearifan yang dimiliki oleh warga di Dusun Segenter, yang kemudian oleh pemerintah dibangun pariwisata rumah tradisional Dusun Segenter.

Saat ini beberapa bangunan rumah warga di Dusun Segenter mulai tergantikan dengan bangunan berbahan dasar batu bata. Perubahan desain rumah adat menjadi lebih modern, mengindikasikan keteguhan masyarakat Dusun Segenter terhadap kearifan lokal mulai terkikis. Rumah tradisional Dusun Segenter adalah kearifan lokal yang sudah menjadi titah adat secara turun-temurun bagi masyarakat Dusun Segenter.

Konsep pariwisata budaya yang diterapkan di pariwisata rumah tradisional Dusun Segenter ialah nilai-nilai yang terdapat pada arsitektur rumah tradisional tersebut, mulai dari bentuk, pilihan bahan, dan daya guna bangunan. Hal ini kemudian memantik peneliti untuk melihat sejauh mana konsep pariwisata yang diterapkan dalam menjaga dan melestarikan bangunan rumah tradisional sebagai kearifan lokal dengan upaya yang dilakukan warga masyarakat Dusun Segenter sebagai subjek yang mampu menyesuaikan diri dengan hajat pariwisata budaya tersebut.

Mengutip tulisan Muhammad Sibawaihi, tentang bagaimana peran pemerintah dan keikutsertaan masyarakat dalam mengelola pariwisata harus memikirkan dan mempertimbangkan kesiapan maupun kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam serta kematangan strategi pembangunan yang baik, untuk dapat mewujudkan kawasan wisata yang baik dan kondusif dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya masalah baru[23].

1.2 Tujuan Penelitian

Riset ini merupakan salah satu upaya untuk menelaah tentang pengaruh perubahan arsitektur rumah adat terhadap pariwisata dan budaya masyarakat Segenter yang merupakan salah satu destinasi pariwisata budaya Lombok Utara.

23 Muhammad Sibawaihi (2015), http://akumassa.org/id/blue-print-yang-buram-masa-depan-suram/

2. Dasar Pemikiran dan Metode Penelitian

2.1 Tinjauan Pariwisata Budaya di Indonesia

Sebagai salah satu destinasi pariwisata budaya Lombok Utara, rumah tradisional Dusun Segenter cukup menarik menjadi daya tarik wisatawan atas kearifan nilai tata ruang yang dimilikinya. Dalam konsepnya, pariwisata budaya menurut International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) mengajak pengunjung untuk mengenali budaya dan komunitas lokal, pemandangan, nilai dan gaya hidup lokal, museum dan tempat bersejarah, seni pertunjukan, tradisi dan kuliner dari populasi lokal atau komunitas asli. Pariwisata budaya mencakup semua aspek dalam perjalanan untuk saling mempelajari gaya hidup maupun pemikiran[24].

Dalam Pasal 1 UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, disebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Definisi ini menjadi landasan yang digunakan untuk mengklasifikasikan wisata tersebut menjadi beberapa jenis pariwisata seperti wisata budaya, wisata bahari, wisata alam, dan sebagainya.

Wisata budaya disebutkan sebagai sebuah kegiatan perjalanan yang sementara baik dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang dari tempat tinggalnya ke tempat lain seperti situs purbakala, museum, tempat upacara adat atau upacara keagamaan. Perspektif lain, wisata budaya sebagai sebuah produk kebudayaan atau atraksi-atraksi budaya yang memuat pesan dan atau nilai kepada wisatawan.

Disebutkan juga bahwa produk tersebut dipandang sebagai kegiatan khusus yang diminati oleh sebagian kecil pelaku perjalanan berpengalaman untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda dari sekadar pengalaman berlibur dari hal biasa yang mereka dapatkan. Pada sekitar tahun 1990-an pariwisata budaya tersebut sudah dikenal sebagai aktivitas pasar massal dengan nilai jual yang tinggi[25].

Kebudayaan merupakan kontinuitas sikap manusia yang dilakukan dengan sadar dan berulang. Hal ini kemudian yang menjadi kebiasan dan dianggap sebagai kebenaran oleh manusia yang hidup sesudahnya. Kebudayaan

24Bungaran Antonius S Dkk. "Sejarah Pariwisata, Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia", Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, Hal. 124.

25 Bungaran Antonius S. Dkk. "Sejarah Pariwisata, Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia", Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, Hal. 122.

merupakan simpanan akumulatif dari pengetahuan, pengalaman, nilai, sikap, makna, hirarki agama, pilihan waktu, peranan, relasi ruang, konsep yang luas, dan objek material atau kepemilikan yang dimiliki dan dipertahankan oleh sekelompok orang atau suatu generasi[26].

Pariwisata merupakan sektor dengan persoalan yang kompleks, bukan sekadar kegiatan dengan objek utama industri pelayanan yang melibatkan manajemen produk dan pasar, lebih dari itu merupakan proses dialog antar wisatawan, interaksi kebudayaan tempat wisatawan sebagai pengunjung dan masyarakat sebagai tuan rumah. Suatu kawasan wisata dihuni oleh komunitas masyarakat yang memiliki beragam karakter sosial dan status ekonomi yang penting menjadi objek pengembangan[27].

Konsep pembangunan pariwisata pada intinya menekankan pada empat prinsip sebagai berikut.

a. Berwawasan Lingkungan
   Pariwisata memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.
b. Diterima Secara Sosial dan Budaya
   Menekankan bahwa proses pembangunan dapat diterima oleh masyarakat setempat, pembangunan tersebut mesti memperhatikan nilai-nilai yang berada pada masyarakat sehingga tidak menghilangkan jati diri masyarakatnya.
c. Layak Secara Ekonomi
   Pembangunan pariwisata mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi warga masyarakat yang berada di kawasan pariwisata baik secara pembangunan atau kesejahteraan masyarakat lokal.
d. Manfaat Ekologi yang Pantas untuk Diterapkan
   Proses pembangunan secara teknis dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya lokal dan dapat diadopsi masyarakat setempat secara mudah.

2.2 Hubungan Pariwisata dan Kebudayaan

Mula-mula pelestarian kebudayaan tumbuh atas kesadaran mempertahankan eksistensi kearifan lokal setiap daerah dan konsisten

26 Dr. Alo Liliweri, M.S "Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya", Lkis Yogyakarta, 2007, Hal. 9

27 Op. Cit Bungaran

secara turun-temurun. Pandangan ini lalu meluas setelah datangnya konsep pariwisata sebagai tawaran baru untuk mempertahankan dan menjaga eksistensi tersebut. Konsep pariwisata kemudian memengaruhi rasionalisasi upaya bertahannya kebudayaan; pariwisata memberikan peluang tidak hanya soal pelestarian, melainkan pada pendapatan ekonomi, relasi, dan rekayasa sosial di bidang tertentu seperti teknologi, akulturasi, dan sistem sosial.

Hal ini terjadi terutama pada klasifikasi wisata budaya tradisional yang menyuguhkan kearifan lokal, ritual, dan produk kebudayaan seperti arsitektur material sebagai identitas kolektif masyarakat. Kajian-kajian tentang pariwisata budaya mulai dilirik oleh peneliti dan lembaga promosi pariwisata dengan kesadaran menganugerahi pengetahuan tentang kearifan lokal dan mempromosikannya sebagai destinasi wisata budaya berbasis pengetahuan.

Pengukuran pembangunan industri pariwisata Indonesia sejak era Presiden Soekarno (1945—1966) hingga saat ini, bertumpu pada dua cara pandang berbeda yaitu secara kualitas dan kuantitas. Menurut IUOTO (*International Union of Official Travel Organization*), pertama, pariwisata sebagai pemicu perkembangan ekonomi. Kedua, pemicu kemakmuran melalui perkembangan transportasi, komunikasi, dan akomodasi. Ketiga, perhatian khusus terhadap pelestarian budaya dan nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi. Keempat, pemerataan kesejahteraan karena adanya konsumsi wisatawan. Kelima, pemicu perkembangan lembaga pendidikan profesi seperti pariwisata. Keenam, cipta pasar bagi produk lokal[28].

Pada kenyataanya industri pariwisata tidak terlepas dari muatan negatif terhadap nilai yang terdapat pada masyarakat. Salah satu dampak negatif dari industri pariwisata adalah tergerusnya nilai-nilai sosial di tengah masyarakat. Di Pemenang misalnya, industri pariwisata menyebabkan pembatasan terhadap ruang sosial yang sebelumnya dapat diakses oleh warga.

Akses warga menggunakan bangsal adalah sebagai salah satu tempat rekreasi keluarga, bermain, atau mengadakan ritual keagamaan. Kini hal tersebut tidak lagi dapat dilakukan dengan leluasa sebab banyaknya wisatawan yang lalu lalang dan pembatasan ruang dari pihak Syahbandar dan keluhan para nelayan karena berkurangnya debit ikan yang disebabkan

28 Dr. I Gusti Bagus RU, M.A, "Pengantar Industri Pariwisata", Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2016, Hal. 2

oleh lalu-lalang sampan/perahu pengangkut wisatawan menuju tiga *gili* (Air, Meno, dan Trawangan). Kendati demikian, pendapatan daerah dari sektor pariwisata masih belum dapat ditandingi oleh sektor yang lain.

2.3 Lanskap Pembangunan Pariwisata Budaya di NTB

Lanskap budaya menurut Saures adalah suatu kawasan geografis di mana ditampilkan ekspresi lanskap alami oleh suatu kebudayaan tertentu. Budaya adalah agennya, kawasan alami sebagai medium, dan lanskap budaya sebagai hasilnya. Lanskap budaya menggambarkan sejarah suatu kawasan budaya dan akan selalu berubah mengikuti perubahan peradaban manusia yang mendiaminya[29].

Lanskap pembangunan pariwisata budaya sangat erat kaitannya dengan sejarah karena lanskap sejarah diartikan sebagai suatu kawasan geografis yang berupa objek atau *setting* dari suatu peristiwa bersejarah yang pernah dialami manusia.

Selain itu, lanskap pembangunan pariwisata budaya didasari oleh pelestarian kebudayaan yang ada pada suatu kawasan tersebut. Kegiatan pelestarian merupakan kegiatan konservatif dengan pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terjaga dengan baik. Konservasi meliputi seluruh upaya pemeliharaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

Konteks pelestarian kebudayaan pada lanskap pembangunan pariwisata menjadi sorotan yang mesti diprioritaskan. Kekhawatiran tentang adanya pergeseran nilai memang tidak bisa dinaifkan. Kendati suguhan yang ditawarkan merupakan kearifan, maka kebudayaan adalah wajah yang memberikan ekspresi bagi perkembangan pariwisata budaya.

2.4 Metode Penelitian

Penelitian tentang pengaruh pembangunan pariwisata budaya terhadap kearifan lokal masyarakat adat Segenter, Bayan, Lombok Utara menggunakan metode penelitian kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh pariwisata terhadap kearifan lokal kepada warga yang berdomisili di kawasan pariwisata rumah tradisional Segenter.

29 Retno Reksi W, "Lanskap Perencanaan Kawasan Wisata Budaya Kampung Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat" Program Pasca Sarjana ITB, 2002, hal. 20

Observasi dimulai pada bulan Januari 2018. Kemudian pada Maret dan April 2018, peneliti secara berkala melakukan observasi dan tinggal di lokasi penelitian selama satu minggu dalam satu bulan. Sebagian besar masyarakat Dusun Segenter yang menjadi responden berprofesi sebagai petani dan peternak. Peneliti juga mewawancarai pihak elit desa dan para tetua adat yang memegang kewenangan adat gubuk Segenter.

Tabel 1 Daftar Narasumber Wawancara

No.	Nama	Jenis Kelamin	Profesi	Tujuan
1	Ust. Suhardi	Laki-laki	Kepala Sekolah	Untuk mengetahui secara mendalam tentang Madrasah Ibtidaiyah, Miftahul Ulum de Koning School
2	Amaq Doyong (Misayang)	Laki-laki	*Guide* Dusun Segenter	Mengetahui pengelolaan pariwisata rumah tradisonal Dusun Segenter
3	Amaq Gayong (sirmalam)	Laki-laki	Pengemban Adat	Mengetahui tata adat Dusun Segenter
4	Hambali	Laki-laki	Pengemban Adat/guru	Mengetahui kehidupan sosial warga segneter
5	Amaq Nisalip	Laki-laki	Amaq Lokaq Toak Turun/Tokoh Aadat	Mengetahui filosofi bangunan tradisional dusun segenter
6	Amaq rus	Laki-laki	Petani	Ritual *Ngawinag meni.*
7	Inaq Rus	Perempuan	Petani	Ritual adat

Instrumen selanjutnya yaitu menggunakan metode studi dokumen dari sejumlah tulisan tentang Dusun Segenter sebagai pariwisata budaya Lombok Utara. Hal ini disebabkan sudah banyak peneliti dan penulis melakukan penelitian di Dusun Segenter baik sebagai konten media atau sebagai syarat menyelesaikan studi strata I, II, bahkan III.

Ada beberapa *key persons* yang ikut serta dalam penelitian ini sekaligus sebagai narasumber yang mengarahkan peneliti untuk menemui beberapa elit masyarakat yang berpengaruh di tanah adat Bayan Lombok Utara, di antaranya penghulu, pengemban, dan Kepala Dusun Segenter yang ikut serta sebagai mitra lokal selama melakukan pengambilan data dalam penelitian tentang pengaruh perubahan arsitektur rumah adat terhadap pariwisata dan budaya masyarakat adat Segenter Bayan Lombok Utara.

3. Temuan Penelitian

3.1 Sejarah dan Gambaran Umum Desa Segenter

Dusun Segenter sendiri berada di Desa Sukadana. Dari Kota Mataram kita akan menempuh kurang lebih dua jam untuk tiba di Dusun Segenter. Sedangkan dari Bandara Internasional Lombok (BIL) dibutuhkan waktu tempuh perjalanan sekitar tiga jam. Dari lokasi Pasir Putih, kira-kira butuh waktu satu setengah jam. Dusun Segenter tidaklah begitu luas. Secara adat, semua rumah yang masuk ke dalam *suteran*[30] Dusun Segenter, jika ditotal luasnya, kurang lebih satu hektar (Ha). Tanah adat ini dipertanggungjawabkan oleh seorang *pemekel* dan seorang *pengemban*[31].

Dusun Segenter merupakan satu dari 17 dusun yang terdapat di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Dari penuturan Amaq Nursaneh, mantan *Lebe Bayan Beleq*[32], sejarah awal dinamakan sebagai Dusun Segenter karena dulu Segenter merupakan tanah yang bergetar. Dalam bahasa setempat '*Se*' artinya satu, "*Genter*" artinya getar jika digabungkan menjadi satu getaran. Cerita ini merupakan tradisi tutur yang diceritakan secara turun-temurun oleh warga masyarakat Dusun Segenter.

Dalam peta kebudayaan masyarakat Lombok Utara, Segenter adalah lokasi penting. Tidak hanya karena ia memiliki rumah tradisional, namun juga karena Segenter bersinggungan dengan kebudayaan Bayan. Kebudayaan Bayan sendiri dipengaruhi oleh ideologi *Wetu Telu,* yaitu masyarakat Bayan memiliki perhatian khusus kepada tiga hal yakni *menganaq*, *meneloq*, dan *mentiwoq*. Hal ini berarti bahwa masyarakat Bayan (termasuk Segenter) memiliki perhatian terhadap kejadian makhluk — baik itu yang bereproduksi dengan cara beranak-pinak, bertelur, atau yang tumbuh. Hal ini kemudian menjadi acuan relasi manusia dan alam. Kemudian ideologi *wetu telu* juga merujuk kepada pembagian pengelolaan sosial-kemasyarakatan masyarakat Bayan. Mereka mengenal ada tiga elemen penting pengatur kehidupan masyarakat, yakni *mangku, keliang,* dan *kiai*. *Mangku* adalah elemen pengatur adat-istiadat, *keliang* adalah elemen pemerintahan, dan *kiai* adalah elemen spiritual atau keagamaan[33]. Oleh

---

30 Dalam Bahasa Indonesia disebut Pagar

31 Salah satu tokoh adat yang mengurusi adat dalam satu wet pada perkara ritual (Kematian dan perkawinan). Sedangkan pengemban adalah pembantu pemeke

32 Pengurus masjid kuno Bayan Beleq

33 Raden Sawinggih DKK. "Dari Bayan Untuk Indonesia Inklusif" Penerbit SOMASI NTB, 2016, Hal. 28

karenanya, tidak heran jika masyarakat Segenter memiliki pandangan spiritual yang tinggi.

3.2 Deskripsi Umum Masyarakat Adat Segenter

Secara umum masyarakat adat Segenter adalah masyarakat yang terbuka, tidak seperti masyarakat adat pada umumnya yang peneliti ketahui di Lombok Utara, yang cenderung tertutup dari orang luar. Asumsi ini berdasarkan dari masyarakat adat Segenter menerima masuknya perubahan dan juga pariwisata yang memengaruhi pola interaksi warga yang terbuka dan setara. Dalam pergaulan sehari-hari, hampir tidak bisa dibedakan siapa yang menjadi tokoh adat dan siapa yang hanya warga biasa. Berbeda sekali dengan masyarakat adat di Semokan dan Sembagek misalnya, yang menempatkan tokoh adat menjadi tokoh sentral kehidupan masyarakat. Namun dalam situasi tertentu, beberapa warga Segenter menunjukkan posisi penting mereka dalam tatanan adat Segenter, saat berlangsungnya ritual adat, seperti ritual adat pekawinan dan ritual adat kematian.

Peneliti pernah beberapa kali ikut serta dalam prosesi ritual adat kematian, yang kemudian membuat kami mengerti posisi setiap individu masyarakat Segenter. Misalnya bapak Nisalip, yang hampir setiap hari peneliti ajak berbincang dan minum kopi bersama ternyata adalah seorang *Amaq Lokaq* di Segenter. *Amaq lokaq* adalah tokoh kunci pengambil keputusan dalam setiap musyawarah adat.

Bagi tamu di luar warga Segenter, prosesi ritual adat menjadi sangat menarik. Selain memang sangat unik, terdapat banyak sekali nilai filosofis yang bisa dijadikan pelajaran. Dalam ritual kematian misalnya, prosesi adat yang dilakukan oleh warga tidak jauh berbeda dengan prosesi pemakaman umat Islam, namun memiliki beberapa perbedaan yang bersifat prinsipiel. Dalam tradisi Islam, salat jenazah dilakukan menghadap ke kiblat dalam hal ini adalah Ka'bah, dengan posisi kepala jenazah di sebelah utara. Di mana, akan dibedakan posisi berdirinya imam salat berdasarkan jenis kelamin. Jika perempuan, imam akan berdiri di pusara jenazah, sedangkan jika laki-laki, imam akan berdiri di kepala jenazah[34]. Sementara itu, dalam ritual shalat jenazah adat, kiblatnya adalah Gunung Rinjani. Imam tidak berdiri di depan makmum, namun berdiri di barisan salat paling kanan. Lalu dalam salat jenazah adat, mayit tidak dibedakan jenis kelamin. Tidak

34 Shahih Bukhari, Hadits nomor 1331.

semua masyarakat melakukan salat jenazah adat, hanya 5 orang saja yang menyalati jenazah yakni orang-orang yang menjadi kiai adat.

Sikap terbuka masyarakat Segenter juga tercermin pada saat peneliti ingin mengabadikan prosesi adat kematian. Masyarakat Segenter sama sekali tidak membatasi peneliti mengambil gambar, malah mempersilakan untuk mengambil gambar dari sudut yang lebih dekat. Setelah ritual kematian tersebut selesai, peneliti pun meminta kepada para tokoh adat untuk berfoto bersama. Mereka pun segera berbaris rapi di area pemakaman tersebut. Tentu saja, peristiwa seperti ini tidak mudah ditemukan dalam komunitas masyarakat adat yang lain. Seperti pengalaman peneliti yang sempat dilarang mengambil gambar di salah satu desa adat yang lain.

3.3 Rumah Adat Segenter "Bale Mengina"

Rumah tradisional Segenter atau oleh orang Segenter disebut dengan *bale mengina,* merupakan rumah yang dibangun berdasarkan ketentuan adat. *Bale mengina* dibangun dengan lajur panjang mengarah utara-selatan dan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam, seperti atap yang terbuat dari ilalang, pagar yang terbuat dari bambu, pondasi rumah dari batu-bata, dan tiang-tiangnya berasal dari kayu

Lingkungan gubuk Segenter juga memiliki keunikan di mana tata ruang pembangunan rumah diserasikan dengan tata adat yang berlaku. Masyarakat adat Segenter memiliki tata ruang dengan rumah dibangun tidak boleh membelakangi tetangga. Setiap rumah saling berhadapan. Di antara 2 rumah yang saling berhadapan, dibangun sebuah *berugaq*[35]. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Dusun Segenter terlihat dari bagaimana warga berkumpul di *berugaq* setiap sore hari. Orang tua mengajak putra-putri mereka bersenda gurau dan berbincang. *Berugaq* sendiri menjadi ruang setiap persoalan sosial dibicarakan. Seperti yang dijelaskan pada gambar di bawah tentang arsitektur bangunan *bale mengina.*

---

35 Bangunan sejenis saung atau gazebo.
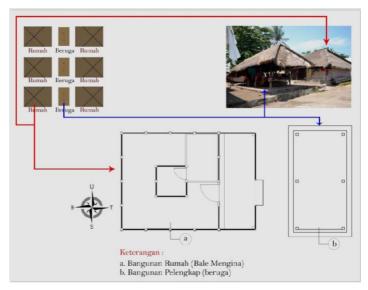
GAMBAR 3 DENAH BALE MENGINA

Sumber: Swatika Dhesti Angraini (2015)

Bangunan rumah tradisional Segenter atau *bale mengina* dibangun dengan luas 6×7 meter, 7×8 meter atau 8×9 meter. Mencakup beberapa ruang dengan fungsi praktis dan fungsi filosofinya masing-masing.

Tata ruang memiliki pemaknaan yang utuh atas harmoni warga Dusun Segenter. *Bale mengina* yang berhadapan dengan satu *berugaq* sebagai ruang bersama. Di antara makna filosofi tata ruang adalah sebagai berikut.

- Eratnya harmoni warga yang satu dengan yang lain;
- Adanya sifat tenggang rasa yang tinggi antara satu warga dengan warga yang lain;
- Adanya sebuah kepercayaan bahwa rumah adat yang berada di sebelah utara dihuni oleh keluarga yang lebih besar seperti orang tua, kakak pertama, kakak kedua hingga seterusnya menuju arah selatan; dan
- Keamanan

Pada umumnya *bale mengina* terbagi menjadi beberapa bagian seperti gambar di bawah:
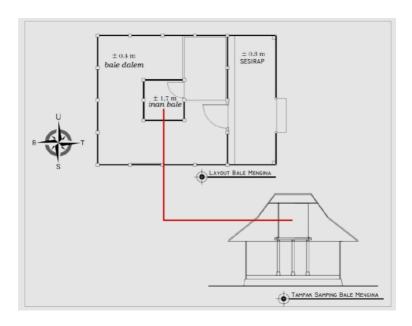
GAMBAR 4 ARSITEKTUR BANGUNAN *BALE MENGINA*

Sumber: Swatika Dhesti Angraini (2015)

Adapun penjelasan setiap bagian adalah sebagai berikut.

1) *Dalem Bale*

Merupakan ruang di dalam rumah secara keseluruhan yang di dalamnya tidak memiliki dinding penyekat apapun. *Dalem bale* seperti satu ruang yang dari setiap sudutnya dapat kita lihat semua isi rumah. Hal ini merupakan pemaknaan adat bahwa manusia sejatinya adalah makhluk yang kosong dari segala sesuatu. *Epen ita*[36] yang memberikan kita segala sesuatu yang kini menjadi milik kita. Selain itu, maksud dari fungsi praktis adalah agar pada saat acara *gawean adat*[37], pemilik rumah dengan mudah mengontrol dan melakukan aktivitas *gawe*. Di antara pembagian ruang secara praktis dalem bale diantaranya ada *lasah*, *malaq* (tempat tidur), dapur, dan *inan bale*.

2) *Amben Beleq*

Amben beleq bisa kita artikan sebagai teras rumah. Dalam perspektif warga Segenter, teras rumah tidaklah dimanfaatkan sebagai tempat

36 Yang memiliki kita atau Tuhan

37 Upacara

perjamuan tamu, melainkan untuk menaruh rumput dan mengeringkan kayu bakar. Perjamuan tamu dilakukan warga Segenter di *berugaq*. Secara filosofi, *amben beleq* merupakan sebuah jalan yang mengharuskan orang-orang yang memasuki rumah untuk menunduk karena pintu *bale mengina* dibuat sangat rendah. Sehingga setiap orang yang memasukinya seolah memberi hormat kepada pemilik rumah. Saat memasuki *amben beleq,* akan muncul kesadaran bahwa antar sesama manusia tidak ada perbedaan kasta atau jabatan.

3) *Sesirep*

   Sesirep jika dilihat dari fungsinya sama dengan gudang. *Sesirep* dibangun berdekatan dengan *amben beleq* untuk menaruh perabotan rumah seperti peralatan dapur, bertani, dan berladang. Pada beberapa kesempatan, peneliti juga melihat *sesirep* dimanfaatkan sebagai ruang tidur bagi anak yang masih bujang. Fungsi praktis *sesirep* dalam acara *gawean adat* adalah mempermudah warga untuk mengambil perabot dapur sehingga tidak mengganggu acara *gawe* yang dilakukan di *berugaq*.

4) *Inan Bale*

   Inan bale adalah induk rumah. Ruangan ini merupakan ruangan khusus berukuran 2×3 meter yang terdapat di tengah rumah dan memiliki tiang penyangga setinggi dua meter. *Inan bale* mirip seperti rumah panggung. *Inan bale* adalah simbol yang paling dikeramatkan oleh warga Segenter. Dalam tatanan adat, *inan bale* hanya boleh dimasuki oleh perempuan saja (ibu). Secara praktis *inan bale* memiliki fungsi sebagai tempat menaruh kebutuhan pokok seperti beras, pusaka keluarga, dan barang-barang yang dianggap berharga. Secara filosofi *inan bale* adalah sebuah simbol keberkahan keluarga. *Inan bale* juga merupakan ruang yang digunakan sebagai tempat melakukan ritual untuk meminta rezeki. Ritual ini hanya dilakukan oleh perempuan. Ritual tersebut dinamakan dengan *ngawinang meni'*.

Ngawinang meni' merupakan salah satu kegiatan adat yang disakralkan oleh warga pada saat upacara adat ritual tersebut. *Ngawinang meni'* hanya dilakukan oleh perempuan dengan menggunakan *kemben*, lalu mempersiapkan dupa dan beras sebagai perlengkapan ritual.

Ketika seorang perempuan yang melakukan ritual sudah memenuhi persyaratan tersebut, maka ia akan masuk kedalam *inan bale* dan duduk *nyelepok* (kaki ke belakang dengan badan yang tegak) sambil mengambil tiga butir beras. Tiga butir beras tersebut kemudian dibacakan mantra *ngawinang meni'* dengan bacaan sebagai berikut.

Bismillahirohmanirrahim,

"Tebeq, tabeq, tabeq Inaq merisiksari amaq mersiksari tiang toloq epe kon okolan epe, kon tirai kelambu eoe datengang anak jari epe elek bat menimuk, elek timuk membat mendait kon tengak. Elek lauk mendaya elek daya melauk mendait kon tengak. Undang anak jari epe aden kumpulang tipaq inan epe nyarak pisah, mersik sari, mersiksari, mersiksari."

Yang terpenting dalam ritual ini adalah adanya penghormatan terhadap beras, sebagai simbol kesejahteraan.

3.3.1 Berugaq Sekenem

Selain *bale mengina* dalam tata ruang atau struktur pembangunan rumah adat Dusun Segenter, terdapat sebuah bangunan yang disebut *berugaq*. Dalam tradisi masyarakat Sasak, terdapat dua jenis *berugaq* yakni *ada sekepat* dan *sekenem*[38]. Untuk Dusun Segenter, rata-rata menggunakan *sekenem*. *Sekenem* merupakan bagian penting dalam tata adat rumah tradisional Segenter. *Berugaq sekenem* adalah sebuah bangunan yang terbuat dari kayu dengan atap ilalang. *Berugaq sekenem* rata-rata berukuran 4×2 meter dengan bangunan membujur ke arah utara-selatan.

Visual bangunan *berugaq* dari arah utara memiliki *tibing*[39] yang terbuat dari anyaman bambu. *Berugaq* dinamakan *sekenem* karena memiliki tiang yang berjumlah enam buah dan membuatnya memiliki dua lokal yaitu lokal utara dan lokal selatan.

[38] *Sekepat* adalah *berugaq* bertiang empat dan *sekenem* adalah *berugaq* bertiang enam.

[39] Dalam Bahasa Indonesia berarti Sekat
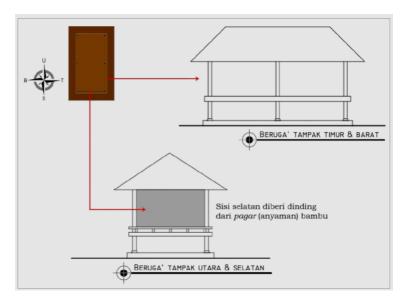
GAMBAR 5 ARSITEKTUR *BERUGAQ SEKENEM*

Sumber: Swatika Dhesti Angraini (2015)

Berdasarkan pembangunan dan tata ruang rumah tradisional Segenter, *berugaq* juga berperan penting sebagai salah satu ruang yang digunakan sebagai ritual adat. Masyarakat Segenter membagi *berugaq* menjadi dua jenis yaitu, *berugaq* biasa dengan *berugaq agung*.

1) *Berugaq Agung*

Setiap rumah di Segenter memiliki *berugaq, n*amun *berugaq* yang dimiliki oleh tokoh adatlah yang disebut sebagai *berugaq agung*. Hal ini dikarenakan ketika tokoh adat dari dusun lain datang, di *berugaq* inilah mereka akan dijamu. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa setiap *berugaq* yang terdapat di Dusun Segenter adalah *berugaq agung*. Dengan alasan bahwa pada saat *berugaq* tersebut dijadikan sebagai tempat untuk *gawean adat,* maka *berugaq* tersebut telah diagungkan dengan adanya acara adat yang dilakukan.

Dalam pemaknaan secara filosofi *berugaq sekenem* dibagi menjadi dua bagian berdasarkan utara dan selatan.

a. Bagian selatan

   Bagian selatan dekat dengan *tibing*[40] yang digunakan untuk *gawean urip* [41] di antaranya *nyunatan* (khitanan), *nyelamatan* (selamatan), *mengkurisang* (ritual cukur rambut), *peraq api* (ritual pemberian nama kepada bayi), *ngawinang* (ritual perkawinan).

b. Bagian utara

   Bagian utara digunakan untuk *gawe pati*[42] di antaranya *poah kubur* (ritual setelah 7 hari kematian), *roah ngangetin bale* (ritual pada Jumat pertama orang meninggal).

3.4 Perubahan Bangunan Rumah Tradisional Segenter

Perubahan bentuk bangunan di Dusun Segenter sejatinya diawali pada tahun 1999 dengan dibangunnya sebuah rumah permanen berbahan dasar batu bata. Rumah tersebut adalah milik seorang warga yang bernama Ustaz Samedi. Dalam proses pembangunannya, rumah tersebut sempat menuai protes dari warga yang lain karena dianggap merusak tatanan adat yang ada, namun Amaq Samedi tetap meneruskan pembangunan. Melihat hal ini, para ketua adat kemudian mengadakan *gundem* (musyawarah) adat dengan harapan bisa menyelesaikan persoalan tersebut[43]. Hasil dari *gundem adat* tersebut adalah warga hanya bisa mengubah pondasi rumah saja. Bagian rumah yang lain tidak boleh diubah. Tapi, hasil *gundem adat* ini sepertinya tidak diindahkan.

Hingga kini, perubahan bangunan pun tidak lagi dipandang sebagai perilaku merusak tatanan adat. Warga saat ini memandang perubahan bangunan merupakan hal yang mau tidak mau akan dilakukan juga. Seperti yang dijelaskan oleh Amaq Rus,

> *"...seandainya saya punya uang, maka rumah ini pasti akan saya ganti dengan rumah batu-bata..."*

(Wawancara Amaq Rus, 24 April 2018)

di kesempatan lain Kepala Dusun Segenter mengatakan

40 Dinding pagar

41 *Gawe Urip* adalah segala jenis ritual yang berkaitan dengan kehidupan.

42 *Gawean Mati* adalah ritual kematian

43 Wawancara dengan.

"...perubahan rumah tradisional menuju rumah tembok tidak dapat kita hindari, karena permasalahannya rumat adat ini banyak sekali. Kalau hujan atapnya bocor, cepat lapuk dan harganya mahal...:"

(Wawancara Ali Hopman, 21 Desember 2017)[44]

Terdapat beberapa faktor berubahnya bangunan adat yang tergantikan dengan bangunan modern. Di antaranya adalah:

1) Mahalnya bahan dasar pembangunan rumah adat

Dalam pembangunan rumah adat, warga harus menyiapkan bahan dasar dari alam. Zaman sekarang, bahan-bahan yang dibutuhkan tidak lagi tersedia di hutan Segenter sebab kondisi sosial ekonomi dan warga cenderung mendapatkan bahan tersebut dari luar Dusun Segenter, sehingga warga Segenter harus membeli bahan bangunan dengan rincian sebagai berikut.

- 100 ikat ilalang dengan harga seikat Rp50.000, Rp500.000.
- 200 buah bambu yang digunakan sebagai pagar, usuk, prametan, pasek dan yang lainnya seharga Rp500.000
- 20 buah rotan dengan panjang 20 meter, Rp200.000.

Rincian tersebut merupakan angka minimum yang harus dipersiapkan oleh warga yang ingin membangun rumah adat. Dalam proses pembangunan sebuah rumah adat, warga yang membangun rumah mesti menyiapkan makanan kepada warga yang bergotong-royong. Gotong-royong dalam pembuatan rumah adat biasanya dilakukan oleh laki-laki.

2) Ketersediaan bahan bangunan yang semakin menipis

Karena lahan yang biasa ditumbuhi ilalang digunakan untuk menanam singkong, keterbatasan persediaan menyebabkan bahan semakin bertambah mahal.

---

[44] Ali Hopman adalah Kepala Dusun Segenter, kec. Bayan Lombok Utara.

3) Ketahanan bahan yang digunakan maksimal 10 tahun.

"Atap Bale Mengina yang terbuat dari ilalang hanya bisa bertahan hingga 10-15 tahun, tergantung dari ketebalnnya, saya membangun rumah tembok agar tidak merenovasi di masa berikutnya"

(Doyong, 24 April 2018)

4) Berkurangnya warga yang ahli membangun rumah adat.

Saat ini, orang-orang yang pandai membuat rumah adat rata-rata warga dengan usia di atas 40 tahun. Tidak ada yang meneruskan keahlian tersebut, karena semenjak tahun 1999 sudah tidak dibangun lagi rumah tradisional sehingga pengetahuan tentang arsitektur bangunan rumah tradisional tidak diajarkan pada generasi lebih muda.

5) Kekecewaan warga terhadap pemerintah.
Pada tahun 1990-an pemerintah Lombok Barat menjanjikan kepada warga Dusun Segenter terkait pelestarian rumah adat. Janji tersebut adalah memberikan warga yang ingin merenovasi rumah adatanya masing-masing Rp1.500.000,- per kepala keluarga.

"Pada tahun 1997 sebelum ada rumah tembok, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat mengusulkan untuk mempertahankan bangunan tradisioal dengan masing-masing kepala keluarga akan diberikan dana perawatan rumah per tahun sebesar 1.500.000"

(Ust. Suwardi, Kepala Yayasan Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Ulum De-koning School, wawancara tanggal 26 April 2018)

Namun setelah beberapa tahun ditunggu oleh warga, pemerintah tidak juga memberikan dana yang dijanjikan sebesar Rp1.500.000, hingga mereka pun mengubah bangunan rumah sendiri, yang diawali oleh rumah Ustaz Samedi pada tahun 1999 tersebut.

Demikian beberapa faktor yang memengaruhi perubahan bentuk bangunan rumah tradisional Dusun Segenter, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Meski secara bangunan sudah berubah, namun tidak menghilangkan nilai praktis dan nilai filosofis rumah tradisional Dusun Segenter, atau yang kita kenal dengan *bale mengina*. Masyarakat Segenter tetap mengkhususkan satu ruangan sebagai *inan bale,* yang secara fungsi sama dengan fungsi *inan bale* di *bale mengina*. Seperti yang tertera pada sketsa rumah permanen berikut:
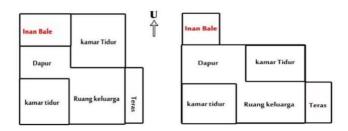
Gambar 6 Arsitektur Bangunan Permanen Dusun Segenter

Sumber: Penulis

Inan bale selalu dibangun pada posisi kiri utara (kanan utara: jika mengikuti palang atap rumah). Dikhususkan ruangan *bale mengina* merupakan hasil *gundem* warga pada tahun 1999 tersebut.

Dari proses penggalian data yang kami lakukan, berikut adalah hasil sensus rumah warga di Dusun Segenter.

Tabel 2 Hasil Pendataan Rumah Warga

Keterangan	Jumlah rumah (buah)
Jumlah bangunan rumah tradisional Segenter yang belum berubah Bangunan tetap (bt)	11
Jumlah rumah yang telah berubah. Bangunan permanen (bp)	52
Jumlah rumah yang berubah pada bagian tertentu Bangunan semi permanen (bsp)	
a. Pondasi saja	14
b. Atap saja	-
c. Atap dan pondasi	15
Jumlah rumah tradisional Segenter yang sudah berubah	81
Kepercayaan warga terhadap nilai bangunan adat tradisional	97%
Jumlah rumah di Dusun Segenter (area wisata)	92

Pada tabel tersebut dituliskan jumlah rumah warga Segenter yang berada dalam *sengkeran* (pagar) gubuk yang merupakan area wisata budaya rumah tradisional adat masyarakat Segenter.

Jika divisualkan dalam bentuk sketsa akan terlihat seperti berikut:

GAMBAR 7 DENAH RUMAH DI WILAYAH SEGENTER

Sumber: Penulis

Denah di atas menjelaskan tentang posisi rumah warga yang telah mengalami perubahan dan yang masih mempertahankan bangunan tradisional, seperti yang dituliskan pada Tabel 2 dengan klasifikasi sebagai berikut:

TABEL 3 KLASIFIKASI RUMAH WARGA

a.	Rumah yang berwarna merah	Merupakan bangunan rumah yang berubah total.
b.	Rumah yang berwarna hijau	Merupakan rumah yang masih mempertahankan ke-aslian bangunan tradisional seperti atap dari ilalang, pagar dari bambu dan pondasi dari tanah.
c.	Rumah yang berubah pada sub-sub tertentu disimbolkan dengan tiga warna diantaranya: • Warna jingga • Warna ungu • Warna biru • Warna hijau tua	Bangunan yang berubah pada pondasi saja. Bangunan yang berubah pada bagian atap saja. Bangunan yang berubah pada bagian pondasi dan atap. Merupakan kandang ternak warga yang dibangun mengelilingi gubuk dan mengikuti bentuk sengkeran (pagar) gubuk.

Sumber: Penulis

3.5 Jalan dan Transportasi

Akses jalan dan transportasi di Dusun Segenter bisa dikatakan cukup baik. Jika mengunjungi Dusun Segenter, kita akan melewati jalan beraspal. Jarak Dusun Segenter dari jalan provinsi adalah 3 kilometer. Pengaspalan jalan di Segenter dilaksanakan pada tahun 2007 oleh Pemerintah Daerah Lombok Barat.

Sementara jalan gang atau jalan setapak di dalam *suteran* Dusun Segenter dibangun oleh pemerintah dari dana APBN pada tahun 2000, dengan jumlah dana sekitar 1 milyar. Dari dana 1 milyar tersebut, dialokasikan juga untuk perbaikan rumah kumuh pada masa itu. Kemudian pada tahun 2002, Dusun Segenter mendapatkan dana 300 juta rupiah juga untuk rabat jalan.

4. Analisis Perubahan Rumah Adat Segenter Terhadap Pariwisata dan Sosial Budaya

4.1 Segenter sebagai Pariwisata Budaya Lombok Utara

Berangkat dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 9 Tahun 2011 dalam Pasal 26 Ayat 1-2 menyebutkan "kawasan peruntukkan pariwisata (kawasan budaya) adalah kawasan budaya yang meliputi; Dusun Selelos, Masjid Kuno Sesait, Desa Tradisional Dusun Segenter, Desa Tradisional Senaru, dan Masjid Kuno Bayan Beleq". Dalam peraturan tersebut dicatumkan nama rumah tradisional Segenter sebagai salah satu kawasan cagar budaya yang mesti dilindungi dan dilestarikan oleh pemerintah daerah.

Awal mula Segenter dijadikan sebagai wisata sejak masuknya jasa *travel* Abi Tour tahun 1994 yang menjadikan Segenter sebagai tempat yang wajib dikunjungi oleh wisatawan [45]. Sejak saat itu Segenter mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Ketertarikan wisatawan untuk mengunjungi Segenter karena terdapat tata ruang dan arsitektur bangunan rumah tradisional *bale mengina*. Para wisatawan yang datang disuguhi dengan nilai kekerabatan warga dan keasrian Segenter yang berada di tengah perkebunan kaki gunung Rinjani. Lewat Segenter wisatawan juga dapat menikmati keindahan panorama Gunung Rinjani.

45 Wawancara Misayang, Ketua POKDARWIS

Setelah Segenter mulai ramai dikunjungi, warga pun mulai membangun pengelolaan pariwisata rumah tradisional dengan membuat kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang diketuai oleh Misayang. Sejak didirikannya Pokdarwis, pemerintah desa dan kabupaten mulai melirik Segenter sebagai salah satu destinasi wisata dan memberikan bantuan berupa fasilitas kepariwisataan. Melalui bantuan tersebut warga mulai membangun secara bergotong royong beberapa fasilitas pariwisata seperti toilet umum, rabat jalan, dan memperbaiki suteran gubuk[46].

Selain sebagai destinasi wisata, Segenter juga menjadi objek penelitian berbagai bidang kajian keilmuan, bahkan jauh sebelum dijadikan sebagai pariwisata budaya, Dusun Segenter sudah dimasuki oleh para peneliti baik dari dalam maupun luar negeri.

Rumah tradisional Segenter telah berperan memberikan ruang bagi para peneliti sebagai kawasan yang mampu menciptakan produk pengetahuan tentang kearifan lokal khususnya wilayah Bayan, Lombok Utara. Tidak jarang para peneliti mengangkat segi tradisi, arsitektur, karakter sosial, bahkan membuat lanskap pariwisata budaya. Namun, bacaan terhadap fenomena yang terjadi di Dusun Segenter tidak memiliki dampak secara signifikan kepada masyarakat adat Segenter secara khusus.

"...banyak peneliti datang kesini untuk mempelajari tata ruang, arsitektur, dan realitas sosial warga. Namun para peneliti tersebut hanya datang mempelajari lalu pergi."

(Hambali, 21 Desember 2017)

Sejumlah aktivitas penelitian ini dipicu karena memandang Segenter sebagai pariwisata yang sesungguhnya, artinya mengukur ketertarikan peneliti lewat minat wisatawan yang mengunjungi pariwisata budaya Dusun Segenter. Di sisi lain para peneliti memandang Segenter sebagai wacana kearifan lokal yang patut dilestarikan menjadi sumber pengetahuan kebudayaan.

4.2 Dampak Perubahan Arsitektur Rumah Adat Terhadap Pariwisata dan Kehidupan Masyarakat Dusun Segenter

Dengan terbentuknya Pokdarwis ini, pariwisata dikelola secara independen tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Namun pada

[46] Tembok pembatas kampung

beberapa kesempatan, pemerintah mengusulkan untuk mengembalikan bangun rumah permanen diganti dengan rumah tradisional tapi warga tidak mengindahkan usulan dari pemerintah.

4.2.1 Dampak pada Sektor Ekonomi

Pariwisata budaya rumah tradisional Segenter tidak berdampak banyak pada peningkatan ekonomi warga, sehingga pariwisata ini cenderung diabaikan. Warga lebih memilih untuk tetap menggarap ladang dan menggembalakan ternak daripada mengurus pariwisata. Sejak tahun 2014, pariwisata budaya rumah tradisional Segenter mulai sepi. Wisatawan yang datang tidak lagi dapat menikmati keasrian sebuah gubuk yang di dalamnya terdapat bangunan tradisional dikarenakan jumlah rumah permanen lebih banyak dibanding rumah adat (lihat tabel 2 hal. 17). Hal ini berdampak pada kurangnya jumlah wisatawan, sehingga warga pun abai karena pemerintah tidak lagi memperhatikan Segenter sebagai destinasi pariwisata.

"Sejak tahun 2014 saya kembali mengurus ternak dan mulai bekerja sebagai subak Desa Sukadana sebab wisatawan sudah jarang datang ke sini… Jika ada pengunjung yang datang, kemudian tertarik untuk melihat atraksi kebudayaan yang ada di Segenter, maka saya mengumpulkan warga gubuk untuk mempraktekkannya, siapa yang ikut, maka ia yang mendapat uang."

(Misayang, 24 April 2018).

Dari wawancara ini kita ketahui bahwa keberadaan pariwisata tidak berdampak langsung kepada ekonomi masyarakat Segenter secara merata.

Kini kondisi pariwisata budaya masyarakat adat Dusun Segenter tidak dapat diidentifikasi sebagai kawasan wisata budaya. Segenter sejak tahun 2000-an sudah mulai dibangun rumah berbahan dasar batu bata hingga pendataan terakhir yang kami lakukan sebanyak 81 buah rumah dari 92 rumah, jumlah keseluruhan rumah di dalam kawasan wisata telah berubah.

4.2.2 Dampak Interaksi Sosial

Komunitas masyarakat yang tinggal di satu tempat tidak terlepas dari interaksi antara warga yang satu dengan yang lain. Pola-pola yang berlaku kemudian, menyesuaikan dengan konteks masyarakat yang terjalin sejak lama dan berkelanjutan. Sejak disematkannya Dusun Segenter sebagai pariwisata budaya Lombok Utara, interaksi masyarakat tidak banyak memiliki perubahan.

Namun pola interaksi ini berubah dipengaruhi karena perubahan pola arsitektur bangunan yang membuat kepercayaan warga terhadap *pamaliq* leluhur mulai samar. Nilai- nilai kearifan tentang kepercayaan terhadap *balaq* yang terjadi akibat melanggar *pamaliq* tersebut sudah tidak lagi dihiraukan. Warga kemudian dengan leluasa membangun rumah semaunya, bahkan ada beberapa warga yang membangun rumah di luar *suteran* gubuk demi terlepas *pamaliq* leluhur.

Kearifan lokal secara prinsip sejatinya masih kental dalam balutan nilai-nilai. Sayangnya, material budaya yang menjadi destinasi wisata rumah tradisional Segenter sudah berubah drastis. Meskipun pada setiap upacara adat dan upacara keagamaan, warga Segenter masih melakukannya sesuai dengan tatanan adat yang berlaku, seperti ritual kematian, prosesi perkawinan, dan sebagainya.

Selain itu, dampak dari perubahan arsitektur bangunan ialah dengan terjadinya perubahan daya guna ruang pada arsitekur bangunan rumah warga. Jika rumah yang dibangun dengan bahan batu-bata, secara otomatis memengaruhi ruang-ruang yang ada di dalamnya. Ruang *bale mengina* didominasi oleh dapur sementara bangunan rumah berbahan batu bata cenderung memiliki ruang dapur yang kecil.

Hal ini memengaruhi prosesi ritual adat warga yang bisanya menggunakan ruang dapur sebagai tempat memasak dan menyajikan makanan. Pada rumah berbahan batu bata, hal ini tidak dapat lagi dilakukan sehingga warga yang mengadakan ritual adat atau keagamaan memasak di pekarangan depan atau di samping berugak.

Perubahan lain yang dipengaruhi oleh perubahan arsitektur bangunan tersebut adalah pada saat warga membangun rumah berbahan batu bata, maka ia tidak lagi menggunakan *berugaq* sebagai tempat tidur bersama karena mereka telah memiliki kamar tidur pribadi di dalam rumahnya. Hal ini juga memengaruhi kebiasaan warga yang saling bercerita tentang keseharian, kehidupan keluarga, dan sebagainaya (curhat) sebelum tidur ketika mareka tidur di *berugaq*.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari penelitian tentang Pengaruh Perubahan Arsitektur Rumah Adat terhadap Pariwisata dan Sosial Budaya Masyarakat Adat Segenter yang

telah dilakukan selama kurang lebih tiga bulan ini, dapat disimpulkan bahwa destinasi wisata budaya di Dusun Segenter, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara merupakan destinasi wisata yang riuh diperbincangkan sejak tahun 1999 hingga tahun 2014. Pada akhir tahun 2015 hingga saat ini destinasi pariwisata rumah tradisional Segenter tidak lagi semenarik dulu. Hal ini dikarenakan telah berubahnya arsitektur bangunan tradisional *bale mengina* yang merupakan suguhan utama bagi para wisatawan yang datang berkunjung.

Pariwisata budaya rumah tradisional Segenter ini sepertinya dilematis jika dihadapkan pada realitas masyarakat Dusun Segenter. Dari proses penelitian yang dilakukan ini, masyarakat Dusun Segenter menyadari adanya motivasi untuk mempertahankan arsitektur rumah tradisional karena merupakan suguhan utama bagi wisatawan. Namun dilematis terhadap perawatan yang mahal dan bahan yang sulit didapatkan. Sementara pemerintah memandang rumah tradisional Segenter sebagai kawasan budaya yang patut dilestarikan. Pandangan pemerintah tersebut, tidak didukung dengan kebijakan yang dapat mendorong warga kembali pada rumah adat masyarakat Segenter. Dukungan pemerintah terutama, pada biaya pembangunan dan perawatan dapat mendorong warga untuk membangun kembali rumah adat Segenter yang sesuai dengan Perda Lombok Utara No. 9 Tahun 2011 tentang kawasan peruntukan wisata Kabupaten Lombok Utara.

Untuk dapat mempertahankan tata ruang maupun arsitektur bangunan rumah adat Segenter kami memberikan rekomendasi sebagai berikut.

- Pemerintah Lombok Utara melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta komunitas terkait memberikan dampingan terhadap warga masyarakat yang tinggal di kawasan wisata budaya rumah tradisional Segenter, agar pengelolaan pariwisata dapat berkelanjutan, berdampak terhadap pelestarian kearifan lokal, dan kesejahteraan masyarakat.
- Pemerintah Lombok Utara segera menyusun *blue print* atau perencanaan pariwisata budaya rumah tradisional Segenter, sebagai acuan pembangunan pariwisata budaya di Lombok Utara.
- Pemerintah memfasilitasi distribusi pengetahuan tentang pembangunan arsitektur *bale mengina* dengan mendampingi warga yang memiliki keahlian di bidang tersebut.

- Pemerintah menyediakan lahan yang digunakan untuk membudidayakan bahan-bahan bangunan yang berasal dari alam seperti ilalang, rotan, dan bambu sehingga dapat dimanfaatkan oleh warga secara berkelanjutan.
- Diadakannya pelatihan-pelatihan wirausaha untuk menunjang pengembangan pariwisata rumah tradisional Segenter, sehingga masyarakat Segenter bisa merasakan manfaat ekonomis dari adanya pariwisata.

Daftar Pustaka

Antonius, Bungaran S Dkk. 2017. *"Sejarah Parisata, Menuju Perkembangan Pariwsata Indonesia"*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Dr. Bagus, I Gusti M.A. 2016. *"Pengantar Industri Pariwsata"*. Jogjakarta: Penerbit Deepublish

Dr. Liliweli, Alo M.S. 2007. *"Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya"*. Yogyakarta: LKIS.

Izzudin, Muhammad DKK. 2014. *"Wajah Islam Sasak Dalam Lebaran Topat dan Maulid"*. Penerbit Insan Madarni Institute.

Reksi, Retno W. 2002. *"Lanskap Perencanaan Kawasan Wisata Budaya Kampung Sade, Lombok Tengah, Nusa Tengara Barat"*. Program Pasca Sarjana ITB

Sawinggih, Raden. 2016. *"Dari Bayan Untuk Indonesia Inklusif"*. NTB: Penerbit SOMASI

Sulasman dan Setia Gumelar. 2013. *"Teori-teori Kebudayaan Dari Teori Hingga Aplikasi"*. Penerbit Pusaka Setia

http://akumassa.org/id/bangsal-dulu-kini-dan-nanti/

Perempuan Korban Kekerasan: *Suara yang Terbungkam*

Yayasan Maupe Maros

Yayasan Amnaut Bife "Kuan"

SEBUAH PENGANTAR

Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 lalu mengungkap bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan.

Tapi, lalu apa?

Di tataran global, dorongan bagi perempuan penyintas untuk menyuarakan kekerasan yang pernah dialaminya belakangan mengemuka. Gaungnya sedikit banyak sampai ke Indonesia, dan di sini, mendorong perempuan penyintas bersuara bukannya tanpa tantangan.

Tantangan besarnya barangkali adalah menemukenali corak kekerasan terhadap perempuan di berbagai daerah di Indonesia. Persis inilah nilai penting riset yang dilakukan oleh Yayasan Maupe Maros (Maupe) dan Yayasan Amnaut Bife "Kuan" (Yabiku).

Maupe berupaya mengungkapkan luasan kekerasan yang dialami perempuan di lingkup Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan). Sementara Yabiku menukik mendalami faktor penyebab dan proses terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur).

Kedua riset ini menunjukkan betapa kekerasan terhadap perempuan bukan hal baru yang jauh dari lingkungan kita. Dengan riset Maupe, kita tahu betapa stigma dalam masyarakat telah menyudutkan korban hingga ia memilih diam. Dengan riset Yabiku, kita tahu bahwa kesenjangan kuasa menyebabkan terjadinya kekerasan dan faktor ketergantungan ekonomi membuat perempuan memilih diam atau menempuh jalur mediasi untuk penyelesaian kasus.

Tak kalah penting, melalui riset ini, kita berjumpa dengan suara-suara perempuan korban kekerasan yang kerap terbungkam (atau dibungkam?). Berbekal suara para penyintas inilah, kita bisa membidik perubahan kebijakan yang relevan dengan konteks dan kebutuhan korban kekerasan. Dengan begitu, semoga suara mereka tak lagi terbungkam.

Selamat menikmati,

Klara Esti.

Yayasan Maupe Maros

Tim peneliti:

Haerana Mahmud

St. Rugaiya

Yunita

IDENTIFIKASI PERILAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, MENUJU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN DI KABUPATEN MAROS

Yayasan Maupe Maros

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, seksual, atau mental perempuan, termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi[47]. Menurut Kamus Hukum, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Kekerasan yang dimaksud termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang terjadi di ranah publik ataupun dalam kehidupan pribadi[48].

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja, tapi salah satu tempat yang paling rentan adalah rumah tangga yang biasanya berakhir di pengadilan agama. Pengadilan Agama Kabupaten Maros sendiri mencatat adanya 924 kasus yang masuk pada tahun 2016 dan 441 di antaranya adalah kasus perceraian. Dari data tersebut 337 adalah kasus cerai gugat (inisiatif pihak istri) sisanya adalah cerai talak (inisiatif pihak suami)[49], hal ini menimbulkan suatu pertanyaan, mengapa lebih banyak pihak perempuan yang mengajukan gugatan cerai? Hal tersebut mungkin karena telah terjadi "ketidakpuasan", "ketidaknyamanan", atau "perasaan tidak aman" yang dialami para istri yang mengajukannya.

Akan tetapi, data di atas tidak menggambarkan keadaan Kabupaten Maros secara keseluruhan, sehingga diperlukan penelitian secara mendalam untuk memahami fenomena kekerasan terhadap perempuan.

47 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 1993 dalam Pengertian Kekerasan pada Perempuan Bentuk Akibat dan Pemberdayaan. http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-kererasan-perempuan-bentuk.html

48 M.Marwan dan Jimmy P. 2009. Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition). Reality Publisher. Surabaya. P: 343

49 Data Pengadilan Agama

1.2 Pertanyaan Riset dan Tujuan Penelitian

Dari latar belakang diperoleh pertanyaan riset sebagai berikut.

a. Bagaimana kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di Kabupaten Maros?
b. Apa peran pemerintah dalam menangani kasus kekerasan?
c. Bagaimana peran adat dalam melindungi perempuan dari kekerasan?

Dengan demikian, maka melalui riset ini diharapkan periset maupun pembaca hasil riset ini dapat:

- Memahami fenomena kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Maros;
- Mengetahui sejauh mana peran pemrintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Maros;
- Mengetahui peran adat dalam melindungi perempuan dari kekerasan.

Penelitian ini sebaiknya segera dilakukan, mengingat semakin tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Maros, sehingga hasilnya bisa digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan peraturan daerah yang komprehensif dan dapat diaplikasikan.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, berupa:

a. Bagi peneliti dan dunia ilmu pengetahuan penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat, khususnya tentang fenomena kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Maros;
b. Secara praktis penelitian ini dapat digunakan untuk acuan dalam penyusunan regulasi bagi perlindungan perempuan dari kekerasan di Kabupaten Maros.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kekerasan Terhadap Perempuan

Pada penelitian ini kami merujuk pada pengertian kekerasan terhadap perempuan menurut Komnas Perempuan (2006) yaitu segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan — baik perempuan dewasa, remaja perempuan, dan anak perempuan. Termasuk di dalamnya ancaman, pemaksaan, maupun secara sengaja mengungkung kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat[50].

Salah satu bagian dari kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga, menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang seringkali terjadi pada perempuan di balik pintu tertutup. Tindakan ini seringkali dikaitkan dengan penyiksaan baik fisik maupun psikis oleh orang yang mempunyai hubungan yang dekat[51].

2.1.2 Penyebab terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan

Biasanya orang mengalami kekerasan karena posisinya yang lemah dan rentan menjadi korban. Orang-orang yang menjadi korban mempunyai posisi yang tidak seimbang dengan pelaku. Pelaku biasanya mempunyai kekuasaan (politik, ekonomi, sosial) atau kekuatan fisik. Perempuan rentan menjadi korban kekerasan karena berada dalam sistem budaya dan sistem sosial patriarki, di mana kebenaran dan kekuatan didominasi bapak dan laki-laki[52].

Menurut Sri Nurdjunaida (2006), ada beberapa penyebab terjadinya tindak kekerasan dari berbagai aspek, yaitu:

50 Ibid, hal 18

51 Ibid

52 Lusia Palulungan, M.Ghufran. H. Kordi dan Taufan Ramli. 2017. Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan. Yayasan Bakti. Makassar. Hal 120

a. Terkait dengan struktur sosial budaya/politik/ekonomi/hukum/agama, yaitu pada sistem masyarakat yang menganut patriarki, di mana garis ayah dominan, laki-laki ditempatkan pada kedudukan yang lebih tinggi dari wanita, dianggap sebagai pihak yang lebih berkuasa.
b. Terkait dengan kondisi situasional yang memudahkan seperti terisolasi, kondisi konflik, dan perang.

Menurut Dutton, seorang penulis dan psikolog Inggris yang sekarang bekerja sebagai peneliti di Departemen Psikologi Eksperimental Universitas Oxford Center for Emotions and Affective Neuroscience (OCEAN) [53], banyak studi yang berfokus pada kekerasan terhadap perempuan, terutama terhadap istri. Dari hasil studi dan penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan di Filipina teridentifikasi bahwa kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah: adanya kecemburuan para pria yang tidak dapat mengontrol emosinya, pria yang alkoholik, pria di bawah pengaruh obat-obatan, pria yang frustrasi dalam kehidupannya, ketidakpuasan dalam kehdupan seks dengan istri, dan istri-istri yang sering mengomel atau istri-istri pembangkang.

2.1.3 Bentuk dan Jenis Kekerasan terhadap Perempuan

Seorang peneliti perempuan, Sri Nurdjunaida (2006), membagi bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut.

a. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di lingkungan masyarakat, berupa perdagangan perempuan (*trafficking*), pelecehan seksual di tempat kerja/umum, pelanggaran hak-hak reproduksi, perkosaan, pencabulan, kebijakan/peraturan daerah yang diskriminatif/represif, dan aturan atau praktik yang merampas kemerdekaan perempuan di lingkungan masyarakat.
b. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga, berupa kekerasan fisik, psikis dan seksual (KDRT), pelanggaran hak-hak reproduksi, penelantaran ekonomi keluarga (KDRT), *Inses* (KDRT), kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (KDRT), ingkar janji/kekerasan dalam pacaran, pemaksaan aborsi oleh pasangan, kejahatan perkawinan

53Kevin Dutton. https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Dutton, akses 28 September 2018

(poligami tanpa izin), atau kekerasan lain dalam rumah tangga (KDRT)[54].

Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan menurut Sri Nurdjunaida (2006) dapat terjadi dalam bentuk :

a. Tindak kekerasan fisik, yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, atau menganiaya orang lain dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan atau kaki) atau dengan alat-alat lain.
b. Tindak kekerasan psikologis, yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, hinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan.
c. Tindak kekerasan seksual, yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual dan berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan.
d. Tindak kekerasan ekonomi yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi di mana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut[55].

2.2 Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan

Menurut G.P. Hoefnagels, Profesor kriminologi dan hukum remaja di Rotterdam[56], upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:

- Penerapan hukum pidana (*crime law application*);
- Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui *mass media (Influencing view of society on crime and punishment/mass media)*[57].

54 Ibid, hal 184

55 Ibid hal 184-185

56Dr. GP (Peter) Hoerfnagels dalam https://www.parlement.com/id/vg09llp1mkz7/g_p_peter_hoefnagels. akses 5 Oktober 2018

57 Misriyani Hartati, Loc.Cit;, hal 1099

2.2.1 Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan oleh Pemerintah dan Lembaga Masyarakat

Upaya untuk mengurangi sampai pada tingkat menghapus kekerasan terhadap perempuan harus dimulai dari negara. Negara (pemerintah) mempunyai kekuasaan yang bisa merambah masuk ke ruang-ruang domestik yang selama ini dianggap sebagai urusan keluarga atau rumah tangga. Selain lembaga pemerintah, juga terdapat beberapa lembaga nonpemerintah yang intens menangani perempuan korban kekerasan, salah satunya KK (Kelompok Konstituen). KK adalah suatu organisasi masyarakat untuk mengakses layanan publik pemerintah. KK dibentuk sebagai bagian dari Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), kegiatan yang dilakukan oleh anggota KK mampu menjadikan seorang korban KDRT berubah menjadi pendamping korban KDRT[58].

2.3 Pendekatan Kearifan Lokal dalam Mencegah Kekerasan terhadap Perempuan

Kearifan lokal *(local knowledege)* adalah konsepsi masyarakat tradisional azali yang saat ini cenderung kurang mendapatkan perhatian di tengah mencuatnya budaya global. Konsepsi dan teori-teori modern telah menenggelamkan prinsip-prinsip kemanusiaan; manusia terutama perempuan hanya menjadi komoditi sains namun gersang akan nilai-nilai kearifan, keberdayaan, atau penghormatan.

Penelitian studi maupun kajian dapat dijadikaan acuan untuk penelitian yang saat ini sedang berlangsung, walaupun sejauh ini belum ada penelitian yang mengkaji peran pemerintah dan lembaga masyarakat dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Maros, begitu juga kearifan lokal masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Maros.

2.4 Kerangka Berpikir

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang kerap terjadi di lingkungan rumah tangga, dunia kerja, di tengah masyarakat hingga tempat-tempat umum, bahkan lingkungan pendidikan dalam bentuk yang bermacam-macam seperti psikis, fisik, dan seksual, dengan pelaku yang juga bervariasi, mulai dari orang terdekat, dekat, hingga orang yang tak

58 Lusia Palulungan, et al. Mengubah dan Menginspirasi (Cerita tentang Perubahan). Yayasan Bakti .Makassar. 2017. Hal 117

dikenal, dengan dampak yang berbeda pula, ada korban yang sanggup bangkit menghadapi perlakuan tersebut, namun ada juga yang mengalami trauma berkepanjangan bahkan menyebabkan kematian.

Dampak kekerasan terhadap perempuan selama ini telah ditangani oleh pihak *stakeholder* dalam berbagai bentuk, seperti pemulihan trauma fisik dan psikis bagi korban juga pemidanaan bagi pelaku. Sayangnya sejauh ini belum dilakukan langkah perlindungan perempuan dari kekerasan sehingga dapat mencegah kekerasan berlanjut.

Oleh karena itu, untuk mencegah agar kekerasan terhadap perempuan tidak berlanjut, perlu dicari penyebab hingga kekerasan tersebut terjadi sehingga dapat melindungi perempuan dari kekerasan dan mencegah terjadinya tindak kekerasan.

Selain pengetahuan dari penyebab kekerasan, perlu juga pengkajian penanganan *stakeholder* (pemerintah) terhadap perempuan korban kekerasan dan kearifan lokal yang dapat digali dengan maksud melindungi perempuan dari kekerasan.

Gambar 8 Kerangka Berpikir

Sumber: Penulis

3. Metodologi Penelitian

3.1 Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui angka-angka yang berhubungan dengan perilaku kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Maros, seperti jumlah populasi, jumlah sampel, jumlah korban kekerasan, klasifikasi pelaku, tempat, penyebab, keadaan korban, reaksi korban, reaksi keluarga, reaksi masyarakat, dan kepedulian pemerintah di

sekitar korban. Penerapan metode ini diterapkan pada 28 desa/kelurahan dari 14 kecamatan di Kabupaten Maros.

Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah perempuan di Kabupaten Maros berusia 18-44 tahun dengan penarikan sampel 3% dari jumlah penduduk. Populasi penelitian diambil dari 28 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Maros yaitu sebanyak 22.891 populasi dengan jumlah responden sebanyak 725 orang.

Selain perempuan di Kabupaten Maros, metode ini ditujukan juga pada *stakeholder* (Dinas PPPA, Polres Maros, pengadilan negeri, pengadilan agama, Lapas Maros, dinas kesehatan, dinas sosial, rumah sakit, dan puskesmas). Data primer diperoleh dari data yang langsung diteliti pada saat penelitian berlangsung dengan melakukan pendekatan personal pada responden; berupa percakapan ringan dan bernuansa *curhat*, sedangkan data sekunder adalah data yang selama ini sudah didokumentasikan oleh objek penelitian dalam hal ini yaitu *stakeholder* atau lembaga pemerintahan dalam perannya menangani korban dan pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan buku catatan, alat perekam dan kamera, surat tugas, dan tim peneliti itu sendiri, dengan waktu pengambilan data yang berlangsung tanggal 12 Februari 2018 sampai 15 Maret 2018. Proses pemeriksaan data kuesioner dan studi literatur berlangsung pada 16 Maret 2018 sampai 30 April 2018, dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi deskriptif.

3.2 Metode Kualitatif

Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis hasil wawancara mendalam terhadap korban, pelaku, tokoh adat/masyarakat, dan pihak pemerintah. Metode ini juga dilakukan di wilayah Kabupaten Maros dengan melakukan wawancara mendalam pada 34 (tiga puluh empat) perempuan korban kekerasan, petugas penanggung jawab, tokoh adat, dan pelaku kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Maros. Instrumen yang digunakan adalah lembar wawancara berisi daftar pertanyaan untuk korban dan pelaku, *stakeholder* dan tokoh adat, buku catatan, alat rekam, kamera, surat tugas, dan tim peneliti itu sendiri. Pengambilan data wawancara mendalam dan analisisnya dilakukan sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai 4 Juli 2018.

Jawaban dari hasil wawancara mendalam kemudian dianalisis dengan menggunakan verifikasi data kuantitatif dan melakukan klasifikasi jawaban korban dari daftar pertanyaan yang diajukan pada wawancara mendalam, mencari perbedaan dan persamaan lalu membandingkannya satu sama lain. Hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan kotak kasus sebagai pendukung.

3.3 Proses Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan laporan penelitian.

4. Hasil Penelitian

4.1 Tingkat Pendidikan Perempuan Korban Kekerasan

Tingkat pendidikan perempuan korban kekerasan dalam penelitian ini terdiri atas berbagai tingkat, yaitu SD 35,60%, SMP 39 19,02%, SMA 64 31,21%, dan perguruan tinggi 8,29%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan perempuan, maka semakin banyak menerima tindak kekerasan.

Sebaran ini berbanding terbalik dengan data perempuan korban kekerasan yang melapor pada DP3A[59], di mana pelapor memiliki pendidikan yang tinggi (perguruan tinggi dan SMA), namun sejalan dengan hasil wawancara mendalam, yaitu dari 34 orang informan, hanya tiga orang yang berpendidikan tinggi (SI dan D3). Bentuk kekerasan yang dialami pun hanya sebatas kekerasan psikis, satu di antaranya mengalami kekerasan fisik tapi terjadi pada saat belum menempuh pendidikan tinggi (usia anak). Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingginya tingkat pendidikan—khususnya bangku perguruan tinggi—dapat membatasi perempuan untuk terkena kekerasan. Mereka yang berpendidikan rendah lebih rentan mengalami kekerasan terutama pada perempuan yang hanya mengenyam pendidikan dasar. Ditambah dengan rendahnya keberanian mereka mengungkapkan kekerasan yang telah mereka alami.

59 Pada Bab Latar Belakang laporan penelitian ini.

4.2 Pengetahuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan

Ada dua hal yang dapat digali dari masalah pengetahuan mengenai kekerasaan, yaitu pengetahuan tentang bentuk kekerasan dan pengetahuan tentang aturan perlindungan perempuan dari kekerasan.

4.2.1 Pengetahuan tentang Bentuk Kekerasan

Salah satu penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah minimnya pengetahuan korban tentang kekerasan. Pada penelitian ini terdapat beberapa informan yang awalnya tidak mengetahui bahwa saat terjadi kekerasan mereka sedang mengalami kekerasan, seperti pernyataan NN:

> *"Waktu itu ada teman yang kehilangan uang, diadakan pemeriksaan. Saya diperiksa sampai ke celana dalam. Saya baru tahu kalau hal tersebut adalah kekerasan saat sudah dewasa dan mendengar berita. Tapi sejak kejadian itu saya malu dan tidak mau lagi bertemu guru saya."*
>
> NN (nama samaran), 28 tahun. Komentar saat pengisian kuesioner tanggal 13 Februari 2018

Dari deskripsi di atas dapat diketahui bahwa korban tidak mengetahui dirinya sedang menjadi korban kekerasan. Mereka menganggap bahwa kekerasan hanya berbentuk pemukulan atau menyakiti anggota tubuh.

4.2.1 Pengetahuan Perempuan tentang Bentuk Kekerasan

Lebih dari setengah dari korban kekerasan tidak mengetahui aturan tentang perlindungan perempuan terhadap kekerasan. Di antara 205 responden yang menjadi korban kekerasan, 50,74% menyatakan tidak tahu tentang aturan tersebut dan tempat untuk mengadu. Mereka yang tahu dan menyebutkan ada 13,65%, sementara responden yang tahu tapi tidak menyebutkan tentang aturan perlindungan perempuan dari kekerasan adalah 18.,04%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden terhadap aturan tentang perlindungan perempuan sangat rendah, sehingga bisa menyebabkan mereka mendapatkan kekerasan secara terus-menerus.

Dari hasil wawancara mendalam dengan para korban diperoleh informasi bahwa 12 informan menyatakan "tidak tahu" atau "tidak ada" ketika ditanya tentang tempat pengaduan untuk perempuan korban kekerasan.

Ketidaktahuan tentang adanya aturan yang melindungi perempuan dari kekerasan bukan hanya berlaku pada korban, melainkan juga para pelaku. Contohnya, pelaku Ir[60], dengan tuduhan pelecehan pada perempuan di bawah umur, dalam wawancara di Lapas Maros, menyatakan:

"Saya tidak tahu bahwa ini salah dan melanggar, kan dia pacar saya, kami melakukannya suka sama suka."

Ir (inisial), 23 tahun. Wawancara tanggal 30 Februari 2018

Dari pernyataan pelaku diatas, dapat dilihat bahwa pada umumnya pelaku dan korban keduanya tidak mengetahui bahwa apa yang terjadi adalah tindakan yang dapat dijatuhi sanksi pidana.

4.3 Pekerjaan Perempuan Korban Kekerasan (Kontradiksi Pekerja Formal dan Informal)

Kekerasan terhadap perempuan banyak dialami oleh ibu rumah tangga. Dari hasil survei diperoleh data bahwa ibu rumah tangga paling banyak mengalami kekerasan yaitu sebanyak 56,09%, sementara perempuan dengan pekerjaan lain jauh lebih sedikit yang menjadi korban: wiraswasta 6,34%, karyawan swasta 5,36%, dan buruh 5,36% (selengkapnya lihat Gambar 9).

GAMBAR 9 PEKERJAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Sumber: hasil kuesioner penelitian MAUPE tanggal 12 Februari s.d. 15 Maret 2018

60 Pelaku Ir ditahan berdasarkan laporan dari orang tua korban, yang melaporkan bahwa pelaku telah melakukan pemerkosaan pada anak gadisnya yang masih di bawah umur (16 tahun)

Kondisi yang lebih buruk adalah jika penelantaran rumah tangga disertai dengan pemukulan dan perselingkuhan. Menariknya, perempuan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) cenderung lebih sedikit mengalami kekerasan dari pihak suami atau bersikap tegas dengan memilih jalan berpisah. Dua di antara korban yang bekerja sebagai PNS berstatus pernah menikah dan dua lagi belum menikah, menunjukkan bahwa perempuan pekerja formal memiliki kekuatan atau resistensi dari kekerasan terhadap perempuan dibanding mereka para pekerja informal.

Data pengaduan dari P2TP2A Maros, menunjukkan hasil yang sama, yaitu terlihat bahwa 18 di antara 53 korban/pelapor adalah ibu rumah tangga diikuti oleh PNS sejumlah 12 orang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mengalami kekerasan, pekerja formal cenderung memilih untuk melindungi diri dengan jalan melapor pada pihak terkait.

4.4 Reaksi Perempuan Korban Kekerasan

Reaksi perempuan korban kekerasan dalam penelitian ini beragam, tetapi yang terbanyak adalah mereka yang diam dan pasrah menerima keadaan yaitu sebanyak 41,46%, disusul mereka yang mengungkapkan atau mengadu pada orang di sekitarnya sebanyak 21,95%, sementara yang melawan dan menghindar sebanyak 16,58%, dan yang langsung melaporkan sebanyak 3,90% (selengkapnya lihat Tabel 4).

TABEL 4 REAKSI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

No	Reaksi Perempuan	Jumlah	Jumlah (%)
1	Curhat	45	21,95
2	Diam	85	41,46
3	Lawan	34	16,58
4	Diam, Lawan, Curhat	1	0,48
5	Lawan, Diam	4	1,95
6	Lapor	8	3,90
7	Curhat, Lawan	4	1,95
8	Curhat, Diam	7	3,41
9	Lawan, Lapor	3	1,46
10	Diam, Lawan, Lapor	1	0,48
11	Curhat, Lapor	1	0,48
12	Tidak Isi	12	5,85

Sumber: hasil kuesioner penelitian MAUPE tanggal 12 Februari s.d.15 Maret 2018

4.4.1 Sikap Diam dan Bertahan

Sikap diam seorang korban kekerasan apalagi perempuan berkaitan dengan adanya pendapat secara umum yaitu seorang perempuan/istri

harus selalu merahasiakan kekerasan yang dialaminya: kekerasan merupakan masalah internal, orang lain tidak perlu ikut mencampuri, dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami merupakan hal yang wajar untuk mengoreksi istri yang salah.

Alasan tersebut ditambah dengan deretan alasan lain, seperti takut hidup sendiri (janda) karena stigma masyarakat yang memandang rendah status seorang janda (janda dianggap berpotensi menggoda dan merayu suami orang lain), ketergantungan ekonomi, rasa takut kalau anak-anak mereka kelak kehilangan sosok ayah, juga sikap pelaku yang berubah "manis" dan menyesal setelah melakukan kekerasan.

Pemerkosaan adalah level kekerasan yang lebih tinggi dari pelecehan, walaupun reaksi diam korban keduanya hampir sama karena didorong oleh perasaan takut dan malu, namun kadar trauma korban perkosaan lebih berat dibanding korban pelecehan.

M, korban perkosaan oleh ayah kandungnya selama ini mengaku diam karena takut pada ancaman pelaku "Saya bunuh ko kalau bilang-bilang sama orang...(saya bunuh kamu kalau mengatakannya pada orang lain)", begitu kata pelaku sambil mencekik korban saat melakukan pemerkosaan. Kata-kata itu selalu terngiang di telinga M dan membuatnya takut untuk mengatakan perbuatan pelaku pada orang lain. Belum lagi sikap kasar pelaku pada ibu dan saudaranya yang lain, apalagi setelah dua saudara laki-lakinya pergi dari rumah karena tidak tahan, tinggallah M memendam semua nyeri tubuh dan batinnya yang tertekan. Hal ini mengakibatkan M sempat depresi dan dianggap gila oleh orang sekitarnya. Dalam bahasa Makassar istilah ini disebut *dongo-dongo* (sebutan untuk orang yang dianggap mengalami keterbelakangan mental, arti sebenarnya bodoh). Hal tersebut menambah ruang bagi pelaku melakukan perbuatannya.

4.4.2 Sikap Melawan dan Menghindar

Hasil survei menunjukkan sebanyak 22,92 % korban bereaksi dengan kombinasi diam, lawan, dan curhat/lapor. Tetapi dari hasil wawancara mendalam ditemukan bahwa 13 orang dari 34 responden melakukan reaksi perlawanan atau menghindar bila terjadi kekerasan atau setelah kekerasan agar kekerasan tidak terulang.

Berbeda dengan kasus pelecehan, para korban KDRT dan kekerasan dalam hubungan pacaran *(Dating Violence)* cenderung melawan dengan cara adu mulut dan mengomel, tapi yang lain ada pula yang menghindar

dengan cara pulang ke rumah orang tua atau menghindari pemicu terjadinya pertengkaran.

Reaksi para korban kekerasan menunjukkan bahwa perlawanan yang diberikan para korban kekerasan dalam rumah tangga lebih bertujuan untuk menghindari konflik dengan mengambil jalan "aman" yaitu tidak menegur atau lari dari lokasi kejadian dengan cara pulang ke rumah orang tua. Sedangkan reaksi para korban perundungan lebih frontal atau terang-terangan dengan jalan membalas, begitu pula dengan korban pelecehan, perlawanan yang mereka lakukan karena spontanitas. Ketiganya memiliki pola berbeda; korban KDRT melakukan karena takut kekerasan terulang, korban perundungan disebabkan karena perasaan marah dan sakit hati, sementara korban pelecehan disebabkan perasaan tidak nyaman, takut, malu, dan harga dirinya terancam.

4.4.3 Mengadu dan Melapor

Mengadu dan melapor ini berkaitan dengan reaksi korban yaitu bercerita pada keluarga, teman, atau yang lainnya (curhat) hingga ke taraf melapor kepada pihak berwenang dalam hal ini kepolisian, pemerintah setempat, dan lembaga perlindungan perempuan. Survei menunjukkan bahwa hanya delapan responden yang langsung melaporkan kejadian yang dialaminya, yang lainnya bertahap dari sikap diam, lawan, curhat, lalu memutuskan untuk melapor (selain korban yang diam dan langsung melawan). Dari hasil wawancara mendalam diperoleh bahwa pelaporan tentang keadaan korban dilakukan oleh keluarga korban (reaksi pihak ketiga). Korban pun akan melakukan pelaporan saat nyawanya sudah terancam, ada dorongan dari pihak lain, dan ada pengetahuan tentang tempat mengadu. Menurut catatan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kabupaten Maros terdapat 41 kasus kekerasan terhadap perempuan (rentang waktu 2015-2017) di mana 41 kasus tersebut tidak berlanjut karena laporan dicabut akibat bukti yang tak cukup dan adanya jalan damai. Jenis pengaduan tentang kekerasan pun berbeda-beda, namun yang terbanyak adalah penganiayaan sebanyak 46,33%, diikuti oleh KDRT sebanyak 31,69%, sisanya adalah menikah tanpa izin, perbuatan cabul, dan zina (Gambar 10).
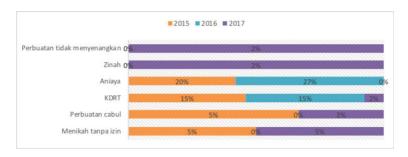
GAMBAR 10 JENIS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG DITANGANI UPPA POLRES MAROS

Sumber: UPPA Poles Maros (2017)

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa pada rentang tahun 2015 sampai 2016 cenderung terjadi peningkatan laporan kekerasan yang diterima oleh UPPA. Pada tahun ketiga (2017), terjadi penurunan jumlah laporan yang diterima, walaupun pada tahun 2017 timbul kasus kekerasan baru seperti zina dan perbuatan tidak menyenangkan.

4.5 Keputusan Akhir Korban

Penelitian ini menemukan aneka cara penyelesaian yang dijalani oleh korban, mulai dari memafkan atau tidak, perceraian, atau kembali hidup bersama. Umumnya keputusan berpisah dilakukan pihak perempuan setelah merasa bahwa mereka tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dan menahan sakit akibat kekerasan atau karena menganggap tidak bisa mengikuti cara hidup pelaku, termasuk karena suami memang sudah meninggalkan mereka sebelumnya.

Pada tahun 2014 menuju tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah cerai gugat dan cerai talak. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang waktu tersebut terjadi berbagai peristiwa yang membangkitkan keinginan beberapa pasangan di Kabupaten Maros untuk berpisah. Memasuki tahun 2016 terjadi penurunan drastis—baik itu cerai talak maupun cerai gugat; hal ini disebabkan beberapa masalah rumah tangga bisa diselesaikan dengan cara perdamaian tanpa niat untuk berpisah. Pada tahun 2017 terjadi perbedaan antara cerai gugat dan cerai talak, cerai talak tidak mengalami peningkatan yang signifikan, namun sebaliknya cerai gugat yang meningkat dari 337 gugatan menjadi 373 gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan kaum perempuan (istri) untuk berpisah lebih tinggi dibanding para pria atau para suami.

Data di atas menggambarkan bahwa dari tahun ke tahun semakin banyak perempuan di Maros yang tidak nyaman dengan pernikahannya. Kebiasaan pasangan seperti mabuk, berjudi, berselingkuh, melakukan kekerasan, ditambah dengan hal lain menambah keinginan untuk meninggalkan pasangan.

Cara penyelesaian lainnya seperti yang dilakukan NN yang mengalami kekerasan dari majikan berupa rayuan dan intimidasi, akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tempatnya bekerja dan memutuskan untuk lebih berhati-hati dalam mencari pekerjaan, bahkan pada akhirnya korban memutuskan untuk tidak bekerja di luar rumah.

Dengan demikian, keputusan akhir korban ketika/setelah menghadapi kekerasan cenderung merugikan korban walaupun di sisi lain membuat mereka terhindar dari terulangnya kekerasan.

4.6 Reaksi Pihak Ketiga/Saksi Kekerasan terhadap Perempuan

4.6.1 Pihak Keluarga

Reaksi pihak ketiga/saksi dalam penelitian ini ditujukan pada mereka yang menyaksikan dan mengetahui peristiwa kekerasan terhadap perempuan, bagaimana cara mereka bersikap dan bertindak ketika mengetahui dan menyaksikan seorang perempuan mengalami kekerasan baik yang mereka kenal maupun yang tidak. Survei menunjukkan bahwa untuk pihak keluarga reaksi berupa pengabaian sebanyak 41,56%, bertindak (peduli) 22,92% , serta menyalahkan korban dan tidak percaya 6,82%.

Wawancara mendalam mengungkap bahwa beberapa informan mendapatkan perlakuan yang beragam dari keluarganya saat terjadi kekerasan, terdiri dari dua bagian, yaitu:

a. Tanggapan positif, yaitu pihak keluarga melakukan pembelaan pada korban kekerasan, seperti ibu dari korban M yang langsung mengungsikan M untuk menghindarkan korban dari pelaku lalu melaporkan ayah kandung M pada pihak berwajib;
b. Tanggapan negatif, yaitu pihak keluarga malah menambah beban pelaku dengan turut melakukan kekerasan, bersikap antipati dan menyalahkan korban, seperti yang dialami Sab, setelah mengalami kekerasan berupa pelecehan di jalan yang diketahui keluarganya, Sab malah dihina dan dikucilkan;

c. Perpaduan tanggapan positif dan negatif, yaitu perlakuan keluarga yang kompleks karena di antara mereka ada yang membela, melindungi, bahkan memfasilitasi, tapi yang lain turut melakukan kekerasan pada korban, seperti yang terjadi pada Her, 35 tahun (lihat **Kotak Kasus 1**).

KOTAK KASUS 1

Korban Her, mengalami kekerasan psikis dan fisik dari suami berupa pemukulan dan diselingkuhi. Sejak awal perkawinan Her sudah berusaha untuk berpisah dengan pelaku, tapi ibunya melarang. "Pikir dulu Nak, kasian anak-anakmu,"kata ibunya saat Her mengutarakan keinginannya. Saat pelaku sakit setelah melakukan kekerasan pada korban, korban lagi-lagi hendak berpisah, namun saat itu ibunya kembali menahan. "Kau akan tambah dosa kalau meninggalkan suami yang sedang sakit." Lagi-lagi Her membatalkan niatnya, namun saat Her mengalami kekerasan yang kesekian kalinya, pihak keluarga khususnya ibunya tidak mau lagi bertemu dengan pelaku dan berubah dingin pada pelaku, menyebabkan Her pindah rumah mengikuti pelaku.

Selain ibunya, anak Her pun turut bereaksi terhadap pelaku. Suatu saat setelah melakukan kekerasan pelaku minta maaf dan Her menerima kembali, anaknya mengajukan protes. "Mama jalla dudu *sama Bapak...biar disakiti* mauji *juga,"*[61] *hal ini dikatakan oleh anak perempuannya, namun anak laki-lakinya biasanya akan memeluk korban dan menangisi serta mengusap luka korban setelah dipukul pelaku.*

"Waktu merantau di Sorong, ketika arisan [pelaku] naik saya mau hitung [uangnya], dia pukul tangan saya. Dia bilang saya mau kirim ini uang ke mamaku, saya jawab, "Jadi bagaimana dengan anakta yang di sana." (Her meninggalkan salah satu anaknya pada ibunya di Maros) Dia bilang, masa neneknya ndak kasi juga cucunya. Setelah kejadian itu paman pelaku menanyakan perihal uang tersebut dan korban pun menceritakan apa yang terjadi. Paman tersebut menegur pelaku, dan sebagai balasannya pelaku kembali memukuli korban. "Saya diseret ke halaman rumah, dijambak dan dipukul dengan bambu."

Her sempat mengajukan cerai dengan dibiayai ibunya, namun perceraian itu batal, "Padahal mamaku sudah bayarmi ke pengadilan agama", juga pada saat kabur dari Sorong dengan menggunakan kapal laut, "Mama yang kirimkan saya uang untuk ongkos pulang." Her merupakan anak tunggal dari pernikahan pertama ibunya, "Makanya saya tidak mau beratkan Mama, karna masih ada adik-adikku, tidak enak juga sama Bapak (bapak tiri), meskipun nasayangja juga..."

Di akhir pernikahannya, ibu dari Her akhirnya menyetujui jika Her mau bercerai dengan pelaku, meskipun dengan nasehat, "Tidak gampang jadi janda Nak...", namun ibu pelaku memaki korban sebagai pembawa sial bagi suaminya. "Selama menikah dengan Her, tidak pernah baek nasibnya anakku," begitu katanya pada tetangga. Ibu pelaku marah karena korban melaporkan putranya pada pihak berwajib dan ditahan. Mendengar kata-kata tesebut, dua ipar perempuan Her (saudara pelaku) mengatakan, "Biar saja, memang pantas H (nama pelaku) ditahan, biar jera kasi begitu perempuan."

61Mama terlalu cinta sama Bapak, biar dipukul tetap mau ikut

Saat resmi bercerai dengan pelaku dan pelaku berstatus narapidana di Lapas Kelas 2A Maros, korban tinggal dengan orang tuanya meski berbeda petak. Saat pelaku mendadak muncul, anak dari korban bersembunyi karena ketakutan. Ia memanjat tembok menuju rumah neneknya. Pelaku akhirnya dihadapi oleh ayah tiri korban.

Selain kekerasan fisik berupa pemukulan dan kekerasan psikis berupa perselingkuhan, Her juga mengalami kekerasan psikis berupa penelantaran ekonomi. "Biasanya dia kasi uang belanja 10.000 sehari, uang jajan anak-anak 5.000. Kalau saya bilang, 'Kak, tidak ada gula,' barulah ditambah 5000, untuk kasi cukup belanja, saya pergi mencuci di rumah nenek, pulangnya bawa beras, minyak dan rempah-rempah, dan biasanya langsung diminta sebagian sama mertuaku."

Kasus di atas menunjukkan bahwa pihak keluarga korban cenderung menasehati korban dan melindungi korban dari pelaku. Berbeda dengan keluarga pihak pelaku, khususnya mertua, yang kerap menambah kekerasan tersebut dengan maksud membela pelaku (suami korban). Namun dalam kasus tertentu, pihak keluarga pelaku turut membela korban. Hal ini disebabkan faktor kepentingan dari pihak keluarga, di mana kadang pelaku melakukan tindak kekerasan dengan motivasi dari orang tua atau kebiasaan dalam keluarga yang diam-diam ditentang oleh pihak submisif seperti anak perempuan atau keluarga lebih muda dari orang tua berstatus paman maupun bibi.

4.6.2 Reaksi Masyarakat

Reaksi masyarakat dalam hal ini tetangga dan warga sekitar cukup beragam. Sebanyak 34,14% responden mengaku diabaikan, yang menerima ungkapan iba sebanyak 31,21%, dan hanya 7,80% yang merasa dipedulikan oleh masyarakat di sekitarnya.

Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara mendalam. Reaksi orang lain di sekitar korban juga beraneka ragam, ada yang sekadar melihat tapi takut menolong, ada yang turut membantu korban, ada yang menemani melapor, dan sebagainya.

Cerita mereka mengungkap bahwa kepedulian warga sekitar atau tetangga pada korban hanya sebatas iba tapi tidak berani menolong, disebabkan ancaman dari suami korban dan tingginya temperamen pelaku, selain itu ada juga rasa segan karena posisi dan kasta pelaku yang dianggap lebih tinggi dari warga di sekitarnya.

Dari hasil wawancara dengan pelaku, diketahui bahwa terungkapnya kejahatan pelaku biasanya terjadi akibat adanya campur tangan pihak lain

seperti yang diceritakan Rif, 17 tahun, pelaku pemerkosaan pada perempuan berusia 21 tahun.

> *"Saya awalnya hanya merampok, tapi melihat ada kesempatan, saya akhirnya memerkosa korban. Setelah itu saya lari, saya didapat karena teman buka mulut, juga korban ditemukan di jalan sama tukang bentor, akhirnya melapor."*

Rif (inisial), 17 tahun, hasil wawancara mendalam, 30 April 2018

Reaksi masyarakat bekaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dalam penelitian ini berkaitan pula dengan pandangan umum masyarakat melalui tokoh masyarakatnya. Dari hasil wawancara 3 dari 12 tokoh masyarakat menyatakan bahwa perempuan tidak layak mengalami kekerasan, bahkan perempuan sebaiknya dijaga dan dihargai[62].

4.6.3 Reaksi Pihak Pelayan Publik (Stakeholder)

Dari hasil survei diperoleh bahwa kasus yang ditangani hanya berjumlah 15,12%, yang tidak ditangani berjumlah 57%, sisanya tidak mengisi. Hal ini terjadi karena pihak korban sendiri tidak melaporkan kekerasan yang dilaminya, tidak mengetahui mereka sudah mengalami kekerasan, menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa, takut melaporkan, dan tidak ada kesempatan untuk melapor.

Data yang diperoleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Maros melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Januari 2016 – November 2017 telah menerima pengaduan sebanyak 91 kasus dan 58,24% kasus di antaranya adalah kekerasan terhadap perempuan.

Setelah pihak kepolisian (penyelidikan dan penyidikan) menyatakan kasus yang memenuhi unsur pidana lengkap, kasus tersebut akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan di pengadilan negeri. Kasus-kasus yang ditangani pengadilan negeri mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Untuk kasus perceraian tahun 2015 pengadilan negeri tidak menangani perceraian, namun tahun 2016 tercatat ada 3 (tiga) kasus perceraian dan meningkat tajam di tahun 2017 menjadi 8 (delapan) kasus. Hal ini menunjukkan bahwa masalah rumah tangga bukan hanya terjadi pada pasangan muslim, melainkan juga pasangan nonmuslim, karena dalam penanganan kasus perceraian, pengadilan negeri menangani pasangan

62 Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Mandai, Simbang dan Tanralili.

nonmuslim, (pasangan muslim dilakukan oleh pengadilan agama), dan jumlahnya pun semakin meningkat.

Untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, pada tahun 2016 terdapat peningkatan kasus hingga 100%, walaupun pada tahun 2017 kembali menurun. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga mungkin menimbulkan efek jera bagi pelaku, sehingga tidak terjadi lagi aksi kekerasan dalam rumah tangga. Dapat juga terjadi juga kurangnya inisiatif korban dalam melaporkan kasus yang dialami karena kasus yang telah ditangani pihak berwajib tidak berlanjut hingga ke pengadilan negeri.

Kasus pelecehan seksual juga mengalami fluktuasi, tahun 2016 terjadi peningkatan kasus pelecehan seksual, namun menurun drastis pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual khususnya pada penanganan pelaku menimbulkan kesadaran bagi calon pelaku lain untuk tidak melakukan perilaku yang sama, dapat pula terjadi karena adanya kesadaran calon korban untuk menghindar agar tidak mengalami pelecehan seksual, begitu pula dengan kasus penganiayaan di muka umum.

Hasil lain diperoleh pada kasus tindak kekerasan di tempat kerja. Pada tahun 2015 terdapat 2 (dua) kasus yang ditangani, namun pada tahun 2016 dan 2017 tidak ada kasus kekerasan di tempat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kemungkinan tidak terjadi lagi kasus serupa karena kesadaran para majikan dalam memperlakukan pekerjanya. Bisa juga terjadi karena para korban tidak melaporkan kejadian yang dialaminya.

Data pengadilan negeri tersebut juga menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual merupakan kasus terbanyak yang ditangani. Hal ini disebabkan karena pelecehan seksual dianggap masyarakat sebagai perilaku yang mendatangkan aib besar bagi korban dan keluarganya, merusak kehormatan korban dan menimbulkan trauma berkepanjangan, sehingga korban cenderung segera melaporkan ke pihak berwajib dan biasanya tidak terjadi perdamaian antara pihak korban dan pelaku, sehingga kasus pelecehan seksual baik ringan maupun berat biasanya berakhir pada vonis dari pengadilan negeri.

Pada hasil wawancara mendalam terdapat berbagai reaksi *stakeholder*/oknum *stakeholder* pada kekerasan terhadap perempuan. Kalau

pada wawancara dengan pelaku, sudah jelas bahwa mereka telah ditangani dalam bentuk proses hukum, namun pada wawancara dengan korban sebagai informan diperoleh gambaran sebagai berikut.

Kasus M alias Mg, segera ditangani oleh Polsek Mandai dan P2TP2A Maros, bahkan dalam proses peradilan, hakim memberi ruang pada korban untuk mengungkapkan keinginannya terhadap pelaku[63]. Jajaran P2TP2A sangat memperhatikan kasus ini "Buat kami kasus ini yang paling berkesan, bayangkan ada perbuatan seperti itu yang terjadi selama berpuluh tahun, ke mana kita selama ini?"[64].

Melalui kisah di atas dapat diketahui bahwa reaksi pelayan publik cukup tanggap dalam menerima laporan korban untuk melayani, menangani, melindungi, dan mencegah kekerasan itu berlanjut. Hal ini juga tercermin pada isi Simfoni (Kumpulan pelayanan terhadap korban kekerasan di P2TP2A), di mana terdapat pengaduan sebanyak 53 kasus yang diteruskan ke beberapa instansi lain seperti kepolisian, rumah sakit, atau yang berakhir damai. Selain itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Maros menerima 48 pengaduan sejak tahun 2015 sampai 2017 yang berstatus pencabutan laporan karena tidak cukup bukti atau berdamai.

Dari hasil wawancara dengan pihak Petugas Lapas, diperoleh keterangan bahwa saat ini Lapas Maros dihuni oleh 331 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)[65], dengan jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan (Pasal 285,287, 289 KUHP dan pelanggaran UU Perlindungan Anak dan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga) sebanyak 15 orang sejak tahun 2015, empat di antaranya masih berstatus tahananan (proses peradilan), kisaran umur mereka yaitu dari 17 (anak binaan) sampai 73 tahun dengan lama pidana 7 bulan sampai 10 tahun[66].

Menurut Kepala Seksi Pendidikan dan Pembinaan dalam proses pembinaan, semua warga binaan diperlakukan sama yaitu dengan menggunakan metode pembinaan seragam, tidak ada perbedaan perlakuan antara pelaku biasa dengan pelaku kekerasan terhadap perempuan.

63 Pelaku akhirnya diganjar dengan vonis 12 tahun penjara di usianya yang ke 73

64 Pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros (Idrus, Msi) pada wawancara *stakeholder* tanggal 4 Juli 2018

65Buku Register Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kls 2A Maros

66Data dari Lapas Maros dan hasil wawancara dengan petugas Lapas

4.7 Penyebab Terjadinya Kekerasan

4.7.1 Pemicu dari Korban

Pemicu dari korban adalah tindakan korban yang menyebabkan reaksi balasan pelaku. Tindakan korban biasanya dianggap pelaku sudah sampai pada taraf 'berlebihan' sehingga sering dijadikan dalih untuk melakukan kekerasan.

Korban-korban antara lain menyatakan bahwa mereka (1) dipukul oleh gurunya karena tidak memperhatikan pelajaran, (2) mendapatkan kekerasan dari atasannya di tempat kerja karena dianggap tidak becus dalam bekerja, (3) mendapatkan kekerasan dari orang tua karena dianggap lancang menasehati adiknya, dan (4) diabaikan oleh suaminya sebagai bentuk protes karena korban lebih memperhatikan orang tuanya.

4.7.2 Keadaan Korban

Keadaan korban berkaitan dengan kondisi fisik maupun kejadian-kejadian yang kerap atau pernah menimpa korban dan digunakan pelaku untuk melakukan kekerasan. Keadaan tersebut dianggap celah untuk melakukan kekerasan.

Korban Kus mengalami kekerasan dari pihak keluarga suami karena berbeda keyakinan dengan pelaku[67], padahal suami korban sendiri pun sudah berkeyakinan sama dengan korban.

4.7.3 Orang Ketiga

Orang ketiga dalam pembahasan penelitian ini bukan hanya dalam hubungan suami istri atau kekasih, tapi juga orang tua, mertua, dan lain-lain. Nur menuturkan bahwa pertengkarannya dengan suami biasanya berbuntut kekerasan bila sudah dicampuri oleh mertuanya ditambah dengan hadirnya perempuan lain yang menjadi selingkuhan suaminya.

4.7.4 Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan terjadi terhadap perempuan, bahkan hampir semua kasus KDRT disebabkan oleh masalah ekonomi. Kurangnya uang belanja dan nafkah meningkatkan stres kedua belah pihak (pelaku dan korban) khususnya pelaku yang

---

67Jenazah suami korban diambil paksa oleh pelaku untuk dimakamkan dengan cara agama yang mereka anut,

kadang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan bagi keluarganya yang berpotensi menjadi korban.

Kondisi ekonomi berkaitan dengan jenis pekerjaan pelaku. Survei menunjukkan bahwa suami yang menjadi pelaku kekerasan paling banyak mengaku sebagai wiraswastawa sebanyak 9,26%, buruh sebanyak 8,29%, diikiuti petani/peternak sebanyak 3,41%, sisanya adalah karyawan swasta, Honorers, PNS, guru, tukang ojek, supir, kepala dusun, pemulung, tukang kayu, dan montir (lihat tabel 9). Bila dilihat dari sisi ketetapan penghasilan, dapat disimpulkan bahwa wiraswasta (pemula) dan buruh adalah profesi dengan penghasilan yang tak menentu. Berbeda dengan mereka yang berprofesi koki, sekuriti, *office boy*, dan berjualan; mereka relatif memiliki penghasilan tetap yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Para suami dengan profesi tersebut tidak menjadi pelaku kekerasan bagi istrinya dalam penelitian ini. Dari gambaran wawancara mendalam, dapat diketahui bahwa rendahnya tingkat penghasilan bisa menyebabkan seorang pria berpotensi menjadi pelaku kekerasan.

4.7.5 Niat Pelaku

Hasil wawancara dengan pelaku diketahui bahwa motivasi mereka melakukan kekerasan beragam, mulai dari bermaksud "mendidik", ritual ilmu, sampai yang bertindak spontan karena pengaruh obat-obatan dan alkohol. Pelaku H[68] mengaku melakukan kekerasan terhadap istrinya karena kesal sebab sang istri tetap bekerja meski keadaan berduka dan dia ingin istrinya berubah lebih menurut padanya (meskipun berbeda dengan versi korban Her yang menyebut bahwa H biasa pulang dalam keadaan mabuk).

Pelaku[69] pemerkosaan terhadap M tidak sempat menjalani wawancara karena menghindar saat ditemui di lapas, tapi dari pihak keluarga diperoleh keterangan bahwa selama ini pelaku dikenal sebagai *sanro* atau dukun di tempat tinggalnya, selain mantan karyawan salah satu perusahaan besar di Sulawesi Selatan. Menurut keluarga tersebut pelaku sedang menjalani ritual untuk memperdalam ilmunya dan apa yang dilakukannya terhadap M adalah salah satu prosesi ritualnya.

Pada kasus *dating violence* alasan "atas nama cinta" adalah frase yang seringkali digunakan pelaku untuk mencapai tujuan dalam melakukan

68Pelaku H adalah pelaku kekerasan terhadap Her yang menjadi salah satu informan korban kekerasan

kekerasan seksual pada pasangannya. Bujuk rayu yang kerap disalahartikan sebagai manifestasi cinta pasangan sesungguhnya merupakan ruang penundukan lain bagi tubuh perempuan[70].

4.8 Jenis Kekerasan

Dari hasil penelitian berupa survei dapat diketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Maros terjadi dalam berbagai jenis, yaitu psikis, fisik, dan psikis. Jenis kekerasan di Kabupaten Maros didominasi oleh kekerasan psikis yaitu sebesar 72,68%, ditunjukkan dengan perbedaan yang signifikan dengan jenis kekerasan yang lain yaitu fisik sebesar 9,75% dan seksual sebesar 3,41%, sedangkan perpaduan fisik dan psikis sebesar 10,73%, psikis seksual sebesar 1,46%, dan perpaduan ketiganya adalah 0,97%, sisanya tidak mengisi. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara mendalam, dari 34 informan yang mengalami kekerasan, tiap kekerasan yang mereka alami diwarnai dengan kekerasan psikis. Hal tersebut sesuai dengan pengertian kekerasan psikis yang dikemukakan oleh Sri Nurdjunaida[71] bahwa kekerasan psikis dapat berbentuk tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Dari hasil penelitian ini bentuk kekerasan psikis tersebut dapat ditambah dengan pengabaian tanggung jawab dan pengucilan.

Jenis kekerasan seksual dalam penelitian ini berbentuk pelecehan seksual, berupa korban diraba dan dicolek, pemaksaan hubungan seksual dengan perempuan di bawah umur, dan perkosaan yang dilakukan oleh orang dekat maupun orang asing.

4.9 Pelaku Kekerasan

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pelaku kekerasan di Kabupaten Maros terdiri atas: suami 43%, teman 15,12%, kerabat 8,78%, sisanya adalah, orang tua, orang asing, tetangga, guru, majikan, pemerintah, dan perpaduan di antara mereka (kolektif).

Pelaku kekerasan di Kabupaten Maros didominasi oleh orang terdekat dari seorang perempuan yaitu suami, artinya perempuan rentan menjadi

70Nike Nadia. Atas Nama Cinta: Relasi Kuasa dan Reviktimisasi pada Kasus Kekerasan Seksual dalam Pacaran (Studi Kasus Putusan Pengadilan). Jurnal Perempuan Vol 23 No. 1 Februari 2018 hal 6312

71 B. Rudi Harnoko, Op.Cit,.hal 184

korban kekerasan setelah menikah, sedangkan hasil wawancara mendalam yaitu dari 34 informan ditemukan 10 di antaranya mengalami kekerasan dari pihak suami dengan melakukan kekerasan fisik dan psikis karena berbagai alasan.

Orang dekat lainnya yang menjadi pelaku adalah ayah kandung, meskipun dari hasil survei dan wawancara hanya diperoleh 2 korban, namun seorang korban tersebut mengalami kekerasan fisik, seksual, dan psikis selama bertahun-tahun dan akhirnya mengalami trauma fisik dan psikis hingga meninggal dunia[72]. Adapun yang satunya mengalami kekerasan fisik yang dilakukan ayah kandungnya saat masih usia sekolah, namun menyisakan trauma psikis bagi korban hingga saat ini.

Pelaku berupa orang lain (bukan sedarah) yang dikenal dilakukan oleh majikan, guru, teman, dan teman dekat (pacar). Masing-masing melakukan kekerasan yang beragam terhadap korban. Pelaku yang merupakan orang asing melakukan bentuk kekerasan seksual berupa perkosaan dan pelecehan.

4.10 Tempat Terjadinya Kekerasan

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebanyak 66,34% kekerasan terjadi di rumah dan sisanya terjadi di tempat lain. Adapun tempat terjadinya kekerasan berupa rumah menempati posisi yang perbedaannya sangat signifikan dengan tempat-tempat lain. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian berupa pelaku kekerasan yaitu pihak suami yang menunjukkan banyaknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Maros dibanding kekerasan lain, walau dari hasil penelitian ini dapat pula diketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan di rumah bukan hanya dilakukan oleh suami, tapi ayah kandung dan keluarga.

Dari hasil wawancara mendalam kekerasan di sekolah dilakukan oleh guru dan teman dari korban, kekerasan di tempat kerja dilakukan oleh majikan dan rekan kerja dari korban, sedangkan tempat umum dilakukan oleh orang yang baru dikenal dan orang tak dikenal dengan modus perampokan dan berakhir dengan kekerasan seksual.

4.11 Penyebaran Kekerasan

Kabupaten Maros terdiri atas 14 kecamatan, dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa dari 725 responden jumlah responden terbanyak berada

72 Kisah M alias Mg yang mengalami pemerkosaan oleh ayah kandungnya

di Kecamatan Moncongloe yaitu 104 orang dengan jumlah korban kekerasan sebanyak 11,53%. Kecamatan dengan jumlah responden terendah terdapat di Kecamatan Lau dengan jumlah korban kekerasan sebanyak 6,66%. Persentase jumlah kekerasan tertinggi terdapat di Kecamatan Maros Baru dengan jumlah responden 42 orang, dengan persentase 61,90% dari jumlah tersebut, diikuti oleh Kecamatan Tanralili dan Kecamatan Marusu.

Sedangkan alamat korban yang melapor pada Dinas PPPA menunjukkan bahwa jumlah korban terbanyak berasal dari kecamatan Turikale, yaitu 33.96% dari jumlah total pelapor, berbeda dengan hasil penelitian. Dari total jumlah tersebut juga dapat diketahui bahwa korban yang sudah melaporkan keadaan yang dialaminya jauh lebih sedikit dibanding jumlah korban dari hasil penelitian (25,85%) dan kemungkinan masih banyak korban lain di Kabupaten Maros, namun belum melaporkan atau mengadukan kekerasan yang dialaminya. Hal ini merupakan "pekerjaan rumah" bagi para pelayan publik, bagaimana menangani para korban hingga berani mengemukakan apa yang selama ini mereka sembunyikan.

5. Pembahasan, kesimpulan, dan saran

5.1 Pembahasan

5.1.1 Faktor yang Memengaruhi Kekerasan terhadap Perempuan

Tingkat kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Maros, dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pendidikan perempuan, pengetahuan perempuan korban kekerasan, dan pekerjaan perempuan korban kekerasan. Berangkat dari faktor-faktor tersebut timbul reaksi yang berbeda dari para korban terhadap kekerasan yang terjadi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa semakin rendah pendidikan seorang perempuan, maka semakin rentan ia mengalami kekerasan, kalaupun di antara mereka ada yang berpendidikan tinggi, mereka mengalami kekerasan sebelum mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Niken Sitoresmi dan Siti Amanah yang menyimpulkan bahwa perempuan yang sudah sadar gender dan berpendidikan tinggi sekalipun, seperti mayoritas responden

yang mereka teliti[73], tetap saja berpotensi untuk mengalami tindak kekerasan[74].

Tingkat pengetahuan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengetahuan korban terhadap bentuk kekerasan dan pengetahuan tentang aturan yang melindungi perempuan dari kekerasan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar perempuan korban kekerasan, tidak mengetahui bahwa apa yang mereka alami adalah kekerasan. Bagi mereka kekerasan hanya berbentuk pemukulan atau aksi menyakiti secara fisik. Tindakan seperti membentak, melecehkan, atau menghina dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak dianggap kekerasan, akibatnya kekerasan berubah menjadi kebiasaan sehari-hari. Hal ini juga terjadi karena kekerasan psikis itu susah untuk dideteksi dari luar, sebab tidak mempunyai ciri fisik seperti memar atau benjolan-benjolan di tubuh. Korban juga menganggap psikis adalah hal yang lumrah dialami oleh seorang istri[75].

Dalam kasus kekerasan fisik rumah tangga, korban cenderung tertutup dan tidak mau menceritakan masalahnya pada orang lain. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi, sehingga korban bersikap sikap diam dan bertahan. Gejala ini sejalan dengan studi Rosario[76], bahwa perempuan kerap menjadi korban kekerasan karena adanya perasaan rendah diri, tidak bisa mengambil keputusan, janji-janji dari pasangannya untuk berubah, atau tidak memukul lagi, ketakutan bahwa pelaku juga akan melukai anak-anak mereka, anak akan diambil alih, melakukan demi anak, dianggap tidak memiliki alasan cukup untuk bercerai, dan pihak orang tua akan menyalahkan mereka jika terjadi perceraian. Kekerasan dirasionalkan sebagai ketidakmampuan perempuan mengakhiri perlakuan kasar dari pelaku yang berkaitan dengan perilaku perempuan yaitu[77].

- Istri masih mencintai suami atau pasangannya;
- Perempuan tidak berhak marah karena dianggap bereaksi berlebihan;

73 Responden yang diteliti dalam penelitian Niken Sitoresmi dan Siti Amanah mayoritas berpendidikan lulus SMA (47%)

74 Rr. Niken Sitoresmi dan Siti Amanah. Pendampingan Perempuan Korban Tindak Kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) . ISSN : 2305-7517. Vol.06 No: 03, download. Portal .downloadgaruda.orga. Article download.portalgaruda.org/article.php?...padu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2tp2a) Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan, hal 9, diunduh 17 Juli 2108

75 Riyadi dan Jeanny Maria Fatima. Pelecehan dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Siaran Radio SPFM serta Dampaknya terhadap Perempuan Pendengar di Kota Makassar. Hal 7 http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/f969097de5cb67678374b52a35494470.pdf, akses 30 Mei 2018

76 Nama sebuah kota di Filipina, merupakan bagian dari Provinsi La Union, Filipina

77Sylvia H. Guerrero and Carolyn I. Sobritchea, The Realitation of Family Violence in The Philipina Recomendation For Change dalam Pandu, Maria, Dra, MA; Sosiologi Keluarga dan Gender , Bahan Kuliah Pasca Unhas cit in Syufri, Jurnal Akademica Fisip Untad Vol I, 2009, https://media.neliti.com/media/publications/28570-ID-perspektif-sosiologis-tentang-kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-rumah-tangga.pdf, hal 100-101, diunduh 29 Mei 2018

- Perempuan dianggap salah jika sendiri dan kesepian;
- Laki-laki memiliki banyak masalah dan hanya istri yang dapat memahami hal tersebut;
- Laki-laki (suami) dapat berubah menjadi lebih baik.

Selain alasan di atas, korban kerap memilih diam karena takut terhadap ancaman pelaku. Pelaku kadang mengancam untuk menghabisi korban, meninggalkan korban, atau mengancam orang lain di sekitar korban, sehingga korban memilih diam dan bertahan agar pelaku tidak melaksanakan ancamannya.

Sikap melawan terhadap kekerasan yang dilakukan orang dekat — khususnya pasangan — dalam penelitian ini biasanya berakhir dengan perpisahan dan bagi yang telah menikah akan memutuskan untuk bercerai.

Khusus untuk kekerasan seksual, (perkosaan dan pelecehan) informan telah memiliki pengetahuan untuk membedakannya dengan jenis kekerasan lain sehingga menimbulkan reaksi dan dampak yang berbeda pula. Kekerasan berupa pelecehan seksual[78] menimbulkan reaksi berupa sikap diam saat terjadi kekerasan, rasa malu, takut, dan terintimidasi membuat beberapa korban tidak bisa bereaksi secara spontan untuk menghentikan perlakuan pelaku. Menurut West and Turner (2007:215), dominasi laki-laki yang begitu kuat mampu menguasai kebiasaan interaksi lawan jenis, bahkan secara bawah sadar yang dikuasai dapat dengan mudah merasa patuh dan menerima begitu saja[79].

Pelecehan juga menimbulkan hal baru bagi korban, meskipun menimbulkan trauma, namun dengan sendirinya korban membentuk pola pertahanan agar tidak mengalami kembali kekerasan yang sama. Sikap yang mereka tunjukkan adalah sikap waspada dengan berperilaku hati-hati dalam berucap dan bertindak agar terhindar dari kekerasan tersebut[80].

Untuk kasus perkosaan dampaknya lebih terasa terhadap korban dan menimbulkan berbagai reaksi. Reaksi diam korban saat terjadi dan setelah pemerkosaan adalah kombinasi berbagai emosi yang dapat memengaruhi psikologi korban sehingga mengalami stres jangka pendek (langsung terjadi) seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu,

78Setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan tertentu yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai atau tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif (M.Marwan dan Jimmy P. 2009. Op.Cit.,hal 494

79West, Richard & Turner, Lynn H. (2007). Introducing Communication Theory: Analysis and Application. Nw York :McGraw-Hill cit in Pelecehan Seksual : Maskulinisasi Identitas pada Mahasiswi Jurusan Teknik Elektro Undip. http://download.portalgaruda.org/article.php?article=73248&val=4687 diunduh 25 Juli 2018 Hal 11

80 Ibid

marah, dan tidak berdaya. Dapat juga menyebabkan stres jangka panjang (setelah pemerkosaan), yaitu trauma sehingga korban kurang percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan[81].

Sikap melawan korban terhadap berbagai jenis kekerasan yang menimpa akan timbul bila korban merasa terancam harga diri dan jiwanya. Reaksi seperti membalas dengan kemarahan, menepis pelaku, dan berteriak adalah reaksi spontan yang keluar begitu saja saat kekerasan berlangsung dan dapat menghentikan kekerasan tersebut untuk sementara atau selamanya.

Deskripsi tersebut sejalan dengan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Hairani Siregar (2015) yang menyatakan bahwa persepsi (tanggapan/penerimaan) perempuan tentang masalah kekerasan sangat dipengaruhi oleh apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan dan akan memengaruhi perilaku atau sikap perempuan atas masalah kekerasan tersebut. Oleh karena itu responden memiliki persepsi yang bervariasi terhadap kekerasan[82].

Pengetahuan tentang adanya aturan yang melindungi perempuan dari kekerasan juga dipengaruhi tingkat akses perempuan terhadap lembaga pengaduan yang masih rendah. Data pengaduan yang masuk ke Dinas PPPA menggambarkan bahwa perempuan korban kekerasan yang mengadukan masalahnya sebagian besar berasal dari Kecamatan Turikale (Ibu Kota Kabupaten Maros) yang relatif lebih dekat dengan lembaga yang bersangkutan. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang isu kekerasan terhadap perempuan —yang baru dimulai pada tahun 2014— juga punya andil terhadap gejala ini. Hal ini sejalan dengan jawaban para informan yang bertempat tinggal jauh dari pusat kota Kabupaten Maros yaitu Kecamatan Bontoa dan Tompobulu, yang mengatakan bahwa di tempatnya tinggal tidak ada tempat pengaduan bagi perempuan yang mengalami kekerasan.

Korban yang mengaku tidak mengetahui tentang adanya perlindungan perempuan dari kekerasan berasal dari informan dengan pendidikan yang beragam (SD, SMA, dan PT). Hal ini berarti ketidaktahuan perempuan tentang hal tersebut bukan disebabkan oleh pendidikan, melainkan dari

81 Ekandari, Mustaqfirin dan Faturohman. Jurnal Psikologi 2001, No. 1, 1-18 https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7011/5463. Perkosaan, Dampak dan Alternatif Penyembuhannya, hal. 1, diunduh 21 Juli 2018

82Hairani Siregar. Loc.Cit., hal 17

informasi tentang topik yang ditanyakan. Di Kabupaten Maros sendiri, isu perlindungan perempuan dari kekerasan baru gencar terdengar dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan yang mengatur keberadaan lembaga yang berwenang menangani tentang perlindungan perempuan. Pada tahun 2014 pemerintah Kabupaten Maros memfasilitasi kegiatan sosialisasi Pencegahan Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak[83].

Pengetahuan tentang aturan yang melindungi perempuan dari kekerasan ternyata bukan hanya kurang dimiliki oleh korban, tapi juga oleh pelaku. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa kebanyakan pelaku, khususnya pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), merasa bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah kekerasan, melainkan didasari oleh posisi mereka yang berada di atas korban. Hal ini sejalan dengan pernyataan tentang kekerasan dalam konteks yang lebih sempit, yaitu kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena faktor dukungan sosial dan kultur (budaya) di mana istri dipersepsikan orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal tersebut muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri harus nurut kata suami, bila istri mendebat suami, dipukul[84]. Begitu pula dengan anak perempuan, menurut Lusia Palulungan, dkk (2017), di dalam keluarga, perempuan harus turut dan patuh pada keputusan ayah dan keluarga besar (terdiri dari laki-laki) jika ia dijodohkan. Ayah dan keluarga besar menempatkan anak-anak perempuan sebagai barang properti yang bisa ditawarkan kepada siapa yang bisa membeli[85].

Dari jenis pekerjaan diperoleh fakta bahwa perempuan yang bekerja di sektor informal seperti ibu rumah tangga, penjahit, penjual, dan sejenisnya, cenderung lebih banyak mengalami kekerasan dibanding dengan pekerja formal seperti Pegawai Negeri Sipil, staf notaris, dan pekerja kantoran lain. Hal tersebut disebabkan karena mereka bersikap tegas dengan memilih jalan berpisah, tidak adanya ketergantungan ekonomi pada pasangan yang menjadi pelaku kekerasan, dan posisi mereka yang lebih dihormati masyarakat menyebabkan perempuan pekerja formal memiliki kekuatan dan resistensi dari kekerasan.

83Surat Keputusan Bupati No : 1063/KPTS/300/VII/2014 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Pencegahan Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Maros

84 B. Rudi Harnoko. Loc.Cit., hal 186

85 Lusia Palulungan, M.Ghufran. H. Kordi dan Taufan Ramli. Loc.Cit., hal 120

Pendidikan, pengetahuan, dan pekerjaan perempuan korban kekerasan merupakan rangkaian keadaan korban yang berkaitan satu sama lain. Rendahnya tingkat pendidikan memengaruhi akses pengetahuan terhadap berbagai hal, khususnya kekerasan terhadap perempuan.

5.1.2 Reaksi terhadap Perilaku Kekerasan

Reaksi keluarga dalam penelitian terdiri atas dua yaitu positif dan negatif. Reaksi positif adalah tanggapan berupa kesediaan keluarga untuk mendengar, lalu menerima pengaduan korban dan bertindak dengan tindakan yang mencerminkan keberpihakan mereka pada korban, sikap simpati, dan menerima keadaan korban. Beberapa korban kekerasan mengalami reaksi berupa tindakan keluarga menghadapi pelaku, membela korban, mendampingi korban, membiayai korban, dan menerima korban kembali seperti saat kekerasan belum terjadi. Sikap ini terjadi karena adanya ikatan emosi dan naluri melindungi dari keluarga terhadap korban. Sikap tersebut dengan sendirinya dapat membantu memulihkan korban menjadi lebih kuat dan mampu menata hidup pascakekerasan. Karena perhatian yang tulus serta empati yang ditunjukkan keluarga korban terhadap masalah yang dialami membuat korban merasa masih berharga. Perasaan tersebut membuat korban memiliki dorongan dan semangat untuk bangkit lagi dan meneruskan kehidupannya seperti semula[86]. Lebih jauh, dalam penelitian ini ditemukan bahwa kasus perkosaan yang telah berlangsung dalam waktu lama akhirnya terungkap karena dipergoki oleh keluarga yang kemudian melaporkannya pada pihak berwajib[87].

Reaksi negatif keluarga adalah tanggapan berupa sikap antipati terhadap keadaan korban dan kekerasan yang menimpanya, pelecehan terhadap keadaan korban, atau menghina dan mengucilkan korban saat korban menceritakan kekerasan yang dialami. Pelecehan seksual yang ditanggapi keluarga korban dengan pengucilan terjadi karena korban dianggap sebagai aib bagi keluarga, mencoreng nama baik keluarga, dan dianggap tidak bisa menjaga diri.

Kekerasan dalam rumah tangga akan ditanggapi dengan menyalahkan korban, menganggap korban sebagai biang dari kekerasan yang dialaminya, istri yang tidak becus, dan cap-cap lain yang membuat korban terpuruk. Keluarga beberapa korban membenarkan pelaku dan mendukung apa yang dilakukan pelaku, menyalahkan dan mengucilkan

86Ekandari, Mustaqfirin dan Faturochman. Op.Cit,.hal 17

87Kasus perkosaan terhadap M alias Mg oleh ayah kandungnya dan kasus pelaku Ir terhadap kekasihnya yang masih di bawah umur.

korban, pembenaran bahwa perlakuan kasar dan pengabaian dari suami merupakan sikap yang wajar dilakukan laki-laki (dominan) terhadap perempuan (submisif)[88]. Hal tersebut sejalan dengan budaya patriakhal, yaitu menempatkan laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan dan mengakui superioritas laki-laki di atas perempuan. Sebagai kepala keluarga, laki-laki mempunyai otoritas yang besar dalam pengambilan keputusan dalam keluarga (domestik) serta berperan dalam kehidupan sosial (publik), sehingga dibenarkan apabila laki-laki (suami) mengontrol perempuan (istri) dengan alasan mendidik atau alasan lain yang bersifat apologik bahkan melakukan tindakan represif seperti pemukulan[89].

Untuk kasus kekerasan yang terjadi di tempat umum, masyarakat[90] akan segera melakukan tindakan jika ada reaksi dari korban seperti berteriak atau bertemu korban setelah kekerasan[91]. Reaksi tersebut adalah reaksi spontan.

Dari reaksi-reaksi masyarakat di atas, dapat diketahui bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya pelecehan di tempat umum, bukan menjadi kasus privat korban semata, tapi biasanya terungkap dan terhenti karena campur tangan masyarakat yang melihat, apalagi jika korban bereaksi dengan meminta tolong. Berbeda halnya dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di mana tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang seringkali terjadi pada perempuan di balik pintu tertutup[92]. Di sini reaksi masyarakat beragam, ada yang bersedia menolong, tapi ada juga yang tidak mau turut campur karena menganggapnya sebagai masalah pribadi, meskipun sudah membahayakan jiwa korban. Selain itu, ancaman pelaku menjadi ketakutan tersendiri, kekhawatiran bahwa kekerasan pelaku akan merambat pada diri dan keluarga mereka membuat masyarakat menutup diri dari turut campur terhadap KDRT yang menimpa perempuan di sekitarnya[93].

Tanpa disadari sikap masyarakat tersebut berlawanan dengan beberapa pendapat tokoh yang mewakili mereka dalam penelitian ini yang

---

88Istilah ini populer pada film Fifty Shades of Grey yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, dimana tokohnya yaitu Christian Grey berperan sebagai dominan dan Anna Steele sebagai submisif yang tunduk patuh pada kekerasan yang dilakukan Christian

89B. Rudi Harnoko. Loc.Cit., hal 186

90Masyarakat dalam penelitian ini adalah orang-orang di sekitar korban kekerasan yang mengenal korban atau tidak mengenal korban dan tidak memiliki hubungan darah dengan korban. Hal yang dikaji adalah reaksi mereka terhadap kekerasan yang terjadi terhadap korban

91Korban perkosaan dari pelaku Rif yang ditemukan oleh pengemudi bentor setelah dirampok dan diperkosa Rif, yang kemudian mengantarkan korban untuk melapor pada polisi

92B. Rudi Harnoko, Loc.Cit, .hal 182

93Pelaku KDRT kerap mengancam orang-orang di sekitarnya akan melakukan tindakan kekerasan berupa perampokan, pembunuhan dan ancaman kriminal lain, khususnya kasus Her dan Sul (lihat Hasil Penelitian)

menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk yang seharusnya dilindungi dan dihargai. Pendapat ini sepertinya tidak selalu terwujud dalam bentuk tindakan nyata agar perempuan dapat dilindungi dari kekerasan.

Reaksi *stakeholder*[94] berkaitan erat dengan kecenderungan korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Semakin tinggi tingkat kesadaran korban untuk mengadukan kekerasan, semakin besar peluang *stakeholder* dalam melakukan pelayanan, penanganan, dan pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Beberapa kasus yang masuk dalam penanganan *stakeholder* khususnya di tingkat akhir (pengadilan agama dan pengadilan negeri) terjadi fluktuasi pada beberapa jenis perkara dan kasus yang ditangani. Peningkatan jumlah kasus terjadi bukan semata-mata karena peningkatan jumlah perilaku kekerasan, tapi juga karena kesadaran korban dalam melakukan pelaporan tentang kasus yang mereka alami. Sementara itu penurunan jumlah kasus yang ditangani dimungkinkan terjadi karena ketidakberanian korban melaporkan kekerasan yang mereka alami dan timbulnya efek jera bagi pelaku; calon pelaku sudah mengetahui tentang aturan, adanya lembaga yang melindungi perempuan, dan adanya sanksi bagi pelaku sehingga tidak berani melakukan kekerasan. Terdapat juga beberapa kasus yang berakhir dengan perdamaian hingga tidak berlanjut di pengadilan negeri.

Sejauh ini pihak *stakeholder* telah melakukan berbagai penanganan dalam memulihkan kondisi fisik dan psikis korban setelah kekerasan, mengupayakan keadilan bagi korban, dan mengenakan sanksi bagi pelaku.

Pihak *stakeholder* memegang peranan penting dalam penanganan dan perlindungan perempuan dari kekerasan juga pencegahannya, hingga perlu diterapkan suatu aturan daerah yang berfokus pada penanganan, perlindungan perempuan, dan pencegahan kekerasan, seperti yang telah diterapkan daerah-daerah lain selain Kabupaten Maros.

Dalam menyikapi kekerasan terhadap perempuan, reaksi korban, keluarga, masyarakat dan *stakeholder* berkaitan satu sama lain. Reaksi korban dalam penelitian ini terjadi karena persepsi korban terhadap kekerasan dan adanya kecemasan serta harapan pada reaksi elemen[95] di sekitarnya.

94Dalam penelitian ini, *stakeholder* yang dimaksud adalah pelayan publik yang menangani perempuan korban kekerasan seperti Dinas PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Rumah Sakit dan Puskesmas. Lembaga yang menangani pelaku yaitu Polres dan Lapas Maros, adapun penanganan perkara oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

95 Keluarga, masyarakat dan *stakeholder*

Harapan bahwa elemen tersebut akan bereaksi positif[96] dan kecemasan bahwa elemen tersebut akan bereaksi negatif [97] . Reaksi keluarga, masyarakat, dan *stakeholder* bergantung pada reaksi korban terhadap kekerasan. Sikap tertutup akan menyulitkan tiga elemen tersebut bertindak sesuai dengan harapan korban, khususnya keluarga. Perlu adanya sikap terbuka dengan cara mengadu hingga tahap melapor yang membuka ruang bagi masyarakat dan *stakeholder* mengatasi masalah kekerasan.

Reaksi masyarakat bergantung pada reaksi korban, khususnya pada kekerasan yang terjadi di tempat umum. Tindakan spontan dari korban saat terjadi kekerasan akan memengaruhi reaksi masyarakat berupa pembelaan dan perlindungan terhadap korban. Selain reaksi korban, dalam penelitian ini reaksi *stakeholder* terjadi karena adanya reaksi positif dari keluarga dan masyarakat dalam menanggapi kekerasan terhadap perempuan.

5.1.3 Penyebab Terjadinya Kekerasan

Penyebab terjadinya kekerasan dalam penelitian ini adalah hal yang menyebabkan perempuan mengalami kekerasan, yaitu <u>pemicu dari korban, keadaan korban, orang ketiga, faktor ekonomi, dan niat pelaku.</u>

Dalam penelitian ini ditemukan empat sikap korban yang dianggap pemicu: tidak memperhatikan apa yang dikatakan pelaku[98], tidak becus dalam bekerja, lancang sebagai anak, dan pengabaian terhadap pelaku sebagai suami[99].

Kekerasan pada perilaku korban di atas merupakan reaksi pelaku terhadap aksi korban yang dianggap mengganggu pelaku atau tidak menghargai pelaku. Hubungan antara suami dan istri, atasan bawahan, atau guru dan murid dianggap sebagai hubungan vertikal, sehingga objek yang berada di bawah wajib mematuhi bagian atas. Khususnya dalam perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sebagai tindakan yang paling efektif dan ampuh untuk mengakhiri konflik antar-pasangan, atau secara psikologis sebagai bentuk komunikasi dengan cara pemberian sugesti untuk melemahkan mental pasangan, (Triana Sofiani, 2008) sehingga menjadi patuh atau menurut apa kata pelaku.

---

96 Berpihak, melindungi dan membela

97 Antipati, mengabaikan dan menyalahkan

98Kasus pemukulan oleh guru terhadap murid yang dianggap tidak memperhatikan pelajaran

99Korban dianggap lebih peduli pada orang tua dibanding suami (pelaku)

Beberapa perempuan juga mengalami kekerasan karena perbedaan keyakinan dan keadaan korban dengan pelaku[100]. Peristiwa yang dialami keluarga korban seperti batal menikah dan rendahnya tingkat pendidikan dibanding dengan tetangga korban menjadikan korban sebagai objek kekerasan bagi sekitarnya.

Semua korban ini adalah mereka yang dianggap berbeda dari pelaku atau keadaannya dianggap sebagai hal yang memalukan bagi pelaku di sekitarnya, sehingga dijadikan sasaran kekerasan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan bisa berasal dari kaum perempuan sendiri karena dianggap tidak bisa berperan menjadi "apa" yang diinginkan oleh lingkungannya. Padahal, apa yang menjadi kondisi korban seharusnya tidak mengurangi hak-haknya dalam bergaul dengan lingkungan sekitarnya.

Kehadiran orang ketiga kerap menggantikan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku dan menyebabkan korban dijadikan sasaran tindakan negatif dari pelaku. Keberpihakan pelaku pada orang ketiga meletakkan pelaku sebagai lawan bagi korbannya agar pelaku dapat melakukan pembelaan dan perlindungan kepada orang ketiga.

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam pernikahan, pelaku seringkali menjadikan istri atau anak sebagai sasaran kekerasan dalam rumah tangga. Selain kekerasan fisik, faktor ekonomi juga mendorong suami atau ayah menjadi pelaku kekerasan psikis berupa pengabaian dan penelantaran rumah tangga. Faktor ekonomi berkaitan erat dengan pekerjaan pelaku —suami dengan pekerjaan yang tidak memiliki kepastian pendapatan[101] cenderung menjadi pelaku kekerasan, sedangkan suami yang memiliki pekerjaan dengan pendapatan tetap[102] cenderung berperilaku sebaliknya.

Pelaku juga melakukan kekerasan dengan 'niat' yang beragam: ada yang berniat mendidik karena korban dianggap kerap membangkang dari perintah pelaku hingga berujung pemukulan. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi dikarenakan keyakinan dalam masyarakat berupa adanya budaya dominasi, di mana laki-laki adalah superior dan perempuan inferior, sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Di samping

100Pada korban Mal yang cacat pada sebelah matanya, menimbulkan perundungan dari teman-teman kerjanya

101Buruh, wiraswasta, petani, pemulung, dll

102Koki, Security, Office Boy, PNS

itu, terdapat interpretasi yang keliru terhadap stereotip gender yang tersosialisasi dalam masyarakat kita yang menganggap bahwa perempuan lemah, perayu, dan penggoda[103], sedangkan laki-laki kuat.

Selain karena berniat "mendidik", niat pelaku melakukan kekerasan terjadi karena ritual ilmu dan di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Ritual ilmu adalah salah satu dalih pelaku kekerasan yang kerap dilontarkan jika pelaku sudah tertangkap dan menjalani proses hukum atau saat melakukan kekerasan[104]. Sementara itu obat-obatan dan alkohol juga kerap dituding pelaku sebagai penyebab mereka melakukan kekerasan.

Penyebab kekerasan yang disebutkan di atas saling memengaruhi satu sama lain. Pemicu dari korban serta didasari niat dari pelaku berupa mendidik dan menguasai korban yang diimplementasikan dalam bentuk kekerasan. Orang ketiga dan faktor ekonomi adalah penyebab yang hadir karena perilaku kekerasan. Pelaku yang lain berupa perselingkuhan dan sikap tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga[105], sedangkan keadaan korban dalam penelitian ini terjadi karena pandangan masyarakat yang cenderung menolak perbedaan[106], kecenderungan dalam melakukan perundungan[107], dan stigma dalam memandang perempuan secara ideal[108].

5.1.4 Jenis Kekerasan, Pelaku dan Tempat Terjadinya Kekerasan

Hasil penelitian menemukan bahwa jenis kekerasan yang terjadi di Kabupaten Maros terdiri atas 3 (tiga) jenis kekerasan yaitu fisik, psikis, dan seksual.

Jenis kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan psikis dalam bentuk pengabaian nafkah, perselingkuhan, dan bentakan yang dilakukan oleh orang dekat korban yaitu suami yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Bentuk kekerasan psikis lainnya terjadi dalam bentuk pengucilan dan penghinaan yang dilakukan oleh kerabat dekat korban yang dilakukan dalam lingkungan tetangga, perampasan hak oleh kerabat korban, dan juga

---

103B. Rudi Harnoko, Loc. Cit,.hal 186

104Kasus Dukun As yang fenomenal beberapa puluh tahun lalu

105 Sikap malas, cuek dan lebih peduli pada binatang peliharaan daripada anak dan istri

106 Berhubungan dengan SARA

107 Perundungan dilakukan pada mereka yang memiliki kekurangan fisik (disabilitas) atau bersikap berbeda dari kondisi di sekitarnya, misalnya kutu buku, yang dianggap tidak bisa bergaul.

108 Batalnya lamaran dalam rencana pernikahan kerap dihubungkan dengan kondisi perempuan yang batal menikah, padahal batalnya pernikahan bisa saja terjadi karena banyak hal, seperti tidak adanya kata sepakat dari kedua belah pihak, begitu pula dengan korban pelecehan mereka biasanya dituding sebagai perempuan kotor dan tak bisa menjaga diri.

perundungan yang dilakukan teman sekolah, rekan kerja, atau majikan korban di tempat kerja.

Kekerasan fisik terjadi dalam bentuk menyakiti fisik dengan menggunakan tangan dan senjata. Hal ini dilakukan oleh orang dekat korban berupa orang tua dan suami korban di lingkungan rumah tangga. Di lingkungan sekolah juga ditemukan kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan oleh guru terhadap korban.

Kekerasan seksual terjadi dalam bentuk perkosaan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung korban. Perkosaan juga dapat terjadi di jalan yang dilakukan oleh orang asing yang diawali dengan perampokan. Bentuk kekerasan seksual lainnya terjadi dalam bentuk pelecehan seksual berupa colekan dan rabaan oleh orang asing yang dilakukan di tempat umum atau angkutan umum. Bentuk lain terjadi dalam bentuk ajakan pergi ke tempat tertentu yang dilakukan oleh majikan korban di tempat kerja.

Dominasi kekerasan psikis dalam penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hairani Siregar (2015) yang menemukan bahwa kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh kekerasan seksual dibanding dengan jenis kekerasan lainnya[109]. Tindakan-tindakan psikis berkaitan dengan komunikasi antara korban dan pelaku. Pembicaraan biasa yang diwarnai dengan perbedaan pendapat dan akhirnya berakhir menjadi pertengkaran adalah hal yang kerap terjadi dalam lingkungan rumah tangga, juga karena kekurangan dan perbedaan korban dengan pelaku[110].

Pelaku yang mendominasi dalam penelitian ini adalah orang dekat korban berupa suami korban. Hal ini sejalan dengan dominasi rumah sebagai tempat terjadinya kekerasan; karena tinggal dalam satu atap, terjadi hubungan yang dekat dan pertemuan yang sering terjadi menimbulkan gesekan, sehingga berakhir pada kekerasan. Juga adanya paham bahwa suami lebih berkuasa daripada istri menjadikan suami cenderung melakukan kekerasan terhadap istri. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Misriyani Hartati (2013) bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar yang melapor adalah ibu

109 Hairani Siregar. Loc.Cit., hal 17

110 Lihat bagian penyebab kekerasan

rumah tangga dan sebagian besar pelakunya adalah suami korban sendiri[111].

5.1.5 Penyebaran Kekerasan di Kabupaten Maros

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan yang dengan persentase tinggi terjadi di Kecamatan Maros Baru, Tanralili, dan Marusu, sedangkan penyebaran kekerasan menunjukkan bahwa kecamatan Marusu, Mandai, Maros Baru, dan Tanralili adalah kecamatan dengan penyebaran kekerasan yang lebih tinggi dibanding kecamatan lainnya. Berbeda dengan data pelapor yang tercatat di Dinas P3A yaitu alamat perempuan korban kekerasan paling banyak berasal dari Turikale (pusat kota kabupaten Maros). Hal ini menunjukkan bahwa pelapor berasal dari kecamatan yang dekat dengan pusat pelayanan perlindungan perempuan, walaupun dari kecamatan lain banyak korban kekerasan yang belum atau tidak melaporkan dan mengadukan kekerasan yang dialaminya. Korban yang belum melaporkan kekerasan merupakan kasus tersembunyi yang membutuhkan penanganan dari berbagai pihak khususnya lembaga pemerintahan yang berwenang. Selain itu dibutuhkan langkah-langkah yang optimal sehingga kasus kekerasan bukan hanya ditangani melainkan juga dilakukan dalam bentuk perlindungan perempuan dan tindakan berupa pencegahan kekerasan.

5.2 Kesimpulan

Perilaku kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Maros terjadi pada perempuan dengan berbagai status, namun yang paling banyak mengalami adalah perempuan dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, perempuan dengan tingkat pengetahuan tentang kekerasan yang terbatas, dan perempuan yang bekerja pada sektor informal seperti ibu rumah tangga. Perilaku kekerasan juga dialami dalam berbagai usia dan posisi (anak, istri, murid, pekerja, kerabat, dan menantu). Hal ini berkaitan dengan penyebab kekerasan yang menimpa perempuan yaitu posisi korban yang lebih rendah daripada pelaku, sikap korban, keadaan korban yang berbeda dengan pelaku, keadaan ekonomi, orang ketiga, niat pelaku yang menganggap korban perlu dididik dan dibina dengan menggunakan kekerasan, pandangan masyarakat yang masih bersifat patriarki (menganggap laki-laki memiliki kekuasaan terhadap perempuan), dan

111 Misriyani Hartati, Op.Cit.,hal 1105

rendahnya pengetahuan pelaku tentang adanya perlindungan perempuan dari kekerasan.

Jenis kekerasan yang menimpa perempuan di Kabupaten Maros terdiri atas berbagai jenis yaitu fisik dalam bentuk pemukulan/melukai fisik, psikis dalam bentuk pengabaian nafkah keluarga, pengucilan, perselingkuhan, pengancaman, caci maki, juga bentakan, dan jenis kekerasan seksual berupa pelecehan dan perkosaan dan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan psikis.

Pelaku kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Maros dilakukan oleh berbagai pihak baik itu orang dekat berupa orang tua kandung (ayah kandung), suami, mertua, keluarga, kerabat, teman, pacar, majikan, guru, serta orang asing dalam bentuk perampasan harta yang berakhir pada pemerkosaan. Penelitian ini menunjukkan yang paling banyak melakukan kekerasan adalah orang terdekat yaitu suami dari korban, karena hal ini berkaitan dengan tempat terjadinya kekerasan yang paling banyak yaitu rumah. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Maros adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dampak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Maros terdiri atas beberapa reaksi yang dilakukan korban berupa sikap diam, melawan, dan melapor. Sikap diam dari korban adalah hal yang paling banyak terjadi. Selain itu reaksi lain terjadi pada keluarga dan masyarakat di sekitar korban yang berupa tindakan membantu korban (reaksi positif) atau berlaku sebaliknya (reaksi negatif) yaitu menyalahkan, mengucilkan, dan mengabaikan. Reaksi negatif yang paling banyak terjadi adalah pengabaian keluarga dan masyarakat terhadap keadaan korban.

Stakeholder yang banyak berperan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Maros adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan fungsi lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Polres Maros, rumah sakit atau puskesmas, lembaga pemasyarakatan, pengadilan negeri, dan pengadilan agama.

Peran pemerintah/*stakeholder* dalam menangani kekerasan dilakukan dalam bentuk penerimaan laporan, pelayanan, penaganan korban berupa penyembuhan trauma fisik dan psikis, penanganan pelaku berupa proses

hukum, hingga pemberian sanksi pidana. Peran pemerintah juga berkaitan dengan reaksi korban yang melaporkan atau tidak melaporkan kejadian yang dialami. Dalam penelitian ini sikap diam korban membuat reaksi pemerintah yang paling banyak ditemukan adalah bentuk pengabaian atau tidak menangani.

Dari penelitian telah diketahui tentang fenomena kekerasan terhadap perempuan khususnya penyebabnya, sehingga diharapkan dapat dijadikan landasan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Maros. Begitu pula tentang peran pemerintah yang masih terbatas pada proses penanganan korban/pelaku dan perlindungan korban, namun belum merambah pada pencegahan kekerasan itu sendiri.

Kearifan lokal dapat dipetik dari sikap masyarakat dalam menyikapi kekerasan. Sikap menolong korban dan menghentikan kekerasan merupakan cerminan perilaku kemanusiaan yang merupakan 'budaya' yang hidup di masyarakat. Memuliakan perempuan juga tercermin dari pernyataan sejumlah tokoh masyarakat Maros, meskipun hasil penelitian belum menemukan tradisi/adat istiadat yang bisa digunakan sebagai landasan dalam melindungi perempuan dari kekerasan.

5.3 Saran

a. Perlu diadakan sosialisasi yang lebih luas tentang kekerasan terhadap perempuan;
b. Pencegahan tindak kekerasan perlu dilakukan dengan penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa;
c. Perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam tentang kearifan lokal yang dapat digunakan untuk mengangkat kedudukan perempuan di Kabupaten Maros, sehingga perempuan dapat terhindar dari kekerasan;
d. Perlu adanya aturan yang jelas dan memiliki kepastian, kemanfaatan dan keadilan di tingkat daerah Kabupaten Maros untuk melindungi perempuan dari kekerasan;
e. Pemerintah perlu turut serta dalam perlindungan perempuan dari kekerasan sekaligus pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Daftar Pustaka

Buku :

Marwan, M dan P. Jimmy. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher.

Nadia, Nike. "Atas Nama Cinta: Relasi Kuasa dan Reviktimisasi pada Kasus Kekerasan Seksual dalam Pacaran (Studi Kasus Putusan Pengadilan)". *Jurnal Perempuan* Vol 23 No. 1 Februari 2018

Palulungan, L, dkk. 2017. *Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan*. Makassar: Yayasan Bakti.

Palulungan, Lusia, et al. 2017. *Mengubah dan Menginspirasi (Cerita tentang Perubahan)*. Makassar: Yayasan Bakti

Website :

Arifin, Baharuddin. *Dicabuli Ratusan Kali oleh Ayah Kandung Mg Alami Gangguan Mental* https://celebesonline.com/2017/11/20/81214/dicabuli-ratusan-kali-oleh-ayah-kandung-mg-alami-gangguan-mental/. Celebes Online, 20 November 2017, diakses 29 Mei 2018

Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. *Kabupaten Maros dalam Angka 2017*.

https://maroskab.bps.go.id/publication/2017/08/11/9244a1790743be6022aaa6a1/kabupaten-maros-dalam-angka-2017.html. diunduh 2 Januari 2018

Dr. GP Peter Hoerfnagel. https://www.parlement.com/id/vg09llp1mkz7/g_peter_hoefnagels, diakses 5 Oktober 2018

Ekandari, Mustaqfirin dan Faturochman. "Perkosaan, Dampak dan Alternatif Penyembuhannya". *Jurnal Psikologi* 2001, No. 1, 1-18 https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7011/5463. diunduh 21 Juli 2018

Harnoko, Rudi.B. “Di balik Tindak Kekerasan terhadap Perempuan”. *Muwazah*, Vol. 2 No.10 ,Juli 2010 http://download.portalgaruda.org/article, diunduh 29 Mei 2018

Hartati Misriyani. “Studi tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur))”. *E- Journal Administrasi Negara*, Volume 1, No 3, 2013:1094-1106), http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013 (09-04-13-08-50-46).pdf. diunduh 20 Mei 2018

Ismail, Ashari. 2015. *Model Kultur Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan*. Lembaga Kultivasi Localknowledge Indonesia (LKLI). 2015 dalam http://eprints .unm.ac.id/3676/1/Ashari Ismail/modelkulturpencegahankekerasan.pdf. diunduh 30 Mei 2018

John Macionis .https://www.kenyon.edu/directories/campus-directory/biography/john-macionis, diakses 28 September 2018

Kevin Dutton. https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Dutton, diakses 2 Oktober 2108

Pelecehan Seksual : Maskulinisasi Identitas pada Mahasiswi Jurusan Teknik Elektro Undip. http://download.portalgaruda.org/article.php?article=73248&val=4687 diunduh 25 Juli 2018 .

Pengertian Kekerasan pada Perempuan Bentuk Akibat dan Pemberdayaan. 2015. http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-kererasan-perempuan-bentuk.html, diakses 2 Januari 2018

Riyadi dan Fatima, J.M. *Pelecehan dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Siaran Radio SPFM serta Dampaknya terhadap Perempuan Pendengar di Kota Makassar.*http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/f969097de5cb67678374b52a35494470.pdf, akses 30 Mei 2018

Rosario, La Union. https://id.wikipedia.org/wiki/Burgos,_La_Union, diakses 6 Oktober 2018

Sakirin, Achmad. 2017. *Penembakan Dokter Letty, Puncak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Diakses dari https//kriminilogi.id/sudut-pandang/katapakar/penembakan-dokter-letty-puncak-kekerasan-terhadap-perempuan, diakses 6 Januari 2018.

Saifulloh, Muhammad. (2016). *Kasus Yuyun Bukti Kekerasan Seksual Sudah Jadi Bahaya Laten.* Diakses dari https://news.okezone.com/read/2016/05/04/337/1380438/kasus-yuyun-bukti-kekerasan-seksual-sudah-jadi-bahaya-laten, diakses 7 Januari 2018

Siregar, Hairani. "Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Kompleks Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara". Pemberdayaan Komunitas, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 14 No.1, Juni 2015, https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jurnalpemberdayaan/article/download/15717/6640. diunduh 28 Mei 2018

Sitoresmi, Niken Rr dan Amanah, Siti. *Pendampingan Perempuan Korban Tindak Kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)* .

ISSN : 2305-7517. Vol.06 No: 03, download. Portal .downloadgaruda.orga. Article *download.portalgaruda.org/article.php?...padu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2tp2a) Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan,* diunduh 17 Juli 2018

Suster Margaret Lacson. https://www.maryknollsisters.org/sisters/sister-margaret-lacson/, diakses 5 Oktober 2018

Syufri. *Perspektif Sosiologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Akdemica Fisip Untad Vol I, 2009, https://media.neliti.com/media/publications/28570-ID-*perspektif-sosiologis-tentang-kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-rumah-tangga*.pdf, diunduh 29 Mei 2018

Dokumen:

Surat Keputusan Bupati No : 1063/KPTS/300/VII/2014 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Pencegahan Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Maros .

Yayasan Amnaut Bife "Kuan" (Yabiku)

Tim peneliti:

Frederikus Kolo

Stefanus Kou

Gabriel Yustus Seran

Mendalami Faktor Penyebab Dan Proses Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Kuanek dan Desa Maubesi Kabupaten Timor Tengah Utara

Yayasan Amnaut Bife “Kuan”

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Data kasus pendampingan Yayasan Amnaut Bife “Kuan” (Yabiku-NTT) tiga tahun terakhir (2015-2017) mengungkap bahwa perempuan adalah korban tindak kekerasan dalam berbagai bentuk. Tahun 2015 terdapat 79 kasus dengan semua korbannya adalah perempuan. Tahun 2016, 120 korban dari 121 kasus tercatat adalah perempuan, sedangkan dari total 141 kasus pada tahun 2017, 140 korbannya adalah perempuan.

Ironisnya, kebanyakan kekerasan yang dialami perempuan terjadi dalam lingkup rumah tangga. Data kasus yang didampingi oleh YABIKU-NTT menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dari 79 kasus yang didampingi, 26 kasus merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pada tahun 2016 dari 121 kasus yang didampingi, 33 kasus merupakan kasus KDRT dan pada tahun 2017, dari 141 kasus yang didampingi 67 kasus merupakan kasus KDRT. Artinya, tindak kekerasan yang dialami perempuan ternyata dilakukan oleh orang-orang terdekat semisal suami, ayah, kakek, pacar, keluarga, bahkan tetangga. Orang-orang inilah yang seharusnya menjadi teman, sahabat, atau mereka yang pantas memberikan perlindungan, namun fakta berbicara lain, ternyata merekalah yang menjadi pelaku. Proses terjadinya tindak kekerasan pun tidak menunggu situasi darurat, tidak juga terjadi pada tempat yang sepi atau di malam hari, tetapi kekerasan ini muncul pada situasi apapun.

Banyaknya tindak kekerasan dalam ranah keluarga dan relasi interpersonal ini membawa tantangan tersendiri dalam penanganan kasus. Penanganan tindak kekerasan hanya dilakukan di tingkat keluarga dengan penyelesaian secara adat, karena KDRT masih dianggap urusan pribadi/keluarga yang tidak boleh diketahui orang lain dan belum dianggap sebagai tindak kriminal.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan diperkuat lagi melalui Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, setidaknya diakui persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupannya. Meskipun pengakuan atas hak maupun kewajiban antara perempuan dan laki-laki adalah setara, dalam praktik kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara masih terjadi ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki. Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara masih berpegang teguh pada mitos, dugaan atau prasangka, serta pelabelan yang bias gender menjadi salah satu pemicu terjadinya berbagai tindak kekerasan. Misalnya, perempuan hanya dianggap sebagai sebagai ibu rumah tangga yang hanya bisa merawat anak, mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, menenun di rumah, dan sebagainya. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah, mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan, dianggap sambilan sehingga kurang dihargai. Keramah-tamahan laki-laki dianggap merayu dan keramah-tamahan perempuan dianggap genit (Efi, 2015).

Kekerasan berbasis gender yang dilakukan masyarakat Timor Tengah Utara bersumber dari ketimpangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki (Kelen, 2011). Relasi kuasa yang dimaksud terjadi karena dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki yang meletakkan laki-laki pada posisi pemegang kendali atas perempuan. Konsep patriarki membagi peran sosial laki-laki (maskulinitas) dan perempuan (femininitas) ke dalam wilayah publik dan domestik secara kaku, di mana ruang publik diidentikkan dengan laki-laki, sedangkan lingkup domestik (privat) identik dengan perempuan (Kadarusma, 2005).

Kondisi ini menjadikan laki-laki memiliki kendali yang kuat atas perempuan dalam segala aktivitas yang berlangsung, baik di ruang publik maupun domestik. Ketimpangan gender ini sudah berlangsung lama dan hampir terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Sebuah realita yang masih diyakini oleh masyarakat Timor Tengah Utara sebagai sebuah bentuk kewajaran perilaku antara laki-laki dan perempuan (Yabiku NTT 2015, 2016, 2017).

Penelitian ini hendak mengurai benang kusut permasalahan terhadap perempuan sehingga menawarkan solusi sebagai upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah penyebab tindak kekerasan terhadap perempuan dan upaya yang dilakukan

serta keterlibatan dari para pihak untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya KDRT. Penelitian ini dilakukan pada lingkungan perempuan pedesaan termasuk perempuan korban tindak kekerasan di Desa Kuanek dan Desa Maubesi. Dua desa ini dipilih karena data pendampingan komunitas paralegal di dua desa ini menunjukkan bahwa dua desa ini merupakan desa dengan jumlah kasus KDRT terbanyak dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun terutama tiga tahun terakhir, terhitung tahun 2015-2017. Meskipun peneliti lebih mengerucut kepada perempuan korban tindak kekerasan, namun dalam penelitian ini diperlukan juga informasi dari perempuan secara umum maupun dari laki-laki. Tujuan pelibatan perempuan dan laki-laki secara umum adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih luas sehubungan dengan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Selain perempuan dan laki-laki secara umum, penelitian ini juga akan melibatkan para pihak untuk mendapatkan informasi terkait upaya mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan.

1.2 Pertanyaan Riset

Adapun pertanyaan yang kami gunakan dalam melakukan riset ini adalah:

1. Mengapa tindak kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi?
2. Bagaimana tindak kekerasan tersebut bisa terjadi?
3. Bagaimana penyintas dan para pihak terlibat dalam penanganan kasus dan penyelesaian kasus?

1.3 Tujuan Riset

Yabiku NTT memandang perlu untuk segera melakukan penelitian ini dengan tujuan mengungkap/menemukan faktor penyebab dan proses terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan di Desa Kuanek dan Desa Maubesi.

Lebih jauh, kontribusi/sumbangan yang ditawarkan oleh penelitian ini adalah:

1. Membantu perempuan korban tindak kekerasan mendapatkan keadilan atas permasalahan yang dihadapinya;
2. Membantu upaya penegakan hukum terhadap perempuan korban tindak kekerasan; serta

3. Mengembangkan sistem berjenjang untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagai lanjutan dari bab ini, pada bab II akan dijelaskan sudut pandang teoritis yang diketahui dari studi pustaka. Sudut pandang teoritik ini kemudian digunakan secara reflektif di sepanjang laporan penelitian mengungkap atau menemukan faktor penyebab dan proses terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan di Desa Kuanek dan Desa Maubesi.

Bab III menyajikan pendekatan penelitian, metode penelitian, dan juga strategi mengumpulkan dan menganalisis data. Di bagian ini, dijelaskan pendekatan apa yang dipilih untuk melakukan riset, bagaimana metode riset digunakan, serta bagaimana menjawab pertanyaan pertanyaan riset.

Bab IV menyajikan temuan-temuan utama penelitian. Di bagian ini, dijelaskan hasil-hasil temuan di Desa Kuanek dan Desa Maubesi, kesamaan pola KDRT di antara dua desa tersebut, faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya KDRT di Desa Kuanek sama dengan faktor dominan penyebab KDRT di Desa Maubesi, pandangan masyarakat tentang pemenuhan rasa keadilan korban dan mekanisme penanganan.

Bab V menjelaskan tentang apa yang peneliti pelajari atau dapatkan selama proses riset ini, bagaimana hal itu memperkaya riset ini atau memperkaya pemahaman kita terhadap fenomena yang diteliti, juga menerangkan butir-butir kesimpulan dari penelitian ini. Selain itu, dijelaskan pula implikasinya terhadap praktik, kebijakan, atau hal lain yang penting untuk digunakan dalam penelitian berikutnya. Bab ini juga memuat hal hal yang menjadi rekomendasi sehingga ke depan dapat dijadikan bahan advokasi.

2. Studi Pustaka

2.1 Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Perundang-undangan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU 23/2004 tentang PKDRT) Pasal 1, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ruang lingkup rumah tangga yang dimaksudkan adalah suami, istri, anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), orang orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, perwalian, termasuk juga pembantu atau orang yang bekerja dalam rumah tangga tersebut (Ata, 2009).

Penjelasan tentang kategori kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU 23/2004 PKDRT Pasal 6 tentang kekerasan fisik, Pasal 7 tentang psikis, Pasal 8 tentang kekerasan seksual, dan Pasal 9 tentang penelantaran rumah tangga. Sedangkan sehubungan dengan penanganan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tentang hak korban.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga disebutkan dalam UU 23/2004 PKDRT Pasal 5 huruf a sampai d, diikuti penjelasan pada pasal-pasal berikutnya:

1. Kekerasan fisik yang dimaksudkan adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6).
2. Kekerasan psikis yang dimaksudkan adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7).
3. Kekerasan seksual yang dimaksudkan adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan atau tujuan tertentu (Pasal 8).
4. Penelantaran rumah tangga yang dimaksudkan adalah orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, pada hal menurut hukum ia wajib untuk memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan bagi orang tersebut. Penelantaran yang dimaksudkan dengan tiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dana dan atau melarang untuk bekerja di dalam rumah atau di luar rumah sehingga korban dibawa kendali orang tersebut (Pasal 9).

Hak-hak korban yang diatur dalam UU 23/2004 PKDRT Pasal 10 antara lain:

1. Hak perlindungan oleh pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya. Perlindungan terbagi atas dua, yaitu perlindungan tetap dilakukan melalui penetapan pengadilan dan perlindungan sementara diberikan maksimal tujuh hari
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan korban
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan oleh pekerja sosial bantuan hukum kepada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
5. Pelayanan bimbingan rohani

Merujuk hal di atas yakni Bab IV UU 23/2014 PKDRT tentang Hak Korban, bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi, sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Hukum yang berpihak pada kelompok rentan dan tersubordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama ketentuan pidana yang akan dikenakan kepada pelaku. Ketentuan pidana atau denda yang diatur dalam UU 23/2004 PKDRT antara lain sebagai berikut.

1. Kekerasan fisik
    a. Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah.
    b. Jika perbuatan mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat dipidana paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah.
    c. Jika perbuatan mengakibatkan matinya korban dipidana paling lama 15 tahun atau denda 45 juta rupiah.
    d. Jika perbuatan dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari dipidana paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.

2. Kekerasan psikis
    a. Jika melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah.
    b. Jika perbuatan dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari dipidana paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 3 juta rupiah.

3. Kekerasan seksual
    a. Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual dipidana paling lama 12 tahun penjara atau denda paling banyak 36 juta rupiah.
    b. Jika memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual dipidana minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun atau denda minimal 12 juta dan paling banyak 300 juta rupiah.
    c. Jika kekerasan seksual mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengganggu daya pikir atau gangguan kejiwaan, gugur atau matinya janin dalam kandungan, tidak berfungsinya alat reproduksi dipenjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau denda minimal 25 juta maksimal 500 juta.

4. Penelantaran

    Penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga dan pembatasan atau melarang untuk bekerja yang layak di luar rumah sehingga menciptakan ketergantungan dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta.

Selain pemidanaan, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku, dan penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

2.2 Pola dan Dampak KDRT

Tindak KDRT bisa dialami oleh siapapun dan kapanpun. KDRT yang terjadi selama ini karena adanya kesenjangan sosial antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki memosisikan diri sebagai penguasa dalam keluarga

sehingga perempuan berkewajiban untuk menuruti semua tuntutan keinginan laki-laki. Selain itu, laki-laki sering menjadi pelaku kekerasan dengan membela diri atas perbuatannya yang salah menurut perempuan dan merasa tidak dihargai. Selanjutnya, mabuk minuman beralkohol dan melakukan KDRT merupakan cara yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan konflik dengan perempuan yang kemudian menjadi korban KDRT (Ramadhan, 2013).

Hal lain yang menyebabkan KDRT terus terjadi adalah ketergantungan perempuan kepada laki-laki sehubungan dengan kelangsungan hidup perempuan dan anggota keluarganya. Menurut pandangan masyarakat, selama ini perempuan hanya dianggap sebagai ibu rumah tangga karena ruang lingkup kerjanya di dalam rumah —walaupun memiliki penghasilan, hanya dianggap sebagai penghasilan tambahan. Pola lain yang menyebabkan terjadinya KDRT adalah laki-laki maupun perempuan belum siap secara fisik maupun mental untuk membina rumah tangga atau dengan kata lain menikah pada usia yang masih muda.

Selain itu, korban perempuan maupun korban laki-laki tidak mendapatkan keadilan dalam penyelesaian KDRT karena dianggap bahwa kekerasan yang dialaminya bukanlah sebagai tindak kekerasan yang serius melainkan hanya persoalan keluarga yang bisa diselesaikan melalui mediasi di tingkat keluarga. Hal ini disebabkan karena jika diselesaikan secara hukum, korban KDRT hanya bisa dikatakan sebagai saksi pelapor. Kalaupun ada alat bukti lain, korban merasa bahwa tidak bisa membiayai dirinya selama proses penanganan secara hukum. Menurut Veronika Ata (2009), budaya patriarki yang sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan menyebabkan peran gender (*gender role*) yang tidak adil. Praktik adat istiadat yang dilanggengkan melalui sosialisasi, indoktrinasi secara turun-temurun; misalnya perempuan bukan pengambil keputusan dalam keluarga dan masyarakat sehingga tidak dapat menyuarakan kebutuhan dan kepentingannya. Selain itu, penerapan *belis*[112] atau mahar yang terlampau tinggi mengakibatkan anggapan masyarakat bahwa perempuan sudah dibeli. Ada anggapan, kalau terjadi KDRT atau pemukulan, berarti pukul kerbau, sapi, emas, dan uang.

112 Belis/mahar/mas kawin merupakan salah satu bentuk penghargaan atau penerimaan pihak laki-laki kepada perempuan yang diberikan oleh laki-laki ketika menikah, biasanya berupa uang, ternak, maupun barang.

Dampak KDRT terhadap korban antara lain:

1. Dampak fisik korban seperti, lecet, patah tulang, lebam, kepala bocor, pusing, dll;
2. Dampak psikis korban seperti, cemas, gelisah, malu, rendah diri, keinginan bercerai dan gangguan jiwa;
3. Dampak terhadap kesehatan korban seperti, terganggunya organ reproduksi, mengalami pendarahan, dan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan;
4. Dampak ekonomi seperti, dililit hutang karena harus meminjam uang dari orang lain untuk biaya hidup;
5. Dampak sosial misalnya, menarik diri dari keluarga, tetangga, dan pergaulan atau untuk sementara waktu korban berhenti beraktifitas sosial seperti ibadah.

Namun demikian, kondisi ini masih terus terjadi tanpa memikirkan dampak lain terhadap anak yang merupakan bagian dari anggota keluarga. Anak yang hidup di antara keluarga yang mengalami dan melakukan tindak kekerasan dapat memaknai bahwa kejadian yang dilihat atau dialami oleh anggota keluarganya merupakan pelajaran dan proses baginya untuk memahami bahwa kekerasan merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan berkeluarga. Tim Kalyanamitra (1999) menyatakan bahwa kekerasan adalah pengalaman yang amat traumatis bagi anak-anak. KDRT yang dialami anak-anak membuat kecenderungan anak tersebut gugup, gampang cemas ketika mengalami masalah, sering ngompol, gelisah, prestasi belajarnya menurun, mudah terserang penyakit seperti sakit kepala, perut, atau asma, kejam terhadap binatang, ketika bermain sering meniru bahasa yang kasar, berperilaku agresif dan kejam, serta suka minggat dan suka melakukan pemukulan terhadap orang yang tidak ia sukai.

2.3 Penanganan KDRT

Penanganan kasus KDRT masih sering dilakukan melalui jalur mediasi keluarga. Padahal, UU 23/2004 PKDRT telah mengatur tentang penanganan korban maupun pelaku KDRT. Dalam lingkup Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Perda TTU 14/2016) yang menyatakan bahwa proses penyelesaian di tingkat keluarga dapat diselesaikan secara adat.

Pilihan penyelesaian secara adat dilatari oleh rasa ketergantungan korban terhadap pelaku. Selain itu, korban yakin bahwa proses penyelesaian secara adat mampu memberikan efek jera bagi pelaku karena pelaku mendapat sanksi berupa penyerahan hewan dan sejumlah uang serta dilakukan sumpah adat bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dalam hal proses penanganan di kepolisian, korban dianggap hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban sehingga menimbulkan kekurangan bukti untuk menindak pelaku KDRT.

Menurut Veronika Ata (2009), setiap daerah memiliki sistem hukum adat masing-masing. Ada sistem hukum adat yang melindungi perempuan dan anak, namun ada yang diskriminatif. Sistem hukum adat yang terkait perkawinan di NTT terdiri dari sistem patrilineal (garis keturunan ayah) dan matrilineal (garis keturunan ibu). Mayoritas penerapan sistem perkawinan adat di NTT adalah patrilineal, kecuali di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Ngada. Sistem hukum perkawinan patrilineal mengakibatkan hak waris berada pada laki-laki. Sebaliknya, sistem hukum perkawinan matrilineal mengakibatkan hak waris berada pada garis keturunan ibu. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan laki-laki merasa lebih berkuasa atas perempuan maupun anak.

Warga Desa Kuanek dan Desa Maubesi menganut sistem patrilineal di mana hak waris dikuasai oleh garis keturunan ayah. Hal ini kemudian berdampak pada laki-laki memiliki sifat berkuasa, baik terhadap hak waris maupun perempuan yang menjadi istrinya atau anak-anaknya. Dalam konteks penyelesaian kasus KDRT, seharusnya diselesaikan secara hukum oleh kepolisian, namun rasa tidak percaya diri dari perempuan yang ditunjang dengan saran orang lain menyebabkan perempuan lebih memilih untuk mendiamkan kasus yang dialaminya dan atau menyelesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak diketahui oleh orang lain selain pihak yang membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

KDRT bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan karena perempuan terjebak dalam lingkaran KDRT. Lingkaran kekerasan adalah pola di mana tindakan kekerasan yang tidak ditangani secara tuntas telah mengakibatkan terus terulangnya kekerasan. Dalam pola ini, korban kekerasan apakah itu anak atau pun perempuan dapat berkembang menjadi pelaku kekerasan terhadap pihak lain yang posisinya lebih lemah dari mereka (Komnas Perempuan, 2009).

3. Metodologi

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian "Mendalami Faktor Penyebab dan Proses Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Kuanek dan Desa Maubesi Kabupaten Timor Tengah Utara" ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan pada bagian studi dokumen terhadap data kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang didampingi oleh komunitas paralegal di Desa Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, dan Desa Kuanek, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Setelah studi dokumen, peneliti melanjutkan dengan melakukan seleksi kasus, bedah kasus, dan tabulasi data. Pendekatan kualitatif dilakukan pada bagian wawancara mendalam dengan penyintas dan para pihak yang terlibat dalam proses penanganan kasus KDRT untuk mendalami mekanisme penanganan dan juga bagaimana penanganan memberikan rasa adil bagi korban (CIPG-Voice, 2017).

Untuk menjawab rumusan masalah, peneliti menentukan atau membuat beberapa pertanyaan mengungkap proses terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kuanek dan Desa Maubesi. Setelah pertanyaan pertanyaan ini dibuat, proses selanjutnya adalah peneliti melakukan wawancara terhadap penyintas dan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus. Tujuan wawancara ini untuk mendapatkan informasi yang lebih detail sehubungan dengan bagaimana penyintas mendapatkan rasa keadilan dari proses penanganan kasus.

TABEL 5 METODE PENELITIAN

No	Pertanyaan	Tujuan	Metode
1	Mengapa tindak kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi?	Mendapatkan data dan informasi tentang faktor penyebab, kecenderungan, pandangan masyarakat, pandangan perempuan, pandangan laki-laki dan juga pandangan perempuan korban tindak kekerasan terhadap terjadinya tindak kekerasan yang dialami perempuan	▪ Studi dokumen data pendampingan ▪ Wawancara penyintas, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah
2	Bagaimana tindak kekerasan tersebut bisa terjadi?	Untuk mengetahui proses terjadinya kekerasan terhadap perempuan. (metodenya studi dokumen dan wawancara)	▪ Studi dokumen data pendampingan ▪ Wawancara penyintas dan para pihak
3	Bagaimana meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan? Bagaimana upaya pencegahan dan penanganannya?	Mendapatkan strategi untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan strategi penanganan perempuan korban tindak kekerasan	Wawancara DPRD, Kanit PPA, P2TP2A, Koordinator Divisi PPAKK YABIKU NTT

Sumber: Penulis

3.2 Strategi dan Instrumen Pengumpulan Data

3.2.1 Studi Dokumen untuk Bedah Kasus

Diawali dengan mengumpulkan seluruh data kasus, proses selanjutnya adalah peneliti melakukan bedah kasus untuk menemukan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lapangan wilayah sasaran penelitian. Kemudian proses peneliti melakukan tabulasi kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk mengetahui dan selanjutnya menganalisis pola KDRT, pemicu dan motif KDRT, dampak KDRT, serta mengetahui mekanisme penanganannya dan dampak penanganan terhadap korban dan pelaku. Proses *coding data* kasus yang terjadi di Desa Kuanek dilakukan pada tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018, sedangkan proses *coding* data kasus di Desa Maubesi dilakukan pada tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan 11 Juni 2018.

Proses *coding* didahului dengan mengumpulkan data kasus yang didampingi oleh paralegal komunitas di Desa Kuanek dan Desa Maubesi. Setelah peneliti mengumpulkan semua data kasus, dilanjutkan dengan proses seleksi kasus untuk memisahkan kasus KDRT dengan kasus-kasus lain. Selanjutnya peneliti melakukan bedah kasus untuk mengetahui ringkasan peristiwa kekerasan, aktor pelaku dan aktor korban, pemicu kekerasan, motif pelaku, dampak terhadap korban, terhadap keluarga, dan masyarakat, penanganan, dan bagaimana penanganan memberikan keadilan. Semua proses ini menggunakan alat bantu berupa formulir yang dibuat untuk memudahkan tahapan penelitian dengan pendekatan kuantitatif.

3.2.2 Wawancara Mendalam

Setelah melewati tahapan bedah kasus, peneliti kemudian mengidentifikasi masing-masing lima orang penyintas dari Desa Kuanek dan Desa Maubesi yang pernah mengalami tindak KDRT dengan pola KDRT yang berbeda. Selain penyintas, wawancara mendalam juga dilakukan dengan para pihak yang diyakini mampu memberikan informasi lebih detail sehubungan dengan faktor penyebab terjadinya KDRT, penanganan KDRT, dan informasi lain sehubungan dengan upaya memberikan rasa keadilan bagi korban.

Wawancara mendalam dilakukan di Desa Kuanek dan Desa Maubesi pada tanggal 11-12 Juli 2018, sedangkan wawancara dengan para pihak dilakukan pada tanggal 18-21 Juli 2018. Kegiatan ini dilakukan dengan cara

melakukan pendekatan personal terhadap sepuluh orang penyintas yang dipilih mewakili semua korban kasus KDRT yang terjadi di dua desa tersebut dan dipilih berdasarkan faktor-faktor pemicu terjadinya kasus-kasus KDRT yang didampingi oleh Paralegal Desa Kuanek dan Desa Maubesi. Tujuan dari kegiatan wawancara penyintas tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana para penyintas mendapatkan keadilan pada saat penyelesaian kasus yang dialami. Berikut profil para penyintas yang kami wawancarai. Guna melindungi privasi, dalam laporan ini, semua nama para penyintas dan pelaku disamarkan atau hanya ditulis inisialnya.

Tabel 6 Profil Narasumber Penyintas

No.	Penyintas	Keterangan	Lokasi
1.	MN (perempuan, 30 tahun)	Korban mengalami kekerasan psikis, merasa sakit hati karena perbuatan pelaku yang adalah suami selingkuh dengan perempuan lain di rumah yang digunakan untuk bekerja.	Desa Kuanek
2.	TS (perempuan, 34)	Korban mengalami kekerasan fisik sehingga merasa kesakitan karena dipukul oleh suaminya. Faktor pemicu terjadinya kekerasan tersebut adalah pelaku merasa lapar dan karena ternak ayam yang belum dikasih masuk di dalam rumah.	Desa Kuanek
3.	MS (perempuan, 38 tahun)	Korban mengalami kekerasan fisik sehingga merasa kesakitan karena dipukul oleh pelaku yang adalah saudara kandung dari korban. Faktor pemicunya adalah pelaku marah karena korban menyumpahi anak kandungnya untuk mati di rantauan.	Desa Kuanek
4.	PS (perempuan, 24 tahun)	Korban mengalami kekerasan fisik dan psikis karena korban dipukul dan dimaki oleh pelaku sehingga korban merasa kesakitan dan merasa malu dengan tetangga karena dimaki oleh pelaku. Faktor pemicunya adalah unsur dendam dan pelaku marah karena korban mengeluarkan pertanyaan yang membuat pelaku tersinggung.	Desa Kuanek
5.	EF (perempuan, 22)	Korban mengalami kekerasan fisik dan psikis sehingga korban merasa kesakitan karena dipukul suami dan merasa malu karena pelaku mengeluarkan bahasa-bahasa yang kurang baik yang berkaitan dengan orang tua korban. Faktor pemicunya adalah pelaku tidak mau untuk membagikan nasi bungkus untuk anaknya.	Desa Kuanek
6.	MS (perempuan, 45 tahun)	Korban mengalami kekerasan fisik dan psikis sehingga pada akhirnya korban merasa kesakitan karena dipukul dan merasa ketakutan karena dikejar oleh pelaku dengan menggunakan parang untuk dipotong. Faktor pemicunya adalah tekanan ekonomi dalam hal ini disuruh pelaku untuk mencari pinjaman uang untuk bayar uang sekolah anak akan tetapi tidak dapat sehingga terjadi persoalan tersebut.	Desa Maubesi
7.	DN (perempuan, 32)	Korban mengalami kekerasan fisik sehingga korban merasa kesakitan karena dipukul pelaku yang merupakan saudara kandungnya. Faktor pemicunya pelaku merasa malu dan ada unsur dendam terhadap korban karena korban sudah memiliki 6 orang anak dari laki-laki yang berbeda.	Desa Maubesi
8.	YL (perempuan, 38 tahun)	Korban mengalami kekerasan psikis sehingga korban merasa sakit hati karena pelaku memiliki istri simpanan/ selingkuh. Faktor pemicunya adalah pelaku selama ini bekerja sebagai sopir Bus Atambua-Kupang sehingga jarang pulang ke rumah sehingga setelah dicari tau oleh korban ternyata pelaku juga memiliki istri simpanan.	Desa Maubesi

Sumber: Penulis

Untuk mendalami informasi tentang proses terjadinya KDRT dan bagaimana penanganannya, terlebih dahulu peneliti membuat daftar nama-nama narasumber yang akan diwawancarai dan menyiapkan panduan wawancara untuk digunakan pada saat wawancara para narasumber. Disepakati bahwa narasumber yang akan diwawancarai adalah lima orang narasumber yang terlibat secara langsung dalam penanganan KDRT, yakni Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Polres Kabupaten Timor Tengah Utara, Kepala P2TP2A, Koordinator Divisi Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dari Yabiku-NTT, Romo Servasius Naben, Pr dari Paroki Maubesi, dan Daniel Afu Usfinit yang merupakan seorang tokoh adat dari Desa Maubesi, serta satu orang narasumber yang tidak secara langsung terlibat dalam proses penanganan KDRT, yakni Maria Filiana Tahu, S.Sos, M.Hum yang merupakan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara.

Proses wawancara diawali dengan pemberitahuan kepada narasumber dalam bentuk surat dua hari sebelum waktu wawancara. Maksud dari pemberitahuan ini supaya narasumber dapat menyediakan waktunya. Wawancara dengan para pihak ini dilakukan selama empat hari terhitung tanggal 18 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018. Berikut adalah gambaran narasumber dan lokasi wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

TABEL 7 PROFIL NARASUMBER DARI BERBAGAI PIHAK

No.	Nama Narasumber	Keterangan	Lokasi
1.	Maria Filiana Tahu. S.Sos.M. Hum	Ketua Komisi C DPRD Kabupaten TTU	Kefamenanu
2.	Arsy Kartiningsih/ BRIGPOL NRD 87040634	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLRES TTU	Kefamenanu
3.	Damasus Wahang	Ketua P2TP2A Kabupaten TTU	Kefamenanu
4.	Frida Ikun	Koordinator Divisi Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan YABIKU NTT	Kefamenanu
5.	Romo Servasius Naben, Pr	Pastor Paroki Maubesi	Desa Maubesi
6.	Daniel Afu Usfinit	Tokoh Adat Desa Maubesi	Desa Maubesi

Sumber: Penulis

Setelah melakukan wawancara mendalam bersama dengan para pihak yang namanya tercantum di atas, peneliti mendapatkan informasi sehubungan dengan mengapa KDRT masih terus terjadi dan cenderung meningkat, apa saja faktor dominan yang menyebabkan KDRT terus terjadi, bagaimana peran para pihak dalam penanganan kasus KDRT, bentuk kerjasama dengan pihak lain, efektivitas penanganan KDRT, efektivitas

regulasi peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan perlindungan anak, serta bagaimana seharusnya KDRT dapat ditangani dan bagaimana seharusnya KDRT dapat dicegah.

3.3 Batasan

Seperti yang diuraikan di atas bahwa penelitian ini hanya fokus pada tindak KDRT yang terjadi di Desa Kuanek Kecamatan Bikomi Tengah dan Desa Maubesi Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara sepanjang tahun 2015-2017. Dua lokasi ini dipilih sebagai lokasi riset karena sesuai data pendampingan kasus yang didampingi oleh Yabiku-NTT dan komunitas paralegal, jumlah kasus yang terjadi di dua lokasi ini paling tinggi dibandingkan dengan lokasi lain. Pelaksanaan penelitian seharusnya dimulai sejak bulan Maret 2018. Akan tetapi, penelitian baru bisa dilakukan pada minggu kedua bulan Juni dikarenakan catatan detail kronologi kasus tidak tersedia di Desa Maubesi.

4. Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Kuanek dan Desa Maubesi

Lokasi penelitian ini adalah dua desa di Kabupaten Timor Tengah Utara, yakni Desa Kuanek dan Desa Maubesi. Dua desa ini dipilih lantaran data kasus pendampingan Komunitas Paralegal menunjukkan bahwa dua desa ini merupakan desa dengan jumlah kasus KDRT tertinggi dalam kurun tiga tahun terakhir (2015-2017). Studi kasus KDRT di dua desa tersebut menunjukkan bahwa jumlah korban KDRT masih ada dan fluktuatif, bahkan di Desa Maubesi kasusnya cenderung meningkat. Beberapa faktor pemicu terjadinya KDRT di dua desa dimaksud di antaranya: dendam, cemburu, tekanan ekonomi, dan perampasan harta orang tua. Terjadinya kasus KDRT dengan beberapa faktor pemicu tadi menunjukkan bahwa masyarakat belum mengelola pengetahuannya secara baik, sehingga tindak kekerasan pun tidak terelakkan.

Dalam penelitian ini juga dijumpai fakta bahwa tindak kekerasan lebih banyak terjadi dalam ranah rumah tangga serta kebanyakan terjadi pada pagi dan sore hari, dengan pelakunya adalah suami, istri, dan juga saudara laki-laki. Setelah mengetahui lokasi kejadian kasus, waktu kejadian, dan aktor pelaku, maka peneliti berpendapat bahwa kesenjangan kuasa antara pelaku dan korban masih mewarnai kehidupan rumah tangga di Desa

Kuanek dan Desa Maubesi. Situasi ini memperkuat dugaan bahwa praktik budaya patriarki melanggengkan egoisme laki-laki dalam relasi keluarga.

Pemahaman akan penyebab dan proses terjadinya KDRT dapat membantu para pihak terkait merumuskan strategi yang lebih relevan (tepat sasaran) untuk menghapus kekerasan berbasis gender, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara.

4.1 Studi Kasus KDRT di Desa Kuanek

4.1.1 Gambaran Umum Desa Kuanek

Pada mulanya sebelum Desa Kuanek terbentuk, desa ini masih termasuk dalam wilayah Swapraja Miomaffo yang terdiri dari delapan *kefetoran* (wilayah yang dipimpin oleh raja) yakni Tunbaba, Manamas, Bikomi, Noemuti, Nilulat, Noeltoko, Naktimun, dan Aplal. Delapan *kefetoran* ini dipimpin oleh kepala swapraja bernama G. A. Kono dari tahun 1921 hingga perubahan dari pemerintahan kefetoran ke pemerintahan desa pada masa Orde Baru tahun 1968. Pada masa pemerintahan kefetoran, wilayah Desa Kuanek termasuk dalam wilayah Kefetoran Bikomi.

Saat ini, Desa Kuanek merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara yang batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Oelneke Kecamatan Musi; sebelah timur berbatasan dengan Desa Nimasi, Oenino Kecamatan Bikomi Tengah; dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Bisafe, Oeolo Kecamatan Musi. Luas wilayah Desa Kuanek sebesar 17,5 km^2 dengan topografi berbukit dan jumlah penduduk dengan 535 jiwa (154 KK) yang tersebar di delapan Rukun Tetangga (RT) dan empat Rukun Warga (RW).

Untuk menuju ke Desa Kuanek dari ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara bisa ditempuh melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat. Jarak dari Desa Kuanek ke ibu kota kabupaten 20 km. Jika ditempuh menggunakan kendaraan roda dua membutuhkan waktu 60 menit dan jika ditempuh menggunakan kendaraan roda empat membutuhkan waktu 1 jam; hal ini karena keadaan jalan yang rusak dan juga topografi yang berbukit-bukit (Pemerintah Desa Kuanek, 2017).

Penduduk Desa Kuanek mempunyai mata pencaharian utama petani dan sebagian kecil adalah guru, PNS, atau tukang, dengan tingkat

pendidikannya rata-rata SMP (50%), SD (30%), SMA (10%), dan S1 (0,1%). Komoditi yang dimiliki oleh masyarakat dari segi pertanian, yaitu padi ladang, jagung, ubi kayu, kacang-kacangan, dan dari hasil kehutanan yaitu asam, kemiri, jambu menteh. Hasil-hasil inilah yang digunakan masyarakat Desa Kuanek untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

Sistem pertanian yang diterapkan di Desa Kuanek pada umumnya masih bersifat tradisional atau ladang berpindah yang dikelola dengan sistem tebas bakar. Sistem pertanian ini diterapkan sejak dulu hingga sekarang. Sistem pertanian ini biasanya dilakukan secara bersama dengan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sangat baik. Proses pembagian peran yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam hal kegiatan pertanian antara lain sebagai berikut: pembersihan lahan (*na'pai*) pada awal musim panas (bulan Mei-Juli) biasanya lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan tinggal di rumah. Pada saat bakar kebun (*kono*) di bulan Agustus-Oktober juga lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, sementara persiapan benih (*pena fini ma aen fini*) pada awal musim hujan (November-Desember) biasanya lebih banyak dilakukan oleh perempuan, dan saat tanam (*tsen*) pada musim hujan (Desember-Januari) dilakukan secara bersama-sama oleh perempuan dan laki-laki.

Di sela-sela kesibukan mempersiapkan lahan pertanian, masyarakat Desa Kuanek juga mengisi waktu luang untuk mendapatkan uang dari pekerjaan sampingan. Misalnya, laki-laki biasanya menjadi pengojek atau tukang bangunan, baik dilakukan di dalam desa maupun di luar desa. Ada juga tanam sayur yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki tergantung minat masing-masing orang. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk menambah penghasilan rumah tangga mereka selain dari pekerjaan pokok.

Masyarakat Desa Kuanek pada umumnya masih menganut budaya orang Dawan (*Atoin Meto*). Dalam budaya ini, semua hal yang berkaitan dengan harta peninggalan orang tua sangat dikuasai oleh laki-laki, sehingga anak laki-laki meskipun terlahir kemudian (bungsu) di dalam satu keluarga sangat dihargai oleh keluarga tersebut, terutama saudari perempuannya. Istilah rumah tangga (*ume nakaf*) dalam pandangan masyarakat Desa Kuanek yaitu kumpulan beberapa orang antara lain bapak, mama, dan anak-anak yang tinggal di dalam satu rumah tangga yang kepala keluarganya seorang bapak. Seorang laki-laki atau bapak dikatakan sebagai kepala rumah tangga karena laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama atau dengan istilah Dawan (*Atoni Nabiko ma Na'ne Nabi Suf ma*

Aut'fin), sedangkan perempuan atau mama dianggap sebagai orang yang bertugas untuk menyalakan api dan lampu atau dengan istilah Dawan (*Bife Apin Paku Ma Ahoit Ai*).

4.1.2 KDRT di Desa Kuanek

Kasus KDRT yang terjadi di Desa Kuanek pada umumnya dilakukan oleh para pasangan yang sudah sah menjadi suami istri, baik dari segi gereja, adat, dan pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena kesalahpahaman antara satu dengan yang lain, dalam hal ini suami dan istri. Sepanjang tahun 2015-2017, kasus KDRT yang didampingi oleh Kelompok Paralegal Desa Kuanek mencapai 19 kasus, ada yang berasal dari dalam Desa Kuanek dan ada juga yang terjadi di desa tetangga namun didampingi oleh Paralegal Desa Kuanek. Untuk penelitian ini, kami hanya mengambil kasus KDRT yang terjadi di Desa Kuanek sepanjang tahun 2015-2017, yaitu 9 kasus. Berikut data kasus KDRT Desa Kuanek periode 2015-2017:
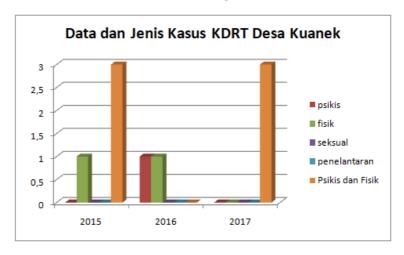
GAMBAR 11 JENIS KASUS KDRT DESA KUANEK TAHUN 2015-2017

Sumber: Yabiku (2017)

Jumlah kasus KDRT yang terjadi di Desa Kuanek dari tahun 2015-2017 sebanyak 9 kasus KDRT dengan rincian sebagai berikut.

Tahun 2015 terdapat 4 kasus KDRT dengan rincian 1 kasus KDRT korbannya mengalami kekerasan fisik dan 3 kasus KDRT korban mengalami kekerasan fisik dan psikis. Empat kasus tersebut dipicu oleh unsur dendam, cemburu, tekanan ekonomi, dan perampasan harta kekayaan orang tua.

Tahun 2016 terdapat 2 kasus KDRT dengan rincian 1 kasus KDRT korbannya mengalami kekerasan fisik dan 1 kasus KDRT korbannya mengalami kekerasan psikis. Dua kasus tersebut dipicu oleh perselingkuhan dan karena korban belum menyiapkan makanan untuk makan malam.

Tahun 2017 terdapat 3 kasus KDRT. Dalam 3 kasus tersebut korbannya mengalami kekerasan fisik dan psikis, yang dipicu oleh makanan (nasi bungkus), merasa tidak dihargai oleh anak, unsur dendam, dan kecapaian.

Dari hasil bedah kasus dan wawancara, baik itu dengan korban maupun paralegal, terungkap bahwa semua pelaku dan korban berasal dari keluarga yang sederhana, mata pencaharian setiap hari adalah bertani, dan para pelaku juga tidak pernah terlibat dengan kelompok geng tertentu, akan tetapi semua yang dilakukan timbul dari dalam diri dan dipicu oleh beberapa hal tertentu misalnya mabuk, tekanan ekonomi, dan lain sebagainya.

Faktor kerentanan yang menyebabkan terjadinya KDRT di Desa Kuanek antara lain faktor kesenjangan antara pelaku dan korban, misalnya pendidikan, dilihat dari hasil bedah kasus Desa Kuanek pada umumnya pendidikan pelaku lebih tinggi dari korban. Hal ini yang menyebabkan pelaku selalu menuntut untuk dihargai. Selain pendidikan, ada juga faktor lain misalnya faktor pekerjaan juga masuk sebagai faktor kerentanan terjadinya KDRT. Rata-rata pekerjaan pelaku hanya sebagai petani yang tidak bisa menghasilkan uang setiap hari untuk menafkahi keluarga, akan tetapi ada juga yang memiliki pekerjaan sampingan yang dapat menghasilkan uang setiap hari meskipun nilainya sedikit misalnya ojek, jual sayur, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, baik pelaku maupun korban yang memiliki memiliki pekerjaan tetap dan menghasilkan uang sama-sama minta untuk dihargai di dalam keluarga karena mereka adalah pencari nafkah utama.

Ada juga satu orang korban laki-laki, adalah duda yang menikah lagi, karena istri pertamanya meninggal dunia. Namun, harta benda istri kedua lebih banyak (lebih kaya) daripada suami dan belis belum dilunasi. Dilihat dari faktor kerentanan umumnya laki-laki yang mengontrol kekayaan, akan tetapi perempuan juga bisa lebih berkuasa atas laki-laki dalam segala hal apabila perempuan tersebut berasal dari keluarga yang banyak memiliki harta, turunan bangsawan, usianya lebih muda dari laki-laki, dan juga apabila laki-laki tersebut berstatus duda yang sudah memiliki anak.

Selain itu, ada juga beberapa hal yang menjadi pemicu terjadinya KDRT di Desa Kuanek antara lain perselingkuhan yang dilakukan oleh laki-laki (kasus laki-laki yang tinggal di desa dan yang merantau sebagai mahasiswa di kota), pelaku pulang dalam keadaan mabuk minuman beralkohol karena pelaku memang memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol, atau soal pergaulan sehari-hari seperti suami yang menduga sang istri bergaul dengan kepala keluarga perempuan yang dicurigai berpraktik sebagai PSK. Sementara itu, kasus yang melibatkan kakak beradik dipicu oleh tidak mendapatkan biaya untuk urusan adat. Pemukulan oleh anak laki-laki terhadap ibu, karena sang ibu menyumpahi anaknya yang lain yang pergi merantau ke Malaysia tanpa izin dari ibu juga menjadi pemicu terjadinya KDRT di Desa Kuanek. Ada juga pemicu terjadinya KDRT istri dipukul karena suami merasa dicurigai serta istri kedua memukul suami (dulu duda ditinggal mati) karena meminta uang untuk biaya sekolah anak.

Dalam semua kasus, pelaku dan korban sama-sama mengalami tekanan hidup dan mengalami kesulitan sehingga mengekspresikan kemarahan atau rasa frustasinya, sehingga luapan perasaan yang keluar justru berupa kekerasan.

Kasus-kasus KDRT yang selama ini terjadi di Desa Kuanek pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan dengan pendampingan paralegal komunitas. Hal tersebut disebabkan karena pertimbangan-pertimbangan dari korban sendiri dan keluarga. Beberapa pertimbangan yang menyebabkan proses penyelesaian KDRT dilakukan secara kekeluargaan antara lain kurang alat bukti dan juga tidak tidak tertangkap langsung dan atau telah bersumpah secara adat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

> *"Masalah tersebut diselesaikan secara adat dan tidak melibatkan polisi karena menurut pengakuan korban bahwa pelaku memang dengan perempuan lain pada malam itu, akan tetapi korban tidak tangkap tangan dan tidak ada bukti, sehingga proses penyelesaiannya hanya dilakukan secara adat dengan denda sebesar Rp 500.000, beras 50 kg. Uang tersebut tidak diberikan kepada korban akan tetapi diberikan kepada pemilik rumah yang digunakan pelaku untuk selingkuh malam itu dengan maksud untuk tutup kembali pintu rumah tersebut, namun korban merasa puas karena pada saat itu juga pelaku bersumpah secara adat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya"*

(MN, (30) paralegal, 11 Juli 2018)

Dari 9 kasus KDRT, ada 2 kasus yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, akan tetapi hanya bermaksud untuk memberikan pembinaan

sesaat kepada pelaku. Pembinaan sesaat adalah pelaku hanya ditahan beberapa hari di sel tahanan dan kemudian dibebaskan, dengan maksud setelah ditahan beberapa hari tersebut, pelaku akhirnya bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya.

Kasus KDRT yang selama ini diselesaikan secara kekeluargaan, menurut pengakuan korban dan juga keluarga cukup memberikan rasa keadilan karena proses penyelesaianya tidak memerlukan biaya yang cukup banyak; korban dan pelaku dirujuk untuk saling menerima kembali sebagai suami istri, denda yang diberikan kepada korban juga sesuai dengan hasil kesepakatan antara keluarga dari kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan masalah baru di dalam keluarga.

Saya merasa puas dengan bentuk penyelesaian masalah tersebut karena tidak memakan biaya yang cukup besar dan saya juga merasa bersalah dengan suaminya karena pertanyaan yang dilontarkan kepada suami, menurut saya juga sangat berlebihan dan membuat suami saya tersinggung sehingga pada akhirnya menimbulkan persoalan tersebut. Dan dengan adanya proses penyelesaian masalah tersebut saya dan suami saling memaafkan dan saling menerima kembali sebagai suami dan istri.

(PS, perempuan penyintas, 20 Juli 2018)

Saya ingin melaporkan masalah tersebut ke polisi karena faktor uang dan ada masukan dari keluarga bahwa untuk sementara ini kita tidak boleh lapor karena kejadian baru 1 kali, apabila pelaku mengulangi perbuatannya baru kita lapor ke polisi. Saya dan keluarga juga merasa puas dengan proses penyelesaian secara adat karena denda yang diberikan tidak terlalu banyak hanya Rp 250.000, sopi 1 botol dan ayam 2 ekor. Uang denda tersebut tidak diberikan kepada korban akan tetapi diberikan kepada Atoin Amaf (paman/ Om dari korban) dengan alasan sudah mempermalukan Atoin Amaf. Meskipun denda tersebut tidak diberikan kepada saya akan tetapi saya merasa puas karena pada saat itu juga pelaku disumpah secara adat dan sekarang dia sudah tobat.

(TS, perempuan penyintas, 22 Juli 2018)

Selain karena tidak membutuhkan biaya yang cukup banyak, hal lain yang menyebabkan proses penyelesaian kasus KDRT secara kekeluargaan adalah karena ada saran atau masukan dari orang lain, dalam hal ini keluarga. Dengan alasan bahwa jika pelaku tidak dipenjarakan maka hubungan antara pelaku dan korban akan baik kembali. Sebaliknya, jika pelaku dipenjarakan maka akan menimbulkan persoalan baru.

4.2 Studi Kasus KDRT di Desa Maubesi

4.2.1 Gambaran umum Desa Maubesi

Sebelum terbentuk menjadi desa, wilayah Maubesi merupakan pusat kerajaan yang dipimpin oleh Usif Malafu Neno, yang secara struktur pemerintahan masih bersifat kerajaan dengan nama Maubesi. Kata Maubesi berasal dari dua suku kata bahasa Dawan yakni *Mau* dan *Besi*. *Mau* merupakan kesepakatan dari tiga orang raja pada tahun 1013 yaitu Raja Liurai, Raja Afeanpah, dan Raja Sonbai. Konon diyakini bahwa Raja Liurai adalah raja yang menguasai wilayah timur atau wilayah Matahari Terbit, Raja Afeanpah adalah raja yang menguasai wilayah tengah dan wilayah tersebut diberi nama *Fainam Maubes Nekem Neofanu* yang artinya kumpulan lima suku besar di Maubesi yang memuja air dan batu. Sementara Raja Sonbai adalah raja yang menguasai wilayah barat atau wilayah matahari terbenam. Kata *Besi* diartikan sebagai berdirinya dacing besi (timbangan) yang mengukur Pulau Timor yang berpusat di Maubesi.

Desa Maubesi merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara dan merupakan ibu kota Kecamatan Insana Tengah dengan ketinggian antara 0,55 s.d. 0,65 mil dpl. Seiring dengan tuntutan terhadap pelayanan masyarakat, Desa Maubesi pada tahun 2016 yang lalu masih berstatus kelurahan akhirnya berubah status menjadi desa. Luas wilayah Desa Maubesi adalah 45 km^2 dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Fafinesu dan Desa Fafinesu A, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Letneo dan Desa Unini, sebelah timur berbatasan dengan Desa Letmafo, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Bannae dan Desa Femnasi.

Secara kasat mata letak wilayah Desa Maubesi sangat datar atau rata yang dikelilingi oleh gunung dan perbukitan dengan curah hujan rata-rata pertahun 4-5 bulan hujan. Suhu udara rata-rata sekitar pada maksimum $32,5^0C$-38^0C dan suhu minimum 22^0C-25^0C, dengan curah hujan rata-rata adalah 1.175 mm/tahun. Salah satu unsur penting pembentukan iklim di atas adalah curah hujan. Curah hujan sangat bervariasi. Keadaan curah hujan di Desa Maubesi pada umumnya sulit diramalkan, dalam artian kadang-kadang terlalu cepat kadang-kadang terlalu lalu tidak sesuai dengan jumlah bulan hujan.

Wilayah Desa Maubesi termasuk dalam kawasan Circum-Pasifik, terletak di Pulau Timor yang terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke

permukaan. Dengan kondisi geologi yang demikian akhirnya menjadikan Desa Maubesi ini juga kaya akan deposit baik mineral maupun sumber sumber energi lainnya, antara lain pasir (Ps), batu hitam, batu kali (Bk), dan pasir batu (Pa).

Umumnya masyarakat Desa Maubesi bermata pencaharian utama sebagai petani. Namun demikian, aktivitas pertanian ini tidak dilakukan sepanjang tahun tetapi mengikuti curah hujan. Oleh karenanya, selain bertani masyarakat Desa Maubesi juga memiliki mata pencaharian tambahan yang lain untuk menunjang kehidupan rumah tangga mereka, seperti supir, tukang ojek, tukang bangunan, tukang batu bata, dan ada juga yang mencari pekerjaan di luar wilayah Desa Maubesi. Penduduk Desa Maubesi berjumlah 3.379 jiwa yang terdiri dari 1.694 jiwa penduduk laki-laki dan 1.685 jiwa penduduk perempuan dengan total 823 KK yang ada di Desa Maubesi.

Jarak dari Desa Maubesi ke ibu kota kabupaten 18 km. Untuk menuju ke Desa Maubesi dari ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara bisa ditempuh melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat. Jika ditempuh menggunakan kendaraan roda dua membutuhkan waktu 45 menit dan jika ditempuh menggunakan kendaraan roda empat membutuhkan waktu 60 menit (Pemerintah Desa Maubesi, 2017).

Masyarakat Desa Maubesi sangat menghormati laki-laki ketimbang perempuan jika dilihat dari struktur adat. Hal ini dapat diketahui dari pengambilan keputusan dan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dijuluki sebagai pencari nafkah utama (*nabiko ma na'ne na nbi suf ma autfin*), sedangkan perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga yang aktivitas kesehariannya hanya mengurusi urusan rumah (*a pin paku ma a hoit ai*). Gambaran laki-laki ideal dalam komunitas Desa Maubesi adalah laki-laki yang memiliki banyak kebun, memiliki banyak ternak, memiliki hasil panen yang melimpah (*Nae ma kana a mui maus*), dan yang lebih penting, laki-laki tersebut merupakan turunan bangsawan. Gambaran perempuan ideal dalam komunitas Desa Maubesi adalah perempuan yang mampu menenun, perempuan yang menghargai suaminya (*bife a tenuf ma nai fuat in mone*). Selain itu, kekayaan rumah tangga kebanyakan dikontrol oleh laki-laki.

4.2.2 KDRT di Desa Maubesi Sepanjang Tahun 2015-2017

Melihat tren kasus KDRT yang terjadi di Desa Maubesi, pada umumnya KDRT di Desa Maubesi terjadi pada pasangan yang sudah menikah secara adat dan gereja dan hampir keseluruhan pelakunya adalah suami korban. Ada juga pelaku yang memiliki hubungan kakak beradik, akan tetapi dari jumlah kasus KDRT yang didampingi oleh komunitas paralegal di Desa Maubesi, hanya ditemukan dua kasus yang pelakunya adalah adik korban dan kakak korban. Jumlah kasus KDRT yang terjadi di Desa Maubesi tiga tahun terakhir adalah 21 kasus dengan rincian: 1 kasus terjadi pada tahun 2015, 8 kasus terjadi pada tahun 2016, dan 12 kasus terjadi pada tahun 2017, sebagaimana tertera dalam diagram ini:
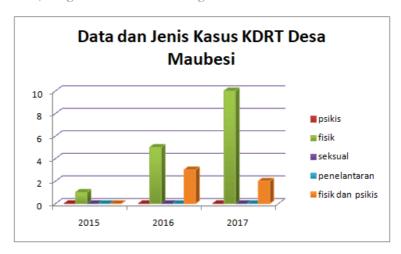
GAMBAR 12 JENIS KASUS KDRT DESA MAUBESI TAHUN 2015-2017

Sumber: Yabiku (2017)

Jumlah kasus KDRT yang terjadi di Desa Maubesi dari tahun 2015-2017 sebanyak 21 kasus KDRT dengan rincian sebagai berikut.

- Tahun 2015 terdapat 1 kasus KDRT dengan rincian 1 kasus KDRT korbannya mengalami kekerasan fisik.
- Tahun 2016 terdapat 8 kasus dengan rincian 5 kasus KDRT korbannya mengalami kekerasan fisik dan 3 kasus KDRT korbannya mengalami kekerasan fisik dan psikis.
- Tahun 2017 terdapat 12 kasus dengan rincian 10 kasus KDRT korbannya mengalami kekerasan fisik dan 2 kasus KDRT korbannya mengalami fisik dan psikis.

Dilihat dari jumlah kasus yang terjadi tiga tahun terakhir, dapat dikatakan bahwa KDRT di Desa Maubesi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Waktu kejadian kekerasan berlangsung pada sore hari sebanyak 8 kasus, diikuti oleh waktu kejadian pagi 5 kasus, malam 4 kasus, siang 2 kasus, dan dini hari 1 kasus.

Pendidikan formal pelaku rata-rata lebih tinggi dibanding korban. Korban (perempuan) rata-rata tidak tamat SD dan ada juga yang pendidikannya setara dengan pelaku. Kalau dilihat dari segi pekerjaan, ada pelaku yang bekerja sebagai ASN. Ada kasus yang pelaku dan korban belum menikah baik secara adat maupun gereja. Ada juga kasus yang perbedaan usia antara pelaku dan korban sangat jauh yakni usia korban lebih muda dari usia pelaku —kebanyakan beda usia 5 hingga 13 tahun. Ada juga pelaku yang menganggap bahwa *belis* sudah dibayar lunas (satu kasus), sehingga pelaku merasa punya hak dan menuntut dihargai. Kebanyakan korban berasal dari keluarga miskin (sederhana). Anggapan keluarga miskin di Maubesi adalah petani yang tidak memiliki alat-alat pertanian modern (traktor, dsb), jika lopo[113] miliknya kecil dan tidak dicat atau tidak dihias, keluarga tersebut dianggap miskin.

Faktor penyebab terjadinya KDRT di Desa Maubesi bervariasi, akan tetapi jika dilihat dari hasil bedah kasus KDRT yang terjadi di Desa Maubesi, faktor dominan penyebab KDRT masih terus terjadi adalah cemburu. Terdapat tujuh kasus KDRT yang terjadi karena faktor tersebut. Ada juga satu kasus yang dialami oleh pasangan yang baru saja menikah secara adat dan gereja dan belum melunasi *belis* (mahar, mas kawin). Pemicunya adalah tekanan ekonomi yang sedang dialami keluarga baru nikah ini. Diyakini, jika saat meminang tidak membawa sejumlah barang atau uang yang diminta oleh pihak perempuan, keluarga baru tersebut akan mengalami musibah. Ada juga pandangan jika mahar tidak berupa perhiasan, uang, hewan tidak diberikan oleh pihak laki-laki, keluarga perempuan melihat bahwa anak perempuan mereka sebenarnya tidak diterima dengan baik oleh keluarga laki-laki (*fe ka nafek in'na fufun*).

Oleh karena itu, ketika ada perbedaan pendapat antara pasangan suami dan istri, maka persoalan *belis* selalu dibicarakan dan memicu emosi pelaku. Selain tokoh adat, ada juga pelaku yang menuntut untuk dihargai sebagai kepala keluarga dengan alasan bahwa pelaku telah membayar lunas *belis*.

113 Lopo adalah bangunan yang wajib dibuat oleh semua orang yang sudah berkeluarga yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu dan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil panen.

Ini ditemukan pada saat melakukan bedah kasus KDRT di bagian motif pelaku di Desa Maubesi.

Kasus KDRT di Desa Maubesi sangat tinggi dan banyak pelaku yang berasal dari pasangan yang baru menikah atau (Ume nakaf Feu) dan juga yang belum nikah sah secara adat (belis belum putus) sehingga ketika ada masalah sedikit di dalam rumah maka belis juga akan diungkit-ungkit.

(Daniel Afu Usfinit, tokoh adat, 21 Juli 2018)

Dalam hal penanganan kasus, semua kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Maubesi diselesaikan secara adat oleh tokoh adat. Proses penyelesaian dihadiri oleh korban, pelaku, maupun keluarga korban dan keluarga pelaku. Ada sejumlah sanksi adat yang dibebankan kepada pelaku. Berikut adalah kutipan wawancara dari seorang penyintas dan salah satu tokoh adat sehubungan dengan mekanisme penyelesaian kasus secara adat.

Saya ingin melapor ke polisi, akan tetapi saya ingat karena suami yang mencari nafkah untuk kami sehari-hari dan ada masukan dari paman (atoin amaf) saya bahwa untuk kali ini tidak boleh lapor ke polisi karena pelaku baru pertama kali melakukan hal seperti ini dan apabila dikemudian hari pelaku mengulangi lagi perbuatannya maka kita lapor ke polisi. Pelaku diberikan denda sebanyak Rp 500.000, sopi 1 botol, dan 1 ekor ayam. Yang membuat saya merasa puas yaitu pada saat bunuh ayam tersebut pelaku disumpah secara adat dan mencium telapak kaki saya lalu berkata bahwa "Saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini".

(MS, perempuan penyintas, 10 Juli 2018)

Saya ingin untuk melaporkan masalah tersebut ke polisi akan tetapi setelah saya pikir-pikir saya akan susah untuk mencari nafkah dan mengurus anak-anak. Hal ini yang membuat saya memilih untuk masalah kami di selesaikan secara kekeluargaan dengan membuat sumpah adat, sehingga apabila dia mengulangi lagi perbuatan tersebut maka akan ditegur oleh alam misalnya sakit secara tiba-tiba, mati tiba-tiba.

(EF, penyintas, 10 juli 2018)

Ketika ada masalah yang ingin diselesaikan di tingkat adat maka saya berperan sebagai hakim, memberikan arahan yang baik kepada anak-anak yang melakukan tindak kekerasan dan memutuskan proses penyelesaian secara adat, sehingga denda yang dibebankan kepada pelaku juga sesuai dengan kebiasaan adat-istiadat di sini.

(DU, tokoh adat, 18 juli 2018)

Pilihan penyelesaian secara kekeluargaan atau adat sebetulnya bukan tanpa alasan. Salah satu penyebab penyelesaian kasus KDRT dilakukan secara kekeluargaan atau adat karena ketergantungan korban kepada pelaku akan keberlanjutan hidupnya dan juga anak-anaknya. Selain itu, saran atau masukan dari orang lain yang merupakan keluarga korban yang bersifat baik merupakan proses penyelesaian kasus KDRT dilakukan secara kekeluargaan atau adat.

4.3. Sintesis

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Kuanek dan Desa Maubesi lebih banyak dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah sah secara gereja, adat, maupun pemerintah. Hanya sebagian kecil kasus KDRT yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah sah secara adat, gereja, dan pemerintah. Akan tetapi, ada juga yang dilakukan oleh saudara laki-laki.

Dalam mayoritas kasus KDRT di Desa Kuanek maupun Maubesi, terdapat tekanan ekonomi yang tinggi. Ada juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya kasus KDRT, misalnya perselingkuhan, perampasan harta peninggalan orang tua yang pada umumnya dipicu oleh miras, dan cemburu. Hal tersebut dapat terlihat dari kronologi kasus yang terjadi di Desa Kuanek dan Desa Maubesi. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tekanan ekonomi adalah kondisi keuangan keluarga tidak stabil atau tidak ada sama sekali untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti biaya pendidikan anak-anak dan kebutuhan pangan keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan perselingkuhan adalah pelaku diyakini memiliki wanita idaman lain.

Selain kasus-kasus KDRT yang terjadi di Desa Kuanek dan Desa Maubesi yang sudah ditangani, ada juga kasus-kasus KDRT lainnya yang terjadi di Desa Kuanek dan Desa Maubesi namun tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk diselesaikan. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih menganggap bahwa kasus KDRT dianggap wajar dan merupakan urusan pribadi, sehingga tetangga yang sempat menyaksikan KDRT tidak memberikan bantuan.

Dari hasil bedah kasus yang dilakukan di Desa Kuanek dan Desa Maubesi, kasus KDRT semuanya diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak melibatkan pihak kepolisian. Hal ini disebabkan karena faktor ketergantungan korban terhadap pelaku yang masih sangat tinggi sehingga

tidak mau untuk pelaku dipenjarakan, karena menurut pengakuan korban, apabila pelaku dipenjarakan, maka tidak ada yang bekerja untuk menafkahi keluarga. Selain itu, ada juga dorongan dari keluarga untuk korban dan pelaku saling memaafkan sehingga bisa akur kembali.

> *Kasus KDRT yang ditangani Unit PPA selama ini cukup banyak dan semua didampingi oleh Yabiku NTT dan juga P2TP2A, dan untuk proses penyelesaiannya tidak langsung, akan tetapi menunggu waktunya korban untuk tenang dulu baru dilakukan proses penyidikan. Dan yang menjadi hambatan pada saat proses penyelesaian masalah tersebut adalah banyak kasus yang tidak ada saksi dan juga alat bukti, sehingga dari sekian banyak kasus KDRT yang ditangani, belum ada yang dirujuk sampai ke meja hijau, sehingga banyak kasus yang pelakunya hanya diberikan efek jera atau hanya ditahan beberapa waktu kemudian dilepas. Ada juga yang kalau korbannya adalah istri datang menarik kembali laporan dengan alasan kalau suaminya dipenjara pasti tidak ada yang mencari nafkah untuk keluarga.*
>
> (Arsy Kartiningsih, Kanit PPA Polres TTU, 18 Juli 2018)

Hal lain yang memengaruhi sehingga korban lebih memilih untuk kasus yang dialami diselesaikan secara kekeluargaan antara lain biaya yang dibutuhkan untuk transportasi tidak ada. Karena itu, korban memilih tempat penyelesaian kasus yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Sedangkan apabila diselesaikan di polisi, maka korban harus menyediakan biaya yang cukup untuk transportasi karena jarak dari desa ke kantor polisi cukup jauh dan harus ditempuh dengan menggunakan kendaraan. Hal tersebut yang selama ini membuat korban harus berpikir dua kali lipat untuk melaporkan masalah tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.

Dampak yang terjadi jika kasus KDRT tidak dilaporkan ke kepolisian maka efek jera yang diberikan kepada pelaku sangat kecil dan hanya sesaat. Hal lain yang terjadi, pelaku akan merasa bangga karena tidak dipidanakan dan ada potensi untuk pelaku mengulangi kembali perbuatannya.

5. Refleksi, Kesimpulan, dan Rekomendasi

5.1. Refleksi

Penelitian ini pertama-tama ingin mengungkap faktor penyebab dan proses terjadinya KDRT. Pada batas tertentu, temuan penelitian ini memang menyikapi sedikit pemicu dan proses terjadinya KDRT. Namun demikian, peneliti merasa bahwa hasil riset ini memang belum mencapai pada temuan kritis dan mendalam, yakni tentang pandangan atau persepsi

masyarakat terhadap tindak kekerasan secara umum dan pandangan atau persepsi warga terhadap kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Hal ini karena masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan pribadi yang tidak harus dicampuri. Argumen ini diketahui pada saat melakukan bedah kasus terutama pada bagian dampak KDRT terhadap keluarga dan masyarakat di Desa Maubesi. Saat terjadi kasus dalam rumah tangga, orang enggan untuk pergi mencari tahu bahkan melerai karena masih dalam cara pandang mereka (orang luar/tetangga) bahwa itu adalah urusan dalam rumah tangganya (keluarga yang berkonflik).

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan beberapa orang penyintas yang mengalami bagaimana KDRT terjadi dengan mendatangi rumah penyintas didampingi oleh komunitas paralegal. Kunjungan peneliti mendapatkan informasi tentang proses penyelesaian kasus KDRT. Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa ada faktor ketergantungan korban terhadap pelaku. Ketergantungan yang dimaksudkan yaitu korban menganggap pelaku sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sehingga apabila pelaku dipenjarakan, maka korban akan kesulitan untuk menafkahi keluarga. Hal tersebut yang membuat korban sering memaafkan pelaku pada saat proses penyelesaian kasus KDRT. Faktor ketergantungan korban juga sangat memengaruhi kasus KDRT yang sudah terjadi dan berpotensi untuk tetap terjadi, sehingga upaya untuk meningkatkan pengetahuan para pihak sangat dibutuhkan. Refleksi lain peneliti bahwa jika setiap orang memiliki pengetahuan yang baik dalam membina hubungan antar sesama, maka akan memengaruhi cara pandang dan cara mengambil tindakan. Sehubungan dengan proses dan hasil penelitian, sangat disadari bahwa penelitian kualitatif semacam ini membutuhkan ketajaman peneliti dan membutuhkan waktu yang lama agar mencapai hasil maksimal; di samping harus membangun komunikasi dan koordinasi lintas pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

5.2. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi dengan beberapa faktor pemicu, di antaranya tekanan ekonomi keluarga, minuman beralkohol, cemburu yang berlebihan, bahkan pada kondisi tertentu terjadi perampasan harta orang tua.

2. Kekerasan dalam rumah tangga belum dianggap sebagai tindak kekerasan yang serius oleh korban maupun keluarga korban karena dianggap wajar dan merupakan urusan pribadi.
3. Ada faktor ketergantungan korban terhadap pelaku. Dalam hal ini, pelaku dianggap sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sehingga korban cenderung memilih penyelesaian kasus melalui mediasi tokoh adat dan keluarga, bukan melalui jalur hukum (lapor ke polisi).
4. Proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga belum memberikan efek jera bagi pelaku.
5. Mayoritas KDRT adalah di dalam rumah dengan pelaku tindak kekerasan di antaranya suami dan saudara laki-laki.

5.3. Rekomendasi/Agenda Perubahan

Berdasarkan kesimpulan di atas, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

***Pertama*,** kepada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif:

a. Pemerintah perlu memastikan implementasi program dan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
b. Pemerintah perlu merevisi Perda TTU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan terutama di bagian yang menyebutkan kewajiban dan hak pelapor tindak kekerasan.
c. Pemerintah perlu mengembangkan program peningkatan kapasitas terkait dengan teknik pendampingan kasus (dengan cara memberikan konseling terhadap korban, Pelatihan Gender) bagi pengada layanan termasuk P2TP2A.

Kedua, kepada lembaga pengada layanan:

a. Pengada layanan seperti P2TP2A, rumah sakit umum, kepolisian, dan LSM pemerhati perempuan dan anak perlu mengembangkan dan memperkuat koordinasi penanganan kasus termasuk kasus KDRT.
b. Lembaga pengada layanan perlu mengembangkan sistem rujukan dalam penanganan kasus termasuk KDRT.
c. Lembaga pengada layanan mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap korban tindak kekerasan

serta memberikan laporan kepada pemerintah terkait kasus-kasus KDRT yang sudah ditangani.

Ketiga, kepada masyarakat Timor Tengah Utara:

a. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan mendukung pemerintah, dan lembaga pengada layanan dalam upaya pencegahan, penanganan terhadap korban tindak kekerasan, dan memberikan laporan terkait kasus KDRT yang terjadi di lingkungan sekitar.
b. Masyarakat turut serta dalam upaya penanganan kasus termasuk KDRT seperti melaporkan tindak kekerasan yang terjadi.

Daftar Pustaka

Ata, V. (2009). *Himpunan UU RI Tentang Hak Perempuan dan Anak*. Kupang: YKBH Justitia.

Ata, V. (2009). *Himpunan UU RI Tentang Hak Perempuan dan Anak*. Kupang: YKBH Justitia.

Ata, V. (2009). *Kekerasan Berbasis Gender dan Instrumen Hukum*, Cetakan I, Kupang: YKBH Justitia

CIPG-Voice. (2017). *Modul Pelatihan Critical Research Methodology (CREAME),* Jakarta

Efi, A. Y. (2015). *Catatan Akhir Tahun Yabiku-NTT*. Kefamenanu: Yabiku-NTT

Efi, A. Y. (2016). *Catatan Akhir Tahun YABIKU-NTT*. Kefamenanu: Yabiku-NTT

Efi, A. Y. (2017). *Catatan Akhir Tahun YABIKU-NTT*. Kefamenanu: Yabiku-NTT

Kadarusman, (2005). *Agama, Relasi Gender & Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana

Kalyanamitra. (1999). *Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kalyanamitra.

Kelen, Aloysius B. (2011). *Gender Sebuah Pendekatan Feminisme Antropologi*, Ende: Nusa Indah

Komnas Perempuan. (2009). *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*. Jakarta: LPSK

Profil. Desa Kuanek. (2017). *Kondisi Geografis, Topografi dan Demografi.* Kuanek: TTU

Profil. Desa Maubesi. (2017) *Kondisi Geografis, Topografi dan Demografi.* Maubesi: TTU

Ramadhan, H. (2013). *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan.* Jakarta

Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.* Jakarta: Panca Usaha

PEMUDA DAN LANSIA: *BERSUARA, TAK DIDENGAR*

Yayasan Wali Ati

Active Society Institute

SEBUAH PENGANTAR

Pemuda dan lansia, kedua kelompok umur ini sering kali tidak didengar karena keduanya tidak berada dalam usia produktif. Pemuda, pra-produktif, sehingga dianggap belum dewasa untuk memberikan pendapat, sedangkan lansia dianggap pasca-produktif, telah menyelesaikan waktunya untuk berpendapat. Padahal, identitas kelompok masyarakat juga ditentukan oleh keduanya. Pemuda akan menjadi penentu masa depan, sedangkan lansia yang memiliki pengetahuan dari pengalamannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Wali Ati (Yasalti) berupaya untuk membuka tabir bahwa kegiatan turun-temurun yang dijalani oleh pemuda, khususnya pemuda perempuan teredam azamnya mengenai masa depan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Active Society Institute (AcSI) berusaha menerobos ruang pikir masyarakat perkotaan mengenai keberadaan pasar tradisional, melalui sudut pandang pedagang perempuan yang rentan.

Kedua studi ini mengurai suara kedua kelompok umur yang selama ini tidak didengar oleh khalayak ramai, bahkan orang-orang terdekat. Dari penelitian Yasalti kita bisa memahami bahwa pemerintah desa mempunyai peluang besar untuk mewujudkan aspirasi pemuda, dan melalui penelitian AcSI kita melihat bahwa pemerintah kota mempunyai andil yang besar untuk memproduksi kebijakan yang tepat terkait keberadaan pedagang perempuan, khususnya lansia. Keduanya meneguhkan pandangan bahwa kebijakan lokal dapat diproduksi secara tepat apabila dilandasi oleh pengetahuan lokal yang tajam.

Selamat menikmati,

Ferzya Farhan

Yayasan Wali Ati (Yasalti)

Tim peneliti:

Yanti Rambu Bambang
Rambu Roku Amma
Florianus Hutsod Dappa
Hina Ranjataka

ASPIRASI REMAJA: PERAN ORANG TUA DAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG ASPIRASI REMAJA DI DESA LAIRURU KEAMATAN UMALULU KABUPATEN SUMBA TIMUR

Yayasan Wali Ati

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Desa Lairuru adalah salah satu desa penghasil kain tenun *pahikung*. Usaha tenun rumahan ini sudah berlangsung sejak lama dan menjadi sumber pemasukan keluarga di samping hasil pertanian ladang yang sangat tergantung musim dengan penghasilan tidak rutin. Dalam tradisi masyarakat Sumba Timur, menenun adalah pekerjaan atau kerajinan tangan kaum perempuan yang diturunkan kepada anak gadis dari generasi ke generasi. Hasil kain tenun *pahikung* berupa *lawu* (kain busana adat untuk perempuan di Sumba Timur) biasanya dijual ke pasar. Sebagian besar hasil penjualannya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari serta untuk membeli bahan baku kain tenun *pahikung* lagi, sementara sisanya untuk keperluan sekolah.

Kain tenun *pahikung* merupakan penghasilan utama bagi perempuan di Desa Lairuru. Dari hasil penjajakan awal diketahui bahwa penghasil utama kain tenun *pahikung* adalah perempuan yang dibantu oleh anak gadis mereka saat pulang sekolah atau jika ada waktu senggang. Memang tidak semua anak gadis pandai menenun, hanya sebagian kecil saja yang mahir karena sudah diwariskan oleh orang tua mereka atau yang mempunyai bakat atau minat saja. Para remaja di Desa Lairuru menenun karena ingin membantu orang tua mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebagian kecil untuk biaya sekolah serta kebutuhan pribadi mereka. Bagi sebagian kecil remaja yang pandai menenun, waktu mereka untuk menenun lebih banyak dibanding waktu untuk belajar. Karena dalam waktu satu minggu mereka bisa mendapat uang dan sudah terbiasa untuk memegang uang sendiri, mereka pun terdorong berusaha keras menenun untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka, selain juga membantu orang tua. Dampaknya, jarang dari mereka yang melanjutkan sekolah, beberapa hanya sebatas sampai tamat SMA saja.

Karena kain tenun *pahikung* merupakan penghasilan utama, remaja pada umumnya, terutama remaja perempuan, di Desa Lairuru lebih mengutamakan menenun dan waktu belajar menjadi nomor dua. Hal ini akan berdampak dan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah khususnya di bidang pendidikan dalam pengembangan generasi muda ke depannya di Desa Lairuru.

Dari "Studi Dokumentasi Sejarah Marapu dan Nilai-Nilai Keadilan dan Keberlanjutan di Kabupaten Sumba Timur" yang dilakukan oleh Yayasan Wali Ati (Yasalti) pada tahun 2014 terungkap bahwa 99% masyarakat Desa Lairuru merupakan penghayat Marapu, sedangkan 1% masyarakat telah beralih ke agama yang diakui pemerintah. Dalam proses belajar, khususnya pelajaran agama, siswa penganut Marapu terpaksa mengikuti pelajaran agama untuk kepentingan memperoleh nilai agama, karena pelajaran Marapu tidak ada dalam kurikulum sekolah formal.

Riset ini berupaya mengungkap aspirasi remaja penenun di Desa Lairuru mengenai masa depannya. Faktanya, hasil kain tenun *pahikung* tidak dapat membantu keluarga lepas dari jerat kemiskinan, dan hal ini berdampak pada masa depan remaja perempuan. Riset ini mengungkap bahwa meski remaja telah menghabiskan sebagian besar waktu luangnya dengan bekerja keras menenun, tetapi tidak ada jaminan bahwa aspirasinya tak akan kandas atau masa depannya menjadi lebih sejahtera. Yang lebih parah lagi yaitu para remaja harus menenun sampai larut malam jika esoknya merupakan hari pasar untuk menunjang ekonomi keluarga karena orang tua sendiri tidak mampu memenuhi produksi tenun tanpa bantuan remaja.

1.2. Pertanyaan Riset

a. Bagaimana aspirasi remaja penenun atas masa depan mereka?
b. Bagaimana remaja penenun di Desa Lairuru dapat mengungkapkan aspirasi mereka?
c. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung pendidikan berkualitas bagi remaja?
d. Kendala apa saja yang dihadapi oleh remaja dalam mengungkapkan aspirasi mereka?

1.3. Tujuan Riset

a. Menganalisis aspirasi remaja penenun *pahikung* atas masa depan mereka di Desa Lairuru, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur.

b. Menganalisis cara remaja dapat mengungkapkan aspirasi mereka dalam keluarga, lingkungan, dan pemrintah.
c. Menganalisis cara pemerintah mendukung remaja dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas.
d. Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh remaja dalam mengungkapkan aspirasi mereka.

2. Metodologi

2.1 Pendekatan Penelitian

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif kami pilih karena pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia lewat wawancara mendalam secara perorangan untuk mendapatkan informasi, gambaran, dan keputusan di tingkat individu maupun kelompok. Pada pendekatan ini, diperoleh data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.

2.2 Metode

Metodologi riset yang digunakan adalah dengan mengumpulkam data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan sumber asli atau pihak pertama untuk menjawab pertanyaan riset berupa pendapat dari subjek riset individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan. Sementara data sekunder kami kumpulkan dari literatur dan dokumen mengenai kebijakan pembangunan daerah. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari data sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolok ukur untuk mengevaluasi data primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Manfaat lain dari data sekunder adalah bahwa seorang peneliti mampu memperoleh informasi lain selain informasi utama.

Kegiatan ini diawali dengan penjajakan awal dan observasi lapangan, lalu memutuskan pemilihan responden dan yang menjadi responden dari riset ini adalah perajin kain tenun *pahikung* (perempuan dan remaja, serta pemerintah).

TABEL 8 KERANGKA RISET

No	Pertanyaan riset	Tujuan	Metode	Informasi yang hendak diperoleh
1	Bagaimana aspirasi remaja penenun atas masa depan mereka ?	Menganalisis aspirasi remaja penenun kain *pahikung* atas masa depan mereka di Desa Lairuru, Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur.	Wawancara dan etnografi remaja	Potret keseharian dan kondisi remaja perajin kain tenun *pahikung* serta peluang remaja dalam mengutarakan aspirasi terkait masa depan mereka di lingkungan keluarga
2	Bagaimana remaja penenun di Desa Lairuru dapat mengungkapkan aspirasi mereka ?	Menganalisis cara remaja dapat mengungkapkan aspirasi mereka dalam keluarga, lingkungan dan pemerintah.	Wawancara remaja	Cara atau langkah-langkah yang ditempuh oleh remaja dalam mengungkapkan aspirasi di lingkungan keluarga, komunitas, dan pemerintah
3	Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung pendidikan berkualitas bagi remaja?	Menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas bagi remaja.	Wawancara pemerintah	Peran pemerintah dilihat dari kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan atau pendidikan yang berkualitas bagi remaja, khususnya di Desa Lairuru
4	Kendala apa saja yang dihadapi oleh remaja dalam mengungkapkan aspirasi mereka?	Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh remaja dalam mengungkapkan aspirasi mereka.	Wawancara dan etnografi remaja beserta keluarganya (orang tua) dan wawancara pemerintah	Potret tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh remaja dalam mengungkapkan aspirasi

Sumber: Penulis

2.3. Strategi dan Instrumen Pengumpulan Data

2.3.1. Observasi Lapangan

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan melihat langsung kegiatan yang sedang dilakukan oleh remaja penenun. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan seluruh indera kita untuk mengamati sesuatu sehingga mempermudahkan kita mendapat informasi yang akurat tentang sesuatu yang kita teliti atau sedang amati. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematik tentang aktivitas utama masyarakat sehari-hari, termasuk kegiatan utama perempuan dan remaja, proses pembuatan kain tenun *pahikung* secara tradisional, potensi pasar dan pemasaran, serta kehidupan masyarakat di Desa Lairuru dikaitkan dengan ekonomi.

Observasi lapangan dilakukan selama 7 hari, yaitu tanggal 1, 2, 16, dan 20 Maret 2018 serta tanggal 2, 9, dan 17 April 2018. Jadwal observasi lapangan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL 9 JADWAL OBSERVASI LAPANGAN

No.	Tanggal	Lokasi		Fokus Observasi
		Dusun	RT	
1.	1 Maret 2018	Dusun 1 Suka Damai	RT Luku Kahihi (RT 001)	5 orang
2.	2 Maret 2018	Dusun 1 Suka Damai	RT Luku Wali (RT 002)	5 orang
3.	16 Maret 2018	Dusun 1 Suka Damai	RT Lairuru (RT 003)	5 orang
4.	20 Maret 2018	Dusun 2 Suka Maju	RT Tanganang (RT 004)	2 orang
5	2 April 2018	Dusun 2 Suka Maju	RT Praimarada (RT 005)	3 orang
6	9 April 2018	Dusun 3 Suka Makmur	RT Kurukuta (RT 006)	2 orang
7	17 April 2018	Dusun 3 Suka Makmur	RT Rami (RT 007)	2 orang

Sumber: Penulis

Pada observasi lapangan, yang diamati adalah aktivitas utama masyarakat sehari-hari, kegiatan utama perempuan dan remaja, proses pembuatan kain tenun *pahikung* secara tradisional, potensi pasar dan pemasaran, serta kehidupan masyarakat di Desa Lairuru dikaitkan dengan ekonomi. Sebanyak 2 — 5 orang yang diobservasi setiap RT dan merupakan perempuan dan remaja perajin kain tenun *pahikung* termasuk pemerintah desa. Semua hasil observasi lapangan didokumentasikan dalam bentuk foto, video, dan rekaman suara. Kegiatan observasi lapangan hanya dilakukan satu kali.

2.3.2. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan narasumber menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Kriteria yang digunakan dalam penentuan informan yaitu dengan menunjuk langsung informan adalah pelaku utama dari atau perajin kain tenun *pahikung*. Pedoman wawancara yang akan digunakan hanya berisi pertanyaan-pertanyaan pokok saja, sedangkan pertanyaan-pertanyaan turunan akan berkembang saat wawancara dilakukan, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan pokok.

Narasumber wawancara ini adalah perempuan dan remaja yang merupakan perajin sarung tenun *pahikung* di Desa Lairuru, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur. Alasan dari pemilihan narasumber tersebut karena untuk mendapat informasi data yang akurat, maka yang menjadi narasumber harus pelaku atau perajin kain tenun *pahikung* yang menjadi fokus riset ini.

TABEL 10 PROFIL NARASUMBER WAWANCARA

No.	Nama Narasumber	Kategori	Keterangan
1.	Noviyanti Lemba Beya	Remaja	16 tahun (Maukaraba, Dusun: Suka Damai, RT Lairuru)
2.	Jati Ninggu	Remaja	18 tahun (Luku, Dusun: Suka Damai, RT: Luku Wali)
3.	Mbaru Matalu	Remaja	28 tahun (Luku, Dusun: Suka Damai, RT: Luku Wali)
4.	Meliani Padji Jera	Remaja	14 tahun (Proyek, Dusun: Suka Makmur, RT: Rami)
5.	Anita Ridja Wadang	Remaja	15 tahun (Kahhi, Dusun: Suka Damai, RT: Luku Kahihi)
6.	Lu Taramata	Orang Tua	65 tahun, ayah dari Noviyanti Lemba Beya
7.	Pindi Mbitu	Orang Tua	60 tahun, ibu dari Noviyanti Lemba Beya
8.	Windi Jawa Kori	Orang Tua	50 tahun, ayah dari Jati Ninggu
		Pemerintah	50 tahun, Sekretaris Desa Lairuru
9.	Dangu Bila	Orang Tua	46 tahun, ibu dari Jati Ninggu
10.	Teul Kamitang	Orang Tua	48 tahun, ayah dari Mbaru Matalu
11.	Lika	Orang Tua	47 tahun, ibu dari Mbaru Matalu
12.	Oka Day Tana	Orang Tua	56 tahun, ayah dari Meliani Padji Jera
13.	Lemba Ata Padji	Orang Tua	49 tahun, ibu dari Meliani Padji Jera
14	Nggau Behar	Orang Tua	46 tahun, ayah dari Anita Ridja Wadang
15	Hana Dapa Mbanjak	Orang Tua	45 tahun, ibu dari Anita Ridja Wadang
14.	Kahi Ata Minya	Tokoh Warga	37 tahun, Sekretaris Desa Persiapan Laimandar dan penyuluh/guru agama bagi penganut Marapu
15.	Susi Susanti	Tokoh Warga	30 tahun, Tokoh Perempuan
17	Yuliana Laji	Pemerintah	38 tahun) Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Sub-bidang Sosial Politik dan Budaya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindingan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sumba Timur

Sumber: Penulis

Data-data yang dikumpulkan dalam wawancara mendalam antara lain:

1. Sejarah dan latar belakang keluarga
2. Makna menenun bagi remaja
3. Bagaimana remaja memanfaatkan waktu luang dan hobi
4. Tokoh idola remaja
5. Kehidupan remaja di desa
6. Pendidikan (pelajaran yang disukai, keaktifan, dan interaksi di sekolah)
7. Cita-cita remaja
8. Harapan orang tua terhadap anak
9. Bagaimana hubungan dan komunikasi orang tua dengan Anak.
10. Kehidupan di desa menurut orang tua
11. Pandangan orang tua terhadap pendidikan
12. Pandangan terhadap anak muda zaman sekarang
13. Harapan terhadap anak muda zaman sekarang.

Semua hasil wawancara didokumentasikan lewat foto, rekaman suara, dan catatan tangan, lantas dituangkan dalam catatan hasil wawancara.

2.4. Batasan

Penelitian ini hanya mengamati, mewawancarai, dan mendokumentasikan kegiatan utama narasumber terkait aktivitas menenun dan lingkungan sekitar serta mencari tahu aspirasi remaja penenun atas masa depan mereka, bagaimana remaja penenun di Desa Lairuru dapat mengungkapkan aspirasi mereka, peran pemerintah dalam mendukung pendidikan berkualitas bagi remaja, dan kendala apa saja yang dihadapi oleh remaja dalam mengungkapkan aspirasi mereka.

Dalam riset ini, peneliti hanya melakukan observasi dan wawancara mendalam saja tanpa melakukan etnografi penuh, karena jarak dari kota ke desa tidak terlalu jauh sehingga dapat diakses dengan mudah serta waktu observasi dilakukan mulai dari pukul 6 pagi sampai sore serta waktu wawancara dimulai dari anak-anak pulang sekolah sampai pukul 7 malam. Dengan rentang waktu seperti ini, peneliti merasa telah mendapat informasi tentang apa yang diharapkan dari riset ini. Selain itu, jika dilakukan etnografi, peneliti merasa membuat keluarga tersebut terbebani dan merasa sungkan dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, dan biasanya jika hal ini dilakukan maka harus ada yang diberikan kepada keluarga tersebut, misalnya biaya konsumsi dan lain-lain.

3. Data dan Pembahasan

3.1. Profil Wilayah Desa Lairuru

3.1.1. Wilayah Desa Lairuru

Desa Lairuru merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur. Desa Lairuru terdiri dari tiga dusun, tiga Rukun Warga (RW), dan tujuh Rukun Tetangga (RT).

TABEL 11 WILAYAH DESA LAIRURU

No.	Dusun	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
1	Dusun 01 Suka Damai	RW Kahhi	RT 001 Luku Kahihi
			RT 002 Luku Wali
			RT 003 Lairuru
2	Dusun 02 Suka Maju	RW Laimonya	RT 004 Tanganang
			RT 005 Praimarada
3	Dusun 03 Suka Makmur	RW Kurukuta	RT 006 Kurukuta
			RT 007 Rami

Sumber: Pemerintah Desa Lairuru (2017)

Desa Lairuru memiliki luas wilayah 32,8 km² (RPJMDes 2015), terletak di bagian barat pusat kota Kecamatan Umalulu dengan ketinggian antara 50 —450 meter dari permukaan laut. Kondisi alam terdiri dari lembah dan perbukitan. Adapun uraian batas Desa Lairuru:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Matawai Maringu, Kecamatan Kahangu Eti;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Watupuda, Kecamatan Umalulu;
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mutunggeding, Kecamatan Umalulu;
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti.

Jarak tempuh dari Desa Lairuru ke Melolo (ibu kota Kecamatan Umalulu) ± 8 km dengan lama tempuh ± 15 menit menggunakan kendaraan bermotor. Jarak tempuh dari Desa Lairuru ke ibu kota Kabupaten Sumba Timur (Waingapu) adalah ± 72 km dengan lama tempuh menggunakan kendaraan bermotor adalah 1 jam 30 menit (1,5 jam).

GAMBAR 13 PETA DESA LAIRURU

Sumber: Pemerintah Desa Lairuru (2017)

Masa dulu wilayah ini masih dikatakan oleh warga tetangga wilayah *luku madu* (kali/sungai kering atau tidak ada air). Mengingat pada saat itu kesulitan untuk mendapatkan air, ada seorang dari marga Luku Tana yang menggali sebuah sumur yang cukup dalam. Dengan sumur yang cukup dalam ini, ia menemukan kejadian aneh yaitu mendapat daun pucuk kelapa yang sedang melambai-lambai serta merasakan adanya tiupan angin dari dalam tanah. Saat melihat kejadian ini oknum yang menggali sumur kembali naik ke permukaan untuk berpakaian lengkap sambil menceritakan hal itu bahwa telah mendapat *mamaruru* (tiupan angin) dan mendapat pucuk kelapa dalam tanah. Setelah menceritakankan semuanya, ia kembali turun ke dalam sumur dengan berpakaian lengkap untuk mendalami kejadian ini. Tetapi setelah turun ke dasar sumur, ia tidak kembali lagi ke permukaan untuk menjelaskan hasil temuannya selanjutnya, sehingga keberadaannya sampai sekarang hilang. Berdasarkan kejadian inilah, kata *mamaru* berubah menjadi kata *lairuru*, karena Suku Sumba ketika memberi nama sebuah tempat harus berawalan *Lai-* atau *La-*, sehingga saat sekarang dikatakan Desa Lairuru (tempat tiupan angin).

Wilayah ini pada masa swapraja masih dipimpin oleh Kepala Kampung yang disebut Kepala Kampung Lairuru, bernama Domu Hamanay dari Marga Matalu. Sejak berubah dari masa swapraja ke desa, tepatnya pada bulan April 1971, mulai terbentuknya Desa Lairuru. Saat itu, yang

menjabat sebagai kepala desa adalah Bapak Oka Day Tana dari marga Kamandalorang Uma Andung.

Tahun 1997—1993 jabatan kepala desa diambil alih oleh Bapak Lapu Hukapati yang juga berasal dari marga Kamandalorang Uma Andung. Pada masa pemerintahan beliaulah Desa Lairuru mulai terkenal dan berkembang, ditandai dengan adanya pembukaan badan jalan baru menuju pusat desa dan Desa Lairuru dinobatkan sebagai Juara Harapan Tingkat Provinsi NTT pada lomba Penghijauan Se-Provinsi NTT. Sebagai penghargaan terhadap prestasi tersebut, Gubernur (Kepala Derah Tingkat I) NTT saat itu, dr. Ben Boy, memberikan hadiah berupa pembangunan jaringan perpipaan yang berasal dari Mata Air Matawai Lobung.

Tahun 1993, jabatan kepala desa dipegang oleh Bapak Yiwa Hungguli dari Marga Kamandalorang Umaratu. Namun masa kepemimpinan beliau tidak berlangsung lama, hanya 9 bulan saja, karena saat itu kepala desa terlibat dalam kasus kriminal pembunuhan. Pemerintahannya dilanjutkan oleh Bapak Yiwa Ali Ambu yang berasal dari Marga/Kabihu Maya melalui proses pemilihan di tingkat desa yang dilaksanakan secara demokratis. Beliau memimpin Desa Lairuru dari tahun 1993 hingga 2003. Pada tahun 2003, Bapak Yiwa Ali Ambu diganti oleh Bapak Yiwa Takandiwa yang juga terpilih melalui proses pemilihan secara demokratis di tingkat desa. Bapak Yiwa Takandiwa memimpin desa Lairuru sejak tahun 2003 sampai sekarang untuk tiga periode kepemimpinan.

Kondisi alam Desa Lairuru berbukit dan lembah dengan tingkat curah hujan rata-rata 100—300 mm per tahun. Terdapat dua musim dalam setahun, yaitu musim kemarau selama 7—8 bulan dan musim hujan selama 4—5 bulan. Musim hujan biasanya berlangsung antara pertengahan bulan November sampai Maret, sedangkan musim kemarau/kering mulai dari bulan April sampai November dengan suhu rata-rata antara 24°C hingga 31°C. Kondisi musim kemarau yang lebih panjang dan musim hujan yang pendek serta curah hujan kategori sedang dan juga kondisi desa yang berlembah dan berbukit sangat berdampak bagi hasil pertanian masyarakat di Desa Lairuru yang relatif rendah.

3.1.2. Kehidupan di Desa Lairuru

Jumlah penduduk Desa Lairuru berdasarkan sensus 2015 adalah 1.315 jiwa yang terdiri dari 658 laki-laki dan 657 perempuan. Sedangkan jumlah

Kepala Keluarga (KK) adalah 356 KK yang terdiri dari 291 KK laki-laki dan 65 KK perempuan.

Tabel 12 Jumlah Penduduk Desa Lairuru Berdasarkan Kelompok Usia dan Tingkat Pendidikan Terakhir

No.	Kelompok Usia	Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah	
			Laki-laki	Perempuan
1.	3-6 tahun	Belum masuk TK	36	40
		Sedang belajar di TK	-	-
2.	7-18 tahun	Tidak pernah sekolah formal	3	2
		Sedang sekolah setingkat SD/sederajat	97	91
		Sedang sekolah setingkat SMP/sederajat	25	45
		Sedang sekolah setingkat SMA/SMK/sederajat	21	29
3.	18-56 tahun	Tidak pernah sekolah formal	24	37
		Tidak tamat SD/sederajat	93	94
		Tamat SD/sederajat	188	147
		Tidak tamat SMP/sederajat	24	32
		Tamat SMP/sederajat dan tamat	28	27
		Tidak tamat SMA/SMK/sederajat	12	14
		Tamat SMA/SMK/sederajat	23	12
		Tamat D1	-	-
		Tamat D2	-	-
		Tamat D3	3	-
		Tamat S1	8	6
4.	di atas 56 tahun	Tidak pernah sekolah formal	14	21
		Tidak tamat SD/sederajat	21	29
		Tamat SD/sederajat	38	31
		Tidak tamat SMP/sederajat	-	-
		Tamat SMP/sederajat dan tamat	-	-
		Tidak tamat SMA/SMK/sederajat	-	-
		Tamat SMA/SMK/sederajat	-	-
		Tamat D1	-	-
		Tamat D2	-	-
		Tamat D3	-	-
		Tamat S1	-	-
	Total		658	657

Sumber: Pemerintah Desa Lairuru (2017)

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Lairuru adalah petani ladang yang hanya tergantung musim dan perajin kain tenun *pahikung* yang sudah sejak lama mengusahakan ini secara turun temurun.

Tabel 13 Mata Pencaharian Pokok Warga Desa Lairuru

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	291	356
Pegawai Negeri Sipil	7	3
Peternak	68	1
Pengusaha kios	12	4
Guru swasta	-	-
Dukun kampung terlatih	1	6
Pensiunan PNS	-	-
Pengusaha jasa transportasi	-	-
Bidan	-	-
Jumlah	**379**	**370**

Sumber: Pemerintah Desa Lairuru (2017)

Dengan kondisi alam yang kering dan sebagian merupakan wilayah perbukitan sampai pegunungan membuat masyarakat sangat tergantung pada iklim karena hampir semua masyarakat di Desa Lairuru bermata pencaharian sebagai petani ladang dalam arti berkebun yang dilakukan setahun sekali dengan hasil yang tidak menentu. Kegiatan menenun di setiap rumah tangga sudah merupakan kegiatan rutin sepanjang tahun serta merupakan sumber penghasilan utama untuk perempuan dan rumah tangga.

Desa Lairuru berbatasan langsung dengan beberapa desa lain seperti Desa Mutunggeding, Desa Watupuda, Desa Kamanggih, dan Desa Matawai Maringu. Jarak dari batas Desa Mutunggeding ke pusat Desa Lairuru yang merupakan desa terdekat adalah ± 3 km. Jalan penghubung antardesa tersebut masih berupa jalan sertu yang sudah mulai rusak dan berlumpur pada musim hujan. Sedangkan jalan yang menghubungkan wilayah Desa Laimandar dan Kilimbatu masih berupa jalan tanah dan baru ± 800 meter yang berupa jalan rabat[114]. Jalan penghubung antardusun pun masih berupa jalan tanah. Untuk sarana transportasi darat, masyarakat menggunakan alat transportasi pribadi bagi yang punya kendaraan bermotor dan jasa ojek untuk menjual hasil kain tenun *pahikung* karena mereka harus menjual hasil kain tenun *pahikung* pukul 02.30 subuh di Pasar Melolo. Jarak dari Desa Lairuru ke Pasar Melolo sekitar 8 km, dapat ditempuh dalam waktu 20 menit dengan kendaraan bermotor. Biaya ojek dari Desa Lairuru ke Pasar Melolo sekitar 10.000 rupiah.

Jaringan listrik dari Perusahan Listrik Negara (PLN) masuk ke Desa Lairuru sejak tahun 1987, tetapi jaringan listrik ini baru sampai di Dusun Suka Damai (Dusun 1). Tidak semua masyarakat di dusun ini mampu mengaksesnya, karena biaya pemasangan listrik cukup mahal. Sampai saat ini, sebagian warga di dusun tersebut dan dua dusun lainnya masih menggunakan lampu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bantuan dari desa menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016.

Dengan keberadaan jaringan listrik, sangat memudahkan sebagian warga di Dusun Suka Damai mengakses informasi dan hiburan melalui radio dan televisi (walaupun kepemilikan TV dan parabola warga baru berjumlah 20 unit). Sedangkan untuk akses komunikasi dengan menggunakan telepon seluler tidak dapat dilakukan oleh warga di Dusun Suka Damai, karena dusun ini letaknya di lembah, tidak mendapat jaringan Telkomsel atau

---

114 Pembukaan jalan dibiayai dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) tahun anggaran 2010

yang lainnya. Karena itu, untuk menggunakan telepon seluler, warga Dusun Suka Damai harus ke puncak gunung yang letaknya tidak jauh dari pusat desa. Sedangkan warga Dusun Suka Makmur dan Dusun Suka Maju yang terletak di atas pegunungan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi melalui telepon seluler karena mendapatkan jaringan dari Kecamatan Kahaungu Eti.

Bangunan pengolahan air bersih atau air minum di Desa Lairuru berjumlah 2 unit yang berasal dari mata air yang telah memiliki jaringan perpipaan. Untuk sanitasi lingkungan, tidak semua warga mempunyai jamban. Total jamban yang ada di Desa Lairuru sebanyak 196 dengan rincian yaitu Dusun 1 sebanyak 76 unit, Dusun 2 sebanyak 67 unit, dan Dusun 3 sebanyak 53 unit. Bagi warga yang tidak memiliki jamban, mereka biasanya menggunakan kebun untuk melakukan buang air besar. Untuk layanan kesehatan, warga Desa Lairuru mengakses layanan kesehatan di satu Puskesmas Pembantu (Pustu) dan satu Poliklinik Desa (Polindes) yang berada di desa. Tidak ada tenaga medis atau bidan desa yang menetap di Desa Lairuru, hanya sebulan sekali datang ke desa. Untuk mengakses puskesmas, masyarakat harus ke Melolo yang jaraknya 7 kilometer dari pusat desa.

Desa Lairuru mempunyai fasilitas pendidikan, yaitu SD Inpres Lairuru yang berdiri sejak 22 Juli 1980 dengan kondisi cukup baik, dapat diakses dengan mudah oleh anak-anak. Sedangkan untuk pendidikan tingkat SMP berada di pinggiran Kota Melolo yang berjarak 7—15 km. Sementara untuk pendidikan SMA harus ke pusat Kecamatan Umalulu yang jaraknya 6—25 km dari Desa Lairuru. Lokasi sekolah berada di Kelurahan Lumbu Koreh.

Budaya dan struktur sosial masyarakat Desa Lairuru tidak ada lagi perbedaan yang berkaitan dengan kasta maupun akses terhadap sumber daya yang ada. Mereka sudah hidup berbaur seperti masyarakat pada umumnya dan hal ini merupakan kenyataan yang riil terjadi di desa ini. Nilai-nilai budaya masyarakat Desa Lairuru masih sangat kental terutama bagi warga penghayat Marapu. Mereka berdoa (*hamayang*) menurut tradisi yang sudah berlangsung sejak lama sampai saat ini, terutama sebelum melakukan panen. Dengan adanya tradisi *hamayang* ini, tidak ada dampak sosial yang terjadi antara penganut Marapu dengan masyarakat yang sudah Kristen atau lainnya dalam melakukan interaksi dan mereka menjalani ini seperti biasa dalam kehidupan mereka sehari-hari, begitu juga hubungan

antar kepercayaan dengan pelayanan publik berjalan seperti biasa dan tidak ada perbedaan. Budaya ini akan tetap dipertahankan sampai turun-temurun karena merupakan warisan budaya dari leluhur mereka.

3.2. Profil Umum Narasumber

3.2.1. Noviyanti Lemba Beya

Novi (16 tahun, kelas 3 SMP Negeri 1 Umalulu) adalah anak bungsu dari 9 bersaudara (3 laki-laki dan 6 perempuan) dalam keluarga Bapak Lu Taramata (65 tahun) dan Ibu Pindi Mbitu (60 tahun). Keluarga ini merupakan Kabihu/Marga Matalu Umma Udi Kampung Maukaraba di Desa Lairuru, Kecamatan Umalulu. Keluarga ini secara strata sosial merupakan masyarakat biasa. Keluarga ini merupakan warga asli dari Desa Lairuru, di mana Ibu Pindi Mbitu berasal dari Kampung Luku, sedangkan Bapak Lu Taramata dari Kampung Maukaraba. Keduanya menganut kepercayaan Marapu. Meski berbeda marga (*kabihu*), Bapak Lu Taramata dan Ibu Pindi Mbitu *diizinkan* untuk menikah secara adat Sumba dengan dasar karena sering bertemu (kampungnya berdekatan) dan orang tua kedua pihak juga mendukung. Namun demikian, pernikahan mereka tidak bisa tercatat resmi di Catatan Sipil Negara karena kepercayaan Marapu tidak diakui sebagai agama sah untuk melangsungkan perkawinan[115].

Orang tua Novi tidak memiliki kemampuan baca tulis. Bapak Lu Taramata hanya mengenyam pendidikan kelas 1 SD selama 5 hari. Saat itu, guru menyuruh membaca, tetapi Bapak Lu Taramata tidak bisa, sehingga ia merasa minder dan malu, lalu akhirnya ia keluar dari sekolah. Adapun Ibu Pindi Mbitu tidak sekolah sama sekali, lantaran letak sekolah yang jauh dari rumah (saat itu, sekolah hanya ada di Paud Desa Watuhadang, sekitar 6 km dari tempat tinggal Ibu Pindi Mbitu) dan akses jalan yang sulit, juga keluarga tidak punya uang untuk biaya sekolah.

Dari 9 anak dalam keluarga ini, anak pertama hingga ketujuh sudah menikah. Mereka tinggal di Desa Lairuru dengan rumah tangga masing-masing kecuali anak nomor 6, yang meski sudah menikah, masih tinggal bersama orang tua. Dari 7 anak yang sudah menikah itu, hampir semua bekerja sebagai petani, hanya anak ke-4 yang berprofesi sebagai guru kontrak di SD Tambahak. Anak nomor 1,2,3,5,6,7 hanya bersekolah sampai SD tetapi tidak lulus, karena sekolah jauh.

115 Kehadiran Program Peduli di Yasalti pada tahun 2017 memungkinkan pasangan ini mencatatkan perkawinannya secara Negara, dan kini bisa mengakses bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang didapat setiap triwulan sebesar 500.000 rupiah.

Anak nomor 4 bisa bersekolah hingga lulus Diploma Komputer di Bogor karena selama sekolah ada kemauan sambil kerja dan tinggal dengan orang Tionghoa hingga bisa pergi kuliah sambil kerja tanpa bantuan dari orang tua. Anak yang lain tidak sekolah karena mereka tidak mau untuk tinggal dengan orang lain maupun keluarga.

Sementara, Desi (anak nomor 8) dan Novi (bungsu, anak nomor 9) masih sekolah dan tinggal bersama orang tua. Desi baru selesai mengikuti tes di Universitas Nusa Cendana Kupang untuk jurusan Ilmu Komunikasi, Pendidikan Sosiologi, dan Sejarah. Jika lulus nanti, ia akan mengambil jurusan guru Pendidikan Sosiologi. Desi dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi karena ia nekat melakukan mogok makan setiap hari hingga akhirnya orang tua mengikuti kemauannya dan berusaha mendukungnya. Adapun Novi sudah lulus SMP dan akan melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA pada tahun ini. Baik Novi, Desi, maupun anak nomor 4 sudah menjadi pemeluk agama Kristen Protestan. Mereka dibaptis saat sekolah SMP karena harus mengikuti pelajaran agama Kristen.

Untuk menghidupi keluarga ini, Bapak dan Ibu masih terus menekuni pekerjaan sebagai penenun, terus berkerja sambil menunggu pada musim hujan kerja kebun. Ibu Pindi Mbitu bersama Desi menjual hasil tenun di pasar tradisional Melolo setiap minggu pada hari Kamis. Mereka harus pergi jual pada pukul 02.00—03.00 subuh supaya bisa terjual sesuai harga, yakni Rp150.000 — 350.000,-. Kalaupun harganya tidak sesuai, tenun tersebut tetap dijual supaya mereka bisa membeli kebutuhan rumah dan membeli modal bahan baku/benang (sekitar 60.000 — 150.000 rupiah sesuai ukuran sarung yang ditenun). Dalam satu minggu mereka menghasilkan 1 lembar kain dan untuk membawa hasil tenun tersebut ke pasar, mereka harus berjalan kaki sejauh 8 km atau naik ojek dengan biaya sebesar Rp10.000,- sekali pergi. Sementara pendapatan bersih setiap bulan menurut mereka sebesar Rp50.000,- hingga Rp100.000,- dari 4 lembar kain yang dihasilkan dalam sebulan.

Novi mempunyai aktivitas yang sangat padat, sehingga masa remaja tidak dilalui dengan bermain, belajar, dan kumpul bersama teman. Kondisi ekonomi keluarga yang cukup sulit serta tradisi dalam masyarakat Desa Lairuru bahwa anak perempuan dalam keluarga harus bekerja membantu orang tua, membuat anak seusia Novi harus sudah menanggung beban keluarga, yakni bekerja sambil sekolah.

Berikut tabel aktivitas Novi dari pagi hingga malam:

TABEL 14 AKTIVITAS HARIAN NOVI

Waktu (jam)	Lokasi	Kegiatan
04.00-5.30	Rumah	Kerja makanan babi (iris batang pisang dan ditumpuk atau parut kelapa).
05.30-06.00	Rumah	Cuci piring, masak air, sapu rumah
06.00-6.30	Rumah	Mandi dan siap berangkat sekolah, *tidak pernah sarapan pagi*
6.30-.7.15/7.30	Perjalanan sekolah	Jalan menuju sekolah dengan berjalan kaki, jika ada sepeda motor bisa menumpang. Tetapi tidak selalu ada lebih banyak jalan kaki. Sehinga kadang-kadang terlambat sampai sekolah.
7.30-13.15	Sekolah	Belajar
13.15	Sekolah	Pulang sekolah
13.30	Rumah	Makan siang dan istrahat
15.00	Rumah	Tenun
16.30-19.00	Rumah	Kerja makanan babi, timba air, cari kayu api. Proses engerjaan sama dengan pada pagi hari, cari kayu bakar di atas gunung dengan di pikul.
19.30	Rumah	Makan malam bersama keluarga
20.00	Rumah	Belajar
21.00	Rumah	Tenun sampai larut malam, apalagi jika besok merupakan hari pasar.

Sumber: Penulis

Kegiatan berkumpul dengan teman seusia hanya dapat dilakukan ketika jam sekolah, saat Novi bisa bercerita hal-hal lucu bersama teman. Kegiatan di luar untuk berkumpul dengan teman remaja yang ada di lingkungan hanya setiap hari Minggu saat mengikuti Pemahaman Alkitab (PA) remaja. Novi diharuskan mengisi buku ibadah/buku mingguan setiap hari Minggu untuk mata pelajaran Agama Kristen Protestan.

Novi mengidolakan Intan, kakak nomor 7 yang saat ini sudah menikah dan tetap tinggal di Desa Lairuru. Intan bermata pencaharian sebagai petani dan penenun. Intan sangat mencintai adiknya. Prestasi Novi di sekolah cukup membanggakan. Di sekolah, Novi juga cukup dekat dengan wali kelasnya, yaitu Ibu Tety karena sering berkonsultasi mengenai pelajaran yang tidak dipahami oleh Novi, bercerita tentang masa remaja bersama dengan teman-teman, serta rencana ke depan nanti melanjutkan studi tingkat SMA. Saat ini, Novi tertarik dengan pelajaran agama Kristen, bahkan berpikir untuk menjadi guru agama Kristen, meski ia sendiri belum dibaptis. Novi pernah pergi ke tempat lain, seperti Waingapu untuk sekadar jalan-jalan. Namun, bagi Novi, Desa Lairuru adalah tempat terbaiknya untuk tinggal, karena ia bisa tetap dekat dengan orang tua serta keluarga dan terus mempertahankan kain tenun *pahikung* yang menjadi warisan keluarga dan masyarakat.

3.2.2. Jati Ninggu

Jati (18 tahun, kelas 1 SMA Negeri 1 Rindi) adalah anak kedua dari 3 bersaudara (1 laki-laki dan 2 perempuan) dalam keluarga Bapak Windi Jawa Kori (50 tahun) dan Ibu Dangu Bila (46 tahun). Keluarga ini merupakan Kabihu Anakariung dengan status sosial sebagai masyarakat biasa. Ketiga anak keluarga ini semuanya bersekolah; di mana anak pertama kelas 2 SMA dan anak ketiga duduk di kelas 2 SMP. Ibu Dangu Bila berasal dari Dusun Laimandar, sedangkan Bapak dari Luku. Kedua orang tua Jati berpendidikan: Bapak lulusan SMA, sedangkan Ibu lulusan SMP. Ibu tidak melanjutkan sekolah karena lokasi sekolah Lumbu Koreh sangat jauh (30 km) dari tempat tinggalnya di Laimandar.

Kedua orang tua Jati dulunya adalah penganut Marapu, kini memeluk agama Kristen Protestan, berjemaat di Gereja Kristen Sumba (GKS) Lairuru. Keluarga Jati berkerja di kebun hanya menunggu musim hujan untuk menanam jagung, yaitu setahun sekali. Selain sebagai petani, keluarga Jati Ninggu juga memelihara ternak babi dan ayam yang biasanya digunakan untuk pesta dan urusan serta hanya sesekali saja dijual untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah.

Jati suka sekali menenun, karena baginya, menenun itu sudah merupakan warisan dan mata pencaharian keluarga, sehingga ia pun bekerja untuk membantu orang tua supaya bisa memenuhi kebutuhan sekolah dan kebutuhan hari-hari dalam rumah. Sejak kelas 6 SD, Jati sudah diajari oleh orang tua untuk membuat motif sederhana, yakni *kali* yang ukuran lebarnya 60 cm. Sampai sekarang, Jati sudah bisa menenun dengan banyak motif yang tergolong sulit, yakni motif *mamuli*, ayam, *andung,* dan *karanga datar*. Pengerjaan satu lembar sarung yang lebarnya 65 — 80 cm bisa memakan waktu satu bulan secara mandiri.

TABEL 15 AKTIVITAS HARIAN JATI

Waktu (jam)	Lokasi	Kegiatan
06.00	Rumah	Kerja makanan babi (iris batang pisang dan cuci piring, sapu rumah,
07.00	Siap kesekolah	Mengikuti proses belajar mengajar di sekolah
13.15	Sekolah	Pulang sekolah
13.30	Rumah	Makan siang dan istrahat
14.00	Rumah	Tenun
16.30-19.00	Rumah	Kerja makanan babi, timba air, cari kayu api, masak
19.30	Rumah	Makan malam bersama keluarga
20.00	Rumah	Belajar
21.00-selesai	Rumah	Tenun sampai larut malam apalagi jika besok merupakan hari pasar.

Sumber: Penulis

Untuk menenun, Jati lakukan setelah pulang sekolah, yaitu mulai dari pukul 14.00—16.00. Setelah itu, ia harus mengambil air, memotong batang pisang untuk ternak dan masak makan malam. Setelah makan malam, ia belajar selama 1 jam dan lanjut menenun kembali sampai pukul 21.30. Jika esok adalah hari pasar[116], maka Jati harus tenun sampai larut malam, bisa sampai pukul 00.00—01.00 karena pada pukul 02.00 subuh Ibu harus berangkat ke pasar tradisional dengan naik sepeda motor milik keluarga.

Kain tenun *pahikung* dihargai 450.000—500.000 rupiah jika menggunakan bahan benang dari toko. Sedangkan harga sarung asli bisa mencapai 1.000.000 rupiah, karena memakai bahan alami, prosesnya lebih rumit dan panjang. Kain tenun harus laku pada pukul 02.00—03.00 supaya terjual sesuai dengan harga di atas. Jika sudah melewati jam tersebut, harga sarung turun karena sudah banyak penjual. Jadi terpaksa dijual dengan harga rendah, hanya 150.000—300.000 rupiah daripada kain tenunnya harus dibawa kembali ke rumah dan pulang tanpa bawa uang. Waktu istirahat hanya sedikit setelah pulang pasar, dan setelah itu, Jati harus kembali bekerja membantu orang tua. Jati nyaris tak punya kesempatan beraktivitas bersama teman sebaya. Jika sore ada kegiatan olah raga (bola voli) di sekolah, Jati juga agak sulit untuk pergi karena lokasi sekolah jauh serta tidak ada transportasi ke sekolah.

Jati tidak mempunyai idola dalam desa. Namun demikian, ia lebih suka berada di Desa Lairuru, karena baginya, Lairuru merupakan tanah kelahiran, apapun keadaannya harus diterima. Ke depannya, Jati lebih suka tinggal di Desa Laimandar karena pemandangannya bagus, juga kakek dan keluarga besarnya ada di Laimandar yang sekarang merupakan Desa Persiapan.

Jati bercita-cita menjadi guru geografi agar bisa mempelajari setiap kondisi wilayah yang ada di setiap daerah. Jika suatu hari nanti bekerja dengan profesi guru, ia tetap mau kembali ke Desa Lairuru agar bisa membantu anak-anak bersekolah, karena di Desa Lairuru banyak anak yang tidak sekolah.

116 Hari Kamis adalah hari pasar di Kecamatan Umalulu.

3.3.3. Mbaru Matalu

Mbaru Matalu (28 tahun) adalah anak ketiga dari enam bersaudara (tiga laki-laki dan tiga perempuan) dalam keluarga Bapak Teul Kamitang (48 tahun) dan Ibu Lika (47 tahun) yang berasal dari *kabihu* Matalu Umawui dengan status sosial sebagai masyarakat biasa. Bapak berasal dari Kampung Maukaraba dan Ibu dari Kampung Kahi, Desa Lairuru. Keduanya menganut kepercayaan Marapu dengan mata pencaharian utama adalah bertani dan bertenun.

Bapak Teul tidak bersekolah karena kondisi jalan dan jarak sekolah yang sangat jauh sekitar 15 km menuju ke Pau. Ibu sekolah hanya sampai kelas 2 SD, juga karena lokasi sekolah sangat jauh di Pau, yaitu sekitar 20 km dan harus mendaki gunung untuk ke sekolah, akhirnya memutuskan keluar sekolah dan lebih memilih membantu orang tua menenun di rumah. Kedua pasangan ini menikah secara adat Sumba sedangkan secara negara baru dicatatkan tahun lalu[117].

Pasangan ini memliki 6 anak, di mana empat di antaranya adalah penganut Marapu, sedangkan dua orang memeluk agama Kristen Protestan. Keenam anak ini ada yang bersekolah sampai SMA dan ada yang pernah kuliah. Anak pertama lulus SMA, sudah menikah ada di Desa persiapan Laimandar; anak kedua tidak lulus SD, sudah menikah dan tinggal di desa Lairuru; Mbaru, anak ketiga, kuliah di Universitas Terbuka Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (UT-PG PAUD) hingga semester 3, tetapi tidak lanjut sampai selesai karena biaya dan belum menikah dan masih tinggal bersama orang tua; anak keempat tidak lulus SD dan belum menikah; sementara anak kelima dan keenam tidak lulus SD dan belum menikah, masih tinggal bersama orang tua. Penyebab tidak sekolah sampai tamat SD karena malas ke sekolah yang dipengaruhi oleh lokasi sekolah yang cukup jauh (sekitar 4 km) dari rumah dan harus ditempuh dengan berjalan kaki.

Mbaru pernah melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka yang ada di Kota Waingapu dengan waktu kuliah tatap muka hanya hari Sabtu dan Minggu, sementara Senin sampai Jumat magang di PAUD yang ada di Desa Lairuru. Namun Mbaru hanya kuliah sampai semester 3 karena tidak

117 Dengan adanya Program Peduli dari Yasalti tahun 2017, pasangan ini ikut pelayanan pencatatan sipil perkawinan dalam pelayanan massal pencatatan di kantor Desa Lairuru, sehingga sekarang ini anak-anak mendapatkan dokumen/akta kelahiran atas nama kedua orang tua.

mampu membayar uang registrasi semester 4. Mbaru lantas memutuskan untuk tidak kuliah sampai saat ini dan hanya fokus mengurus orang tua serta adik-adiknya. Memang ada penyesalan yang ia rasakan, tetapi ia harus merelakan apa yang penah menjadi cita-citanya. Menurut Mbaru, sekarang yang ada di pikirannya hanya berkerja dan tenun.

TABEL 16 AKTIVITAS HARIAN MBARU

Waktu (jam)	Lokasi	Kegiatan
06-.08	Rumah	Kerja rumah (macam-macam)
08.00-12.00	Rumah	Tenun
12.00-13.00	Rumah	Masak, makan
13.00-14.00	Rumah	Istrahat
14.00-16.00	Rumah	Tenun, urus ternak babi, sapi
16.00-19.00	Rumah	Kerja makanan babi, timba air, cari kayu api
19.30	Rumah	Makan malam bersama keluarga
20.00-selesai	Rumah	Tenun sampai larut malam apalagi jika besok merupakan hari pasar.

Sumber: Penulis

Sejak usia 8 tahun, Mbaru sudah terbiasa membantu orang tua seperti menggulung benang atau ambil bahan baku di padang. Setelah ia berusia 12 tahun, ia sudah bisa bertenun motif sederhana. Sekarang ini, Mbaru telah mahir menenun dengan berbagai motif seperti *mamuli*, *andung*, ayam, *karangnatar,* dan lain-lain. Harga jual sarungnya pun bervariasi, mulai dari 500.000 rupiah hingga kisaran 1.000.000 rupiah, yang dipasarkan di Pasar Melolo seminggu sekali setiap Kamis dini hari. Hasil penjualan tenun ini hampir selalu habis digunakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari dan mengurus saudara, sehingga ia tidak bisa menabung.

Kegiatan di luar rumah hanya pergi beribadah setiap hari Minggu di Gereja Kristen Sumba (GKS). Jarak dari rumah ke GKS hanya sekitar 500 meter. Itulah kesempatan bagi Mbaru untuk *refreshing,* bertemu teman-teman, dan bercerita tentang banyak hal. Waktu sehari-hari lebih banyak dihabiskan bersama ibu bertenun sarung, selendang, serta bekerja di kebun jika musim hujan. Mbaru tidak lagi punya keinginan untuk kembali kuliah. Begitu juga dengan adik-adiknya, tidak mempunyai keinginan lagi bersekolah, dan mereka seperti sudah nyaman dengan keadaan sekarang. Mbaru Matalu lebih menyukai Desa Lairuru karena Desa Lairuru sudah terkenal dengan sarung motif *pahikung* dan selendang dengan berbagai susunan motif yang ada dan sekarang ini sudah bisa divariasi yang disesuaikan dengan keinginan konsumen.

3.3.4. Meliani Padji Jera

Meli (14 tahun, kelas VIII SMP Negeri 1 Umalulu) adalah anak kelima dari 6 bersaudara (dua laki-laki dan empat perempuan) dari pasangan Bapak Oka Day Tana (56 tahun) dan Ibu Lemba Ata Padji (49 tahun). Pasangan ini melakukan berbagai pekerjaan setiap hari, di mana suami, istri, dan anak-anak berkerja sama. Pasangan ini merupakan penganut Marapu[118]. Anak-anak dari keluarga ini ada yang masih menganut Marapu (anak pertama, kedua, keempat, kelima, keenam) dan juga ada dibaptis masuk gereja (anak ketiga).

Bapak bisa membaca dan menulis karena sekolah sampai kelas 5 SD, sedangkan Ibu lulus SD namun tidak melanjutkan sekolah karena jarak sekolah yang sangat jauh, sekitar 20—21 km di Pau Desa Watuhadang, harus ditempuh dengan berjalan kaki melewati gunung. Maka itu, anak-anak mereka saat ini diberi kesempatan untuk sekolah. Anak pertama (laki-laki) saat ini kuliah di Universitas Wira Wacana semester akhir jurusan Ekonomi Pembangunan, dengan biaya kuliah saat ini mencapai 2.000.000 rupiah setiap semester. Anak kedua tidak lulus SMA dan sekarang kerja merantau di Kalimantan. Anak ketiga (laki-laki) sudah lulus SMA tahun 2015 lalu, tetapi tidak kuliah karena menunggu saudara yang pertama selesai kuliah, sekarang di rumah saja membantu orang tua. Anak keempat (perempuan) putus sekolah SMP kelas VIII karena sekolah jauh. Anak kelima adalah Meli. Sedangkan anak keenam (perempuan) baru berusia 1,7 tahun. Orang tua Meli sangat berharap anak pertama bisa cepat selesai kuliah sehingga adik-adik bisa bergantian sekolah, karena hasil tenun dan ternak belum cukup membiayai jika semua kuliah bersamaan. Sedangkan anak kedua yang kerja di Kalimantan hanya buruh dengan gaji pas-pasan sehingga jarang mengirim uang buat keluarga.

Bagi Meli, bertenun sudah hal yang biasa. Menenun telah menjadi pekerjaan setiap hari, karena menenun merupakan penghasilan utama keluarga. Sejak usia 8 tahun Meli sudah membantu orang tua *pamening* atau gulung benang dan setelah berusia 11 tahun ia sudah mulai tenun sarung motif *kali* yang sederhana dengan ukuran 60—80 cm dan selendang. Hasil tenun dijual ke Pasar Melolo oleh Ibu. Ibu biasa ke Pasar Melolo menggunakan ojek dengan biaya sebesar 40.000 rupiah pergi dan pulang. Harga jual bervariasi, yaitu kain yang kecil 150.000 rupiah dan sarung besar

118 Pada tahun 2017, pasangan ini akhirnya bisa melangsungkan pencatatan perkawinan secara negara yang difasilitasi oleh Yasalti melalui Program Peduli sehingga anak-anak bisa mendapatkan akta kelahiran yang sah atas nama kedua orang tua.

harganya 500.000 rupiah. Hasil jual sarung dipegang oleh Ibu untuk digunakan membeli kebutuhan sehari-hari.

Tabel 17 Aktivitas Harian Meli

Waktu (jam)	Lokasi	Kegiatan
06.00	Rumah	Bangun tidur
06.15	Rumah	Cuci piring
06.30	Rumah	Mandi dan siap pergi sekolah
07.15	Sekolah	Mengikuti belajar mengajar di skolah
13.00	Sekolah	Pulang sekolah
13.30	Rumah	Makan siang dan istrahat
15.00	Rumah	Bangun Tidur
15.15	Rumah	Tenun
16.30-19.00	Rumah	Kerja makan malam
19.30	Rumah	Makan malam bersama keluarga
20.00	Rumah	Kerja tugas dan belajar
21.00	Rumah	Tidur

Sumber: Penulis

Meli memiliki hobi main bulu tangkis karena bermain bulu tangkis menurut Meli dapat mengajarkan kita untuk fokus. Meli bahkan bercita-cita menjadi guru olah raga. Cita-citanya ini ia ungkapkan kepada Ibu. "Meli selalu dekat dengan Mama karena setiap hari ketemu Mama dan di rumah jika pulang sekolah. Tugasnya menjaga adik yang masih kecil dan saya biasa bercerita di Mama tentang tenun dan sekolah, karena bertenun Mama yang selalu mengajari, dan tentang sekolah dan masa depan saya harus minta pendapat dari Mama. Saya bercita-cita atau bermimpi menjadi guru olah raga". Menurutnya dengan menjadi guru olah raga, ia bisa mengajarkan kepada anak-anak didik bahwa ada banyak ragam olah raga dan jika kita pintar bisa juga menjadi atlet, juga membuat kita sehat. Kegiatan ini ia lakukan hanya saat jam sekolah atau jam olah raga saja. Sedangkan di rumah atau di lingkungan sekitar tidak pernah ia lakukan. Kesehariannya saat di rumah hanya fokus membantu orang tua menenun.

Meli mempunyai waktu di luar rumah pada saat ada kegiatan Pramuka. Ia sangat menyukai kegiatan Pramuka, karena menurutnya dapat mengajarkan kita untuk bisa saling menghargai satu sama lain, mencintai alam seperti menanam pohon di pesisir pantai, tidak membakar hutan dan buang sampah plastik sembarang.

3.3.5. Anita Ridja Wadang

Anita (15 tahun, kelas IX SMP Negeri 1 Umalulu) adalah anak ketiga dari 5 bersaudara (dua laki-laki dan tiga perempuan) dalam keluarga Bapak Nggau Behar (46 tahun) dan Ibu Hana Dapa Mbanjak (45 tahun). Ibu berasal Kabihu Mataui dan Bapak Kamandalorang di Desa Lairuru. Kedua

orang tua ini masing-masing mengenyam pendidikan sampai SMP. Bapak sekolah sampai kelas 2 SMP, namun tidak mau melanjutkan sekolah karena sekolah jauh dan setiap hari harus jalan kaki sejauh 8 km, sehingga menjadi malas. Ibu sekolah sampai kelas 3 SMP, tapi tidak sempat ikut ujian nasional karena sakit berat.

Tiga anak mereka telah dibaptis masuk gereja Pentakosta, sedangkan yang dua anak lain belum dibaptis tetapi selalu ikut ibadah di gereja. Keluarga ini di rumah memelihara ternak babi dan ayam, walaupun akhir-akhir ini babi sering terserang penyakit dan mati. Dari hasil pelihara ternak, Bapak dan Ibu mampu membiayai anak mereka yang sedang kuliah di Universitas Wira Wacana, saat ini sudah semester 5 jurusan Pendidikan Guru Matematika, dengan biaya registrasi per semester sebesar 2.500.000 rupiah. Anak nomor 2 saat ini sudah lulus ujian nasional tingkat SMA, tetapi untuk sementara tidak melanjutkan kuliah dulu, karena harus menunggu kakak yang sedang kuliah selesai baru ia gantian melanjutkan pendidikan. Anita yang merupakan anak nomor 3 saat ini masih duduk di tingkat SMP kelas IX (kelas 3). Anak keempat di kelas 2 SMP dan anak kelima ada di kelas 6 SD.

Tabel 18 Aktivitas Harian Anita

Waktu (jam)	Lokasi	Kegiatan
06.00	Rumah	Bangun tidur
06.15	Rumah	Cuci piring
06.30	Rumah	Mandi dan siap pergi sekolah
07.15	Sekolah	Mengikuti belajar mengajar di skolah
13.00	Sekolah	Pulang sekolah
13.30	Rumah	Makan siang dan istrahat
15.00	Rumah	Bangun Tidur
15.15	Rumah	Tenun
16.30-19.00	Rumah	Kerja makan malam
19.15	Rumah	Makan malam bersama keluarga
19.30	Rumah	Kerja tugas dan belajar
21.30	Rumah	Tidur

Sumber: Penulis

Dari umur 10 tahun, Anita sudah bisa *pamening* atau gulung benang. Pada umur 12 tahun, ia sudah bisa tenun motif sederhana, yaitu motif *kali* dan sampai sekarang Anita belum bisa mengerjakan motif yang sulit, seperti *mamuli*, ayam, *andung* dan hanya bisa tenun, sehingga untuk motif Ibu yang buat. "Saya suka menenun karena setiap hari sering melihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mengerjakan tenun. Jadi saya mulai ikut belajar

supaya tahu, supaya dapat uang sendiri." Saat ini Anita sudah bisa menghasilkan sarung 4 lembar tenun dalam 1 bulan kalau motif biasa. Hasil tenun dijual ke pasar Melolo setiap Kamis oleh Ibu dengan harga 150.000—500.000 rupiah.

Selain menenun, Anita masih mempunyai waktu bisa bertemu teman-teman sambil latihan *vocal group* di gereja. Anita sekarang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, sehingga setiap seminggu atau dua minggu sekali, ia mengisi pujian bersama teman-temannya. Sebelum mengisi pujian di gereja, Anita bersama teman-teman melakukan latihan seminggu sekali, yaitu setiap Sabtu. Menyanyi bersama teman-teman merupakan kesenangan tersendiri bagi Anita karena bisa menyalurkan hobinya untuk memuji Tuhan. Sementara ini, cita-citanya adalah menjadi guru agama Kristen.

Anita sangat dekat dengan Ibu karena ia sering bertanya tentang motif dan benang apa yang digunakan untuk motif-motif tertentu. Tak jarang juga ia dimarahi oleh orang tua jika ia melawan dan tidak mengerjakan apa yang sudah perintahkan. Anita sering bercerita kepada orang tuanya tentang masa depannya dan orang tua mengatakan kalau mereka mampu mereka akan dukung.

3.3. Memintal Masa Depan: Aspirasi Remaja dan Pemuda Desa Lairuru

Semua remaja penenun di Desa Lairuru menginginkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi tuntutan ekonomi menghambat untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita mereka. Mereka tidak mampu untuk memaksakan kehendak walaupun banyak orang tua yang menginginkan anak mereka untuk berhasil dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Meski remaja dan orang tua mempunyai penghasilan dari penjualan kain tenun *pahikung,* kenyataannya tidak mampu meningkatkan ekonomi keluarga yang pada akhirnya anak mereka menjadi korban dari kondisi ekonomi keluarga ini.

Dari hasil riset ini, para remaja penenun di Desa Lairuru pada umumnya mempunyai cita-cita menjadi guru, baik sebagai guru agama, guru olah raga, maupun guru geografi. Dari cita-cita ini, pernah ada remaja yang kuliah sebagai guru PAUD tetapi hanya sebatas semester III saja dan saat memasuki semester IV orang tidak mampu lagi membiayai kuliahnya karena masalah ekonomi. Sehingga dengan data ini kita dapat katakan

bahwa remaja di Desa Lairuru tidak akan berkembang jika masalah ekonomi keluarga tidak berubah yang mana sampai saat ini mereka masih sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Ibu Kahi Ata Minya, salah satu tokoh warga, di Desa Lairuru hampir semua masyarakat ekonominya masih pas-pasan sehingga anak mereka hanya bisa sekolah sampai jenjang SMP dan SMA saja. Saat ini, anak-anak yang bersekolah sampai tingkat yang lebih tinggi sangat minim (data ada di profil desa). Jika ada orang tua yang menyekolahkan anaknya, maka mereka harus menenun, memelihara babi dan ayam untuk membantu biaya sekolah dari anak mereka. Bagi orang yang merasa bahwa pendidikan itu penting, anak-anaknya dititipkan kepada keluarga yang cukup berdekatan dengan sekolah. Sementara, anak-anak yang putus sekolah biasanya pergi menjadi buruh kerja di kota besar seperti di Bali, Kalimantan, atau menjadi TKI di Malaysia dan Singapura, dan uang hasil kerjanya digunakan untuk membangun rumah, membantu saudara sekolah, membeli motor, beras, kopi, gula, dan lain-lain. Sedangkan anak-anak yang tidak berkerja di luar tetap berada di Desa Lairuru untuk membantu orang tua kerja di kebun dan bertenun.

Saat ini pun tidak banyak ragam kegiatan yang bisa menjadi wadah aspirasi remaja. Yang dilakukan untuk mengurangi kegiatan anak muda yang bersifat negatif yaitu dengan melibatkan mereka dalam setiap kegiatan gereja. Tantangan lain, menurut Ibu Susi Susanti yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Lairuru, tidak semua anak muda di Desa Lairuru mau diajak untuk aktif dalam setiap kegiatan, ada sebagian yang mempunyai waktu luang namun lebih memilih hura-hura dan mabuk-mabukan. Untuk memenuhi harapan anak muda sekarang, maka pemerintah desa harus mengaktifkan kegiatan olah raga di desa yang tidak pernah dilakukan selama ini. Kegiatan ini sangat digemari oleh anak muda dan ada harapan akan mengubah anak muda untuk melakukan hal positif.

Dalam menyampaikan aspirasi, para remaja kebanyakan hanya kepada orang tua saja terutama kepada ibu mereka. Ada juga remaja menyampaikan aspirasi pada guru mereka di sekolah terkait cita-cita mereka. Namun itu dilakukan jika guru tersebut masih ada hubungan keluarga dengan remaja. Tanggapan orang tua terhadap apa yang disampaikan oleh anak mereka sangat sederhana yaitu mereka hanya mengatakan kalau mereka mampu maka mereka akan dukung tetapi semua kembali pada faktor ekonomi keluarga yang tidak pernah berubah. Sedangkan tanggapan guru mereka saat menyampaikan aspirasi hanya

sebatas mengingatkan agar belajar yang rajin. Masa depan para remaja penenun di Desa Lairuru terbilang memprihatinkan karena hampir semua remaja penenun hanya mampu menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMA saja. Hal ini dipengaruhi oleh tuntutan ekonomi keluarga yang mengharuskan mereka membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Novi misalnya, ia mempunyai cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (sampai perguruan tinggi) dan menjadi guru agama. Ia pernah menyampaikan cita-citanya ini kepada orang tuanya, dan menurut orang tua Novi, mereka akan mendukung jika mereka mampu. Hal ini akan menjadi pergumulan tersendiri bagi kedua orang tua Novi agar bisa mendukung anak mereka meraih cita-cita. Sama hal dengan apa yang dialami oleh Mbaru, di mana ia merupakan tamatan SMA dan pernah melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka Kota Waingapu dengan waktu kuliah hari Sabtu dan Minggu. Namun Mbaru gagal melanjutkan karena ia tidak mampu lagi membayar biaya registrasi. Mbaru bisa menamatkan pendidikan di tingkat SMA dan lanjut sampai tingkat perguruan tinggi karena ia nekad saja sedangkan kedua orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa lantaran ekonomi keluarga yang tidak mendukung. Ayah Mbaru Matalu sudah jarang di rumah dan sering keluar tanpa tujuan yang jelas, sehingga Mbaru Matalu menjadi tulang punggung keluarga saat ini. Adik-adik Mbaru Matalu tidak melanjutkan sekolah karena malas ke sekolah dengan alasan sekolah jauh dari rumah.

Selain Novi dan Mbaru, Meli juga mempunyai cita-cita menjadi seorang guru olah raga dan hal ini ia sudah sampaikan pada kedua orang tuanya. Orang tua Meli sangat mendukung, tetapi ia harus menunggu giliran sampai kakaknya yang sedang kuliah di Univesitas Wira Wacana Sumba selesai baru ia bisa melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Menurut orang tua Meli, mereka tidak mampu membiayai kuliah anak mereka 2 orang sekaligus sehingga harus menunggu yang satu selesai baru yang satu lagi bisa kuliah. Meli kemungkinan bisa lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan meraih cita-citanya karena saat ini ia baru kelas 1 SMP, sedangkan kakaknya yang kuliah sudah semester akhir dan saudaranya yang sudah tamat SMA tidak melanjutkan pendidikan lagi karena sudah menikah dan sudah di luar tanggung jawab orang tua.

Jati juga mempunyai cita-cita menjadi seorang guru geografi, dan saat hal ini disampaikan pada orang tuanya, mereka menyatakan akan mendukung, asalkan mereka mampu. Bagaimanapun, saat ini mereka masih sangat

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu juga dengan Anita Ridja Wadang yang mempunyai cita-cita menjadi seorang guru agama tetapi kedua orang tuanya mengatakan hal yang sama seperti yang dialami oleh Meli yang harus menunggu giliran untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi, karena saat ini kakaknya sedang kuliah di Universitas Wira Wacana Sumba semester awal.

4. Kebijakan terkait Remaja dan Pemuda

4.1 Kebijakan Pemerintah terkait Remaja dan Pemuda

Dari bab sebelumnya, peneliti menemukan bahwa remaja di Desa Lairuru mengalami kendala dalam mengungkapkan dan mewujudkan aspirasinya. Kendala dan fakta yang yang dihadapi remaja mencakup remaja membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah, membantu orang tua untuk menenun adalah hal wajar bagi warga Desa Lairuru. Orang tua biasanya juga tidak memaksa atau mengharuskan anak untuk menenun tetapi anak terdorong untuk membantu orang tua menenun agar bisa beli buku dan jajan, akses untuk ke sekolah susah (tidak tersedianya bus sekolah, beban membayar uang komite setiap bulannya Rp35.000,- tidak tersedianya kurikulum pendidikan penghayat Marapu [untuk mendapatkan nilai agama terpaksa anak mengikuti pelajaran agama]).

Dalam bab ini, kami akan mengulas kebijakan pemerintah terkait remaja dan pemuda, serta melihat apakah kebijakan tersebut telah membantu menjawab permasalahan yang dihadapi remaja Desa Lairuru.

Dari semua kebijakan pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang berkaitan dengan remaja dan perempuan dengan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan lewat Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) belum dijalankan secara maksimal karena kenyataannya masyarakat Desa Lairuru kondisi ekonominya masih dikategorikan miskin, begitu juga dengan remaja yang banyak putus sekolah oleh karena lokasi sekolah yang jauh.

Dari Pemerintah Desa belum ada program dan realisasi anggaran untuk remaja yang sedang sekolah maupun yang sudah putus sekolah, RPJMD saat ini adalah fokus pada pembangunan fisik: aspal jalan dan

pembangunan SD Satap Laimandar sejak dari tahun 2017 sudah mulai beroperasi untuk kelas 1 dan 2.

4.2. Kebijakan dan Kendala Remaja dalam Mewujudkan Aspirasi

Kendala yang dihadapi oleh remaja dalam menyampaikan dan mewujudkan aspirasi yaitu:

Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga untuk membiayai sekolah sang anak. Hal ini terjadi karena tingkat pendapatan dan penghasilan orang tua yang hanya dari satu sumber saja yaitu dari tenun, sedangkan dari sektor pertanian (jagung) yaitu setahun sekali panen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, sedangkan dari ternak hanya digunakan untuk urusan adat dan pesta. Menurut Ibu Kahi, di Desa Lairuru hampir semua masyarakat ekonominya masih pas-pasan sehingga dampaknya membuat anak mereka hanya sampai jenjang SMP dan SMA saja. Begitu juga pernyataan yang disampaikan oleh semua orang tua yang diwawancarai, mereka mengatakan akan mendukung anak-anak mereka meraih cita-cita asal mereka mampu, tetapi keadaan ekonomi yang membuat mereka tidak bisa berbuat banyak.

Terkait ekonomi, misi kebijakan pemerintah Sumba Timur adalah mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin yang bertujuan untuk mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Program yang dicanangkan antara lain: penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro, bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP), pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajemen usaha mikro, pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal, fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro, peningkatan akses informasi, dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga. Namun, di Desa Lairuru program ini belum dilaksanakan sama sekali. Jika hal ini dilakukan dan ekonomi keluarga meningkat, maka bisa jadi akan menolong remaja dalam mewujudkan aspirasi dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Jarak antara tempat tinggal dengan sekolah yang harus ditempuh oleh remaja cukup jauh yaitu sekitar 6—25 km. Selain karena faktor ekonomi, faktor jarak juga memengaruhi remaja dalam mewujudkan

aspirasi, membuat remaja malas ke sekolah karena lokasi dan akses ke sekolah sangat jauh. Ditambah lagi, tidak ada sarana transportasi dari desa ke sekolah, sehingga anak-anak dan remaja harus berjalan kaki ke sekolah, kadang banyak dari mereka yang terlambat sampai di sekolah. Jika ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sore hari, mereka pun malas untuk ikut karena faktor tadi.

Program pemerintah Sumba Timur untuk meningkatkan pendidikan adalah mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di seluruh wilayah kecamatan serta pembangunan infrastruktur sekolah yang merata melibatkan orang tua, sekolah, pemerintah, maupun masyarakat. Kenyataannya, lokasi dan jarak sekolah masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh remaja Desa Lairuru, juga belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini menjadi kendala bagi remaja dalam menyampaikan dan mewujudkan aspirasi.

Target Angka Partisipasi Murni (APM) yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur hanya di kisaran 60% (tahun 2013: 53,39%; tahun 2014: 61,06%; tahun 2015: 60,97%; tahun 2016: 62,26%; tahun 2017: 66,74%; sumber: Target APK dan APM Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Sementara, jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2015 mencapai 31,74% (sumber: Buku Sumba Timur dalam Angka Tahun 2016) dan Desa Lairuru sendiri adalah salah satu desa yang masuk kategori miskin. Dengan demikian, jika Pemerintah Sumba Timur hanya ingin mencapai target APM 60%, bisa jadi anak-anak usia sekolah di desa miskin terabaikan. Sebenarnya, pemerintah desa bisa melakukan lobi ke pemerintah kabupaten untuk membangun sekolah, misalnya sekolah satu atap (satap) untuk memberikan akses lebih mudah bagi remaja. Jika hal ini terwujud, maka tidak ada lagi remaja yang malas dan mengeluh tentang jarak sekolah.

Selain itu, belum ada wadah di desa yang dapat menampung dan membantu mewujudkan aspirasi remaja. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Kahi yang mengatakan perlunya wadah di desa yang dapat menampung aspirasi remaja dan memberikan solusi bagi orang tua yang ingin anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Upaya pemerintah sendiri untuk meningkatkan pendidikan yaitu dengan mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di wilayah kecamatan, namun hal ini belum terlaksana di semua kecamatan. Kenyataannya, masih banyak remaja Desa Lairuru yang putus sekolah, sedangkan pemerintah baru membangun Satap SD yang bangunannya baru 2 kelas serta baru dua

pengajar yang masih diambil dari sekolah induk SD Lairuru. Sedangkan akses jalan dari Lairuru ke lokasi sekolah di Laimandar kurang memadai, masih berupa jalan sertu dan berbatu terlepas, itupun panjangnya baru sekitar 4 km, sisanya berupa jalan tanah.

Ada indikasi bahwa anak-anak dan remaja penghayat Marapu mendapat diskriminasi di bidang pendidikan formal. Kebanyakan remaja penganut Marapu di Desa Lairuru menjadi Kristen saat masuk SD dan SMP demi mendapatkan nilai untuk pelajaran agama. Sekarang ini, pelajaran agama untuk anak-anak penghayat Marapu belum ada dalam kurikulum pendidikan formal. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap psikologi remaja. Hal ini didukung dengan data anak penganut Marapu untuk tingkat SD di Desa Lairuru yaitu laki-laki 73 orang dan perempuan sebanyak 65 orang, namun hanya tak ada anak laki-laki dan anak perempuan penghayat Marapu yang melanjutkan ke jenjang SMP.

Demikian, faktor paling mendalam yang menghambat remaja dalam mewujudkan aspirasi yaitu keterbatasan ekonomi keluarga, akses atau jarak ke sekolah yang ditempuh remaja cukup jauh yang menyebabkan banyak remaja yang putus sekolah, tidak adanya transportasi atau bus sekolah, serta masih ada indikasi bahwa anak-anak penghayat Marapu mendapat diskriminasi di bidang pendidikan formal karena mereka masuk kristen saat masuk SD dan SMP demi mendapat nilai agama.

Keterbatasan ekonomi keluarga membuat remaja di Desa Lairuru lebih banyak menghabiskan waktu di rumah membantu orang tua setelah pulang sekolah dibanding dengan waktu belajar. Kadang mereka harus menyelesaikan tenun sampai larut malam jika esoknya merupakan hari pasar. Kalaupun ada kegiatan di sekolah atau di luar sekolah pada sore hari, jarang mereka bisa ikut. Bukan karena dilarang oleh orang tua, tetapi mereka malas untuk ke sekolah lagi karena lokasi sekolah yang cukup jauh. Belum lagi mereka sampai di rumah setelah pulang sekolah sudah pukul 2 siang, kadang lebih.

Sebenarnya setiap orang tua menginginkan dan mendukung anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi mereka kewalahan dengan biaya yang begitu besar, khususnya di tingkat perguruan tinggi, karena ekonomi mereka masih di bawah standar. Sedangkan di tingkat SMP dan SMA sudah sekolah gratis dan hanya membayar uang komite sebesar 35.000 rupiah. Ada juga orang tua yang menyatakan bahwa agar anaknya bisa melanjutkan pendidikan, maka harus menunggu giliran

sampai yang sedang kuliah selesai dulu, baru nanti yang satunya lagi kuliah. Hal ini dilakukan karena orang tua memang tidak mampu untuk menyekolahkan dua anak sekaligus di tingkat perguruan tinggi mengingat pendapatan orang tua hanya dari hasil tenun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jika dikaitkan dengan program atau kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, ada misi 2 yaitu mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing dengan mengedepankan keadilan berbasis tata nilai dan budaya lokal serta misi 1 mewujudkan peningkatan ekonomi wilayah yang tangguh dan mandiri berbasis pendapatan rumah tangga. Dalam RPJMD Pemerintah Sumba Timur tertulis program meningkatnya kualitas pendidikan dengan sasaran utama yaitu (1) menurunkan angka buta aksara, (2) meningkatkan partisipasi pendidikan, (3) meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, serta (4) meningkatkan kuantitas dan kualitas guru, dengan target angka kelulusan dari SD sampai SMA 100% serta persentase Guru Bersertifikat Pendidikan dan kualifikasi D4/S1 yang didukung target APM untuk paket A yaitu 94% per tahun, paket B 60,25% per tahun, dan paket C 60% per tahun lewat upaya yang dilakukan yaitu mendirikan PKBM di seluruh kecamatan serta pembangunan infrastruktur sekolah yang merata. Sayangnya, program ini belum dijalankan sepenuhnya. Kurikulum yang lebih representatif yang dapat menggali potensi siswa, tidak sekadar *hardskill*, namun juga *softskill*, agar peserta didik lebih berkualitas, cerdas, bermoral, dan beretika juga belum dijalankan dengan baik, sehingga efeknya belum dirasakan oleh masyarakat dan remaja di Desa Lairuru.

Dengan demikian, kita dapat katakan bahwa belum ada program konkret dari arah kebijakan pemerintah yang dijalankan menyentuh langsung apa yang menjadi harapan perempuan dan remaja di Desa Lairuru. Sehingga dengan kondisi ini, nasib remaja penenun di Desa Lairuru sangat tergantung pada ekonomi keluarga dan usaha mereka sendiri untuk mewujudkan aspirasi. Kondisi inilah yang mendorong remaja menenun sampai larut malam untuk membantu menunjang ekonomi keluarga. Harapannya, jika ekonomi keluarga meningkat maka akan membantu mereka untuk dapat meraih aspirasi atau cita-cita.

Sedangkan target pemerintah dalam RPJMD yang berkaitan dengan pendidikan yaitu mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di seluruh wilayah kecamatan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan melakukan pencegahan dini, baik yang dilakukan oleh orang tua, sekolah

(pemerintah) maupun oleh masyarakat, pembangunan infrastruktur yang merata, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Program yang didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sumba Timur untuk kelompok perempuan penenun dengan bantuan berupa benang juga belum menunjang taraf ekonomi keluarga yang berdampak tidak dapat menunjang tingkat pendidikan remaja di Desa Lairuru.

5. Refleksi, Kesimpulan, dan Rekomendasi

5.1. Refleksi

Semua remaja penenun di Desa Lairuru menginginkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi tuntutan ekonomi menghambat untuk mewujudkan cita-cita mereka. Sayangnya, walaupun para remaja dan orang tua mempunyai penghasilan dari hasil kain tenun *pahikung*, kenyataannya tidak mampu meningkatkan ekonomi keluarga. Pada akhirnya, anak-anak dan remaja menjadi korban dari kondisi ekonomi keluarga ini.

Dari hasil riset ini, diketahui bahwa para remaja penenun di Desa Lairuru pada umumnya mempunyai cita-cita menjadi guru, baik sebagai guru agama, guru olah raga, maupun guru geografi. Dari cita-cita ini pernah ada yang kuliah sebagai guru PAUD tetapi hanya sebatas semester III saja dan saat memasuki semester IV orang tidak mampu lagi membiayai kuliahnya karena masalah ekonomi yaitu Mbaru Matalu. Kakaknya Novi sampai dapat meraih cita-citanya hingga lulus Diploma karena selama sekolah ada kemauan sambil kerja dan tinggal dengan orang Tionghoa sehingga bisa pergi kuliah sambil kerja tanpa bantuan dari orang tua. Orang tua Meli dan Anita mempunyai komitmen untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dari anak mereka, tetapi syaratnya anak mereka yang sedang kuliah selesai dulu baru anak yang satunya lagi kuliah karena mereka tidak mampu membiayai kuliah anak mereka 2 orang sekaligus. Hal ini merupakan upaya yang baik dari orang tua walaupun dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan. Sebenarnya jika semua orang tua mempunyai prinsip seperti ini, maka akan sangat membantu remaja dalam mewujudkan aspirasi dan juga dapat membantu dalam pengembangan remaja ke depannya.

Hal yang paling penting diperoleh peneliti dalam riset ini adalah bahwa masyarakat Desa Lairuru sebenarnya mempunyai penghasilan utama dari kain tenun *pahikung,* tetapi hal ini tidak berdampak positif dalam menunjang perekonomian keluarga yang sampai saat ini masih tergolong miskin. Sebenarnya dalam 1 minggu mereka mampu memproduksi 1 lembar kain dengan kualitas rendah dan harga jual sarung tersebut berkisar antara 150.000—300.000 rupiah dengan keuntungan bersih antara 50.000 — 100.000 rupiah per lembar, tetapi semua hanya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Untuk menghasilkan 1 lembar kain membutuhkan 6 warna atau 6 jenis benang dengan harga beli masing-masing jenis yaitu Rp14.000,- sehingga total biaya produksi untuk 1 lembar kain dengan kualitas rendah yaitu 84.000 rupiah. Sedangkan kain dengan kualitas sangat baik juga membutuhkan biaya produksi yang sama tetapi yang yang membedakan yaitu cara tenun yang lebih padat dengan tingkat kesulitan membuat motif yang lebih rumit sehingga untuk menghasilkan kain jenis ini membutuhkan waktu cukup lama yaitu antara 1—3 bulan dengan harga jual 700.000—750.000 rupiah.

Dari hasil riset diperoleh data bahwa 99% masyarakat Desa Lairuru merupakan penghayat Marapu. Gereja sering melakukan pengabaran injil dan melakukan PA atau ibadah pemuda, tetapi masyarakat di Desa Lairuru masih berpegang pada budaya bahwa Marapu yang merupakan warisan nenek moyang mereka atau merupakan agama leluhur. Memang tidak ada paksaan agar mereka tidak Marapu lagi (meninggalkan Marapu) dan negara lewat putusan Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa Marapu merupakan agama leluhur. Tetapi, bagi anak yang sekolah harus mengikuti pelajaran agama, sedangkan di sekolah tidak ada pelajaran agama Marapu, sehingga untuk mendapatkan nilai pelajaran agama, anak-anak ini terpaksa mengikuti pelajaran agama Kristen Protestan maupun Katolik dan kondisi menentukan pilihan ini sangat berpengaruh terhadap psikologi anak.

Menurut Ibu Yuli Laji dari DP3AP2KB, dinas mereka pernah memberikan bantuan bagi kelompok tenun di Desa Lairuru berupa benang. Tetapi program itu hanya satu kali dilakukan, yaitu pada tahun 2017 dan mereka tidak pernah melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi karena keterbatasan dana. Sehingga, ia pun mengakui sejauh ini program dan kebijakan pemerintah belum dijalankan secara maksimal karena tidak adanya pendampingan untuk mendorong perempuan dalam meningkatkan usaha. Masih menurutnya, dalam lingkaran birokrasi semua

serba sulit dan terpaku pada aturan yang mengikat sehingga mereka agak sulit untuk melakukan sesuatu di luar kebijakan dan aturan.

5.2. Kesimpulan

Dari hasil riset ini, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Remaja penenun Desa Lairuru yang diwawancarai mempunyai beragam aspirasi, di antaranya menjadi guru agama, guru geografi, dan guru olah raga. Tetapi untuk mewujudkan aspirasi mereka dihadapkan dengan kondisi keuangan keluarga yang tidak mampu membiayai mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Walaupun para orang tua menginginkan anak mereka meraih apa yang menjadi aspirasinya, keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga masih jadi penghalang. Ada juga orang tua yang mendukung anaknya untuk melanjutkan pendidikan tetapi harus menunggu giliran sampai yang sedang kuliah selesai dulu baru yang satunya lagi kuliah. Hal ini mereka lakukan karena orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anak di tingkat perguruan tinggi dua orang sekaligus, mengingat pendapatan orang tua hanya dari hasil tenun yang sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Dalam menyampaikan aspirasi, para remaja kebanyakan hanya kepada orang tua saja terutama kepada ibu mereka. Ada juga remaja menyampaikan aspirasi pada guru mereka di sekolah terkait cita-cita mereka, tetapi jika hal ini mereka lakukan karena mereka merasa dekat dengan guru tersebut atau masih ada hubungan keluarga.
3. Pemerintah sendiri khususnya di bidang pendidikan belum menjalankan fungsinya secara maksimal dan masih sebatas menerapkan kurikulum saja. Sedangkan fungsi pengawasan untuk mendukung kegiatan dan aktivitas pengembangan diri anak didik di luar jam sekolah tidak berjalan.

Kendala utama yang dihadapi oleh remaja dalam mengungkapkan atau menyampaikan aspirasi yaitu:

1. Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga untuk membiayai sekolah sang anak berpeluang membuat remaja penenun tidak berhasil mewujudkan aspirasi masa depannya untuk melanjutkan sekolah. Sedangkan salah satu langkah pemerintah untuk

meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada rakyat miskin belum dilaksanakan secara optimal.

2. Lokasi sekolah yang jauh membuat mereka malas ke sekolah karena harus berjalan kaki dari rumah ke sekolah sejauh 6—25 km.
3. Masih ada indikasi bahwa anak-anak penghayat Marapu mendapat diskriminasi di bidang pendidikan formal karena kebanyakan remaja Desa Lairuru menjadi Kristen saat masuk SD dan SMP demi mendapatkan nilai agama sedangkan orang tua mereka merupakan penghayat Marapu. Hal ini sangat berpengaruh terhadap anak-anak mereka dalam menentukan pilihan serta sangat menggangu psikologi anak.
4. Belum ada wadah di desa yang dapat menampung dan memberikan solusi bagi orang tua tentang bagaimana cara agar mereka dapat mewujudkan aspirasi, dan hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah khususnya Pemerintah Desa.

5.3. Rekomendasi/Agenda Perubahan

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait hasil penelitian ini, yaitu:

1. Melakukan advokasi terhadap kebijakan terkait peningkatan kualitas pendidikan serta meningkatkan target APM yang hanya 60% menjadi 100%.
2. Mendorong pemerintah agar program yang sudah dicanangkan dapat dilakukan, terutama program yang berpihak pada masyarakat miskin, sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan mengurangi jumlah masyarakat miskin.
3. Mendorong pemerintah Desa Lairuru agar menyusun program dari dana desa yang dapat memberikan solusi bagi anak usia sekolah maupun anak atau remaja yang sudah putus sekolah.
4. Mendorong dinas pendidikan untuk membangun satap di Desa Lairuru, sehingga jarak dan akses untuk ke sekolah tidak menjadi permasalahan lagi yang dihadapi oleh remaja dan pemuda. Cara ini akan mengurangi jumlah remaja putus sekolah.
5. Mendorong pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan Desa Lairuru agar mengalokasikan dana desa untuk beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu, karena

kebanyakan remaja di Desa Lairuru tingkat jenjang pendidikannya sebatas SMP dan SMA saja.

6. Melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang terintegrasi dan berkesinambungan sehingga mengurangi beban kerja remaja.

Daftar Pustaka

Bakker, JWM. 1999. *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius

CNN Indonesia. 2016. *Merapah Identitas Marapu di Tanah Leluhur Sumba*. Diakses melalui http//www.cnnindonesia.com/nasional/2016.

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. 2016. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 - 2021*

Pemerintah Desa Lairuru. 2015. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Lairuru*

Sarjono. A. R (ed). 1999. *Pembebasan Budaya-budaya Kita*. Jakarta: PT Gramdia Pustaka Utama.

Sugiyono. 2012. *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*.

Yayasan Wali Ati. 2014. *Hasil Kajian Lapangan Studi Dokumntasi Sejarah Marapu dan Nilai-nilai keadilan dan Keberlanjutan di Kabupaten Sumba Timur*. Waingapu: Yasalti

ACTIVE SOCIETY INSTITUTE (ACSI)

Tim peneliti:

Mulyadi

Misda Ulviatmi Dalmi

Eka Wulandari

STRATEGI PENGHIDUPAN PEREMPUAN PEDAGANG DI PASAR TERONG

Active Society Institute

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pasar Terong merupakan salah satu pasar terbesar di Indonesia. Terletak di tengah Kota Makassar dan menjadi muara pertemuan berbagai komoditas. Kelapa dan jahe dari Sulawesi Barat; jeruk nipis dan sagu dari Sulawesi Tenggara; sayur dan merica dari Sulawesi Tengah; sayur dan cabai dari Gorontalo dan Sulawesi Utara; ikan kering dari Kalimantan Selatan; cabai dan buah apel dari Jawa Timur; cabai besar dari Yogyakarta; sagu dan ikan kering dari Ambon dan sekitarnya; ikan kering dari Maluku Utara; dan bawang merah, bawang putih, dan asam dari Nusa Tenggara Barat[119].

Pasar ini juga dikenal sebagai pemasok sembilan bahan kebutuhan pokok seperti sayur-mayur, aneka jenis ikan, telur, buah-buahan, dan sebagainya yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Pasar Terong juga menyuplai kebutuhan di daerah lain hingga ke beberapa provinsi di pulau Sulawesi, Indonesia Timur dan sebagian Indonesia Barat. Misalnya, Sulawesi Tengah (Palu), Sulawesi Tenggara (Kendari), Sulawesi Utara (Palu, Gorontalo, Manado), Maluku, Kalimantan khususnya bagian Timur, pelosok Papua dari Sorong hingga Merauke, sebagian Bali, NTT, dan NTB. Di Indonesia bagian barat ada Jawa Timur, Jawa Barat, Banten hingga DKI Jakarta. Bahkan, Pasar Terong juga mampu menyuplai satu negara termuda, yakni Timor Leste.

Pada mulanya, Pasar Terong hanya berada di ujung jalan (tahun 1960), lalu bertambah ke gang-gang permukiman yang kini menjadi Jalan Mentimun, Jalan Kubis, dan Jalan Kangkung. Di antara tahun 1967—1968, pasar ini mengalami perubahan akibat kebakaran yang bermula di Jalan Kangkung lalu terbentuklah pasar permanen berupa toko dan los yang berbentuk U dengan satu los induk dan beberapa los kecil di sekelilingnya membentuk petak memanjang berukuran 20×30 meter. Tahun 1971, Pasar Inpres Terong berfungsi permanen dan diresmikan oleh Walikota Makassar, Mayor M. Daeng Patompo.

119 Siswandi, *Pasar Terong Makassar, Dunia dalam kota,* Penerbit Ininnawa, Makassar, 2013 hal 1.

Pada tahun 1995, bangunan toko dan los dibongkar. Gedung berlantai empat kemudian menggantikan bangunan lama dan berfungsi pada 1997. Pemerintah meminta kepada pedagang untuk menempati gedung berlantai empat tersebut. Namun, pada akhirnya banyak bagian bangunan yang tidak terpakai, terutama lantai tiga dan empat. Hal tersebut terjadi karena banyak pembeli yang enggan naik ke lantai tiga dan empat, penempatan lokasi pedagang sayur dan ikan basah di lantai atas tidak tepat dari segi pedagang maupun kultur berbelanja pembeli. Alasan lainnya adalah biaya sewa atas los terlalu mahal bagi sebagian besar pedagang.

Kondisi tersebut membuat pedagang merugi dan memilih menempati wilayah di luar gedung hingga ke pinggir jalan. Kondisi yang dimaknai oleh pemerintah sebagai penyebab kemacetan dan kesemrawutan pasar, sehingga mereka mesti ditertibkan.

Dinamika antar pihak di Pasar Terong cukup kompleks. Di antaranya hubungan antara pembeli-pedagang, pedagang-pengurus pasar, pedagang-polisi, pedagang-pemerintah, pengembang-preman, pemerintah-preman, preman-pembeli, pedagang pengumpul-punggawa pasar, punggawa-pedagang pengecer, pedagang-bank, pedagang-rentenir, dan sebagainya. Ditambah berbagai pungutan liar, intimidasi bagi pedagang oleh pemangku kuasa, penggusuran, penipuan, dan semakin berkurangnya jumlah pembeli menyebabkan kondisi perempuan pedagang menjadi semakin rentan.

Pengembang dan pedagang yang berjualan di gedung, mengorganisir diri dan membentuk Asosiasi Pedagang Pasar Terong (APPT)—pemerintah menyebutnya sebagai pedagang Pasar Terong. Pedagang yang tetap memilih berjualan di luar gedung, juga membentuk Solidaritas Pedagang Pasar Terong (SADAR). Meski demikian, pengelola pasar tetap melakukan penarikan retribusi pada pedagang dan segenap langkah penertiban tetap digalakkan.

Mengapa perempuan pedagang?

Perempuan yang bekerja di sektor publik semakin meningkat jumlahnya. Tapi setidaknya ada dua alasan besar terkait hal itu. Pertama, soal akses dan kapasitas sehingga mereka diterima oleh publik dan kedua, karena keterpaksaan sebagai penjaga keutuhan rumah tangga.

Dalam keluarga miskin, perempuan bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Selain pekerjaan mereka mengerucut pada urusan

rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak, dan menyiapkan makanan untuk anggota keluarga, mereka juga terpaksa bekerja di luar rumah untuk menghasilkan pendapatan bagi keluarga.

Kebudayaan mengajarkan konsep kesucian kepada perempuan. Itu mengapa sedari kecil mereka dijaga dan diajarkan mengenai moral secara berlebih dibanding laki-laki. Alasannya sederhana, kelak perempuan akan menjadi ibu yang bertugas mendidik dan berbakti pada keluarga. Mereka didaulat sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas utuhnya sebuah keluarga. Misalnya, meski kerap menerima tindak kekerasan dalam rumah tangga, banyak di antara mereka menerimanya sebagai sesuatu yang "biasa" terjadi. Begitu pula dalam keluarga miskin, perempuan akan menjadi orang yang paling aktif memberikan kontribusi dalam hal pendapatan.

Perempuan miskin sebagai tenaga kerja yang tidak terampil dan tidak memiliki pendidikan yang tinggi, hanya memiliki peluang pada sektor ekonomi informal, seperti pasar. Dari 1.020 total pedagang yang tergabung dalam Solidaritas Pedagang Pasar (SADAR) di Pasar Terong, 695 di antaranya adalah perempuan. Mereka bekerja dari pukul 7 pagi hingga pukul 6 sore.

Umumnya laki-laki (sebagai kepala keluarga perempuan pedagang) bertugas mengangkut dan menyiapkan barang dagangan. Kadang, sebagian dari mereka memiliki tugas tambahan, seperti mencari dan membeli komoditi di desa-desa yang selanjutnya dijual oleh sang istri. Tapi, umumnya perempuan pedagang terkoneksi langsung dengan pedagang besar sehingga memungkinkan mereka untuk mengecer barang, terutama perempuan pedagang yang kepala rumah tangga. Tugas laki-laki sudah selesai, selanjutnya para perempuan baru mulai bekerja.

Dinamika antara perempuan pedagang sebagai pengecer dengan pedagang besar sebagai penyedia barang, setidaknya berdasar pada dua hal. Berbasis utang dan pembelian tunai.

Perempuan pedagang, umumnya tidak memiliki modal besar. Sehingga, pembelian tunai sangat mereka hindari jika harus berhubungan dengan pedagang besar. Jika harus melakukan pembayaran tunai, tentu barang yang bisa diecer tidak banyak, maka keuntungan juga sedikit. Sehingga banyak di antara mereka lebih memilih berutang.

Biasanya jenis barang yang diambil dengan cara tunai adalah barang yang sifatnya tahan lama sehingga masa jual juga bisa lebih panjang, itu mengapa butuh modal yang lebih besar; seperti beras, alat rumah tangga, kosmetik, atau pakaian. Sementara, jenis barang yang bisa diberlakukan utang adalah yang memiliki masa kedaluwarsa lebih cepat, seperti sayur, buah, atau ikan.

Maka, utang barang pada pedagang besar memiliki risiko yang tidak kecil. Setelah mengatur kesepakatan mengenai tempo pembayaran utang, perempuan pedagang ini akan berjudi dengan waktu. Jika mengambil utang barang dalam jumlah besar, keuntungan yang diperoleh akan berlipat, tapi risiko barang tidak laku dan membusuk sama besarnya. Itu berarti jika barang tidak laku, mereka harus mengganti sesuai jumlah harga yang telah ditentukan.

Umumnya, strategi perempuan pedagang adalah mengambil utang barang pada beberapa pedagang besar. Jadi, dengan beragamnya jenis barang dagangan mereka akan mudah melakukan subsidi silang pembayaran utang. Misalnya, dalam satu lapakan mereka menjual tomat, terong, dan cabai. Jika cabai laku lebih dulu, sementara pemilik tomat sudah menagih pembayaran, maka uang hasil keuntungan cabai bisa digunakan untuk membayar utang tomat, dan seterusnya. Sehingga, dengan pengaturan seperti ilustrasi tersebut mereka bisa menyisihkan upah untuk dirinya dalam sehari. Tapi, jika dalam sehari itu mereka tidak akan mendapat upah apa pun, akan memberikan krisis pada keluarga.

Pada kondisi yang mengenaskan itu, kehilangan akses pada sumber mata pencaharian bisa saja berdampak pada rumah tangga. Itulah sebabnya mengapa perempuan pedagang ini jauh lebih rentan dari segala bentuk ancaman yang ada di pasar.

Perempuan pedagang yang dominan dalam organisasi SADAR, menunjukkan betapa mereka sangat membutuhkan ruang aliansi perlindungan.

Di pasar, bentuk bias atas perbedaan kelamin tidak tampak secara nyata. Baik laki-laki dan perempuan akan mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama. Namun, untuk kasus Pasar Terong, perempuan pedagang dapat dikatakan salah satu aktor kunci dalam mata rantai perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari dominannya perempuan dalam ruang-ruang pasar; mulai penagih retribusi, petugas kebersihan, apalagi pedagang.

Dari sekian banyak dinamika yang menjadi potret keseharian di Pasar Terong, Active Society Institute (ACsI) dalam kerangka kerja sama dengan CIPG-VOICE, akan fokus pada situasi kerentanan dan dampak yang dihadapi dan dialami perempuan pedagang. Dengan demikian, akan terlihat bagaimana perempuan pedagang melakukan serangkaian strategi penghidupan untuk keluar dari kerentanan tersebut.

1.2 Pertanyaan penelitian

Berangkat dari apa yang telah dijelaskan di atas, maka kami merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

Mengapa perempuan pedagang di Pasar Terong mengalami kerentanan dan seperti apa strategi penghidupan yang mereka pilih?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami membuat beberapa pertanyaan turunan agar memudahkan dalam menjawab pertanyaan utama. Berikut adalah pertanyaan turunannya:

a. Kerentanan apa yang paling dominan dihadapi oleh perempuan pedagang?
b. Bagaimana kerentanan tersebut bisa terjadi dan memberikan guncangan pada perempuan pedagang?
c. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kerentanan tersebut?
d. Bagaimana strategi perempuan pedagang dalam menghadapi kerentanan tersebut?

2. Metodologi

2.1 Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dan pertanyaan turunan di bab sebelumnya, maka berikut adalah beberapa aspek yang akan menjadi pedoman dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut:

a. Profil Perempuan Pedagang

Pada aspek ini, informasi sangat dibutuhkan untuk mengetahui kedalaman latar belakang sebuah komunitas yang menjadi subjek dalam penelitian; apakah mereka homogen atau heterogen. Pada

aspek ini juga akan diketahui mengenai jenjang pendidikan, jumlah tanggungan, dan rata-rata usia mereka yang dapat ditelusuri melalui:

- Identitas
- Latar belakang sosial ekonomi

b. Faktor Kerentanan

Aspek ini bertujuan untuk menggeledah sumber-sumber kerentanan yang paling dominan yang dihadapi oleh perempuan pedagang di Pasar Terong. Kerentanan tersebut dapat diidentifikasi dengan mengetahui dan mengeksplorasi:

- Penurunan omzet dagangan
- Guncangan apa yang mereka rasakan sebagai perempuan pedagang

c. Dampak Kerentanan

Bertujuan untuk menangkap informasi naratif tentang sejauh mana dampak yang berhasil ditimbulkan berdasarkan sumber kerentanan.

- Perubahan dalam kehidupan rumah tangga dan lingkungan pasar?

d. Strategi Penghidupan

Aspek ini merupakan hal yang paling penting dalam studi ini. Aspek yang bertujuan untuk memuat cerita-cerita individual maupun kolektif terkait cara para perempuan pedagang melanjutkan penghidupan dalam menghadapi setiap konteks kerentanan yang membentang dalam keseharian mereka di pasar.

Lingkup substantif penelitian ini adalah memberikan analisis mengenai strategi yang dipilih oleh perempuan pedagang dalam menghadapi dampak dari sebuah kerentanan yang memberikan krisis pada rumah tangga perempuan.

Dengan demikian, aspek-aspek penelitian yang telah dirumuskan dapat membantu memberikan sejumlah data untuk dianalisis. Diharapkan melalui data tersebut, pertanyaan dalam penelitian dapat dijawab dengan baik.

Berikut disajikan ke dalam tabel aspek yang kami maksud:

TABEL 19 ASPEK PENELITIAN

Aspek	Variabel	Pertanyaan	Metode
Profil perempuan pedagang	Identitas	Nama	Survei
		Usia	Survei
		Alamat	Survei
		Domisili	Survei
		Jumlah Anggota Keluarga	Survei
		Pekerjaan Anggota Keluarga	Survei
	Latar belakang sosial dan ekonomi	Jenjang pendidikan	Survei
		Pendapatan Bulanan	Survei
		Ketersediaan tabungan	Survei
		Dalam situasi darurat kemana meminjam uang	Survei
	Perbandingan aktivitas perempuan pedagang dengan suaminya	Gambaran aktifitas dari pagi hingga malam	Wawancara dan Survei
		Gambaran aktifitas suami dari pagi hingga malam	Wawancara dan Survei
	Pekerjaan responden dan suami	Mengapa memilih berdagang sebagai pekerjaan utama	Wawancara
		Sejak kapan mulai berdagang	Wawancara
		Apa ada aktifitas lain yang bisa mendatangkan uang	Wawancara
		Apa pekerjaan utama suami	Wawancara dan Survei
		Apa pekerjaan sampingan suami	Wawancara dan Survei
		Apa berdagang memberi keuntungan	Wawancara
		Kapan saat paling menguntungkan, situasi seperti apa, polanya seperti apa	Wawancara dan Survei
		Pada saat apa biasanya merugi, situasi seperti apa, polanya seperti apa	Wawancara dan Survei
Faktor kerentanan	Penyebab kerentanan	Dalam 10 tahun terakhir, apakah merasakan penurunan omzet	Wawancara dan FGD
		Apa penyebab turunnya omzet	Wawancara dan FGD
	Kerentanan	Hal apa yang menjadi keresahan perempuan pedagang di pasar	Wawancara dan FGD
		Apa penyebabnya	Wawancara dan FGD
Dampak	Perubahan	Apa yang berubah dari sejak 10 tahun berdagang	Wawancara dan FGD
		Apa yang berubah di pasar	Wawancara dan FGD
Strategi Penghidupan	Strategi penghidupan	Mengapa masih berdagang	Wawancara
		Apa yang dilakukan menghadapi turunnya omzet	Wawancara

Sumber: Penulis

Penelitian ini menggunakan dua metode, yakni metode kuantitatif dan kualitatif agar seluruh pertanyaan penelitian dapat terjawab dengan baik. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada aspek profil pedagang, seperti identitas dan latar belakang sosial ekonomi, serta pada aspek faktor kerentanan. Sedangkan, metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian pada aspek dampak kerentanan dan strategi penghidupan.

2.1.1 Kuantitatif

Sampel untuk metode kuantitatif berada pada dua tingkat, yaitu keluarga dan anggota keluarga. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah dan masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan sebagainya.

Menurut BPS, ada dua jenis keluarga yaitu keluarga inti dan keluarga luas. Konsep keluarga yang digunakan dalam penelitian ini adalah keluarga luas, yaitu keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, anak yang belum kawin, anak yang sudah janda/duda tanpa anak, cucu, orang tua, mertua, maupun kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga yang menempati bangunan tempat tinggal yang sama dengan kepala keluarga. Tanggungan yang dimaksud adalah tanggungan konsumsi atau makan sehari-hari.

Karena subjek penelitian ini adalah perempuan pedagang, maka populasi penelitian ini adalah perempuan yang sementara melakukan aktivitas dagang di wilayah Pasar Terong. Kedua, karena penelitian ini bermaksud untuk melihat strategi perempuan pedagang ini dalam menghadapi kerentanan, maka populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perempuan pedagang yang merupakan anggota Solidaritas Pedagang Pasar (SADAR), karena secara hukum mereka tidak diakui sebagai pedagang pasar, mereka kerap disebut sebagai pedagang liar.

Anggota SADAR dapat dengan mudah diketahui, sebab mereka menjual dagangannya tidak di dalam gedung pasar--secara resmi diakui sebagai pasar. Mereka berdagang di luar, di sepanjang jalan-jalan yang mengitari gedung pasar. Kedua, seluruh anggota SADAR dibagi menyeluruh ke dalam beberapa sektor berdasarkan areal geografisnya, antara lain:

1. Sawi Utara
2. Sawi Tengah
3. Sawi Selatan
4. Tangga Selatan
5. Kubis
6. Bayam
7. Mentimun
8. Terong Selatan
9. Terong Tengah
10. Terong Utara
11. Labu
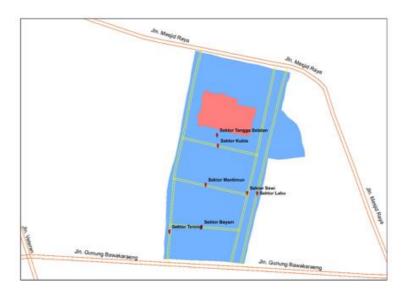
GAMBAR 14 PETA PASAR TERONG

Sumber: Penulis

Sehingga, diketahuilah total sampel seluruhnya berjumlah 695 orang. Maka, berdasarkan rumus Slovin seperti berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan misalnya 10%.

Maka,

$$n = \frac{695}{1+695(0,1)^2}$$

n= 87,4213836477987

n= 87

Jadi, total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 87 orang.

2.1.2 Kualitatif

Sampel kualitatif pada penelitian ini adalah informan yang memiliki pengetahuan untuk memberikan penjelasan sebagaimana aspek penelitian yang telah dijelaskan di atas. Wawancara dengan informan dilakukan sebelum dan sesudah survei kuesioner. Hal tersebut dilakukan agar informasi yang ditemukan dapat saling menguatkan.

Berikut adalah informan yang kami wawancara:

TABEL 20 DAFTAR INFORMAN

No.	Daftar Informan	Informasi yang ingin digali
1	Perempuan pedagang	Strategi penghidupan yang mereka pilih
2	Pengurus SADAR (Persaudaraan pedagang pasar)	Tujuan dan manfaat bagi anggotanya
3	Zainal Siko (Aktif mengorganisir pasar lokal di Makassar sejak tahun 90-an)	Sejarah pasar, konflik antara pedagang dan pengelola pasar
4	Kepala Pasar	Kebijakan pasar terhadap pedagang di luar gedung pasar

Sumber: Penulis

Selain wawancara, FGD juga dapat dilakukan pada perempuan pedagang. Hal ini berguna untuk mendapatkan informasi secara utuh sesuai pertanyaan utama dalam penelitian ini. Model FGD dapat dilakukan bersamaan dengan masa wawancara mendalam. Melalui FGD, setiap informan akan saling mengkonfirmasi informasi yang mereka sampaikan.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan untuk kajian ini dilaksanakan di sepanjang Februari—Mei 2018 di Pasar Terong, Makassar. Metode pengumpulan data dilakukan antara lain dengan:

Kajian kepustakaan terutama produk-produk kebijakan pemerintah dan literatur yang mengulas lokasi penelitian, termasuk mengkaji ulang temuan-temuan penelitian tahap sebelumnya.

Survei rumah tangga. Dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum situasi sosial dan ekonomi rumah tangga perempuan pedagang.

Wawancara mendalam. Dilakukan untuk mendapatkan informasi spesifik kepada narasumber tertentu, misalnya untuk mengetahui strategi penghidupan yang mereka tempuh dan situasi kerentanan yang paling banyak memengaruhi penghidupan mereka.

Pengamatan langsung. Ini dilakukan baik secara terlibat (partisipatif) maupun tidak. Pengamatan dilakukan dengan melihat langsung kondisi lingkungan misalnya lanskap, infrastruktur, maupun kegiatan pedagang. Kadang pengamatan langsung digabungkan dengan FGD, misalnya lewat kegiatan transek yang dilanjutkan dengan pemetaan.

FGD. Dilakukan untuk menangkap pendapat warga tentang sesuatu, misalnya tentang organisasi warga, kondisi pelayanan, program pemerintah, dan sebagainya.

2.3 Kerangka Analisis

Studi ini menggunakan kerangka analisis sebagaimana dideskripsikan pada gambar di bawah. Kerangka analisis ini dibuat dengan menyesuaikan kerangka penghidupan berkelanjutan milik Ian Scoones[120]. Penggunaan kerangka yang berdasar pada Scoones sengaja dipilih karena kami menganggap lebih dekat dan aplikatif dengan apa yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Studi ini ingin melihat apa saja yang menjadi sumber kerentanan bagi perempuan pedagang yang ada di Pasar Terong, bentuk guncangan, dan dampak yang ditimbulkan dari guncangan tersebut.

Strategi penghidupan yang dilakukan rumah tangga bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif guncangan terhadap kualitas penghidupan.

120 Ian Scoones, Sustainable Livelihood and Rural Development, Practical Action Publishing, 2015.
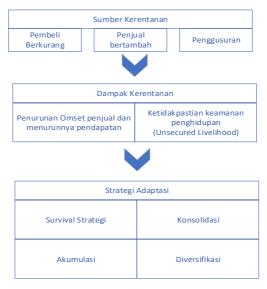
GAMBAR 15 KERANGKA ANALISIS

Sumber: Scoones (2015)

Sebagai perempuan pedagang, dibanding dengan laki-laki yang berdagang, mereka cenderung lebih rentan mengalami dampak dari guncangan tersebut. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki beban kerja ganda sehingga cenderung lebih mudah "terlempar" dari ruang penghidupannya.

Setiap dampak krisis yang memberi guncangan pada rumah tangga, lebih banyak ditanggung oleh perempuan. Hal ini terjadi karena adanya relasi gender yang menempatkan perempuan dalam mengelola urusan rumah tangga, termasuk dalam mengatasi segala permasalahannya. Sementara itu, karena kaum laki-laki ditempatkan dalam wilayah publik, maka hal demikian dianggap bukan menjadi persoalannya.

Secara dini, hal tersebut dapat dilihat dari terlibatnya perempuan dalam menopang ekonomi rumah tangga. Karena urusannya rumah tangga; kesehatan dan gizi anak terpenuhi, asap dapur terus mengepul, dan jumlah tanggungan yang banyak. Maka, aktivitas ekonomi yang tadinya dianggap sebagai ranah publik —milik laki-laki— oleh perempuan tetap dianggap sebagai urusan mencukupi kebutuhan dalam keluarga.

Namun, di sisi lain, kerentanan tersebut juga menjadi pemicu sejumlah tindakan kreatif untuk mempertahankan kualitas penghidupan perempuan

pedagang. Musababnya adalah karena perempuan akan menjadi pihak yang menanggung beban mencari nafkah untuk menyelamatkan keluarganya dari risiko krisis.

Belum lagi serangkaian strategi untuk bertahan hidup banyak dilakukan oleh kaum perempuan untuk menjaga stabilitas rumah tangga. Misalnya arisan, berhutang, menjual, atau menggadaikan aset seperti emas.

2.4 Gambaran Umum Responden

2.4.1 Rata-rata Usia Pedagang

Dari 1.020 kartu anggota SADAR yang terdaftar, sebanyak 68,14% atau 695 orang di antaranya adalah perempuan. Hasil riset AcSI dari 88 perempuan pedagang di Pasar Terong rentang usia pedagang bervarian, dan disesuaikan dengan kategori umur menurut Depkes RI 2009[121] adalah sebagai berikut; pedagang remaja yang mencakup remaja awal dan akhir usia 10-25 tahun 4,55%, usia dewasa yang mencakup dewasa awal dan akhir 26-45 tahun sebanyak 54,55%, lalu lansia awal dan akhir yang berusia 46-65 tahun sebanyak 38,64%, serta masa Manula yang berusia 65 tahun ke atas sebanyak 2,27%. Lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 21 SEBARAN USIA PEDAGANG

No.	Usia	Frekuensi	Persentase
1	10-15	1	1,14
2	16-20	1	1,14
3	21-25	2	2,27
4	26-30	7	7,95
5	31-35	14	15,91
6	36-40	11	12,50
7	41-45	16	18,18
8	46-50	15	17,05
9	51-55	11	12,50
10	56-60	4	4,55
11	61-65	4	4,55
12	66-70	1	1,14
13	71-75	0	0,00
14	76-80	1	1,14
Total		88	100

Sumber: Data Primer (2018)

Dari tabel tersebut di atas, kita dapat melihat bahwa kecenderungan yang terjadi adalah perempuan pedagang yang saat ini ada di Pasar Terong didominasi oleh mereka yang berusia dewasa yang angkanya secara

[121] Dalam I Gusti Putu Ngurah Adi Santika, S.Pd., M.Fis., Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi Volume 1 : Hal. 42 – 47, Juni 2015

statistik mencapai 54,54%, lalu disusul oleh mereka yang berusia lansia sebanyak 38,65%.

Lalu di antara perempuan pedagang tersebut di atas, terdapat sebanyak 21,59% atau 19 orang yang merupakan perempuan kepala keluarga, dengan rentan usia yang dominan 46—55 tahun sebanyak 78,95% atau 15 orang.

TABEL 22 RERATA USIA PEREMPUAN PEDAGANG KEPALA KELUARGA

No.	Usia	Frekuensi	Persentase
1	20-25	1	5,26
2	41-45	1	5,26
3	46-50	6	31,58
4	51-55	9	47,37
5	>55	2	10,53
Jumlah		19	100

Sumber: Data Primer (2018)

2.4.2 Situasi Pendidikan

Terkait tingkat pendidikan individu yang menjadi subjek dalam penelitian ini, hasil survei menunjukkan bahwa mereka yang belum/tidak pernah sekolah mencapai 4,55% dan mereka yang tidak/belum tamat SD mencapai 12,50%. Presentase terbanyak adalah mereka yang tamat SD, SMP, dan SMA masing-masing mencapai 28,41%, 22, 73%, dan 29,55%. Lalu ada pula di antara mereka yang memiliki jenjang pendidikan hingga S1, meski jumlahnya adalah yang paling kecil sebanyak 2,27%.

2.4.3 Rata-rata Jumlah Tanggungan

Dari hasil survei menunjukkan jumlah tanggungan yang paling cenderung dimiliki oleh sampel yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 4 tanggungan yang presentasenya mencapai hingga 27,27%. Disusul dengan mereka yang memiliki 5 jumlah tanggungan yang mencapai 20,45%.

Karakteristik responden yang ditampilkan di atas, menunjukkan wajah kemiskinan kebanyakan ditampakkan oleh kaum perempuan. Karakteristik dapat disimpulkan dari rendahnya tingkat pendidikan, usia yang masih digunakan untuk bekerja, dan jumlah tanggungan yang harus mereka sanggupi. Lebih dari separuh penduduk miskin di negara berkembang adalah perempuan, sehingga menguatkan terjadinya

feminisasi kemiskinan; bahwa sebagian besar angka kemiskinan diisi oleh perempuan[122].

3. Kerentanan

3.1 Konteks Kerentanan

Kerentanan (*vulnerability*) adalah keadaan kesejahteraan individu, rumah tangga, atau komunitas dalam situasi perubahan lingkungan yang mengancam kesejahteraan. Perubahan lingkungan yang mengancam kesejahteraan dapat berupa ekologi, sosial, atau politik dan dapat juga berupa krisis yang tiba-tiba, tren jangka panjang, dan musiman[123].

Konteks kerentanan (*vulnerability context*) merujuk kepada situasi rentan atau laten yang setiap saat dapat memengaruhi atau membawa perubahan besar dalam penghidupan masyarakat. Konteks kerentanan penting dijabarkan untuk mengenali beragam kerentanan dan membangun kesadaran bersama bahwa guncangan (*shocks*), kecenderungan (*trends*), dan musiman (*seasonality*) berpengaruh besar bagi keberlanjutan penghidupan masyarakat[124].

GAMBAR 16 KONTEKS KERENTANAN

Sumber: diadopsi dari Moser, Caroline, O.N (1996)

Guncangan (*shocks*) yaitu perubahan yang bersifat mendadak dan sulit diprediksikan, pengaruhnya relatif besar bagi penghidupan, bersifat

122 Withead, 2013 dalam Imam Cahyono, Wajah kemiskinan, wajah perempuan, Jurnal perempuan edisi 42, yayasan jurnal perempuan, Jakarta.

123 Moser, Caroline, O.N. 1996. "Con-ing Crisis, a Comparative study of Household Response to poverty and Vulnerability in Four Poor Urban Communities". The World Bank, Washington.

124 DFID (2001). Sustainable livelihoods Guidance Sheets. Department for International Development, https://www.ennonline.net/dfidsustainableliving. (diakses pada 19/07/2018)

merusak atau menghancurkan, dan umumnya dirasakan secara langsung. Misalnya: bencana alam, serangan hama, atau guncangan ekonomi.

Kecenderungan (*trends*) adalah perubahan yang terjadi secara perlahan yang umumnya dapat diprediksi. Namun, pengaruh negatif yang ditimbulkan terhadap penghidupan masyarakat, mampu membesar apabila tidak atau gagal diantisipasi dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah. Kecenderungan (*trends*) ini umumnya merupakan suatu perubahan yang kompleks, tidak berdiri sendiri, namun akumulasi dari beberapa kondisi yang umumnya masyarakat memiliki atau dapat memperoleh informasi tentangnya. Misalnya: kecenderungan populasi, kecenderungan ekonomi, kecenderungan politik, dll.

Perubahan musiman (*seasonality*) yaitu perubahan yang bersifat berkala dan sering terjadi pada periode tertentu. Meskipun dapat diprediksi, perubahan berkala tersebut tetap membawa pengaruh terhadap penghidupan masyarakat, karena dampak yang ditimbulkannya lebih luas dibanding dengan kemampuan antisipasi masyarakat. Perubahan musiman tidak terbatas pada perubahan yang terkait dengan cuaca, musim, atau perubahan alam lain, namun mencakup perubahan yang lebih luas seperti dinamika sosial masyarakat, aktivitas pasar, dan pertukaran beragam sumber daya dalam masyarakat. Perubahan musiman antara lain: produksi pertanian di sawah, ladang, perubahan harga barang, pengangguran, lapangan kerja, migrasi penduduk dari desa ke kota, harga musiman, musim produksi, atau musiman kesempatan kerja.

3.1.1 Kecenderungan (*Trend*)

a. Pembeli yang Berkurang

Setiap tahun, pembeli yang datang ke Pasar Terong semakin menurun. Hal tersebut diakui oleh sebagian besar perempuan pedagang yang sudah berpuluh-puluh tahun menjalani aktivitas berdagang di pasar ini. Mereka menyebutkan bahwa dulu masih banyak pembeli dari kantor-kantor pemerintah berbelanja di pasar. Kini, mereka tak pernah terlihat lagi. Para pedagang meyakini bahwa konsumen pegawai negeri itu, kini lebih memilih berbelanja di pasar-pasar modern.

Konsumen yang tersisa adalah para pelanggan tetap yang sudah sejak awal menjalin hubungan dagang dengan para pedagang pasar. Umumnya, pelanggan tersebut adalah pembeli yang akan menjual kembali barang dagangan di warung makan seperti coto, ikan bakar, konro, dan sebagainya

yang membutuhkan daging, sayur, tomat, jeruk nipis, dan buah segar setiap harinya, atau pelaku ekonomi kecil lainnya seperti pedagang kaki lima dan toko rumah tangga.

Fenomena tersebut yang terjadi pada Ibu Ros, penjual ikan kering. Ia punya pelanggan tetap seperti pemilik warung makan yang rutin melakukan pemesanan hingga 20 kg setiap minggunya.

"Kayak itu penjual-penjual makanan toh. Apakah dia masak atau dia goreng untuk jualan warungnya,"

Ros, 36 tahun, (Wawancara 13 Agustus, 2018).

Berkurangnya pembeli di pasar lokal, juga disebabkan oleh perubahan persepsi konsumen. Menjamurnya pasar modern, membuat mereka menarik perbandingan di antara keduanya. Pasar modern lebih menawarkan pelayanan, kebersihan, hingga harga yang cenderung lebih terjangkau, bahkan mudah menemukan dan memilih barang yang dicari. Kondisi barang juga dianggap lebih bersih, nyaman, praktis, dan menawarkan pilihan yang lebih lengkap. Pasar modern ini berada di mana-mana, di pinggiran kota, kompleks perumahan, POM bensin, bahkan di hampir di semua poros jalan arteri, dan beroperasi hampir 24 jam untuk *minimarket.*

"Tata ruang pasar, semakin ke sini semakin semrawut. Sehingga konsumen enggan datang ke pasar karena macet,"

Enal, 42 tahun. (Wawancara 12 Agustus, 2018)

Sementara pasar lokal oleh sebagian masyarakat lebih diidentikkan dengan tempat yang kumuh, semrawut, becek, pengap, bau, dan sumpek. Pasar lokal juga sering dituduh sebagai sumber kemacetan, sebab para pedagang sering menggelar dagangan mereka dengan memanfaatkan sempadan jalan.

Bulan Februari 2018, beberapa pedagang melakukan protes kepada pihak pengelola pasar. Mereka menolak rencana pemasangan batas jalan di poros jalan terong.

"Waktuna lagi diperbaiki jalanan ini, diangkat semuai rumah-rumah ya (lapakan), makanya sekarang baru lagi semua. Ihh baru 6 bulan lalu itu kejadian."

Hasna, 39 tahun. (Wawancara 10 September, 2018)

Lebih jauh, pelaku usaha pasar modern seperti Alfamart, Indomaret, Circle K, Alfamidi, dan lainnya telah melakukan perluasan bisnis. Gerai-gerai mereka kini sudah berdiri di permukiman padat penduduk, bahkan hingga ke lorong-lorong. Pasar modern tersebut juga memungkinkan mereka bekerja sama dengan banyak produsen semisal Mayora, Unilever, Nestle, Indofood, dan sebagainya. Dengan pembelian barang langsung dari produsen, membuat harga beli menjadi jauh lebih murah dibanding pembelian secara konvensional yang dilakukan oleh pedagang pasar.

> *"Kita pun orang pasar biasa belanja di alfamart...macam minuman itu seperti Sprite atau Coca-cola, kalau di sana bisa kita beli Rp3.000,- ji, kalau di sini bisa sampai Rp5.000,- beda Rp2.000,-. Karena mereka langsung beli di (mobil) kampas, langsung di pabriknya, ambil banyak, beli partai. Sementara penjual yang di pasar beli di toko, hanya beberapa dos."*

Hasna, 39 tahun. (Wawancara 10 September, 2018)

Aksesibilitas tersebut memungkinkan pembeli untuk tidak lagi pergi jauh berbelanja ke pasar lokal. Sebab, pasar modern dengan suka rela datang dan mendekatkan diri kepada konsumennya. Kenyamanan dan kemudahan dalam berbelanja merupakan salah satu penyebab perubahan pola belanja masyarakat dari *gadde-gadde* ke *minimarket*[125].

Pasar modern ini datang dan mendekatkan diri ke rumah-rumah warga untuk menjemput pelanggan. Menyediakan hampir semua kebutuhan dasar rumah tangga seperti; sayur, telur, susu, buah, dan sebagainya. Harganya juga kebanyakan jauh lebih murah karena bekerja sama langsung dengan produsen dan dalam jumlah yang banyak.

Pelayanan yang diberikan pada pelanggan juga memuaskan, mulai dari ruangan yang memiliki penyejuk, penataan barang, kebersihan, serta lahan parkir. Tak ketinggalan pula penyediaan layanan tambahan seperti; pembayaran tagihan bulanan; seperti listrik dan air, juga beragam pembayaran *payment point* transaksi belanja daring seperti; *publik utility* (Pembayaran listrik, air, dan telepon), transportasi, *multi-finance*, TV kabel, dan *e-Commerce*, yang memberikan kemudahan bagi pelanggannya.

> *"Sepinya pembeli karena konsumen telah beralih pada* supermarket *dan makanan cepat saji. Dan orang semakin malas memasak."*

Penjual ikan (FGD 7 Oktober, 2018)

125 Ishak Salim, 2013, Tsunami Minimarket Tenggelamkan Pedagang Kecil di Makassar. Social Justice Magz, Vol 3, hlm 25-28

Pada masa tertentu, Pasar Terong dibanjiri pembeli hingga memadati ruas-ruas jalan. Biasanya keramaian itu terjadi pada saat menjelang perayaan hari besar agama seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal. Lewat dari masa itu, biasanya hingga satu minggu setelah perayaan, pasar akan lebih sunyi karena uang belanja telah digunakan secara maksimal di masa perayaan.

Dalam seminggu, biasanya Pasar Terong cukup ramai pada hari minggu, sedangkan di hari Senin sampai Sabtu cenderung sepi. Ketika hari-hari sepi tiba, para pedagang sering kali menurunkan sedikit harga jual barang dagangan. Menurut para pedagang, hal tersebut lebih baik dibanding dagangan tidak laku terjual sama sekali.

> *"Itu pi biasa kalau mau puasa, mau lebaran, baru banyak orang. Ramai sekali sampai padat ini jalanan.... hari Senin sampai Sabtu, sepi. Hari minggu pi biasa baru banyak orang. Malah biasa saya kasih turun harga, ka dari pada tidak laku. Daripada tinggal, dak ada orang mau beli,"*
>
> Ros, 36 tahun. (Wawancara 13 Agustus, 2018).

Hal lain yang membuat pembeli enggan menginjakkan kaki ke Pasar Terong adalah karena tidak tersedianya lahan parkir yang memadai. Sementara penjual di Pasar Terong sangat banyak, sekitar 7,8 ha luasan lahan yang ditempati pedagang secara terpencar. Maka, pembeli lebih memilih berbelanja di jalan poros Pasar Terong.

Pasar Terong sendiri secara administratif masuk ke dalam 2 wilayah kelurahan, Tompobalang dan Bajo Baru. Sehingga pembeli tidak bisa mengakses jauh ke dalam dan mereka lebih memilih berbelanja hanya di bagian depan pasar saja. Karena akses jalan besar hanya satu, di poros jalan Pasar Terong.

Berbeda dengan pasar modern yang didesain secara profesional, di pasar lokal, khususnya Pasar Terong, tidak memiliki pengaturan yang jelas sehingga menimbulkan ketidakteraturan yang parah. Pedagang terpencar hingga memenuhi bahu jalan poros Pasar Terong yang menyebabkan kemacetan, tidak tersedianya lahan parkir, hingga kebersihan yang tidak dijaga dan menyebabkan bau yang tidak mengenakkan.

> *"Karena jarak penjual di dalam cukup jauh, jadi pembeli hanya membeli di luar."*
>
> *Ibu Indri. (FGD 7 Oktober, 2018)*

Kehadiran becak motor dan ojek di sekitar wilayah jalan poros Pasar Terong semakin memperparah kemacetan. Mereka menunggu para

pembeli keluar dengan barang belanjaannya, yang membutuhkan tumpangan. Pembeli yang kebanyakan ibu rumah tangga ini biasanya diantar oleh suaminya, karena tidak ada tempat untuk parkir, sang suami lebih memilih untuk pulang dan membiarkan istrinya kembali dengan transportasi umum.

Jalan poros Terong yang sedianya bisa digunakan untuk tempat parkir, digunakan oleh pedagang untuk berjualan. Para pedagang menyewa lahan-lahan yang ada di depan pagar rumah warga atau kios, lalu menaruh dagangannya di atas meja atau kain/plastik yang bisa digunakan untuk jadi alas, hingga keluar ke hampir pertengahan jalan. Karena pembeli lebih ramai berlalu lalang di jalan poros, maka ramai pula pedagang yang membuka lapak di pinggiran jalan menjemput pembelinya. Hasilnya, para pembeli melakukan transaksi di atas kendaraannya, dan menyebabkan kemacetan yang panjang.

"Tangga selatan bagian depannya tidak terbuka. Seandainya bukan karena langganan pasti akan mati usaha di sini."

Pak Umar (FGD 7 Oktober, 2018).

Tumpah ruahnya pedagang memenuhi pinggiran jalan poros Terong, disebabkan karena bangunan gedung berlantai empat yang seharusnya penuh, tidak diinginkan oleh sebagian besar pedagang. Alasannya, pembeli malas naik, dan sewa kios tidak dapat dijangkau oleh pedagang kecil. Maka, mereka lebih memilih untuk tetap berjualan di luar gedung, dan di pinggir jalan poros Pasar Terong.

Kebersihan pasar juga menjadi hal yang menyebabkan pembeli malas berbelanja ke pasar, selain kotor juga menyajikan aroma yang tidak sedap. Padahal, seharusnya pasar lokal bisa jauh lebih bersih, karena setiap hari pedagang menyetor retribusi harian sebesar Rp5.000,- dan retribusi sampah Rp2.000,-. Namun petugas kebersihan yang ditunjuk oleh Kepala Pengelola Pasar hanya sekali dalam sehari melakukan bersih-bersih.

b. Jumlah Pedagang yang Bertambah

Arus urbanisasi yang tinggi dan ketidakmampuan kota dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup di sektor-sektor formal, berimplikasi pada maraknya orang untuk memulai usaha pada sektor informal [126] .

[126] laporan penelitian "studi etnografi dan observasi pasar-pasar lokal di tengah pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern di kota Makassar", AcSI-SADAR. https://www.scribd.com/doc/40549579/Microsoft-Word-Laporan-Penelitian-Pasar-Tradisional-Makassar

Mendatangkan orang-orang dari desa untuk mengadu nasib di kota. Karena umumnya tidak memiliki latar pendidikan yang tinggi, mereka lalu lebih memilih sektor informal, dan pasar merupakan sektor informal yang paling mudah untuk memberikan pekerjaan pada mereka.

Pengertian sektor informal meliputi sektor produksi, distribusi, konsumsi, hingga jasa. Di pasar, seseorang bisa bekerja tanpa perlu memiliki status pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah. Itulah alasan, pasar menjadi muara sektor ekonomi informal. Modal yang dibutuhkan relatif lebih kecil.

Dengan membawa hasil bumi yang ada di desa, lalu diangkut menggunakan mobil *pick-up*, mereka lalu menggelar lapakan di pinggir poros jalan Pasar Terong dan hingga jalan poros Veteran yang berada tepat di sebelah barat Pasar Terong. Sejak pukul 03.00 dini hari, mereka telah mulai menjual dagangannya.

Lalu, ada pula mereka yang menggunakan sepeda atau motor, yang di sisi kiri dan kanannya dibuatkan tempat penampungan untuk memuat dagangannya, seperti ikan, sayur, atau buah. Orang di pasar menyebut mereka *pagandeng*, mereka mengayuh sepeda dan menarik gas motornya juga dari desa di luar Makassar, lalu sudah berada di Pasar Terong sejak pukul 05.00 subuh, juga memarkirnya di jalan poros Terong dan hingga jalan poros Veteran.

Kedua jenis pedagang ini berakhir hingga antara pukul 08.00 sampai 10.00 pagi. Mereka yang menggunakan mobil, menjual sisa dagangannya pada pengecer, sementara mereka yang menggunakan sepeda atau motor melanjutkan berjualan dengan cara berkeliling.

Salah satu faktor yang menyebabkan pedagang di Pasar Terong semakin banyak adalah manajemen yang lemah dari pihak pengelola pasar. Perencanaan yang tidak melibatkan aspirasi pedagang, membuat mereka luput dari kebutuhan para pedagang. Akibatnya, ketidaksesuaian kepentingan antara pedagang dan pengelola pasar, sering kali membuat pedagang sebagai korban dari tiap proyek pembangunan.

"Tampak jelas bahwa perusahaan daerah Makassar melalui kepala pasar yang katanya mengelola pasar itu, tidak punya pengetahuan tentang itu (mengelola). Apakah sebuah pasar membutuhkan bangunan permanen yang begitu mahal hingga lantai tiga? Mana ada pedagang yang mau jualan di lantai tiga apalagi pedagang yang berjenis basah atau yang memiliki masa kadaluwarsa lebih cepat seperti ikan, buah, atau sayur. Ini kan rencana-rencana pemerintah

kota dalam melakukan modernisasi pasar-pasar lokal yang dianggap sebagai tradisional.... Pedagang kita lebih mengenal budaya hamparan bukan dengan bangunan bertingkat."

Enal, 42 tahun (Wawancara 5 September, 2018)

Pedagang dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitar pasar mulai dari jalan masuk sampai di sekitar gedung pasar. Setidaknya ada 4 jenis pedagang yang di Pasar Terong: ruko (rumah toko), kios, los, dan PKL.

Ruko dapat ditemukan di dalam gedung berlantai tiga dan di beberapa tempat di luar gedung. Sedangkan kios merupakan toko kecil atau warung berbentuk bangunan kecil. Kebanyakan ditemukan di luar gedung Pasar Terong. Lalu, ada los yang merupakan bangunan setinggi 1 meter dan lebar 1 meter yang dibuat secara memanjang. Bangunan ini kemudian dibagi seluas 1×1 m^2 untuk satu orang pedagang. Banyak terdapat di basemen gedung pasar.

Jenis yang terbanyak adalah pedagang kaki lima (PKL). Ada beragam jenis pedagang kaki lima, di antaranya adalah mereka yang hanya menggunakan kain, plastik, atau baskom dan sejenisnya sebagai alas jualan. Ada yang menggunakan meja kayu, ada pula yang memakai sepeda yang bagian belakangnya di dua sisi kiri dan kanannya dipasangi bak untuk menampung barang dagangan, dan terakhir adalah bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu berukuran 2×2 m^2.

Sehingga, secara keseluruhan, baik di dalam maupun di luar gedung berlantai tiga, total pedagang Pasar Terong mencapai 2.632 pedagang[127].

Karena PKL hanya menumpang di dinding-dinding pagar rumah masyarakat yang ada di sekitar gedung pasar terong, dan menggelar lapakan di pinggir-pinggir jalan di sekitar gedung pasar, maka mereka kerap dibubarkan secara paksa oleh pihak pengelola pasar. Setidaknya, ada dua alasan mengapa mereka senantiasa menjadi target penggusuran. **Pertama**, karena mereka menyebabkan kemacetan. **Kedua**, kios yang ada di dalam gedung masih banyak yang kosong sehingga mereka diminta untuk mengisinya. Tapi, karena harga yang mahal dan jarang pembeli yang masuk ke dalam gedung membuat mereka tetap kembali melapak di tempat semula.

---

127 Data PD. Pasar Makassar Raya, 2014

Para pedagang digusur, dan sialnya tidak ada tindak lanjut dari pengelola pasar. Sebelum pedagang yang tergusur kembali menaruh lapak, pedagang baru sudah terlebih dahulu menetap dan memasang lapak baru. Karena pedagang baru dan pedagang yang pernah tergusur sama-sama tidak memiliki hak, mau tidak mau mereka harus berbagi tempat. Ditambah dengan pedagang baru yang memiliki modal lebih, mereka mampu menyewa dan akhirnya memiliki los dan kios sendiri.

Beberapa pedagang mengakui, setiap kali usai penggusuran, maka semakin bertambah pula pedagang baru yang menempati pasar. Dan itu berarti mereka juga harus saling berbagi ruang untuk bisa sama-sama bertahan hidup. Penggusuran terakhir terjadi pada tahun 2009.

Setiap sesudah penggusuran pedagang, tempat yang tadinya ditinggalkan oleh pedagang yang tergusur, akan diisi oleh pedagang baru sekira 2 hingga 3 bulan setelah penggusuran. Lalu, pedagang yang tergusur sebelumnya akan kembali dan berbagi tempat dengan pedagang baru, atau mencari tempat lain.

Luas Pasar Terong mencapai 8,7 ha[128]. Sementara secara resmi, Pasar Terong diakui hanya bangunan yang tiga lantai. Di sekeliling gedung terdapat rumah-rumah warga yang pekarangan rumahnya digunakan oleh pedagang-pedagang untuk berjualan. Ada yang dikenakan biaya sewa, ada pula yang gratis. Kondisi tersebut yang secara berangsur membuat pedagang semakin bertambah mengisi 11 ruas jalan yang ada di Pasar Terong yang selanjutnya disebut sebagai *sektor* oleh organisasi SADAR.

Biasanya, seorang pedagang pasar akan mempekerjakan tenaga keluarga untuk membantu penjualan di pasar. Tapi, jika sudah merasa cukup menguasai teknik berdagang, pekerja tersebut akan mulai membuka lapak sendiri dan belajar mengembangkan dagangannya, sehingga tidak mengherankan jika pedagang-pedagang di Pasar Terong merupakan rumpun-rumpun keluarga.

> *"Dulu saya ikut kerja sama kakak ku. Ada mungkin 5 tahun saya ikut sama dia. Ku pikir kalo di situ terus ka dak berkembang ka. Makanya saya mulai juga usaha sendiri. Banyak pedagang begitu di sini, mulanya ikut-ikut ji dulu sama keluarganya yang menjual."*
>
> *Ros, 36 tahun (Wawancara 13 Agustus, 2018).*

128 Wawancara dengan kak Enal (Aktivis pendamping pasar)

Pada saat musim lebaran, Natal, dan tahun baru akan semakin ramai lagi pedagang yang berjualan di sekitar Pasar Terong. Aneka jualannya akan menyesuaikan tema perayaan yang sedang berlangsung. Begitu perayaan berakhir, harusnya pedagang-pedagang ini sudah tidak lagi berjualan, namun sebagian dari pedagang ini memilih menetap.

Titik ramai pedagang terletak di jalan poros Pasar Terong, tapi kini telah memenuhi hingga ke ruas-ruas jalan sempit di sekitar gedung pasar, ruas jalan yang menghubungkan rumah-rumah warga di sekitar pasar. Para pedagang lalu menyewa halaman depan rumah warga, dan memasang meja atau menggelar kain/plastik lalu berjualan di tempat itu.

3.1.2 Guncangan

a. Penggusuran

Wacana penggusuran sudah dimulai sejak Pasar Terong diresmikan oleh Walikota Makassar, Mayor M. Daeng Patompo, di tahun 1971. Bentuk pasar masih berupa jejeran toko berbentuk huruf U —di tengahnya terdapat satu los induk dan beberapa los kecil yang mengelilinginya dengan bentuk berpetak memanjang, ada yang ukuran panjangnya 30 meter ada juga yang 20 meter.

Awal 1990-an, petugas pasar mulai melarang para pedagang kaki lima berjualan di sekitar jalan masuk ke Pasar Terong. Larangan itulah yang pertama kali menjadi persoalan antara pedagang kaki lima dan Satpol PP Pemkot Makassar.

Dengan diresmikannya pasar tersebut, pedagang yang sebelumnya menggelar jajanannya secara semrawut di ruas-ruas jalan bekas lokasi pasar sekarang, dengan segera ditertibkan. Pengelola pasar berusaha memindahkan sejumlah pedagang yang berjualan di luar pasar inpres. Pedagang yang kebanyakan dari mereka menggunakan meja sebagai tempat jualan walaupun sebagian berupa pelapak (hanya menggunakan kain atau plastik sebagai alas) yang menjual sayur, buah, dan rempah. Mereka menyewa tempat dari pemilik rumah dan toko, namun ada juga yang sekadar menumpang.

"Saya tidak bayar ji ini tempat di sini (di depan dinding pagar rumah warga) karena kebetulan masih keluarga meski keluarga jauh. Tapi ada juga pedagang yang membayar sebagai sewa tempat."

Ros, 36 tahun (Wawancara 13 Agustus, 2018).

Karena pedagang tersebut bergeming, dengan dibantu oleh seorang tentara yang bernama Pak Sampe bersama dengan anggotanya yang juga tentara bertindak sebagai kepala keamanan di Pasar Terong, mereka berpatroli mengawasi pedagang yang menjual di luar pasar, mengusir mereka dengan kekerasan seperti ditendang bahkan dipukul dengan kayu[129].

Pada masa yang penuh intimidasi itu, banyak pedagang kaki lima memilih pindah atau sengaja dipindahkan ke Panampu atau Pabaeng-baeng. Selama satu bulan berjualan di dua lokasi tersebut, pedagang merugi dan akhirnya memilih pindah ke pasar Kalimbu yang berdekatan dengan Pasar Terong. Pedagang merasa bahwa Pasar Terong belum aman disebabkan perpanjangan kontrak tentara yang bertindak sebagai pengamanan.

Seperti kisah daeng Nur (49) yang terpaksa harus mengungsi ke pasar Butung. Demi melayani pelanggan tetapnya, ia harus membuat janji bertemu dan menjual dagangan secara sembunyi-sembunyi kepada mereka.

> "J*adi, saya punya kode dengan pelangganku. Biasanya dia telepon ka baru pesan bilang bawakan ka sekian. Pas di pasar, saya akan berteriak 'merdeka!' jadi kalau dia dengar mi kode ku, na datangi ma.*"
>
> Nursiah, 49 tahun (Wawancara 10 September, 2018)

Setelah masa kontrak para tentara itu telah habis, di sekitar pasar sudah mulai berdatangan pedagang-pedagang baru dan pedagang lama dari pasar Kalimbu juga sudah mulai kembali ke Pasar Terong.

Lalu pada tahun 1990-an, ide 'modernisasi' pasar 'tradisional' mulai marak. Maka, dilakukanlah pembongkaran toko dan los menjadi gedung pasar berlantai empat. Pada masa pembangunan pasar, sebagian besar pedagang dipindahkan ke jalan Labu, di sana mereka membangun kios-kios sederhana, sebagian lagi menempati jalan Sawi, Kubis, dan Terong.

Pembangunan gedung rampung dan berfungsi pada 1997, pengelola pasar kembali menertibkan pedagang. Kios-kios di jalan Labu dibongkar dan pedagang dipindahkan untuk mengisi gedung baru tersebut. Namun, pada akhirnya banyak bangunan yang tidak terpakai terutama los-los lantai tiga dan empat. Menurut kebanyakan pedagang, mereka enggan menempati lokasi tersebut karena tidak ada pembeli yang ingin naik berbelanja.

---

129 Pasar Terong Makassar, Dunia dalam kota, Penerbit Ininnawa, Makassar, 2013

Pedagang yang tidak memiliki modal juga tidak sanggup membayar harga setiap kios yang disediakan. Penempatan lokasi berjualan bagi pedagang sayur dan ikan basah di lantai atas tidak tepat dari segi pedagang maupun kultur belanja pembeli.

Kondisi tersebut membuat banyak pedagang merugi, lalu akhirnya memilih pindah ke luar gedung dan bergabung bersama pedagang yang menggunakan sepeda yang berasal dari berbagai daerah yang tidak tertampung di dalam gedung. Mereka menempati trotoar yang ada di Pasar Terong seperti trotoar di Jalan Terong, Jalan Mentimun, dan Jalan Bayam. Sebagian pedagang juga tetap tinggal di Jalan Labu, Jalan Kubis, dan Jalan Kangkung. Akibatnya, semakin banyak pembeli yang malas masuk ke gedung.

Pedagang-pedagang yang akhirnya tumpah ke jalan, dianggap sebagai penyebab kemacetan oleh pihak pengelola pasar, sehingga harus ditertibkan. Pengerahan polisi, satuan pamong praja, dan bahkan preman sewaan untuk melakukan penggusuran cukup mendapatkan perlawanan sengit karena kebanyakan dari pedagang tersebut juga adalah mantan preman.

Sejak itu, tercatat sudah empat kali pembongkaran berlangsung di Pasar Terong, yaitu pada tahun 2000, 2003, 2007, dan 2009. Sayangnya, usai pembongkaran tersebut, tidak ada tindak lanjut dari pengelola pasar dalam waktu secepatnya. Hari-hari berikutnya, pedagang kembali memasang meja dan kainnya, meski awalnya harus sembunyi-sembunyi.

Pada tahun 2003, para pedagang yang berjualan di luar gedung ini, menggabungkan diri dan membentuk organisasi Persaudaraan Pedagang Pasar Terong (SADAR). Organisasi ini kemudian menjadi wadah pedagang pasar membicarakan nasib mereka berhadapan dengan pihak pengelola pasar.

Melalui organisasi tersebut, para pedagang berhasil membangun afiliasi dengan kepala pasar saat ini. Namun, politik senantiasa berubah-ubah, para pedagang akan tetap awas dan menunggu bandul politik mengarah ke posisi mana. Apakah keberpihakan mengarah kepada para pedagang atau malah sebaliknya.

3.2 Dampak Kerentanan

Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan di atas terkait sumber-sumber kerentanan perempuan pedagang di Pasar Terong, maka subbab ini akan memberikan pemaparan terkait dengan dampak yang ditimbulkan.

3.2.1 Penurunan Omzet dan Keuntungan

Sejumlah kerentanan yang dipaparkan di atas menyebabkan sejumlah dampak bagi penghidupan perempuan pedagang yang ada di Pasar Terong. Dampak ini pada masanya akan memicu guncangan dan memberikan sejumlah tekanan bagi rumah tangga pedagang. Jika tidak diatasi, maka akan menyebabkan mereka terlempar keluar dari penghidupannya.

Dari sekian banyak sumber kerentanan yang dihadapi oleh pedagang di Pasar Terong, penurunan omzet penjualan menjadi akibat yang umum dialami bersama oleh sebagian besar perempuan pedagang.

Hasil survei menunjukkan sebanyak 80,68% pedagang mengalami penurunan omzet penjualan, sementara ada 18,18% yang mengaku stabil. Lalu, sisanya sebanyak 1,14 % yang menyatakan penurunan omzet hanya sedikit atau relatif tidak signifikan. Data lebih lengkap disajikan pada bagan di bawah ini.
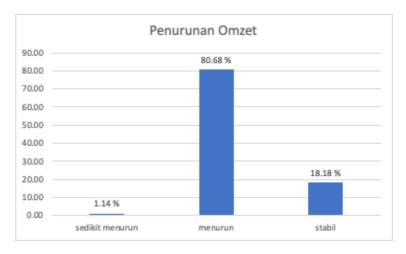
GAMBAR 17 PRESENTASE JUMLAH PEDAGANG YANG MENGALAMI PENURUNAN OMZET

Pedagang di pasar lokal memiliki kekuatan modal yang kecil, sehingga mempunyai kemampuan yang terbatas dalam melakukan pembelian barang untuk dijual kembali. Karena berbelanja dalam jumlah kecil, maka harga pokok pembelian yang harus dibayarkan terhadap sebuah produk, akan lebih mahal. Akhirnya, pedagang di pasar menetapkan harga jual barang tersebut juga lebih mahal.

Misalnya daeng Nur, penjual sandal. Ia membutuhkan modal sebesar 10 juta rupiah yang termasuk sebagai modal kecil. Dari modal tersebut, terdapat beragam jenis sandal dari sejumlah penyuplai. Satu jenis sandal, bermodal kira-kira 2 juta rupiah sebanyak 8 lusin. Lalu, untuk mendapat keuntungan, barang tersebut diecer (dijual satuan). Karena satu lusin sandal itu berarti seharga 250 ribu, maka biasanya satu pasang sandal akan dijual seharga 30—40 ribu per pasang.

> *"Ya kita jual dua kali harganya toh biar kita untung juga. Tapi biasanya kalo sudah langganan tidak banyak kita ambil untung dari dia. Atau kalau sudah kembali modal, dak mahal mi kita jual. Tergantung kalau pembeli juga tidak menawar, karena kan mereka tidak tahu harga."*
>
> Nursia, 49 tahun (Wawancara 10 September, 2018)

Karena itu, pedagang kerap mematok harga tinggi —biasanya dua kali lipat dari harga modal. Pada masa itulah, mekanisme tawar-menawar bekerja. Namun, tidak jarang para pedagang memberi potongan harga. Dalam hal ini, pedagang di pasar lebih selektif memilih konsumen dalam memberikan potongan harga yang lebih murah. Potongan harga biasanya diberikan kepada konsumen yang mengerti tentang produk tertentu atau kepada pelanggan tetap, agar pelanggan tidak pindah ke toko yang lain.

Fenomena tersebut mirip dengan diskriminasi harga, tetapi berbeda dengan definisi monopoli pada umumnya. Fenomena di pasar lokal lebih kepada memanfaatkan pemberian harga khusus terhadap pelanggan tetap dan memanfaatkan informasi asimetris terhadap pelanggan tidak tetap. Sehingga pemberian harga khusus hanya dilakukan dengan pelanggan tetap karena pelanggan tetap dinilai lebih mengerti dan mengetahui informasi tentang barang yang akan dibeli atau dikonsumsi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sumber kerentanan di atas, kondisi-kondisi tersebut menyebabkan para pedagang di pasar lokal mengalami kesulitan dalam menjual kembali produknya. Makanya, selalu saja ada barang dagangan yang tersisa karena tidak laku. Barang dagangan

yang awet dapat tetap tersimpan hingga berminggu-minggu sehingga dapat dijual dengan harga yang lebih murah. Sedangkan, jenis barang dagangan yang mudah membusuk seperti sayur dan buah, terpaksa harus dibagi percuma atau dibawa pulang.

"Seperti ini lombok eh. Saya ambil 4 kg karena yang punya sudah mau pulang. Tapi, cuma 2 kg yang laku, jadi itu mi sisanya dak bisa diapa-apai. Itu juga saya punya alpukat, banyak pelanggan mengeluh karena katanya hitam, jadi saya stop dulu. Masih ada tersisa saya punya hutang ke dia 1,7 juta karena tidak laku barangnya."

Hasnah, 39 tahun (Wawancara 10 September, 2018)

Hal tersebut mengakibatkan para pedagang mulai mengurangi jumlah pemesanan untuk dijual atau mulai mencari jenis dagangan baru.

Seiring dengan kecenderungan penurunan omzet, hal tersebut juga akan berimplikasi pada menurunnya jumlah keuntungan, bahkan ada yang merugi. Hal tersebut dapat terjadi apabila barang dagangan tidak habis terjual, sementara nilai hasil penjualan belum memenuhi nilai modal yang telah dikeluarkan. Biasanya, kondisi ini banyak dialami oleh pedagang yang jenis barang dagangannya gampang membusuk.

Jika kondisi tersebut terjadi, pedagang akan memberikan dirinya upah lebih sedikit dari biasanya, sebab modal harus terus tetap berputar. Sementara sebagian besar dari perempuan pedagang di Pasar Terong ini, ekonomi rumah tangga mereka hanya ditopang dari sumber nafkah berupa dagangan mereka.

TABEL 23 SUMBER PENDAPATAN PEREMPUAN PEDAGANG

Sumber pendapatan	Frequensi	Persentase (%)
Buruh	2	2,3
Kerajinan tangan	2	2,3
Jasa pelayanan	0	0,0
Dagangan	83	94,3
Pertanian	0	0,0
Lainnya, sebutkan.	1	1,1

Sumber: Data Primer (2018)

Menurunnya keuntungan bagi pedagang akan mengganggu sistem penghidupan mereka. Musababnya adalah, karena hal tersebut dapat

memicu berkurang atau tertutupnya akses pada satu jenis kebutuhan rumah tangga. Misalnya, jika awalnya mereka mampu melakukan cicilan untuk satu jenis kendaraan, karena keuntungan menurun, pos anggaran untuk biaya cicilan menjadi hilang.

Seperti yang terjadi pada ibu Hasna, karena usahanya dianggap macet oleh penyuplai alpukat, maka ia ditawari untuk memberikan lapakannya pada penyuplai untuk disewa sejumlah 10 juta rupiah.

"Karena kan saya berhutang sama dia, banyaknya barangnya yang tidak laku. Jadi saya pikir-pikir ini karena dia minta ini tempat ku disewa."

Hasna, 39 tahun (Wawancara 10 September, 2018)

b. Ketidakpastian Keamanan Penghidupan (*Unsecured Livelihood*)

Bekerja di sektor formal dengan beragam jenis layanan dan tunjangan kesejahteraan, dapat membuat penghidupan lebih aman. Berbeda dengan mereka yang bekerja di sektor informal, khususnya perempuan pedagang di Pasar Terong. Mereka kerap diintai penggusuran dan tidak memiliki jaminan keamanan.

Pemerintah kota Makassar hanya mengakui Pasar Terong yang merujuk pada pedagang pasar yang ada di gedung berlantai empat. Sedangkan praktik yang berlangsung sehari-hari, pengelola pasar memungut retribusi dari segenap pedagang yang berjualan baik di dalam maupun di luar gedung.

Sehingga, mereka yang berada di luar gedung senantiasa dalam keadaan terancam. Mereka selalu menjadi objek atas setiap kebijakan pasar yang berhubungan dengan penertiban maupun revitalisasi.

Mati bagi pedagang pasar adalah pantang. Semakin mereka terancam, semakin pula mereka gigih memperjuangkan hak-hak mereka. Pekerjaan yang mereka upayakan merupakan proses perjuangan untuk mempertahankan hidup, bukan disediakan oleh negara. Beragam konteks kerentanan harus mereka hadapi, dan sialnya, sebagian dari kerentanan itu datang dari mesin-mesin negara.

Tentara, polisi, dan Satpol PP silih berganti ditugaskan untuk menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan masuk pasar hingga ke area sekitar gedung.

"Hampir semua pedagang yang berjualan pada tahun-tahun awal 1990-an tidak pernah melupakan nama Sampe. Ia kepala keamanan pasar di masa kepemimpinan kepala Pasar Terong 1988-1995, Mustari Abdullah. Sebagai tentara aktif, Sampe dapat menurunkan sejumlah pasukan armed *sebagai pendukung penertiban pedagang kaki lima yang berada di luar gedung. Bahkan, Sampe membangun pos-pos penjagaan di keempat pintu masuk pasar.... Tentara aktif bergantian berpatroli dan langsung mengusir pedagang yang mereka dapati di luar gedung...."*[130]

Meski sejak masifnya perlawanan dari organisasi SADAR sejak 2008 silam, dan sepanjang kepemimpinan Pemkot Makassar yang terpilih sejak 2014, belum lagi ada penertiban yang memaksa para pedagang untuk pindah. Namun, organisasi SADAR sampai hari ini belum melakukan pembaharuan struktur, padahal ada beberapa ketua sektor yang tidak lagi aktif dan ada pula yang sudah meninggal. Di sisi lain, perhelatan Pemilukada baru saja usai 2018 ini, namun terpaksa harus diulang pada tahun 2020 karena dimenangkan oleh kotak kosong.

Di sisi lain, pihak pengembang pasar telah berakhir masa kontraknya tahun 2017 lalu. Pihak PD Pasar Raya ingin mengambil alih pengelolaan. Kondisi ini akan membuat situasi di Pasar Terong menjadi tidak aman. Jaminan kepastian pedagang untuk tetap bisa berjualan, tidak ada.

Maka, ratusan perempuan pedagang di Pasar Terong, Makassar, terancam kehilangan akses atas sumber penghidupan utama mereka. Tidak hanya pedagang, tapi semua orang yang bergantung mengais penghidupan di sektor informal ini akan terkena dampaknya. Mulai dari penyuplai barang yang ada di desa, pemilik warung makan dan ibu rumah tangga yang berlangganan ikan kering di pasar, hingga pemulung yang setiap sore mengais sampah untuk kemudian dia jual.

Pada tahun 2009, pemerintah kota Makassar mengeluarkan Perda pelindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern. Perda bernomor 15 itu dikeluarkan dengan dalih untuk melindungi pedagang kecil di pasar tradisional dari persaingan dan monopoli pasar modern. Namun pada praktiknya, pasar modern, utamanya Alfamart dan Indomaret, semakin menjamur dan dengan sukarela datang mendekatkan diri menjemput pelanggannya. Selain itu, Perda tersebut sejak awal memandang pasar lokal sebagai sesuatu yang kuno dan usang. Misalnya

130 Agung Prabowo, senjata orang-orang pasar dalam "Dunia Dalam Kota", Penerbit Ininnawa, Makassar, 2013

pilihan menggunakan diksi yang berlawanan antara tradisional dan modern.

Sehingga, pasar lokal dipaksa untuk tampil lebih bersih dan memiliki gedung berlantai agar dekat dengan istilah modern. Kini, melalui konsep modern yang diagung-agungkan, para pedagang kecil yang tidak mampu membayar biaya sewa, memilih keluar dan menaruh lapak dengan memanfaatkan sepadan jalan, atau menempel pada dinding rumah warga, yang sampai saat ini dianggap sebagai biang kemacetan dan rawan penggusuran.

Mereka yang paling rentan dari tidak bekerjanya dengan baik perda No. 15 tahun 2009 tersebut adalah perempuan yang dominan bekerja sebagai pedagang di Pasar Terong.

4. Strategi Penghidupan

Bab ini membahas temuan terkait strategi yang dilakukan rumah tangga perempuan pedagang dalam menghadapi tiga sumber guncangan yang menimpa mereka. Strategi yang dibahas dalam bab ini adalah strategi penghidupan yang dapat didefinisikan sebagai strategi pengamanan penghidupan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko atau meminimalisir konsekuensi negatif dari guncangan yang dialami masyarakat pada saat dampak guncangan sudah terjadi melalui pilihan-pilihan strategi seperti; Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi, dan Migrasi.

Istilah strategi penghidupan digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang atau beberapa orang memilih melakukan kombinasi dan jangkauan dari aktivitas untuk mencapai tujuan kehidupan mereka[131].

Strategi yang diterapkan masing-masing rumah tangga mereka selain bertujuan memenuhi kebutuhan hidup juga untuk memperkuat sumber-sumber kehidupannya. White[132], menyimpulkan strategi *livelihoods* dengan membaginya berdasarkan status sosial ekonomi rumah tangga. **Pertama**, strategi survival adalah strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup pada tingkat minimum agar dapat bertahan hidup; **kedua**, strategi konsolidasi

131 Carney, D. (1998). Implementing the Sustainable Rural Livelihoods Approach. In Carney (ed.) Sustainable Rural Livelihoods. What Contributions can we make? Department for International Development Nottingham: Russell Press Limited.

132 White, Benjamin N.F.1991. Economic Diversification and Agrarian Change in Rural Java 1900-1990. Pp 41-49. Alexander, Paul, Boomgard, Peter and White, Benjamin (eds). 1991. In the Shadow of Agrarculture: Non Farm Activities in Javanese Economy, Past and Present. Royal Tropical Institute, Amsterdam.

adalah strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dicerminkan pada pemenuhan kebutuhan pokok dan sosial; **ketiga**, strategi akumulasi adalah strategi pemenuhan kebutuhan hidup untuk mencapai kebutuhan pokok, sosial, dan penumpukan modal. Strategi tersebut tidak selalu muncul dalam suatu masyarakat, strategi yang muncul akan berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lain di mana strategi yang dilakukan sangat menguntungkan pada kondisi ekonomi rumah tangga.

Selanjutnya, Scones[133] menggolongkan strategi penghidupan setidaknya menjadi tiga golongan besar. Ketiga golongan antara lain; **(1)** Rekayasa sumber penghidupan pertanian, yang merupakan usaha pemanfaatan sektor pertanian agar lebih efektif dan efisien baik melalui penambahan input eksternal berupa tenaga kerja atau teknologi (intensifikasi) maupun dengan memperluas lahan garapan pertanian (ekstensifikasi). **(2)** Pola keragaman penghidupan yang merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mencari pekerjaan lain selain sektor pertanian untuk menambah pendapatan (diversifikasi). **(3)** Rekayasa spasial merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mobilisasi/perpindahan penduduk baik secara permanen maupun sirkuler (migrasi).

Sehingga dalam penelitian ini, akan banyak menggunakan versi dari Ian Scones. Namun kami juga akan tetap meminjam milik Benjamin Nicholas Forbes White untuk menambal sulam konsep yang kami anggap tepat dalam menjelaskan serangkaian strategi yang dipilih oleh perempuan pedagang di Pasar Terong.

Untuk strategi penghidupan, konsep White cenderung lebih tepat digunakan pada penelitian ini. Karena strategi penghidupan yang dipilih oleh perempuan pedagang di Pasar Terong, lebih tergambarkan secara tepat melalui konsep strategi penghidupan milik White; bertahan hidup, konsolidasi, dan akumulasi. Sementara, intensifikasi dan ekstensifikasi serta migrasi, cenderung lebih tepat digunakan dalam penghidupan masyarakat desa, tapi konsep diversifikasi ala Scoones juga menjadi penting untuk menjelaskan situasi di Pasar Terong.

Sebelum melangkah lebih jauh pada pembahasan terkait strategi penghidupan perempuan pedagang di Pasar Terong, terlebih dahulu perlu kami tunjukkan beberapa akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh

---

133 Scoone, 2001, Sustainable Rural Livelihoods A Framework For Analysis. IDS Working Paper 72. Institute of Development Studies.

beberapa sumber kerentanan yang menjadi guncangan bagi rumah tangga perempuan pedagang.

Sehingga secara umum serangkaian strategi penghidupan di atas dapat dilihat sebagaimana berikut ini:

GAMBAR 18 STRATEGI BERTAHAN HIDUP

Sumber: Penulis

4.1 Strategi Bertahan hidup

Strategi bertahan hidup (*survival strategy*) adalah strategi yang dilakukan oleh perempuan pedagang yang memiliki modal kecil dan tipe lapakan yang sederhana. Setidaknya ada empat jenis lapakan yang dapat ditemukan di lokasi penelitian. Pertama, hanya menggunakan kain atau plastik untuk menggelar lapakan. Kedua, menggunakan meja atau kelompok pedagang yang menggunakan sepeda. Ketiga, mereka yang memiliki kios kayu sederhana. Dan keempat, mereka yang sudah memiliki los dan bangunan kios. Kelompok pertama dan kedua biasanya mengolah sumber daya yang terbatas atau terpaksa bekerja apa saja dengan imbalan yang rendah hanya untuk sekadar menyambung hidup tanpa mampu menabung atau untuk sekadar modal usaha. Jenis strategi yang dilakukan tidak terbatas hanya pada satu strategi saja, tetapi lebih dari pada penggabungan dari beberapa strategi yang diterapkan.

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar perempuan pedagang memiliki tipe lapakan yang berstatus rendah. Sebanyak 56,82% tipe lapakan mereka

adalah meja kayu sederhana. Pada golongan inilah dan 12,50% yang tipe lapakan hanya berupa kain atau plastik yang paling rentan terhadap guncangan.

Dalam menghadapi perubahan pendapatan dan penurunan aset penjualan, perempuan pedagang akan melakukan penyesuaian untuk mempertahankan penghidupan mereka. Tindakan yang umum adalah;

1. Mengurangi volume barang yang akan dijual lalu menaikkan sedikit harga agar margin pendapatan tidak begitu jauh menurun.

Karena keuntungan yang diperoleh semakin sedikit, maka besaran produk yang harus dijualkan juga menjadi lebih sedikit. Alasannya sederhana, keuntungan yang diperoleh sebelumnya tidak cukup untuk melakukan belanja modal yang lebih besar.

Misalnya seperti yang terjadi pada daeng Jama', penjual asam. Dulu, dalam sebulan ia mampu menjual hingga satu karung asam. Kini, ia hanya bisa menjual setengah karung saja. Supaya keuntungan yang diperoleh tidak turun terlalu jauh, maka ia akan menaikkan sedikit harga jualnya. Kecuali pada pelanggan tetap yang sudah akrab, kadang ia justru memberikan diskon, agar pelanggan tidak lari.

2. Mengurangi upah dan maksimalisasi pembelian modal

Karena keuntungan menurun, maka untuk mempertahankan usaha, banyak dari pedagang terpaksa meminimalisir upah untuk dirinya. Sisa hasil usaha kebanyakan digunakan untuk melakukan belanja modal untuk dijual keesokan harinya.

Seperti pengalaman ibu Ati, penjual minuman rasa-rasa. Karena pemasukannya per hari, maka jika dalam sehari pembeli kurang ramai, yang artinya pemasukan untuk hari itu terbilang sedikit. Maka, ia juga akan memberikan sedikit upah untuk dirinya sendiri, lalu sisanya ia belanjakan untuk pembelian modal.

3. Untuk mengatasi minimnya keuntungan yang masuk pada satu masa tertentu, biasanya mereka akan melakukan penghematan pada menu makanan. Jika bisanya hidangan di meja makan memiliki menu lengkap, pada masa krisis menu makan tidak menjadi soal asal perut terisi.

Porsi pengeluaran yang lebih besar untuk makanan, merupakan salah satu bentuk penghematan yang dilakukan oleh rumah tangga. Atau bisa dikatakan, tingginya biaya yang dikeluarkan untuk makanan adalah bentuk riil dari kemiskinan mereka. Sebab mereka tidak memiliki banyak keuntungan untuk dibelanjakan pada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder, apalagi tersier.

Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa 63,78% pendapatan digunakan untuk makanan. Maka, hal ini mengindikasikan betapa terguncangnya mereka jika sumber pendapatan mereka terancam dan keuntungan mereka menurun. Hal ini terjadi karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk kebutuhan yang paling dasar. Lalu, dengan terguncangnya pendapatan, mereka malah semakin menghemat.

Lebih jauh, mari kita simak persediaan beras yang dimiliki oleh rumah tangga perempuan pedagang. Beras merupakan kebutuhan pokok yang harganya fluktuatif, sering kali membuat kebanyakan orang susah menjangkaunya. Semakin rumah tangga tersebut memiliki persediaan beras maka semakin mampu mereka meminimalisir guncangan. Namun, jika persediaan beras rumah tangga subsisten, nanti ketika beras habis lalu mulai membeli, semakin rentan pula mereka terhadap guncangan.

Penyebab utama kemiskinan suatu rumah tangga adalah rendahnya pendapatan yang mereka terima, sedangkan karakteristik perempuan pedagang antara lain memiliki rata-rata jumlah tanggungan keluarga yang banyak. Jumlah anggota keluarga yang banyak merupakan salah satu indikasi yang dominan dalam menentukan tingkat kemiskinan rumah tangga. Semakin besar tanggungan keluarga, semakin besar pula jumlah konsumsi berasnya.

4. Bagi kebanyakan perempuan pedagang, aktivitas berdagang di pasar merupakan satu-satunya jenis pendapatan yang mampu mereka raup. Jika terjadi penurunan omzet penjualan, maka menjual dagangan dengan harga murah menjadi pilihan yang paling rasional. Strategi penjualan seperti itu banyak dipraktikkan oleh toko-toko besar. Untuk mengantisipasi penurunan keuntungan secara berlebih, barang harus dijual lebih murah.

4.2 Strategi Konsolidasi

Strategi konsolidasi adalah bentuk strategi yang dilakukan oleh rumah tangga, di samping untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, juga agar mampu menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung.

Strategi konsolidasi dengan memaksimalkan pendapatan berisi tindakan yang telah melewati tingkat keamanan dari sekadar bertahan hidup, di mana pedagang sudah mampu memenuhi kebutuhan primer. Strategi ini dilakukan untuk menghindari atau mengantisipasi jika kurang mencukupi kebutuhan utama atau kebutuhan mendadak,

1. Melakukan penyesuaian konsumsi/pengeluaran antar waktu dengan cara mengambil tabungan, mencari pinjaman/utang ke berbagai pihak.

Jika pendapatan menurun, maka beberapa pos anggaran harus ditekan. Jika pos tersebut tetap harus dibayarkan karena sesuatu yang darurat, mereka melakukan pinjaman, menggunakan uang simpanan, dan menjual aset.

Pada sebagian besar perempuan pedagang jika pada situasi darurat membutuhkan uang, maka 63,64% dari mereka akan melakukan pinjaman untuk menutup kekosongan pos anggaran pada satu jenis kebutuhan tertentu. Lalu, terdapat pula sebanyak 34,09% yang menggunakan uang simpanan, dan sisanya sebanyak 2,27% menjual atau menggadaikan aset yang mereka miliki.

Mekanisme strategi konsolidasi dengan cara berhutang merupakan strategi penunjang bagi rumah tangga. Dalam kondisi sulit di mana pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka strategi tambahan yang dibangun adalah berhutang atau meminta bantuan keuangan dari pihak lain.

Hasil survei mendapatkan data bahwa sebagian besar perempuan pedagang sebanyak 74,63% menggunakan pinjaman untuk modal usaha. Pinjaman untuk modal usaha dilakukan agar margin pendapatan akibat dari penurunan omzet tidak begitu jauh pengaruhnya.

Selain penggunaan dana segar untuk pembelian barang sebagai modal usaha, biasanya juga mendapatkan barang dalam bentuk pinjaman. Pemilik akan memberikan sejumlah barang pada pedagang dalam tempo tertentu (misalnya seminggu), pedagang akan mengembalikan sejumlah uang

sebagaimana harga yang telah disepakati. Namun, dalam beberapa kasus, kadang kala barang dagangan yang diambil dalam bentuk utang, tidak laku terjual bahkan sebelum harga modal kembali. Sementara, barang sudah mulai membusuk dan barang tersebut tidak lagi bisa dijual. Jika pedagang tersebut memiliki banyak jenis barang jualan yang harga jualnya cukup tinggi dan laku, maka ia bisa saja melakukan subsidi silang. Kerugian ia dapat dari satu jenis barang, dapat dibayarkan melalui keuntungan barang yang lain. Jika tidak, maka pada kondisi inilah mereka harus berhutang atau menggadai/menjual asetnya.

2. Menggadaikan barang, menjual barang-barang berharga.

Menggadaikan atau menjual barang adalah salah satu alternatif yang dipilih oleh rumah tangga ketika menghadapi penurunan pendapatan. Menggadaikan barang memiliki prinsip yang sama dengan melakukan peminjaman. Namun, prosedurnya lebih tidak terbelit dibandingkan dengan melakukan peminjaman pada institusi keuangan formal maupun informal. Menggadaikan barang dipilih sebagai upaya penyangga agar penurunan konsumsi tidak banyak terjadi dan adanya keterbatasan dalam sumber-sumber pendanaan lainnya dalam mengatasi penurunan pendapatan. Namun demikian, jika rumah tangga tidak mampu menebus barang yang digadaikan, maka konsekuensinya barang akan dilelang. Jenis aset pedagang yang dijual atau digadaikan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 24 JENIS ASET YANG DIJUAL/GADAI

Jenis Aset	Frequensi	Persentase (%)
Tanah	9	10,23
Lahan pertanian	7	7,95
Ternak	0	0,00
Kendaraan	14	15,91
Rumah	14	15,91
Usaha	15	17,05
Emas	28	31,82
Alat elektronik	1	1,14

Sumber: Data Primer (2018)

Sebagian besar perempuan pedagang (sebanyak 31,82 %) menggunakan emas sebagai aset yang paling sering digunakan untuk dijual atau digadaikan.

Kebanyakan perempuan pedagang tidak mampu menabung, dalam artian menaruh uang hasil keuntungan di bank. Namun, pada praktiknya, meski tidak menabung dalam bentuk simpanan di bank, namun mereka secara tidak langsung melakukan investasi terhadap emas. Saat mereka memiliki untung yang berlebih dan tidak ada keperluan mendesak untuk menggunakan uang, mereka lebih memilih untuk membeli emas. Suatu waktu, pada masa genting membutuhkan uang segar, maka mereka bisa langsung menjual emas.

Alasannya sederhana, karena emas lebih mudah dijual dibanding aset lain seperti tanah atau lapakan dagang mereka. Emas dapat dijual kapan saja dan uangnya bisa langsung cair pada saat itu juga, terlepas dari apakah uang yang didapatkan melalui penjualan di bawah harga atau tidak, intinya uang bisa segera didapatkan. Beda dengan aset yang lain seperti tanah atau lapakan dagang, pihak lain harus puas lebih dahulu untuk kemudian bersepakat membelinya dan biasanya memakan waktu yang cukup lama.

Tercatat hanya sekitar 38,64% saja yang mampu menabung di bank, sisanya sebanyak 61,36% tidak mampu menabung.

3. Memanfaatkan sumber daya rumah tangga yaitu mempekerjakan anggota rumah tangga dewasa.

Untuk mengurangi risiko semakin menurunnya keuntungan, maka banyak pula pedagang yang menambah jenis dagangannya dalam satu lapakan. Dengan demikian, juga akan menambah beban pekerjaan. Maka, memanfaatkan sumber daya rumah tangga dengan mempekerjakan anggota rumah tangga dewasa akan memberikan daya dukung penghidupan.

4.3 Strategi Akumulasi

Strategi akumulasi adalah strategi yang dilakukan rumah tangga dengan cara memanfaatkan kelebihan (surplus) yang didapat untuk mengembangkan usaha. Strategi ini sebagai usaha-usaha untuk mengakumulasi modal usaha sebagai cara menjamin keberlangsungan hidup rumah tangga.

Ada perempuan pedagang yang sudah memiliki lebih dari satu lapakan dagang. Ia melibatkan tenaga kerja yang merupakan kerabat dekat. Hal ini dilakukan untuk menambah jumlah pendapatan. Lalu, ada juga di antara

mereka yang memiliki los lebih dari satu lalu menyewakannya ke orang lain.

Perempuan pedagang yang sudah mampu melakukan akumulasi, bisa dilihat dari sudah terpenuhinya kebutuhan tersier. Misalnya dapat dilihat dari hasil akumulasinya selama berdagang untuk segera melakukan ibadah haji. Salah satu prestise bagi masyarakat adalah dengan menyandang titel haji di depan namanya, itu mengapa menyandang gelar ini menjadi salah satu pencapaian yang menunjukkan status sosial yang lebih dibanding yang lain. Salah satu yang dapat dicapai oleh setiap orang dengan usaha-usaha yang disengaja (*achieved status*)[134].

Selain itu, mereka yang mampu melakukan akumulasi adalah pedagang yang sudah mampu naik makam dari pedagang eceran menjadi pedagang grosir.

Misalnya sebagaimana yang dilakukan oleh Hj. Sri, penjual ayam potong. Untuk mengurusi usaha ayam potongnya, ia memberi tanggung jawab pada anaknya. Lalu ia mulai mengembangkan bisnis travel pengantaran jemaah haji dan umrah.

4.4 Diversifikasi

Strategi diversifikasi merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mencari pekerjaan lain selain pekerjaan pokok untuk menambah pendapatan atau menganekaragamkan pekerjaan/usaha.

Tidak banyak perempuan pedagang di Pasar Terong yang melakukan pekerjaan tambahan. Sebab, berbeda dengan jenis penghidupan yang lain, seperti di sektor pertanian yang memiliki sumber pendapatan yang bersifat musiman. Para pekerja pasar beraktivitas hampir setiap hari, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk terlibat pada pekerjaan lain.

Maka, jenis diversifikasi yang dilakukan perempuan pedagang adalah diversifikasi produk. Umumnya, jenis barang dagang yang dijual tidak hanya pada satu jenis barang, meski ada juga yang masih konsentris seperti penjual ayam, ikan, atau daging. Namun, bagi pedagang lain, untuk memaksimalkan keuntungan, menambah jenis barang dagangan merupakan strategi yang paling memungkinkan.

---

134 M. Zainuddin, HAJI DAN STATUS SOSIAL: Studi Tentang Simbol Agama di Kalangan Masyarakat Muslim, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Konsentris yang dimaksud adalah hanya menjual satu jenis barang dagangan. Misalnya, penjual daging sapi hanya menjual daging sapi, tidak mencampur dengan daging kambing atau daging lainnya. Sama halnya dengan penjual ikan yang konsentris, hanya akan menjual ikan jenis tertentu, misalnya cakalang. Jika mereka sudah mencampur dengan jenis daging dan ikan yang lain, maka mereka sudah melakukan diversifikasi produk.

Maka, tidak mengherankan jika kita melihat pedagang di pasar, selain menjual cabai, mereka juga menjual sagu, buah, gula merah, dan lain sebagainya. Atau penjual ikan kering, dengan beragam jenis ikan.

Selain berguna untuk memaksimalkan laba, diversifikasi produk juga berguna untuk memudahkan pedagang melakukan subsidi silang. Jika salah satu barang dagangan ada yang tidak laku terjual maka ia bisa menutupinya dengan keuntungan dari jenis barang dagangan lainnya.

Karena sebagian besar dari pedagang ini menghabiskan seharian waktunya dalam pasar, maka untuk meningkatkan jumlah pendapatan dan mengurangi risiko kerugian, mereka memilih menambah jumlah jenis barang dagang. Banyak pedagang, dan sering kita saksikan, memiliki jenis jualan hingga lebih dari 3 jenis.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

a. Dari 1.020 kartu anggota SADAR yang terdaftar, sebanyak 68,14% atau 695 orang di antaranya adalah perempuan. Hasil riset AcSI dari 88 perempuan pedagang di Pasar Terong rentang usia pedagang bervarian, dan disesuaikan dengan kategori umur menurut Depkes RI 2009 adalah sebagai berikut; pedagang remaja yang mencakup remaja awal dan akhir usia 10—25 tahun 4,55%, usia dewasa yang mencakup dewasa awal dan akhir 26—45 tahun sebanyak 54,55%, lalu Lansia awal dan akhir yang berusia 46—65 tahun sebanyak 38,64%, serta masa Manula yang berusia 65 tahun ke atas sebanyak 2,27%.
b. Persentase terbanyak situasi pendidikan perempuan pedagang adalah mereka yang tamat SD, SMP, dan SMA masing-masing mencapai 28,41%, 22,73%, dan 29,55%. Lalu ada pula di antara

mereka yang memiliki jenjang pendidikan hingga S-1, meski jumlahnya adalah yang paling kecil sebanyak 2,27%.

c. Jumlah tanggungan yang paling cenderung dimiliki oleh sampel yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 4 tanggungan yang persentasenya mencapai hingga 27,27%.
d. Konteks kerentanan yang dihadapi oleh sebagian besar pedagang dapat diklasifikasi ke dalam guncangan (*shock*) berupa penggusuran dan kecenderungan (*trend*) yang berupa berkurangnya pembeli dan semakin bertambahnya penjual.
e. Berkurangnya pembeli disebabkan oleh semakin menjamurnya minimarket dan pengaturan pasar yang tidak memiliki lahan parkir hingga menyebabkan macet.
f. Pedagang yang semakin ramai disebabkan karena tidak berfungsinya gedung berlantai 4 dan tingginya arus urbanisasi.
g. Penyebab utama penggusuran di Pasar Terong adalah karena melubernya pedagang di jalan poros Pasar Terong yang meninggalkan gedung pasar berlantai 4 karena kurang pembeli yang naik berbelanja.
h. Dampak dari situasi kerentanan tersebut berakibat pada penurunan omzet penjualan yang diikuti oleh menurunnya jumlah pendapatan yang diakibatkan dari situasi kerentanan berupa berkurangnya jumlah pembeli dan bertambahnya jumlah pedagang. Sedangkan sumber kerentanan yang berupa penggusuran, berdampak tidak adanya jaminan keamanan penghidupan (*Unsecured Livelihood*).
i. Strategi penghidupan yang dilakukan oleh perempuan pedagang di Pasar Terong adalah dengan melakukan strategi bertahan hidup, konsolidasi, akumulasi, dan diversifikasi

5.2 Rekomendasi

a. Melakukan diskusi dengan pedagang pasar terkait temuan hasil penelitian, dan membangun rencana tindak lanjut bersama.
b. Beragamnya situasi kerentanan yang dihadapi oleh perempuan pedagang, sehingga membutuhkan organisasi sosial yang kuat dalam memberikan perlindungan dan memberikan respon atas masalah-masalah yang dihadapi oleh pedagang, sehingga dibutuhkan penguatan pada organisasi SADAR agar semakin solid.

c. Membangun komitmen bersama kepala pengelola pasar dan PD Pasar Raya untuk melakukan pengaturan pasar yang ramah parkir melalui negosiasi bersama pedagang pasar.
d. Mendorong implementasi Perda No. 15 tahun 2009 agar lebih efektif dan inklusif.
e. Mendorong komitmen pemerintah kota Makassar untuk memperhatikan kesejahteraan pedagang lanjut usia sesuai amanat Undang-undang No. 13 tahun 1998.
f. Melakukan kampanye dan promosi pasar lokal untuk mengajak masyarakat luas untuk berbelanja di Pasar Terong.

MEMBANGUN DAN MEMPERKUAT KAPASITAS: *REFLEKSI PROSES PENDAMPINGAN*

Fasilitator CIPG:

Daya Sudrajat dan Anesthesia H. Novianda,
Wilayah Nusa Tenggara Barat

Ferzya Farhan,
Wilayah Sulawesi Selatan
Klara Esti,
Wilayah Nusa Tenggara Timur

Fasilitator Lokal:

Nurhady Sirimorok, Wilayah
Sulawesi Selatan

Pantoro Tri Kuswardono, Wilayah
Nusa Tenggara Timur

Daya Sudrajat dan Anesthesia H. Novianda

Wilayah Nusa Tenggara Barat

Catatan Pembelajaran

Daya Sudrajat

Pasir Putih

Pertama kali berkunjung ke 'markas' Pasir Putih di Pemenang, pesisir Lombok Utara, saya bertemu dengan beberapa anggotanya yang penuh semangat menceritakan kerja organisasi mereka. Tidak hanya itu, mereka juga bercerita mengenai isu-isu lokal di daerah Pemenang, bahkan Pulau Lombok.

Setelah beberapa kali saya berkorespondensi dan diskusi tatap muka pertama dengan Pasir Putih, mereka menyatakan ketertarikan untuk terlibat di program Membunyikan Bukti. Ekspektasi mereka ketika itu adalah agar anggota Pasir Putih dapat belajar riset dengan metode yang lebih terstruktur. Katanya, 'riset' yang selama ini mereka lakukan lebih bersifat spontanitas ketimbang riset yang dimulai dengan membuat perencanaan/desain terlebih dahulu

Tidak begitu sulit, pikir saya ketika itu. Dari diskusi awal serta beberapa artikel yang saya baca dari situs Pasir Putih, saya mendapat informasi mereka memang terbiasa turun ke masyarakat, mengobservasi kesehariannya, dan mencatat hasilnya dalam bentuk artikel populer. Artinya, Pasir Putih kurang lebih sudah mempunyai modal pengetahuan awal untuk melakukan riset.

Sebagai pendamping di awal saya berharap Pasir Putih dapat mendesain riset secara terstruktur, mempelajari teknis pengumpulan data, menganalisis temuan secara kritis, dan menuliskan hasilnya ke dalam tulisan yang lugas. Lebih jauh, saya berharap Pasir Putih dapat mengaplikasikan hal-hal yang dipelajari dari proses riset untuk kegiatan-kegiatan organisasi mereka.

Dari proses pemilihan topik riset hingga mengumpulkan data, Pasir Putih yang diwakili Sibawaihi, Ahmad Ijtihad, dan Ahmad Dhoom, cukup kreatif dalam hal substansi maupun teknis melakukan riset. Misalnya dalam melakukan pendekatan kepada warga di Desa Segenter, Pasir Putih terlebih dahulu bolak-balik melakukan observasi untuk memahami kebiasaan warga. Hal tersebut kemudian memudahkan mereka dalam melakukan pengambilan data, karena Pasir Putih sering melibatkan diri di aktivitas warga sebelumnya.

Bulan Juni tahun 2018 adalah bulan terakhir saya mendampingi Pasir Putih, bersamaan dengan berakhirnya fase riset. Di bulan itu pula terjadi bencana gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Barat, dan Lombok Utara adalah salah satu wilayah yang paling terdampak. Pasir Putih yang saat itu sedang menulis laporan penelitian, harus menunda semua prosesnya. Bencana gempa Lombok juga turut menghilangkan beberapa dokumen catatan lapangan milik Pasir Putih yang belum sempat dialihkan menjadi format digital.

Jika harus memberi penilaian dari skala 0 hingga 100, saya akan memberi 80 untuk usaha riset yang dilakukan Pasir Putih. Saya memberikan apresiasi yang sangat besar untuk kreativitas mereka dalam proses pembuatan rencana riset dan pengumpulan data di lapangan. Selain itu, inisiatif Pasir Putih untuk mengajak anggota komunitas dan warga sekitar untuk terlibat dalam riset juga patut diapresiasi. Meskipun demikian, Pasir Putih perlu lebih didorong untuk menganalisis dan menuliskan temuan laporan riset ke dalam bentuk yang lebih formal dan mudah dibaca.

Apa yang dihasilkan Pasir Putih di akhir proses riset, sedikit kurang memenuhi harapan hanya karena proses penulisan laporan yang tidak selesai tepat pada waktunya. Namun demikian hal tersebut dapat dipahami mengingat kondisi *force majeur* yang terjadi saat itu. Selain itu proses belajar melakukan riset bersama Pasir Putih, sudah berlangsung dengan sangat baik.

Proses Belajar Bersama: Koreksi dan Perbaikan

Secara garis besar, proses koreksi dan perbaikan ada di seluruh tahap penelitian terutama pada proses perencanaan penelitian, pemilihan metode, dan penulisan. Antara pendamping dan Pasir Putih melalui beberapa proses diskusi untuk akhirnya merumuskan pertanyaan dan lingkup penelitian. Diskusi yang menentukan metode penelitian juga menjadi tantangan tersendiri, dikarenakan Pasir Putih ketika itu ingin mencoba metode etnografi yang sebetulnya tidak cocok untuk menjawab pertanyaan riset yang diajukan Pasir Putih.

Sebagai pendamping, saya melakukan koreksi dan perbaikan melalui dua cara: tatap muka dan jarak jauh. Proses koreksi dan perbaikan melalui tatap muka berlangsung lebih efektif, karena Pasir Putih cukup tanggap dalam prosesnya. Selain itu, ketika proses tatap muka setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam proses perbaikan. Misalnya, dalam kunjungan fasilitator kedua pada bulan Maret

dalam menyusun dan memperbaiki instrumen penelitian, Ahmad Dhoom dan Ahmad Ijtihad melakukannya secara bergantian.

Namun, dalam proses diskusi jarak jauh pendamping menghadapi tantangan yang lebih sulit. Pendamping melakukan koreksi dengan memberikan komentar di dokumen yang dikirimkan serta melalui diskusi via *whatsapp* dan telepon. Pasir Putih kurang disiplin dalam merespon komentar perbaikan dari pendamping, terutama dari segi tenggat waktu. Selain itu, proses koreksi dan perbaikan dari segi teknis penulisan juga merupakan tantangan tersendiri bagi pendamping.

Antara Penelitian dan Perubahan

Awalnya, hasil riset yang dilakukan Pasir Putih di Desa Segenter akan digunakan sebagai bahan advokasi kebijakan pariwisata di daerah Lombok Utara pada khususnya. Pasir Putih berencana mengajukan rekomendasi kepada pemerintah lokal untuk membuat *blue print* perencanaan pembangunan pariwisata di Desa Segenter. Selain itu, Pasir Putih juga merekomendasikan kebijakan kepada pemerintah daerah Lombok Utara untuk mengadakan pelatihan wirausaha kepada masyarakat Desa Segenter agar masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi pariwisata.

Namun demikian, bencana gempa bumi di Lombok yang terjadi bersamaan dengan proses akhir penelitian Pasir Putih membuat asumsi-asumsi riset di awal berubah. Temuan sementara berupa pemetaan perubahan dari rumah adat tradisional harus disesuaikan kembali, mengingat Desa Segenter termasuk daerah yang terkena dampak gempa. Selain itu fokus pemerintah dan masyarakat tentu saja berada pada pemulihan pasca gempa.

Antara Mitra dan Target Grup

Saya melihat Pasir Putih mempunyai potensi untuk mengajak warga terlibat dalam kegiatan-kegiatan mereka. Termasuk dalam program riset Membunyikan Bukti, Pasir Putih turut melibatkan warga dalam prosesnya.

Diawali dengan perkenalan dan pendekatan secara informal, Pasir Putih ikut terlibat juga dalam kegiatan sehari-hari warga. Misalnya, pada bulan Maret 2018, saya diajak Pasir Putih untuk turut melihat lokasi penelitian mereka. Sebelumnya Ahmad Dhoom dan Ahmad Ijtihad membeli sayur-sayuran untuk dimasak bersama warga di Desa Segenter.

Ketika sampai di sana kami pun memasak dan makan bersama di depan rumah warga. Beberapa remaja perempuan di Desa Segenter juga

mengajak kami mencicipi rujak bersama-sama. Dari percakapan-percakapan informal tersebut Pasir Putih turut menjelaskan tujuan keberadaan mereka di desa tersebut – untuk belajar riset dan advokasi bersama-sama. Ana, salah satu anggota Pasir Putih ketika itu juga mengajak perempuan-perempuan di Desa Segenter untuk suatu waktu kumpul bersama dan memasak. Hal itu ditanggapi dengan antusias oleh warga Desa Segenter.

Pasir Putih kerap kali bercerita kepada saya warga Desa Segenter bertindak sangat kooperatif dalam pelaksanaan riset Pasir Putih. Terutama peran Hambali, yang disebut Pasir Putih sebagai 'juru kunci' proses riset ini. Hambali mengenalkan Pasir Putih kepada kepala dan tetua-tetua adat di Desa Segenter serta membantu menjelaskan kepada warga mengenai keberadaan mereka.

Selain itu, Pasir Putih juga sangat sigap untuk mengikuti segala ritual yang ada di Desa Segenter. Warga Desa Segenter pun tidak keberatan dengan keberadaan Pasir Putih, termasuk dalam pengambilan gambar. Alih-alih, warga Desa Segenter juga secara pro-aktif menunjukkan orang-orang yang bisa diwawancarai oleh Pasir Putih.

AMAN Sumbawa

Pertama kali saya mengunjungi kantor AMAN Sumbawa di Sumbawa Besar, Pulau Sumbawa pada bulan September 2017 saya mendapatkan kesan bahwa AMAN Sumbawa mempunyai ekspektasi yang cukup besar dengan program 'Membunyikan Bukti'. AMAN Sumbawa telah mendampingi berbagai komunitas adat di Sumbawa selama bertahun-tahun dalam mengadvokasikan hak atas tanah untuk masyarakat adat. Usaha advokasi yang dilakukan AMAN Sumbawa selama ini selalu mendapat tantangan dari berbagai pihak terutama dari pemerintah daerah Sumbawa sendiri. Melalui program 'Membunyikan Bukti' AMAN Sumbawa berharap mereka dapat mempunyai alternatif langkah advokasi yakni melalui riset.

Salah satu komunitas adat yang didampingi oleh AMAN Sumbawa dalam melakukan advokasi adalah Komunitas Adat Cek Bocek. Awalnya, kami berencana untuk menjadikan Komunitas Adat Cek Bocek sebagai *target group* utama program ini. Tetapi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena di Komunitas Adat Cek Bocek kebanyakan terdiri dari sesepuh adat

yang kurang lancar berkomunikasi baik lisan dan tulis dalam Bahasa Indonesia.

Harapan saya sebagai fasilitator di awal adalah AMAN Sumbawa dapat melibatkan Komunitas Adat Cek Bocek dalam proses pelaksanaan riset. Setidaknya Komunitas Adat Cek Bocek dilibatkan dalam diskusi di dalam proses riset ini dan dalam pengumpulan data. Tidak hanya dalam hal proses transfer pengetahuan mengenai riset dan advokasi baik di internal AMAN Sumbawa maupun eksternal (untuk Komunitas Adat Cek Bocek), namun riset dan advokasi yang dilakukan juga merepresentasikan suara komunitas adat tersebut.

Di awal program, kami meminta pada AMAN Sumbawa setidaknya ada salah satu warga Komunitas Cek Bocek yang terlibat langsung di dalam program Membunyikan Bukti. Suryadi, sebagai warga asli Cek Bocek dan bekerja di AMAN Sumbawa pada saat itu – dijanjikan oleh Jasardi (Ketua AMAN Sumbawa) untuk dapat terlibat langsung di proses riset dan advokasi. Meskipun demikian, selama proses riset untuk melibatkan Suryadi maupun warga Cek Bocek lainnya sulit dipastikan karena komunikasi mengenai proses ini lebih banyak didominasi oleh Jasardi sebagai ketua AMAN Sumbawa.

Di akhir Maret 2018, AMAN Sumbawa melakukan pergantian tim untuk program 'Membunyikan Bukti'. Irawan, sebagai anggota tim advokasi AMAN Sumbawa menggantikan peran Suryadi di proses riset ini. Alasan penggantian adalah karena Suryadi berpindah domisili sehingga tidak bisa terlibat lagi secara penuh waktu. Meskipun Irawan lebih membantu dalam proses riset dan bisa mengimbangi Jasardi (tidak malu-malu mengeluarkan pendapat dan bisa menuliskan gagasannya), namun tetap disayangkan karena tidak ada representasi Komunitas Adat Cek Bocek yang terlibat langsung dalam program Membunyikan Bukti.

Dari proses awal mendesain riset hingga titik berhenti mitra saya memberikan nilai 60 untuk AMAN Sumbawa, karena banyak terjadi ketidaksesuaian antara harapan di awal dan realitas yang ada hingga saat ini. Terutama dari segi proses transfer pengetahuan, pengetahuan mengenai arah riset yang dilakukan AMAN Sumbawa lebih dominan dimiliki oleh Jasardi sebagai ketua AMAN Sumbawa. Dari segi luaran riset, AMAN Sumbawa mempunyai perencanaan sendiri untuk menampilkannya, yakni dalam bentuk publikasi buku. AMAN Sumbawa berencana untuk menampilkan keseluruhan sejarah Komunitas Cek Bocek dalam publikasi buku, yang kurang realistis untuk dilaksanakan di jangka

waktu program yang singkat. Hal ini disayangkan karena di tahap akhir proses riset, yakni penulisan, AMAN Sumbawa tidak lagi berfokus untuk menampilkan luaran yang menjawab pertanyaan penelitian mereka tentang kepemilikan tanah Komunitas Adat Cek Bocek.

Meskipun demikian, AMAN Sumbawa mempunyai potensi jaringan dan pengalaman dalam melakukan advokasi. AMAN Sumbawa di awal sudah mempunyai gambaran perencanaan advokasi yang kuat. Saya pun mengapresiasi AMAN Sumbawa yang sedikit banyak belajar untuk melibatkan warga Komunitas Adat Cek Bocek dalam proses risetnya meskipun tidak secara langsung. Misalnya, AMAN Sumbawa selalu mendiskusikan tentang program riset yang dilakukan di Komunitas Adat Cek Bocek di *rapulung adat* (musyawarah adat) bersama warga adat Cek Bocek.

Proses Belajar Bersama: Perbaikan dan Koreksi

Pada proses keseluruhan riset bersama AMAN Sumbawa, tantangan fasilitator diawali dengan memberikan masukan terkait fokus yang akan diangkat oleh mereka. AMAN Sumbawa awalnya merencanakan untuk membahas seluruh sejarah Komunitas Adat Cek Bocek. Untuk memperjelas fokus riset, saya menyarankan untuk menggunakan pendekatan *etno histori* untuk melihat sejarah kepemilikan tanah Komunitas Adat Cek Bocek dari perspektif warga.

AMAN Sumbawa kesulitan untuk merespon perbaikan dari jarak jauh dan dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu. Sampai bulan Maret 2018, pada kunjungan fasilitator kedua, AMAN Sumbawa akhirnya bisa merumuskan pertanyaan dan instrumen penelitian bersama fasilitator. Selain itu, AMAN Sumbawa baik Jasardi maupun Irawan menunjukkan keinginan belajar yang kuat dalam hal menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan.

Meskipun pertanyaan dan instrumen penelitian sudah cukup jelas, namun fasilitator mendapatkan kesulitan dalam mengontrol proses pengambilan data. Hal ini dikarenakan AMAN Sumbawa tidak mengirimkan data-data mentah yang didapat dari lapangan kepada fasilitator, melainkan langsung ke dalam bentuk laporan penelitian. Di dalam laporan tersebut, AMAN Sumbawa masih mendeskripsikan sejarah Komunitas Adat Cek Bocek secara umum tanpa membahas dinamika kepemilikan tanah warga Cek Bocek.

Pada tahap evaluasi proses riset, AMAN Sumbawa pun menjelaskan tantangan mereka dalam merespon perbaikan. Menurut AMAN Sumbawa, mereka menghadapi kebingungan karena menerima input yang berbeda dari fasilitator dan konsultan lokal. Tantangan yang dihadapi AMAN Sumbawa terutama terletak pada tahap analisis data dan penulisan hasil riset. Menyadari ada perbedaan pendapat antara fasilitator dan konsultan lokal, saya mengembalikan keputusannya kepada AMAN Sumbawa terkait masukan perbaikan yang akan mereka ambil berdasarkan tujuan advokasi mereka.

Antara 'Penelitian' dan 'Perubahan'

Awalnya, target advokasi AMAN Sumbawa adalah terbitnya peraturan daerah mengenai pengakuan atas keberadaan masyarakat adat di Pulau Sumbawa. Terkait Komunitas Adat Cek Bocek, pengakuan dari pemerintah daerah tentang keberadaan mereka sangat penting untuk penyelesaian konflik masyarakat adat dengan perusahaan tambang, Newmount.

Untuk menuju langkah advokasi tersebut, AMAN Sumbawa merumuskan topik penelitian tentang relasi masyarakat adat Komunitas Cek Bocek dengan tanahnya melalui perspektif sejarah. AMAN Sumbawa ingin menunjukkan pentingnya makna tanah bagi masyarakat adat Cek Bocek tidak hanya dari segi penghidupan tetapi juga spiritual. Dari sisi topik penelitian, AMAN Sumbawa membawa kebaruan dari penelitian yang pernah dilakukan di Komunitas Adat Cek Bocek sebelumnya. Penelitian-penelitian tentang Komunitas Adat Cek Bocek sebelumnya lebih banyak terfokus pada konflik tanah antara masyarakat adat dan perusahaan tambang.

Temuan penelitian AMAN Sumbawa perlu diperdalam dan dipertajam lagi untuk 'menggaungkan' kepentingan masyarakat adat Cek Bocek tentang tanahnya. Temuan yang dihasilkan sejauh ini hanya dapat menggambarkan secara umum, belum menyentuh pengalaman masyarakat adat secara langsung tentang relasi mereka dengan tanahnya. Jika hal ini dapat dilakukan, penelitian relasi antara masyarakat adat Cek Bocek dan tanahnya dapat menggugah masyarakat di daerah Sumbawa tentang pentingnya kelestarian tanah dan hutan adat. Lebih jauh, diharapkan 'kesadaran kolektif' masyarakat dapat mendorong pemerintah untuk mulai menyusun peraturan daerah yang mengakomodasi kepentingan masyarakat adat di Pulau Sumbawa.

MENCARI PERUBAHAN

Anesthesia H. Novianda

Bergabung dalam Perubahan

Sebagai pendengar dari beberapa program yang dilakukan oleh CIPG, perjalanan tim VOICE saya nominasikan sebagai program dengan kisah paling unik. Ketika pertama kali diperkenalkan oleh tim CIPG untuk VOICE tahun 2017 tentang program ini, saya menangkap agenda yang cukup besar terutama untuk CIPG yakni "membunyikan bukti". Seberapa besar "bunyi" itu akan bergaung? Menjadi salah satu tugas saya yang saat itu berperan sebagai tenaga komunikasi di organisasi.

Demi memahami konteks dan bersama menyusun agenda komunikasi yang akan dijalankan, saya sering terlibat dalam rapat internal yang diagendakan oleh tim VOICE. Keterlibatan itu membuat saya memahami sebagian informasi yang diberikan oleh masing-masing fasilitator CIPG tentang mitra-mitra VOICE di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Tentu informasi yang saya punya berbeda dengan informasi yang dimiliki oleh fasilitator CIPG saat itu. Fasilitator CIPG untuk VOICE jauh memiliki kedalaman informasi dan ikatan dengan mitra di wilayahnya.

Bagian dari Perubahan

Perjalanan tentang pencarian mitra, fasilitator lokal, serta proses penyusunan agenda penelitian sebagian saya ambil sebagai materi komunikasi dan sebagian lainnya menjadi proses pengenalan saya pada *Civil Society Organisations.* Tak disangka, tahun 2018 saya sendiri menjadi aktor dari kisah unik tim VOICE. Perubahan peran pada tim internal VOICE yang sebelumnya fasilitator CIPG untuk wilayah NTB adalah Daya, digantikan oleh saya. Cerita tentang VOICE dari saya selanjutnya, sebagai fasilitator lokal dari wilayah NTB.

Proses transfer pengetahuan dari Daya ke saya tidak terlalu sulit, karena informasi ketika terlibat dalam agenda komunikasi sudah cukup saya dapatkan tentang siapa mitra, topik besar penelitian, dan pendamping mitra di wilayah. Nama Komunitas Pasir Putih dan AMAN Sumbawa sebagai mitra VOICE NTB tentu tidak asing. VOICE yang saat itu sudah

setengah dari perjalanannya, akan menyelesaikan fase riset dan beralih ke fase advokasi.

Proses peralihan Daya ke saya berjalan di bulan Juli, bersamaan dengan fase penyusunan laporan akhir riset dari mitra. Dalam tahap itu, saya masih belum sepenuhnya mengambil alih pendampingan untuk mitra, pendampingan fase riset masih dilakukan oleh Daya karena saya dipersiapkan untuk mendampingi pada fase advokasi. Meski begitu, mitra sudah diberikan informasi akan adanya pergantian pendamping CIPG. Saya berkenalan dengan mitra dan fasilitator lokal (Anhar) melalui *e-mail* dan *Whatsapp*.

Realitanya, agenda yang disusun di awal oleh tim CIPG untuk menyelesaikan penelitian di bulan Juli tidak dapat terpenuhi. Maka, saya masuk sebagai fasilitator riset bagi kedua mitra melanjutkan kerja yang sudah dilakukan oleh Daya sebelumnya. Pada tahap ini, mendampingi tanpa sebelumnya berkenalan langsung secara tatap muka menjadi tantangan awal bagi saya, mitra dan konsultan lokal. Tidak lama, tantangan lainnya muncul. Bencana alam gempa bumi menimpa rekan-rekan mitra di wilayah NTB, fasilitator lokal (Anhar) dan teman-teman Pasir Putih yang terdampak paling besar. Proses penyelesaian laporan penelitian pun harus berhenti sementara. Begitu pula dengan hambatan komunikasi dengan Anhar dan Pasir Putih. Rekan-rekan AMAN Sumbawa meski terdampak masih dapat melakukan perbaikan dari masukan yang dilakukan oleh Daya.

Agenda yang dilakukan oleh CIPG selanjutnya adalah melakukan lokakarya advokasi di akhir bulan Agustus. Lokakarya ini menjadi kesempatan saya dapat bertemu langsung dengan mitra dan Anhar sebagai fasil lokal untuk berkenalan, mendapatkan cerita tentang ham batan dan kesulitan penulisan. Sayangnya, Anhar sebagai fasil lokal tidak dapat menghadiri lokakarya sehingga saya tidak bisa mendapatkan informasi lainnya di luar Daya tentang proses penelitian yang dilakukan oleh mitra.

Pasca pertemuan lokakarya advokasi, proses pendampingan lebih mulus. Ruang "sungkan" antara mitra dan saya hilang. Namun, Anhar sebagai fasil lokal masih sulit dihubungi sehingga saya menghubungi langsung mitra untuk perbaikan laporan penelitian. Pendampingan penulisan riset yang saya lakukan banyak mengambil referensi perbaikan yang sudah dilakukan Daya, dengan harapan proses ini memudahkan penyelesaian laporan tidak jauh dari tenggat waktu yang nyatanya sudah jauh terlewati.

Proses pendampingan yang terjadi selama Agustus hingga Oktober ini membawa saya pada beberapa tantangan pada proses mitra dalam penulisan laporan risetnya, seperti:

1. Disiplin waktu. Sebuah program yang baik memerlukan *timeline* kerja, begitu pula dengan VOICE. Hal pertama yang saya perlu lakukan adalah memastikan pengumpulan laporan Pasir Putih dan AMAN Sumbawa sesuai dengan tenggatnya. Mengingat, adanya ketertinggalan mitra NTB dibanding rekan-rekan di wilayah lainnya karena bencana alam yang membuat proses penulisan berhenti selama beberapa minggu. Sayangnya, disiplin waktu tidak dapat dilakukan oleh rekan-rekan dari kedua organisasi. Saya harus selalu mengingatkan kedua mitra untuk mengirimkan versi paling terbaru dari tulisannya.

2. Ketat dalam menggunakan landasan teori. Landasan teori akan memudahkan Pasir Putih dan AMAN Sumbawa dalam menuliskan dan menjelaskan data-data yang mereka punya, serta melihat sebuah fenomena secara sistematik. Contohnya dalam penggambaran proses munculnya masyarakat adat Cek Bocek.

3. Asumsi dan kalimat jargon. Kedua mitra memiliki pengalaman dalam melakukan advokasi. Pengalaman bertahun mitra dalam membuat kalimat yang dapat menggerakan massa, atau membuat sebuah slogan gerakan menjadi kebiasaan dalam penulisan kalimat. Program VOICE "membunyikan bukti" mencoba menantang mitra untuk melakukan advokasi berlandaskan sebuah fenomena, yang telah dipahami. Tantangan terbesar dalam fase ini adalah membuat mitra menghindari kata-kata yang bentuknya asumtif dan spekulatif.

4. Komunikasi. Awal tulisan ini saya banyak bercerita tentang proses komunikasi awal dengan mitra. Hingga proses akhir selesainya laporan penelitian masih saya rasakan. Hal ini hanya dari penilaian saya saja. Seperti ada ruang antara saya dan mitra baik AMAN Sumbawa maupun Pasir Putih. Sayangnya, "jarak" komunikasi ini paling terlihat dalam laporan AMAN Sumbawa. Masukan dari Daya maupun saya belum sepenuhnya dilakukan oleh peneliti dari AMAN Sumbawa. Komunikasi yang hilang dari fasilitator lokal juga menjadi salah satu tantangan besar. Pengetahuan dari Anhar sebetulnya akan berguna bagi saya, karena membaca laporan fasilitator lokal saja tidak akan cukup. Namun, usaha untuk menghubungi Anhar baik telpon maupun *Whatsapp* tidak berjalan.

Setelah semua proses pada fase penulisan telah selesai, membaca kembali laporan dari mitra, melihat hasil tulisan mitra kini sudah tidak diisi oleh kalimat asumsi. Begitu pula dengan kalimat panjang yang saya tunggu sampai mana saya bertemu dengan tanda titik. Kalimat panjang sudah banyak berubah menjadi kalimat yang lebih lugas dan mudah dipahami. Sejauh itu, saya merasa mitra sudah berkembang dalam segi menuliskan sebuah laporan penelitian dibanding ketika saya pertama kali mendapatkan *draft* awal laporan penelitian mitra. Meski selanjutnya, dalam kegiatan penelitian penting bagi AMAN Sumbawa dan Pasir Putih untuk menggunakan teori dan data yang tidak hanya mendukung penelitiannya. Sekali lagi, penelitian dilakukan untuk memahami sebuah fenomena, bukan menghilangkannya untuk mendukung asumsi.

Salam,

AHN

FERZYA FARHAN

Wilayah Sulawesi Selatan

MEMAHAMI SUARA MARGINAL

Sebuah Refleksi dalam Mendampingi Mitra VOICE Selama Fase Riset

Ferzya Farhan

Awal Mula

Menjadi fasilitator untuk mendampingi mitra melakukan riset dan advokasi adalah hal baru bagi saya. Walau CIPG pernah melakukan kegiatan serupa, namun bagi pribadi, ini merupakan pengalaman baru. Sebelumnya, pengalaman saya dalam mendampingi CSO hanya dalam program-program advokasi saja, akan tetapi kali ini berbeda.

Awalnya, kami bertiga; Daya, Mba Klara, dan saya dikumpulkan dalam satu ruangan untuk membahas rencana kegiatan. Di sana, kami berbagi tugas. Ada tiga wilayah yang akan dijadikan lokasi kegiatan, yakni Sulawesi Selatan (Sulsel), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Masing-masing dari kami diberi waktu untuk refleksi diri dan memutuskan akan bertanggung jawab pada daerah yang mana.

Saat itu, kami sepakat bahwa Mba Klara akan bertanggung jawab untuk wilayah NTT karena sudah mempunyai pengalaman di wilayah tersebut. Daya untuk wilayah Sulawesi Selatan, karena ia tekun di isu perempuan dan tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang siapa itu Aan Mansur (walau di kemudian hari mereka tak kunjung bertemu). Sedangkan saya, untuk wilayah NTB karena sudah cukup erat dengan isu minoritas dan konflik sumber daya alam.

Dalam 2 tahun ke depan, kami akan mendampingi mitra-mitra tersebut melalui 3 fase yakni fase riset, advokasi, kemudian refleksi. Tapi, sebelum pendampingan dilakukan, terlebih dahulu kami harus menentukan siapa yang akan didampingi. Ada beberapa organisasi yang sudah diidentifikasi saat CIPG menyusun proposal kegiatan. Namun, seiring berjalannya kegiatan, kami sadar bahwa penentuan organisasi ini harus melalui penilaian yang jelas.

Oleh karena itu masing-masing fasilitator membuat "*profile assessment*" pada lembaga-lembaga yang berpotensi. Ini merupakan kegiatan awal dalam

fase "*Goal Attainment*". Saya membuat landasan awal yang dijadikan pertimbangan seperti *geographic (where they are), demographic (who they are), psychographic (how they think), behavioural (what they do),* dan *environment (who and what influence them)*. Selain itu, untuk memahami kondisi dasar masing-masing provinsi, kami juga mengumpulkan data tingkat literasi, tingkat konflik sosial, serta pengetahuan umum seperti siapa pemimpin daerah tersebut. Data kami dapatkan dari pencarian melalui kanal daring, riset CIPG sebelumnya, informasi dari teman sejawat, dan komunikasi langsung dengan kontak di organisasi-organisasi tersebut.

Setelah muncul beberapa nama organisasi, kami butuh mengerucutkannya kembali menjadi dua organisasi per provinsi. Masing-masing dari kami membuat acuan pemilihan organisasi berdasarkan tiga hal, yakni kesesuaian isu dengan tujuan program VOICE, pengalaman riset atau advokasi yang masih minim, dan anggota organisasi pengetahuan yang cukup baik (kaya, maupun minim data tertulis) terhadap isu yang akan diteliti.

Setelah proses ini berlangsung, kami dapat nama-nama organisasi yang akan dikunjungi. Organisasi tersebut adalah Active Society Institute (AcSI) dan Yayasan MAUPE Maros untuk wilayah Sulawesi Selatan, Komunitas Cek Bocek Seleser Ren Suri dan Komunitas Pasir Putih untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, dan Yayasan Wali Ati (Yasalti) dan Yayasan Amnaut Bife "Kuan" (Yabiku) untuk wilayah Nusa Tenggara. Selanjutnya, kami perlu bertemu langsung dengan mereka untuk dapat memahami karakter organisasi dan kelompok target yang akan disasar.

Bulan September 2017. Wilayah pertama yang dikunjungi adalah Sulawesi Selatan, oleh Daya dan Mas Nardo. Kemudian saya akan ke wilayah NTB bersama Mba Mona, lalu Mba Klara dan Mas Fajri akan mengunjungi NTT.

Tapi, ternyata menjelang akhir bulan September ini saya dapat fakta bahwa dalam tubuh ini sedang tumbuh satu calon manusia. Bingung harus bersikap seperti apa. Saya mengabari Mba Mona bahwa saya tetap akan pergi ke NTB dalam keadaan hamil muda. Sontak Mba Mona memutuskan agar saya dan Daya bertukar wilayah kerja. Pertimbangannya saat itu adalah, posisi calon mitra daerah Sulawesi Selatan mudah dijangkau dan tidak berjauhan. Sedangkan mitra di NTB berada di dua pulau yang berbeda. Atas pertimbangan ini, saya urung ke NTB dan langsung digantikan oleh Daya. Sepulang dari Sulawesi Selatan, saya bertemu

dengan Daya untuk membicarakan apa saja yang perlu disiapkan, termasuk bertemu dengan siapa, apa yang harus dilakukan, dan mengabari bahwa terjadi perubahan personil kunjungan untuk wilayah NTB. Lalu, sepulang dari NTB, Daya memberikan informasi mengenai mitra di Sulawesi Selatan kepada saya.

Belajar Mendampingi

Bagi saya, proses mendampingi ini adalah sebuah pembelajaran. Tadinya saya pikir proses pendampingan organisasi akan sering dilakukan secara tatap muka, tapi karena satu dan lain hal, hal ini tidak dapat dilakukan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, proses pendampingan akan sangat sulit dilakukan apabila pendamping dan yang didampingi tidak memiliki "koneksi" yang terbangun dari komunikasi yang intensif.

Oleh karena itu, "kekosongan" peran pendamping CIPG perlu digantikan oleh pendamping lokal yang mumpuni. Sesuai dengan kebutuhan CIPG dan mitra di tiap provinsi. Mencari pendamping lokal yang tepat, itu merupakan tantangan lainnya.

Pertama, saya harus mengenal dulu nilai-nilai yang dipegang oleh AcSI dan MAUPE, kemudian bagaimana struktur organisasi dan pengambilan keputusannya, lalu siapa yang akan mengerjakan programnya. Setelah itu, baru saya bisa identifikasi kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh sang pendamping lokal dan kriteria apa yang diperlukan.

Berkenalan

Saya baru mulai benar-benar berkenalan dengan mitra, sejak pertemuan tatap muka pertama dalam kegiatan pelatihan *Critical Research Method* (CREAME) di Makassar, awal Desember 2017 lalu.

Dari AcSI diwakili oleh Accang dan Mucha. Mereka terlihat seperti tipikal mahasiswa yang banyak melakukan kegiatan akar rumput, sering membaca buku-buku tebal, berdiskusi panjang lebar mengenai 'bagaimana dunia ini bekerja' sembari minum kopi dan merokok. Seperti yang sering saya temui kala menjadi mahasiswa di Yogyakarta, 6-8 tahun yang lalu dan beberapa orang di komunitas serupa saat menetap di Banda Aceh. Dalam pikiran saya kala itu, "Hmm… Sepertinya untuk AcSI, fase advokasi akan lebih menantang dibanding fase riset".

Sedangkan dari Yayasan Maupe Maros, diwakili oleh Yunita dan Uga. Keduanya memakai baju serupa, kala itu, duduk berdampingan (peserta

lain duduk secara acak), dan hampir tidak bersuara sama sekali. Bahkan setelah ditanya pun seperti itu. Padahal yang saya dengar, keduanya orang yang cukup lantang apabila bicara mengenai posisi perempuan di masyarakat. Setelah dicermati, saya merasa bahwa Maupe akan cukup kesulitan di fase riset.

Selama kegiatan CREAME saya lebih banyak memperhatikan kepribadian Accang, Mucha, Yunita, dan Uga baru memperhatikan kemampuan mereka menangkap materi. Sebelum materi CREAME dimulai, masing-masing peserta menuliskan kemampuan (*skill*) yang telah organisasi dan individu miliki. Dari situlah saya menentukan batas harapan program ini pada mereka.

Sebagaimana pengalaman mendampingi organisasi dulu, saya menerapkan hal yang sama bagi mereka: tidak berharap banyak, namun tetap mendorong terjadinya perubahan yang maksimal. Saya ingin membuka "ruang" untuk belajar daripada mengimla. Ihwal yang paling penting untuk fase riset ini, menurut saya kala itu, adalah perwakilan organisasi bisa mengoperasionalkan *Microsoft Office*, setidaknya berupa Word dan Excel.

Peralihan Personil

Satu hal yang menjadi catatan pribadi saya akhir Desember 2017 lalu adalah saya terlalu fokus pada keempat orang tersebut dan tidak mengindahkan adanya risiko keputusan internal organisasi untuk mengalihkan sumber daya manusia mereka.

Setelah pelatihan CREAME selesai, masing-masing personil kembali ke organisasinya. Melakukan rembuk bersama dari pengalaman dan pekerjaan rumah yang mereka dapat dari kegiatan tersebut. Berita mengejutkan pertama datang dari AcSI yang saya dapat sesekali, karena Accang sebagai direktur dan narahubung sering di desa (saya tidak tahu apa yang dia lakukan kala itu). Kabar itu mengabarkan bahwa dia belum dapat kabar terbaru dari Mucha. Mucha, mitra kerjanya itu tidak bisa dihubungi. Dari jauh hari pun saya tidak dapat menghubungi dia. Sempat khawatir, tapi saya coba tepis dan berpikir positif, karena memang ada tipe orang yang "tidak-perlu-diawasi-nanti-lihat-hasil", mungkin Mucha termasuk tipe itu.

Lalu, datang berita bahwa Maupe menetapkan satu orang untuk mengerjakan riset ini, yakni Hera. Hera sehari-hari bertugas untuk menuliskan berita di situs daring yayasan. Oleh karena itu, Ibu Una

(direktur Maupe) merasa dia cukup mumpuni untuk menyelesaikan tugas fase riset ini.

"*Wah, kapalo! (*saya dalam masalah, bahasa Aceh) *Kak Hera kan tidak ikut pelatihan CREAME",* merupakan respon pertama dalam otak saya saat mendapat kabar ini. Saya meminta Yunita dan Uga untuk memberikan pengetahuan yang mereka dapat dari proses CREAME kepada Kak Hera dan meminta Kak Hera untuk baca modulnya.

Tapi, sesungguhnya saya merasa renjatan saat terima kabar lanjutan dari AcSI bahwa Mucha… hilang. Kabar itu saya dapat saat kunjungan lapangan yang pertama di akhir Januari 2018. Hilang, maksudnya adalah kondisi saat seseorang tidak memberi kabar pun tidak dapat dihubungi, walau sebenarnya kita tahu bahwa ia tidak dalam bahaya, hanya tidak ingin terlibat dalam kegiatan. Kondisi ini sering saya temui saat berorganisasi zaman mahasiswa dulu, jadi sebenarnya hal ini lazim terjadi. Namun, saya terenjat karena tidak siap mental bahwa AcSI pun akan ganti personil sebagaimana Maupe. Dan benar, alih-alih menenangkan situasi, Accang pun angkat kaki dari kegiatan ini dan tanggung jawabnya dialihkan kepada Mulyadi dan Misda. Dua orang baru, yang tidak ikut pelatihan CREAME.

Apakah Terdengar?

Agar dapat memahami, terlebih dulu harus mau mendengar. Maka saya putuskan untuk mendengar suara mitra, untuk memastikan mereka mendengarkan suara kelompok target.

AcSI melakukan riset untuk perempuan pedagang di Pasar Terong, sedangkan Maupe untuk perempuan korban kekerasan di Kabupaten Maros. Kedua organisasi sudah lama terlibat dalam isu tersebut. Sebagai catatan awal, AcSI pernah melakukan penelitian etnografi di Pasar Terong tahun 2009 dan membuahkan sebuah buku (tahun 2013) serta organisasi bernama Persaudaraan Pedagang Pasar Terong (SADAR). Sedangkan Yayasan Maupe, telah menjalankan Sekolah Politik Perempuan Maupe (SPPM) untuk mendorong adanya pengakuan dan keadilan bagi perempuan, serta membangun hubungan baik dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) agar dapat berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan.

Ada dua kelompok sasaran yang berbeda oleh kedua organisasi ini. Di wilayah Kota Makassar, AcSI fokus pada strategi penghidupan perempuan pedagang di Pasar Terong. Hal ini dirasa penting karena saat ini aktivitas

transaksi di Pasar Terong kian meredup, konon karena semakin gempurnya waralaba di kota Makassar, padahal mayoritas pedagang di sana adalah perempuan, beberapa di antaranya bahkan kepala keluarga. Sedangkan bagi Maupe, perempuan korban kekerasan merupakan kelompok sasaran yang utama. Mereka, sering kali tidak dapat bersuara, walaupun ingin. Sehingga, Maupe tidak bisa hanya menunggu, namun harus mencari dan menghampiri mereka agar suaranya dapat terdengar.

Dalam proses pendampingan, keduanya menciptakan dinamika yang berbeda. Saat bekerja dengan teman-teman AcSI, karena mayoritas pemuda maka saya harus bersikap *selo* namun tegas. Sedangkan dengan Maupe, saya harus bisa mengakomodir suara-suara dengan baik tetapi tetap taktis.

Ada kelebihan dan kekurangan dalam setiap organisasi dan individu, dan ini semua adalah proses. Dalam hal manajemen waktu, saya acungkan jempol untuk Maupe. Relawan Maupe pun luar biasa, walau tak punya *paralegal*, mereka bisa menyiasati cara agar dapat berjumpa dengan korban kekerasan. Kala itu, beberapa kali relawan diusir, dari rumah, bahkan dari kampung. Dengan demikian, Maupe berhasil mengumpulkan suara-suara perempuan korban kekerasan di Kabupaten Maros. Namun, Maupe tersandung setelahnya, karena setelah data terkumpul hanya satu orang saja yang mengerjakan semua. Dari melakukan studi pustaka, menulis, hingga mengolah data untuk dianalisis. Bagaimana mengolah data ini? Bagaimana menganalisisnya? Apa itu kerangka pikir? Adalah pertanyaan-pertanyaan yang menghampiri saat data telah tersedia.

Lain dengan AcSI. Perkara waktu… *ampun!* Anak muda *procrastinating* (suka menunda, red)*!* Sampai akhirnya terpaksa harus menyelesaikannya. Maka selesailah dia. Jreng, bagai sulap. Mungkin, karena tumbuh dalam lingkungan yang menyenangi bacaan dan diskusi jadi tak sulit bagi mereka untuk menuangkan pikiran dalam tulisan. Namun, karena terburu-buru maka kurang teliti, prinsip “yang penting dikumpulin” berlaku di sini.

Sayangnya saya tidak bisa mendampingi kedua organisasi secara utuh. Dalam fase riset (ideal) yang berlangsung bulan Desember 2017 hingga Juli 2018, saya hanya dapat menemani hingga akhir April 2018 karena pada bulan Mei, anak dalam kandungan saya pun lahir ke dunia.

Sudahkah Memahami?

Namun, karena fase riset tersebut tidak cukup untuk mitra benar-benar menyelesaikan pekerjaannya, maka saya masih dapat kesempatan sedikit untuk melihat hasil kerja keras mereka dan meneruskan pendampingan pada bulan Agustus hingga November 2018.

Di sinilah baru saya bisa melihat, apakah Maupe dan AcSI sudah bisa memahami suara yang mereka dengar atau belum. Ternyata, AcSI mau menyingkirkan asumsi awal mereka, dan mencermati bagaimana pedagang perempuan menyiasati redupnya transaksi di pasar. Tapi, bukan itu suara yang dikeluarkan oleh pedagang perempuan, sebenarnya suara mereka mengatakan bahwa kerentanan ini terjadi karena para pedagang tidak solid, ditambah penegak aturan yang tak tegak. AcSI akhirnya memahami hal ini, dan melanjutkan perjuangan di fase advokasi dengan bekal yang lumayan cukup karena berhasil mengaktifkan kembali konstituen pasar, yakni organisasi Pesaudaraan Pedagang Pasar Terong.

Sementara itu, Maupe, dari pengalaman baru ini, mereka terlihat semakin mantap untuk melakukan penyadaran mengenai "kekerasan" terhadap perempuan. Hasil penelitian ini dijadikan landasan untuk menggugah suara-suara perempuan korban kekerasan lainnya yang selama ini masih tertahan di tenggorokan.

Pada akhir fase riset, saya kembali merenung. "Ruang" belajar dapat terbentuk dengan baik apabila ada inisiatif untuk belajar, namun selama hal tersebut belum ada, maka mengimla masih menjadi cara yang paling tepat.

Tabik.

KLARA ESTI

Wilayah Nusa Tenggara Timur

MENUNTUT DAN MENUNTUN

Catatan Kecil tentang Menjadi Fasilitator bagi Mitra di Nusa Tenggara Timur

Klara Esti

Menjadi fasilitator mungkin sama seperti seorang yang merawat biji tumbuhan tanpa tahu itu biji tumbuhan apa. Tantangan utamanya adalah justru mengenal mitra yang didampingi agar kapasitasnya berkembang optimal. Tapi mungkin metafora tadi berlebihan.

Mitra kami di Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah Yayasan Wali Ati (Yasalti) dan Yayasan Amnaut Bife "Kuan" (Yabiku). Yasalti bermarkas di Waingapu, Sumba Timur (Pulau Sumba). Yasalti berdiri pada tahun 2002, fokus pada akses kaum marginal terhadap layanan dasar, efektivitas pelayanan publik, dan tata kelola berkelanjutan. Sedangkan Yabiku bermarkas di Kefamenanu, Timor Tengah Utara (Pulau Timor). Sejak terbentuk di tahun 2002, Yabiku fokus pada isu perempuan, bergiat dalam pendampingan perempuan korban kekerasan dan akses perempuan terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Keduanya merupakan organisasi yang biasa menjalankan program advokasi. Orientasi advokasi adalah mengubah sesuatu, bukan pertama-tama memahami apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa sesuatu itu. Kecenderungan ini tampak jelas saat mereka menulis proposal. Klaim, asumsi, dan jargon berjejalan dalam latar belakang yang mereka tulis, seolah sudah serba pasti: patriarki menyebabkan kekerasan terhadap perempuan terjadi, adat telah memojokkan perempuan, masyarakat sendiri bersikap acuh tak acuh terhadap pendidikan anaknya, dan seterusnya. Klaim, asumsi, dan jargon itu dideretkan begitu saja, tanpa sumber rujukan. Tujuan penelitian pun melompat ke advokasi:

> Bahwa kita harus memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan, bahwa kita harus mewujudkan kesetaraan akses bagi perempuan, dan seterusnya. Ada ketergesaan untuk mengubah sesuatu, alih-alih memahaminya terlebih dahulu.

Wahai, jika semua sudah serba pasti seperti ini, untuk apa meneliti? Maka, inilah **tantangan pertama: membantu teman-teman Yabiku dan Yasalti mengerti bahwa riset/penelitian dilakukan pertama-tama**

untuk membantu kita memahami fenomena, bukan mengubah fenomena. Bahkan riset untuk advokasi pun tidak selayaknya diisi nafsu menggebu-gebu untuk mengubah apa-apa yang dirasa atau sudah diasumsikan salah. Tugas penelitilah untuk menghidupi tegangan antara dua hal ini: (1) menunda penilaian maupun asumsi demi memperoleh informasi yang bisa seakurat mungkin memotret realitas dan (2) memilih keberpihakan di antara momen-momen itu. Peneliti perlu tekun mondar-mandir antara mencebur menyelami realitas dan mengambil jarak untuk merefleksikan realitas itu, lantas menuliskannya.

Selain itu, dalam penelitian ada tuntutan untuk menjaga koherensi argumen yang bersumber dari keketatan metode pengambilan data dan analisis data. Karenanya, proses merancang penelitian sungguh penting. Persis inilah **tantangan kedua: membuat teman-teman Yabiku dan Yasalti paham pentingnya rancangan penelitian yang ketat (*rigorous*)**. Bahkan merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat pun cukup menantang. Bagi para peneliti Yabiku dan Yasalti, memilih kata tanya (mengapa untuk menanyakan sebab, bagaimana untuk menanyakan proses terjadi, dst.) ternyata bukan perkara gampang.

Konsultasi melalui telepon dan satu konsultasi tatap muka (Januari 2018) tampaknya tidak cukup untuk menanamkan kesadaran ini pada mereka. Saya duga, sebagian karena karakter penelitian memang berbeda dengan advokasi yang cenderung luwes. Selain itu, pengalaman teman-teman Yasalti dan Yabiku selama ini lebih banyak sebagai pengumpul data – istilah kerennya sebagai *data collector* atau *enumerator*.

Untungnya, sejak Maret 2018, saya punya sekutu yang agak lebih galak dalam memastikan teman-teman mitra di NTT memahami pentingnya rancangan penelitian yang detail dan ketat. Saya kutipkan kata-katanya yang meneguhkan itu:

> *"Merancang penelitian saja sudah merupakan bagian dari penelitian. Ini termasuk studi pustaka, analisis data awal, sampai membuat pertanyaan yang tajam, metode analisis, metode pengambilan data, dsb."*
> - Torry Kuswardono, pos elektonik, 20180306

Dalam hal ini, bekerja bersama fasilitator lokal yang berbagi kesamaan gairah (atau mungkin visi?) dengan CIPG dan VOICE sungguh membantu, termasuk membantu menagih perkembangan riset para mitra.

Tantangan ketiga, mungkin justru ini tantangan terbesar, **adalah konteks NTT sendiri.**

Logistik misalnya. Berjumpa tatap muka selama dua hari dengan teman-teman Yabiku dan Yasalti bisa makan waktu satu minggu penuh: hari pertama perjalanan Jakarta — Waingapu sudah pasti menghabiskan setengah hari sebelum bertemu Yasalti di Waingapu; hari kedua bersama Yasalti di Waingapu; hari ketiga bersama Yasalti di Waingapu atau ambil penerbangan siang menuju Kupang, lanjut 5—6 jam perjalanan darat ke Kefamenanu; hari keempat bertemu Yabiku; hari kelima bertemu Yabiku; hari VI bertemu Yabiku, lalu bertolak ke Kupang dalam 5 — 6 jam perjalanan darat; hari ketujuh baru kembali ke Jakarta. Ini juga yang membuat CIPG memutuskan membatalkan kunjungan ketiga fasilitator CIPG yang sedianya akan dilakukan pada Juni 2018 dan memilih mengalokasikan sumber daya untuk membiayai kunjungan fasilitator lokal.

Kedua mitra berada di dua pulau berbeda, masing-masing dengan konteks sosial-budaya-ekonomi-politik yang berbeda. Saya harus rajin-rajin membaca mengenai Sumba Timur dan Timor Tengah Utara agar tak terlalu gagap menampung cerita teman-teman Yabiku dan Yasalti. Sempat tinggal satu bulan di Kupang (tahun 2014) dan akrab dengan logat bicaranya, kini saya memperlancar kebiasaan bertutur dengan logat Kupang untuk berkomunikasi dengan teman-teman Yabiku. Ternyata hal ini cukup membantu memperlancar komunikasi. Saya juga tak terlalu sulit menangkap pembicaraan teman-teman Yasalti. Tentu saja itu semua klaim saya. Manakala mereka bercakap-cakap dengan Bahasa Meto atau Bahasa Sumba, *aduh e, mampus su, beta sonde mangarti lai dong bacakap apa*. Lagi-lagi, beruntunglah saya dipertemukan dengan CIS Timor, IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change), serta Pikul yang berkenan berbagi wawasan, pengalaman, dan bahan bacaan untuk membantu saya memahami NTT.

Keseruan berlanjut.

Tantangan keempat, mitra tak cukup menguasai kerangka pikir, sehingga pengambilan data pun terseok-seok. Menggali fakta dan pemahaman mitra akan lingkup permasalahan yang mau mereka teliti ternyata butuh waktu lama. Padahal, kedua lembaga ini punya informasi dan pengetahuan yang sungguh kaya terkait topik penelitian mereka. Bahkan, pada konsultasi tatap muka kedua (Maret 2018) Yasalti dan

Yabiku tampak belum paham betul data dan informasi apa yang perlu mereka cari untuk menjawab pertanyaan riset masing-masing. Mau tidak mau, fasilitator membantu mengembangkan kerangka pikirnya.

Kepada Yabiku, kami tawarkan untuk menelaah peristiwa kekerasan dengan kacamata *progression of disaster*: Faktor kerentanan, picu, kejadian kekerasan, dampak, penanganan, serta keadilan bagi penyintas. Sementara, pada Yasalti, kami tawarkan untuk mengungkap aspirasi remaja dan pemuda dengan kacamata hak untuk menentukan masa depannya sendiri, lengkap beserta aspek-aspeknya. Praktis saat Yasalti kesulitan, kami juga membantu Yasalti mengelompokkan daftar pertanyaan wawancara mereka ke dalam tema-tema tertentu. Dalam bayangan kami, kerangka pikir tadi sudah cukup sebagai pedoman teman-teman untuk melengkapi data, sekaligus sebagai pisau analisis.

Namun ternyata bayangan indah kami mengandaikan banyak hal lain, seperti:

Kedisiplinan melakukan langkah demi langkah pengambilan data. Dalam proposal penelitiannya, Yasalti berencana menggunakan etnografi dengan tinggal bersama keluarga remaja dalam kurun waktu tertentu untuk mendapat pengalaman langsung mengenai kehidupan keseharian subjek penelitian. Tampaknya, tim peneliti belum memahami prinsip etnografi ini dan mungkin ada beban kesibukan dari program lain di lembaganya, sehingga etnografi tidak diterapkan dengan ideal.

Kepekaan terhadap detail data. Yasalti sempat menyerahkan catatan hasil wawancara dan observasi yang hanya berupa penggalan informasi dan tak cukup komprehensif menggambarkan konteks. Alhasil, tim Yasalti sendiri sempat bingung menunjuk temuan menarik dari risetnya. Fasilitator – terutama saya yang masih serba tertatih memahami Sumba Timur– pun memberondong Yasalti dengan aneka pertanyaan. Dari situ, kami tahu bahwa sebagian besar warga Desa Lairuru (lokasi penelitian) adalah penganut Marapu, dan anak-anak mereka yang menempuh pendidikan formal jenjang SD—SMP terpaksa memilih pelajaran agama Kristen atau Katolik demi memperoleh nilai untuk pelajaran agama.

Dalam kasus Yabiku malah lebih runyam: level detail data kasus antardesa ternyata sangat *njomplang* (berbeda jauh), padahal desain bedah kasusnya mengandaikan ada kronologi lengkap. Kalau saja hal ini diketahui sejak awal, fasilitator bisa menyarankan rancangan penelitian yang berbeda.

Peneliti Yabiku pun sempat tidak konsisten menyebut angka jumlah kasus KDRT di dua desa. Setelah ditelusuri, ternyata ada kasus KDRT di desa lain di luar wilayah penelitian yang dilaporkan kepada paralegal desa wilayah penelitian, sehingga tercatat dalam data pendampingan.

Kelancaran komunikasi antara mitra dan fasilitator. Sempat ada sekitar 3 minggu berlalu tanpa kabar perkembangan riset dari teman-teman, meski saya rajin meneror lewat surel, telepon, dan pesan pendek. Wahai, saya tak mampu telepati. Jadi, jika teman-teman tak mengabarkan kesulitan yang dialami, mana bisa kami membantu? Rupanya, teman-teman Yabiku dan Yasalti lebih mudah bercerita dan memahami materi lewat tutorial tatap muka. Akibatnya, berbagai kesulitan yang teman-teman alami selama mengambil dan mencoba menganalisis data baru kami ketahui benar saat Mas Torry melakukan pendampingan tatap muka.

Tantangan kelima: saya menuntut kesempurnaan atau yang mendekatinya (bahkan meski kesempurnaan hanya milik Tuhan, tak ada salahnya bagi manusia mengupayakannya). Jadi, membaca draft laporan riset yang mengandung banyak kesalahan ketik, kalimat panjang beranak-pinak dengan kata hubung bertumpuk, data tidak akurat, tampilan data semrawut, dan argumen tidak runut sungguh menyiksa saya. Energi kami tersita untuk berupaya memahami substansi di balik tulisan yang berantakan. Berdasarkan berbagai kesalahan tata bahasa itu, kami kumpulkan tips menulis beserta contohnya. Kami juga melontarkan berbagai pertanyaan untuk mengecek kecermatan teman-teman mengolah data dan logika argumen, agar jangan sampai teman-teman ini mengabaikan fakta dan justru sibuk menggelayuti asumsi mereka sendiri. Contoh:

Di awal, Yabiku berasumsi bahwa perempuan selalu jadi korban kekerasan. Faktanya, hasil bedah kasus mereka menunjukkan ada satu perempuan yang jadi pelaku KDRT. Kok bisa? Nah, ternyata perempuan ini berasal dari keluarga yang lebih kaya daripada suaminya, sehingga ia punya kontrol lebih kuat dalam rumah tangganya.

Yasalti sempat mengatakan bahwa remaja Lairuru putus sekolah lantaran orang tua mereka tidak sadar pentingnya pendidikan. Setelah "dipaksa" mencermati kembali hasil wawancara dengan orang tua, ketahuan: orang tua mengerti pentingnya pendidikan dan mau mendukung anaknya sekolah, tapi menanggung biaya pendidikan SMA dan pendidikan tinggi terlalu berat bagi mereka yang penghasilannya pas-pasan.

Dari situ tampak bahwa Yabiku dan Yasalti sama-sama kesulitan bertekun membaca dan memaknai data. Kedua tim juga kesulitan memanfaatkan data yang sudah mereka punya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berulang kali fasilitator menanyakan, "Apa temuan paling menarik atau paling menggugah yang teman-teman dapatkan?" Jawaban yang kami dapat kerap berupa senyuman (bagi Mas Torry yang beratatap muka langsung) atau hening (bagi saya nun di Jakarta yang mengandalkan surel, telepon, dan pesan pendek). Lagi-lagi, fasilitator menuntun dengan berbagai alat bantu, seperti model bawang untuk mengungkap mekanisme generatif, visualisasi keterkaitan temuan, hingga tabel untuk analisis kebijakan maupun tabel untuk melihat kaitan antara pertanyaan penelitian-temuan-kesimpulan-rekomendasi. Jadi, **sekadar menuntut itu gampang, tapi menuntun mitra mencermati data hingga berhasil menemukan pola itu sulit.**

Di tengah berbagai tantangan tadi, ada momen-momen saat fasilitator sendiri gamang: Apakah kami tidak turut campur terlalu jauh dalam proses riset mitra-mitra ini? Rasanya, fasilitator hampir seperti peneliti utama yang dari waktu ke waktu gencar menagih perkembangan riset, menantang cara berpikir, membaca teliti data-data mentah, bahkan memberi contoh cara meramu data yang mereka punya menjadi cerita. Barangkali, sayalah yang tidak tahu diri, menuntut peneliti pemula tersulut gairahnya, penuh rasa ingin tahu, lalu terpacu, jadi penuh inisiatif, tekun mencermati data, dan menghasilkan laporan riset nan ciamik.

Sampai di sini, kemajuan yang paling terlihat mungkin pada kemampuan menulis mitra. Semula, mereka menjejalkan banyak ide dalam satu paragraf berisi kalimat-kalimat panjang. Kini, mulai bisa menulis paragraf dengan satu gagasan pokok, kalimatnya lebih lugas. Sementara, kapasitas mitra dalam melakukan riset rasanya masih perlu diasah lewat pendampingan intensif. Bagaimanapun, mengembangkan kapasitas riset bukan hal instan. Pun tim Yabiku dan Yasalti yang terlibat dalam program ini terbilang belum berpengalaman dalam melakukan riset dari awal (merancang) hingga akhir (menulis laporan riset).

Harapan saya, proses belajar melakukan riset membantu organisasi masyarakat sipil –terutama yang mengaku berjuang membela kaum marginal– mewawas diri: secara berkala memeriksa fakta apakah yang mereka gaungkan sungguh suara kaum marginal (dan bukan agenda organisasinya semata). Sederhananya, kalau segala keterampilan riset menguap, semoga setidaknya disiplin mengecek data masih tertanam.

Harapan yang tidak terlalu muluk bukan?

April-Agustus-Desember 2018,
Salam hangat dari Jakarta yang pengap,

Klara Esti
Fasilitator CIPG-VOICE untuk Mitra Nusa Tenggara Timur (NTT)

NURHADY SIRIMOROK

Wilayah Sulawesi Selatan

Bagaimana VOICE Bertarung Melawan Struktur Sosial

Nurhady Sirimorok

Progam VOICE yang dijalankan CIPG dan mitranya di Sulawesi Selatan, dalam pandangan saya, dapat disebut sebagai anugerah, setidaknya bagi organisasi-organisasi mitra dan kelompok warga di mana para mitra bekerja. Berbeda dari banyak program 'pusat' yang datang ke organisasi-organisasi masyarakat sipil di 'daerah', VOICE lebih terbuka dalam hal menyerahkan isu yang dikerjakan mitranya untuk ditentukan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh para mitra. Dengan pendekatan seperti ini, VOICE menempatkan mitra dalam relasi yang nisbi setara, membantu menemukan isu spesifik yang relevan bagi mitra dan kelompok warga tempat mereka bekerja, dan melecut berlangsungnya pengembangan kapasitas organisasi-organisasi mitra dalam isu yang selama ini memang menjadi pekerjaan mereka. Gejala seperti ini jarang saya jumpai, atau malah tampak sebagai pembalikan dari arus utama. Tulisan ringkas ini akan lebih berfokus pada kerja para mitra, refleksi terhadapnya, termasuk mengapa program seperti VOICE menjadi penting bagi kerja-kerja para organisasi mitra.

Mari kita mulai dengan sebuah gambaran latar tentang kecenderungan organisasi masyarakat sipil lokal yang, harus saya sebut sejak awal, lebih berupa sketsa. Gambaran ini berasal dari pengalaman pribadi hampir dua dasawarsa berkecimpung dalam dunia organisasi masyarakat sipil. Dari rentang waktu itu saya sering menjumpai gejala ini: program 'dari pusat' umumnya tiba dengan isu yang sangat spesifik, kerangka pikir dan kerja tertentu yang disesuaikan dengan isu tersebut, dan bahkan tak jarang lengkap dengan metode untuk menjalankannya. Mereka datang dengan seluruh rencana yang sudah rampung dan menyisakan sedikit ruang (bila ada) untuk kontekstualisasi. Dengan rancangan semacam itulah mereka mencari mitra di daerah-daerah yang dianggap bisa menerapkannya di lapangan. Yang terjadi kemudian antara lain ialah, 'salah tembak' masalah, organisasi mitra yang entah sulit berkembang atau bahkan susut, dan bertahannya ketergantungan terhadap lembaga pemasok dana proyek dari pusat. Mari kita lihat efeknya satu per satu.

Pertama, dengan membawa fokus isu ke sebuah tempat, maka isu lain yang mungkin lebih penting dihadapi oleh warga sasaran sangat mungkin akan

terabaikan. Bila pun kontekstualisasi terjadi, biasanya itu hanya terbatas pada isu spesifik proyek. Misalnya, kaji cepat (*assessment*) lebih dilakukan untuk tahu keadaan lokasi sasaran sebelum program atau proyek dimulai—untuk kebutuhan monitoring evaluasi—tekait dengan isu spesifik yang sudah ditetapkan pembawa proyek. Jika kaji cepat tersebut menemukan sesuatu yang lebih penting bagi kelompok warga sasaran daripada isu titipan dari 'pusat', cara terbaik bagi mitra untuk tetap berada di jalur yang digariskan proyek—sehingga bisa menampilkan kinerja yang baik—ialah mengabaikannya.

Kedua, organisasi mitra yang diletakkan sekadar pelaksana bagi rencana yang dibuat 'di luar sana' dengan sendirinya akan menyesuaikan diri. Mereka akan mencoba mempelajari dokumen rencana tersebut, melakukan lokakarya-lokakarya, dan bila perlu menyewa tenaga terampil atau 'ahli' dari luar organisasi bila di dalam organisasi mereka sendiri tak tersedia tenaga yang bisa melakukan kerja-kerja spesifik yang dibutuhkan program. Setelah program selesai para tenaga terampil itu pergi dengan menyisakan sedikit pengetahuan dan keterampilan, sebab biasanya mereka akan sibuk untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kinerja yang baik. Hal ini lebih sering terjadi apabila sebuah organisasi menjalankan program yang jauh di luar isu, lokasi, dan pranata yang selama ini menjadi perhatian mereka. Situasi semacam ini pun sering menurun ke tingkat paling bawah, yaitu ketika mitra kemudian bekerja sama dengan (organisasi) masyarakat di lokasi program. Jadi sangat mungkin organisasi mitra yang sejak awal berdiri menangani isu, lokasi, dan kelompok warga tertentu, kemudian melompat ke isu, lokasi, dan kelompok lain. Dengan demikian, mereka akan kehilangan fokus dan kehilangan peluang menjalankan visi dan misi organisasi secara konsisten.

Dalam sebagian kasus mereka bahkan sampai kehilangan staf setelah beberapa program 'pesanan' selesai mereka kerjakan; sementara keterampilan, jaringan, dan pengetahuan yang mereka peroleh selama program berjalan tak banyak berguna bagi kerja-kerja awal mereka, bahkan berpotensi membelokkan arah organisasi mereka. Tak sedikit organisasi yang berubah arah atau hilang setelah melewati program semacam ini.

Ketiga, dengan mengerjakan program-program yang bersifat *top-down* semacam itu, organisasi-organisasi di daerah pelan-pelan menjadi tergantung. Mereka akan secara perlahan kehilangan kemampuan untuk bertahan hidup, etos yang tadinya membuat organisasi itu terbentuk dan bertumbuh digoyang oleh pekerjaan yang berada di luar fokus kerja

mereka sebelumnya. Dan bila itu berlangsung lama, pengetahuan, keterampilan, dan orang yang mereka butuhkan juga ikut berubah seiring dengan pelaksanaan program yang dirancang dari 'luar sana'. Kemampuan mereka untuk berpikir pun pelan-pelan dibatasi oleh kelengkapan kerangka pikir dan kerangka kerja yang dipasok dari atas.

Di kalangan organisasi masyarakat sipil di daerah berkembang, guyonan yang menyebut organisasi atau individu seperti itu sebagai "hamba *tools*", karena ke mana-mana hanya mengkampanyekan atau cuma bisa menggunakan alat-alat tertentu yang sudah 'diajarkan' oleh pelatihan-pelatihan yang dibawa oleh lembaga dana. Guyonan ini dengan tepat menunjukkan ketergantungan terhadap pengetahuan dan keterampilan. Sementara kerja-kerja mereka selama ini belum tentu sesuai dengan alat-alat tersebut, sebaliknya keterampilan dan pengetahuan yang mereka kembangkan sebelumnya pun belum tentu relevan dengan program. Dan ketika pengetahuan dan keterampilan baru belum mereka kuasai, pengetahuan dan keterampilan lama mereka pelan-pelan menipis. Tentu tidak semua *tools* itu sia-sia belaka, persoalannya setidaknya ada di dua level. Pertama, bisa jadi *tools* itu, lewat proyek, tiba di kelompok masyarakat yang punya kebutuhan *tools* berbeda. Kedua, *tools* itu dijadikan semacam hapalan, sehingga di bawa ke mana-mana dengan sedikit kontekstualisasi, modifikasi, atau kombinasi dengan *tools* lain sesuai kebutuhan lapangan.

Semua gejala yang saya sebutkan di atas telah banyak dikritik, meski masih terus bertahan. Kerangka atau beraneka *tools* yang berhubungan dengan partisipasi, perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, dan sebagainya, sudah banyak dikritik namun masih bertahan. Kritik terhadap konsep-konsep yang mendasari *tools-tools* tersebut sudah banyak beredar mungkin bahkan sebelum *tools* itu sendiri dibuat. Misalnya, kritik terhadap konsep 'modal sosial' [135], demikian pula dengan konsep 'partisipasi' [136], 'ketangguhan' (*resilience*)[137], dan sebagainya.

135 Lihat mis., John Harriss. 2001. Depoliticising Development. Delhi: Leftward; Ben Fine. 2001. Social Capital Versus Social Theory: Political Economy and Social Sciences at the Turn of the Millenium. London: Routledge.

136 Lihat mis. Cooke dan Kothari (eds.). 2000. Participation: The New Tyranny?. London: Zed Books; Hickey dan Mohan (eds). 2004. Participation: From Tyranny to Transformation. London: Zed Books.

137 Lihat misalnya, Bene, et. al. 2012. "Resilience: New Utopia or New Tyranny? Reflection about the Potentials and Limits of the Concept of Resilience in Relation to Vulnerability Reduction Programmes". IDS Working Paper 405. Sussex: Institute of Development Studies.

VOICE Membalik Arus Utama

CIPG melakukan pembalikan dalam arus utama kecenderungan yang saya beberkan di atas. Program VOICE memulai dengan mencari mitra di tiga wilayah. Setelah menemukan mereka, CIPG meminta mereka meneliti isu apa yang dialami warga di tempat para mitra bekerja selama ini. CIPG tidak menentukan isu spesifik, hanya menyebutkan warga sasaran program: kaum marginal—yang memang sudah menjadi sasaran kerja para mitra. CIPG tidak menentukan kerangka kerja spesifik, tetapi menawarkan alternatif metode penelitian dan advokasi yang relevan untuk mengajak mitra menemukan isu spesifik tersebut dan kemudian mengkampanyekannya. Dan yang sangat jarang terjadi, CIPG menyediakan waktu dan dana khusus yang memadai untuk meneliti.

Dalam pendekatan seperti ini saya mencatat setidaknya ada tiga kelebihan. Pertama, pola kerja semacam ini menempatkan mitra sebagai sejawat yang setara. VOICE meletakkan para mitranya bukan sekadar pelaksana (*implementor*) dalam sebuah hubungan yang hierarkis, melainkan sejawat pada posisi nisbi setara. Hal ini ditunjukkan dengan membebaskan para mitra mengidentifikasi isu dengan terlebih dahulu melakukan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian, para mitra juga dibebaskan untuk menentukan metode sesuai kebutuhan mereka, sejumlah lokakarya dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian tersebut. Itulah mengapa di Sulawesi Selatan, dua organisasi mitra memilih pendekatan yang nisbi berbeda dalam penelitian masing-masing. Demikian pula, konsultasi dan monitoring yang berlangsung secara teratur juga mengikuti kebutuhan tersebut—untuk mempertajam rancangan, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan hasil penelitian yang dikerjakan para mitra[138]. Seluruh rangkaian ini menurut saya adalah sebuah terobosan.

Kedua, VOICE dapat dan telah (sampai taraf tertentu) memperdalam pengetahuan tentang kelompok warga yang menjadi sasaran kerja mitra. Di sepanjang proses penelitian, para mitra terdorong untuk membaca, menggali informasi, dan memikirkan isu-isu yang mereka temukan di kelompok warga masing-masing. Bahwa para mitra sudah punya pengetahuan awal tentang kelompok warga tempat mereka bekerja, itu tidak menggugurkan kenyataan bahwa pengetahuan tersebut mungkin belum tersusun secara sistematis, lengkap dengan data-data pendukung.

---

138 Untuk kebutuhan konsultasi itu pun, secara bersengaja VOICE memilih mengadakan konsultan dari daerah setempat yang dalam sejumlah hal punya kedekatan lebih baik terhadap isu, mitra, dan kelompok warga yang menjadi subyek kerja program.

Poin-poin kesimpulan yang seringkali muncul dalam pembicaraan mitra boleh jadi juga belum mewakili keadaan warga, dan hanya sedikit peluang untuk menimbang-nimbang poin mana di antara sekian banyak kesimpulan yang menjadi isu paling penting bagi kelompok warga. Selain itu, bias yang dibawa oleh kerangka-kerangka pikir atau *tools* yang sebelumnya diperkenalkan kepada para mitra—apalagi tanpa data pendukung yang kokoh—dapat membuat isu-isu penting tidak tampak atau dilihat dengan cara berbeda sehingga terlihat tidak penting.

Ketiga, proses ini tentu meningkatkan kapasitas organisasi mitra baik dalam hal keterampilan meneliti maupun dalam hal berpikir ilmiah dalam menjalankan sebuah advokasi. Operasi penelitian dan penalaran ilmiah ini kemudian menjadi modal penting bagi organisasi mitra untuk menjalankan kerja-kerja advokasi selanjutnya. Satu elemen yang penting diperhatikan di sini ialah fakta bahwa lewat VOICE para mitra belajar meniti jalur yang nisbi baru, yaitu advokasi berbasis bukti. Belum lagi, seluruh proses penelitian sejak perancangan, pengumpulan data, analisis, dan akhirnya penulisan laporan, semua dikerjakan oleh organisasi mitra; sementara CIPG berperan sebagai fasilitator. Hal ini penting sebab dalam kerja-kerja penelitian pun, kita sudah sering menjumpai pembagian kerja di mana mitra penelitian lokal umumnya ditempatkan hanya sebagai 'pengumpul data' untuk kemudian diserahkan kepada pihak lain, yaitu mitra di pusat, atau perwakilannya di daerah. Akibatnya mereka tak terbiasa mengerjakan analisis dan menuliskan laporan hasil penelitian. Dalam VOICE, para mitra didorong untuk melakukan analisis sendiri atas temuan-temuan mereka, menuliskannya, dan kelak menjadikannya sebagai bahan advokasi. Kerja mereka menjadi utuh.

Bagaimana Penelitian Berlangsung

Di sepanjang tahap penelitian sejumlah tantangan ditemui oleh para mitra, yang sebagian sudah mereka lewati dengan baik. Beraneka tantangan yang muncul ini merupakan hal yang wajar mengingat pengalaman para mitra dan latar sosial yang akan saya ulas di bawah. VOICE mengantisipasi persoalan-persoalan ini dengan mengadakan forum-forum konsultasi yang intensif bersama mitra; dengan cara ini beberapa tantangan yang akan diurai di bawah ini sudah dapat diatasi dengan baik oleh organisasi mitra. Dengan demikian, pemaparan di bawah lebih ditujukan untuk menunjukkan sejumlah titik di mana para mitra mengalami kesulitan, dengan kata lain gambaran ringkas ini lebih berupaya menunjukkan 'jejak

belajar' para mitra—yang saya bayangkan dapat menjadi bahan refleksi di organisasi masing-masing.

Merancang penelitian. Pada tahap ini, kedua mitra sepertinya harus bekerja keras, dan kadang gagal di beberapa bagian. Pada kedua mitra, terlihat bahwa penguasaan konsep-konsep dan teori yang relevan cukup tipis sehingga mereka kesulitan untuk menyusun kerangka yang bisa menjawab pertanyaan penelitian. Bahkan dalam kasus Maupe, rumusan pertanyaan kurang mengalami tempaan konseptualisasi dengan (saya bayangkan) menimbang sekian banyak penelitian-penelitian sebelumnya. Hasilnya ialah rumusan pertanyaan penelitian yang sangat terbuka atau kurang mengalami 'kualifikasi': penetapan batasan-batasan yang kelak akan berguna antara lain untuk menetapkan cakupan, sudut pandang analitis, dan perancangan instrumen. Contoh di bawah ini mungkin bisa menjelaskannya isu tersebut.

Desain awal penelitian Maupe menyulitkan mereka untuk menjawab *mengapa* kekerasan terjadi terhadap perempuan. Sebabnya, mereka meletakkan pertanyaan tersebut dalam survei dengan serangkaian pilihan jawaban yang tidak melewati proses konseptualisasi (dan kontekstualisasi) yang memadai. Dengan rancangan instrumen seperti ini, selama proses pengumpulan data para enumerator hanya mengandalkan pengetahuan masing-masing untuk menentukan pilihan jawaban berdasarkan cerita responden. Pertanyaan ini pun tidak tercantum dalam panduan pertanyaan untuk wawancara mendalam (*indepth interview*), sebuah metode yang lebih cocok untuk bertanya 'mengapa'.

Selain itu, peletakan 'tokoh adat' sebagai salah satu segmen informan khusus, dalam pandangan saya, juga bermasalah. Soalnya, siapa yang bisa disebut 'tokoh adat' dalam penelitian ini, laki-laki atau perempuan, dari posisi sosial seperti apa, dan menurut sudut pandang siapa? Apakah pengetahuan mereka masih relevan atau berpengaruh kepada banyak orang? Atau bahkan apakah pengetahuan mereka yang terkait kekerasan terhadap perempuan cukup memadai? Lalu, yang lebih mendasar, apa sajakah 'adat' atau 'budaya' yang dimaksud di sini? Semua pertanyaan ini muncul karena konsep 'tokoh adat' tidak melewati proses konseptualisasi yang ketat[139].

139 AcSI memulai penelitian agak telat, ketika saya sudah memulai bertugas, sehingga mereka masih sempat mengundang saya dalam proses penyempurnaan desain riset dan instrumen, sekaligus menghadiri lokakarya tim enumerator survai sebelum mereka ke lapangan. Saya membantu mengoreksi beberapa bagian yang kurang jelas atau kurang tepat, semisal memperjelas kluster informan yang masih kabur, atau rumusan-rumusan pertanyaan yang masih multitafsir atau terlalu abstrak. Anggota tim enumerator juga sempat melakukan tanya jawab mengenai strategi membangun rapport dan probing, mengklarifikasi konsep-konsep yang digunakan dalam instrumen, dan lainnya.

Pengumpulan data. Maupe punya banyak tenaga lapangan sehingga sejak akhir Maret sudah menyelesaikan survei yang menjangkau seluruh kecamatan di Maros. Sedangkan AcSI awalnya terseok karena kekurangan orang. Baru setelah mereka merekrut tenaga enumerator, survei mereka bisa berjalan lancar. Mereka merampungkan tahapan ini jauh lebih belakangan daripada Maupe. Kemampuan menyelesaikan survei kedua tim ini juga ditopang oleh kedekatan (*proximity*) dan/atau persentuhan sebelumnya dengan warga yang menjadi subjek penelitian. Beberapa persoalan yang muncul dalam proses pengumpulan data cukup penting untuk dicatat di sini.

Pertama, kemampuan melakukan *probing* saat menjalankan wawancara mendalam. Memang nisbi mudah bagi para mitra mengembangkan *rapport* karena persentuhan sebelumnya dengan warga yang menjadi partisipan penelitian (AcSI), atau karena kesamaan identitas (sama-sama perempuan dalam kasus Maupe). Tetapi ketika mereka mencoba menggali lebih jauh jawaban-jawaban informan mereka kadang tersendat sehingga menghasilkan jawaban yang kurang mendalam. Beberapa jawaban yang saya coba gali biasanya sulit dijelaskan lebih jauh oleh para mitra karena persoalan ini. Untungnya, kedekatan dengan para subyek penelitian membuat mereka dapat mengulangi sejumlah wawancara.

Soal lain yang tampak dari para mitra ialah minimnya triangulasi. Misalnya, ketika mewawancarai korban dan pelaku, Maupe tidak berusaha mewawancarai informan dari kejadian yang sama (misalnya, mewawancarai suami *dan* istri yang menjadi pelaku dan korban dalam satu kejadian kekerasan). Hal ini menyebabkan sulitnya membangun gambaran lebih utuh mengenai kejadian dari kedua sisi. Ini terbukti ketika tim Maupe mewawancarai seorang suami yang ternyata menceritakan separuh saja dari versi kejadian (menurut versi yang menguntungkan sang suami, tentunya). Kelemahan ini terungkap dalam diskusi dengan Dinas P3A Kab. Maros yang kebetulan juga menangani kasus tersebut. Hal ini juga mengindikasikan kurangnya *probing* untuk mengklarifikasi kejadian.

Kesulitan yang dialami oleh Maupe sepertinya berasal dari kecenderungan metodologis yang tampak mengejar 'angka', dalam artian mengejar validitas berdasarkan 'representasi populasi'. Karena itu 'representasi informasi' (kualitas dan kedalaman data kualitatif yang relevan mewakili segmen sampel dari kluster populasi berbeda) menjadi keteteran. Hal ini terlihat pada jumlah informan dalam wawancara mendalam yang berjumlah 77 orang. Jumlah ini tentu bisa menjadi kekuatan jika ditopang

oleh jumlah pewawancara yang banyak dengan mutu seragam, yang ternyata belum dipunyai[140].

Analisis dan interpretasi data. Para mitra menghadapi tantangan berat ketika berhadapan dengan data. Ketika data survei sudah terhimpun mereka bisa mengolah data dengan relatif mudah, tapi mereka mengalami kesulitan ketika hendak menafsir data atau memberi pemaknaan terhadap hasil olahan data tersebut. Dalam naskah-naskah awal yang mereka kirimkan yang dijuduli 'Interpretasi Data Awal Riset' tidak terdapat interpretasi sama sekali terhadap hampir semua unit data survei, melainkan hanya hasil olahan data berupa sebaran persentase pada setiap unit data. Ketika saya memberi masukan untuk melakukan interpretasi baik bagi setiap unit data maupun melihat persilangan antar-unit data tersebut, interpretasi yang muncul cenderung kembali ke 'zona nyaman', yaitu ke rumusan-rumusan umum yang sudah lazim beredar di lingkaran yang mengerjakan tema-tema yang diteliti oleh mitra. Di titik ini, boleh jadi kurangnya referensi (bacaan teoritik dan/atau analisis terhadap studi-studi kasus yang relevan) membatasi daya jangkau mereka untuk menafsir data yang sudah diolah tersebut. Misalnya, apa artinya bila belanja sebuah keluarga didominasi oleh belanja pangan (AcSI) atau apa artinya jika sebagian besar pelaku kekerasan terhadap perempuan ialah orang dekat (Maupe).

Persoalan lain ialah kecenderungan tersesat dalam detail. AcSI, misalnya, menulis dua bab pertama laporan mereka yang berbeda dengan apa yang sudah mereka buat sebelumnya pada tahap perancangan. Modifikasi bab-bab awal setelah data terhimpun dan dianalisis dilakukan memang masih memungkinkan sampai taraf tertentu, namun sangat berisiko menimbulkan kebingungan lebih jauh, baik bagi pembaca maupun penulisnya sendiri: beberapa bagian di dua bab awal itu menjadi tidak sejalan dengan rancangan instrumen penelitian itu sendiri—dan tentu saja dengan bagian pemaparan data dan interpretasi[141].

Semua persoalan di atas berdampak pada beraneka masalah yang dijumpai mitra dalam proses penulisan laporan. Misalnya, tulisan yang terlampau panjang namun minim analisis: kecenderungan untuk mengejar ketebalan laporan daripada logika penarikan kesimpulan yang runut sejak bagian awal sampai akhir laporan. Di bagian ini saya senantiasa mengingatkan

140 Untuk mengatasi hal ini, dan tenggat yang mendekat, saya mengusulkan agar mereka mengurangi jumlah informan wawancara mendalam dan mengambil sampel informan yang kira-kira paling bisa bercerita mewakili kluster populasinya, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori kluster informan yang paling relevan (mis, berdasarkan posisi sosial perempuan korban, persebaran geografis, atau jenis kekerasan, atau lainnya).

141 Untuk itu saya meminta mereka untuk memperbaiki draft kedua bab tersebut, dan kembali melihat desain dan instrumen awal mereka.

mereka agar selalu melihat kembali desain dan instrumen dalam menata dan menafsir data, dan bahwa tujuan sebuah penelitian ialah menjawab pertanyaan penelitian, jadi seluruh data yang dikumpulkan harus diolah berdasarkan tujuan tersebut. Kesulitan lain ialah melihat hubungan antara temuan-temuan di unit-unit data yang berbeda. Kekurangan kosa kata juga tampak ketika mereka hendak memberi komentar atau interpretasi data kuantitatif dan kualitatif yang membuat mereka sulit merumuskan fenomena yang mereka temukan, dan membuat rumusan abstraksi dari hubungan-hubungan antara fenomena-femonema tersebut.

Melawan Struktur Sosial

Seluruh tantangan yang dihadapi para mitra tidak muncul tiba-tiba, melainkan berasal dari bekerjanya struktur sosial[142] yang melingkupi mereka: sistem pendidikan, kecenderungan kerja organisasi masyarakat sipil, dan pranata lokal masyarakat. Sistem pendidikan kita yang masih jauh lebih mengandalkan hafalan daripada diskusi untuk mencapai pemahaman berdampak pada kesulitan menganalisis—dan ini bukan hanya dialami oleh para mitra. Beberapa tahun saya terlibat menjalankan program pelatihan penelitian lapangan untuk siswa-siswa SMA. Selama itu, kelemahan paling butuh perhatian lebih ialah kemampuan menganalisis temuan. Dalam satu kesempatan kami bahkan menemukan seorang peserta menangis karena frustrasi tak mampu menganalisis temuan lapangan kelompoknya[143].

Sistem pranata sosial masyarakat lokal Sulawesi Selatan yang secara umum menghasilkan relasi sangat hierarkis turut memberi andil dalam membatasi ruang untuk seseorang bertumbuh dalam lingkungan yang bebas berpendapat dan egaliter. Dibantu oleh dominasi hafalan di sekolah, sistem sosial ini membuat generasi muda jarang berdiskusi mengenai persoalan publik dan menyampaikannya ke hadapan publik, setidaknya di lingkungan publik yang dekat dengan mereka. Persoalan publik biasanya hanya didominasi oleh orang dewasa. Karena itu, mereka kekurangan ruang dan pilihan peranti yang benar-benar relevan untuk melakukan (latihan) menganalisis persoalan sehari-hari yang mereka lihat atau alami sendiri. Karena itu pula, sangat wajar apabila mereka kekurangan kosa kata

142 Struktur sosial di sini dipahami sebagai pola relasi dan sistem pemaknaan (system of meaning) sebuah kelompok masyarakat yang sudah bertahan lama sehingga dianggap sebagai sesuatu yang wajar (lihat Hays .1994. "Structure and Agency and the Sticky Problem of Culture". Sociological Theory, Vol.2 (1), hl. 65)

143 Gambaran dan analisis lebih lanjut mengenai progam ini lihat Nurhady Sirimorok. 2010. Membangun Kesadaran Kritis. Yogyakarta: Insispress.

berikut aneka strategi dan peranti pengungkapan yang sangat dibutuhkan untuk merumuskan pendapat dengan jelas dan tajam.

Intinya, sejumlah kelemahan yang ditunjukkan oleh mitra di atas terjadi antara lain karena sejak awal sekolah dan masyarakat memang menyediakan sangat sedikit ruang—baik yang terbentuk secara disengaja maupun tidak—untuk melatih anak muda berpikir secara ilmiah dan mengungkapkan pikiran tersebut. Dan gejala seperti ini memang tak hanya terlihat dari para mitra. Pengalaman saya menjalankan pelatihan dan penelitian bersama orang muda selama hampir dua dasawarsa menunjukkan gejala serupa di banyak jenis organisasi, baik organisasi mahasiswa, organisasi ekstra kampus, organsasi nonpemerintah, dan organisasi pemuda berbasis agama, dan lainnya. Dalam sebuah penelitian tentang orang muda desa (*rural youth*) di empat kabupaten Sulawesi Selatan, pendapat ini terkonfirmasi. Di sana kami menemukan bahwa tugas anak muda di dalam masyarakat tidak lebih dari sekadar "disuruh-suruh" atau sebagai pelaksana bagi program atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh orang-orang dewasa. Bila pun mereka melakukan kerja kolektif di ruang publik dengan derajat pengambilan keputusan yang lumayan tinggi, biasanya itu hanya untuk kegiatan rekreatif yang memang lazim menjadi kegiatan anak muda, seperti kesenian dan olahraga.

Bila kita menambahkan latar sosial ini pada persoalan spesifik di dunia organisasi masyarakat sipil lokal yang sudah disinggung di atas—kurangnya partisipasi dalam kegiatan 'berpikir' seperti merancang dan analisis, tampaklah mengapa VOICE menjadi sangat penting organisasi mitra di Sulawesi Selatan.

Akhirnya, apa yang dilakukan oleh VOICE, menurut pengalaman saya, berpotensi untuk membantu mempertahankan kelangsungan organisasi mitra. Salah satunya ialah dengan mendorong agar mereka punya pengetahuan mendalam mengenai isu yang mereka kerjakan. Lewat kerja penelitian, organisasi-organisasi mitra akan selalu punya pekerjaan untuk dilakukan. Pengetahuan terperinci akan memberi gagasan-gagasan baru mengenai program yang perlu dilakukan. Pengetahuan terperinci, apalagi bila dibarengi dengan alat-alat analisis yang relevan dan kajian bandingan lewat bacaan kasus-kasus dari tempat lain, juga akan berdampak pada komitmen. Dengan kelengkapan 'piranti lunak' itu, sebuah organisasi akan senantiasa berpikir bahwa selalu ada yang belum selesai dikerjakan, akan selalu ada celah atau kelemahan yang ditemukan dalam kerja-kerja sebelumnya—akan selalu ada yang salah. Dengan kata lain, pengetahuan

terperinci dan analitis, sebuah organisasi akan dapat melakukan otokritik. Proses sirkular tak berhingga tindakan-refleksi-tindakan—praksis—akan memburu sebuah organisasi untuk terus mengerjakan apa yang sedang mereka kerjakan dengan lebih baik dan terarah. Kelemahan-kelemahan akan tampak sebagai tantangan untuk diatasi, sementara kelebihan-kelebihan akan diapresiasi sebagai modal yang patut dirawat. Dengan cara seperti ini, VOICE, dan program-program dengan pendekatan serupa, dapat memberi sumbangan penting dalam memertahankan arah dan eksistensi organisasi-organisasi lokal.

Pantoro Tri Kuswardono

Wilayah Nusa Tenggara Timur

Batas itu Ternyata Kabur

Refleksi Pribadi Mendampingi Mitra CIPG-VOICE dalam Penelitian

Pantoro Tri Kuswardono (Torry)

Konsultan CIPG-VOICE untuk Mitra Nusa Tenggara Timur (NTT)

Tak Kenal Itu Menyulitkan

Meneliti satu topik atau membantu penelitian, terutama sebagai penasihat, akan menarik jika kita memulainya dari penentuan topik, perumusan masalah, dan pertanyaan riset. Tapi, dalam proses ini tampaknya semua itu menjadi sebuah kemewahan. Tugas mendampingi para periset yang relatif pemula ini, saya dapatkan ketika proposal penelitian sudah hampir jadi.

Seperti halnya bagi pengacara, dokter, ataupun guru, memahami profil klien adalah hal penting. Meski saya kenal baik dua lembaga yang saya dampingi, profil para peneliti dari dua lembaga ini belum saya kenal. Saya tidak memiliki informasi tentang latar belakang, pengalaman menulis, pengalaman lapangan, dan pengalaman analisis dari mitra-mitra kerja, baik Yayasan Amnaut Bife "Kuan" (YABIKU) di Timor Tengah Utara (TTU) maupun Yayasan Wali Ati (YASALTI) di Sumba Timur. Bagi seorang pendamping, profil klien adalah hal yang penting. Dengan memahami profil klien, pendamping bisa merumuskan strategi pendampingan dan konsultasi yang cocok.

Profil dan karakter peneliti baru saya dapatkan dan saya pelajari bersama Klara, fasilitator CIPG-VOICE untuk mitra NTT, justru ketika kami mulai mendampingi. Barulah kami pahami, bahwa kebanyakan para peneliti ini adalah benar-benar peneliti pemula, yang justru tidak sedang mendalami duduk perkara yang mereka hendak teliti. Mereka bukanlah kru lembaga yang bertugas pada isu tersebut. Para peneliti ini tahu tentang isunya, tetapi hanya sebatas di permukaan. Tugas keseharian mereka berbeda dengan topik penelitian yang diajukan. YABIKU memiliki topik penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat di Kabupaten TTU. Sementara, YASALTI mengusung topik tentang aspirasi para penenun remaja untuk bisa memiliki opsi masa depan di Kabupaten Sumba Timur. Sementara anggota tim dari kedua lembaga, sehari-harinya

bertugas pada pengembangan pertanian dan ekonomi pemuda, topik yang cukup berbeda dengan keseharian mereka.

Emosi dan Perasaan Bisa Memicu Pertanyaan

Pada pertemuan pertama, saya cukup mengalami kesulitan karena mitra-mitra peneliti ini tidak memahami persoalan yang hendak mereka teliti. Pada proses konsultasi rencana penelitian, teman-teman YASALTI tampak kebingungan untuk merumuskan pertanyaan riset. Biasanya, saya mengajukan pertanyaan, "Apa yang membuatmu gundah, jengkel, atau bertanya-tanya ketika melihat satu situasi?" Atau, bisa juga saya ajukan bentuk pertanyaan lain, "Situasi sosial apa yang membuat kalian gundah sebagai masyarakat sipil?"

Lewat pertanyaan semacam itu, saya biasanya mulai mendampingi staf untuk melihat apakah kegundahaan mereka tepat. Kegundahan, rasa penasaran, atau rasa marah terhadap sesuatu biasanya memicu seseorang untuk menyelidiki sesuatu. Sayangnya, emosi awal yang memicu gairah meneliti ini tidak terlalu muncul dalam diskusi bersama mitra. Kami butuh waktu cukup lama untuk menggali pemahaman dan fakta dari mitra agar mereka bisa merumuskan masalah dan mengajukan pertanyaan penelitian yang tepat.

Tanpa Fakta, Itu Namanya Curhat atau Gosip

Data dan fakta awal adalah kunci dalam sebuah penelitian. Kegundahan, kemarahan, dan rasa penasaran, baru dapat menjadi topik penelitian jika diimbangi dan didukung dengan sejumlah fakta dan kerangka logika yang tepat. Di sini pulalah tantangannya. Para peneliti kedua lembaga, tidak memiliki atau bahkan tidak sadar, kekayaan informasi dan pengetahuan yang dimiliki lembaganya. Banyak pertanyaan yang kami ajukan tidak terjawab, justru karena daya jelajah peneliti ini terbatas pada program tertentu di lembaganya. Boleh jadi, kultur dalam lembaga tidak terlalu kondusif bagi stafnya untuk menjelajahi dan memungut informasi maupun pengetahuan yang ada.

Serunya, data dan fakta baru justru didapatkan ketika proses sedang berlangsung. Misalnya, bahwa sebagian besar penduduk Desa Lairuru – desa yang menjadi lokasi penelitian YASALTI– adalah penganut Marapu, baru kami ketahui di tengah jalan, saat kunjungan pertama saya ke Sumba Timur. Hal itu tentu saja luput dari rancangan penelitian karena mitra tidak menjelaskan konteks wilayah penelitian dengan utuh. Kemudian,

ketersediaan data yang ternyata tidak andal di TTU baru diketahui setelah lebih dari 1 bulan. Sementara, metodologi yang dirancang mengandaikan adanya kronologi yang lengkap dari puluhan kasus. Jika ini telah diketahui, maka rancangan penelitian tentu akan berbeda.

Kerangka Itu Kompas, Supaya Tidak Nyasar

Adalah sebuah syarat, sebuah penelitian memiliki kerangka-kerangka pikir ataupun teori yang hendak digunakan, hendak dilawan, atau dilengkapi. Kerangka pikir maupun teori adalah ganjalan berikut dalam proses ini. Tim peneliti mitra rupanya kurang melengkapi diri dengan kerangka pikir tertentu yang bisa digunakan, dibuktikan, atau justru ditentang dalam penelitian. Ini adalah tantangan tersendiri. Mau tidak mau, baik sebagai konsultan dan fasilitator, tentu saja kami perlu membantu mengembangkan kerangka pikir.

Guna membantu urusan kerangka pikir, mau tidak mau saya dan Klara berkerut dahi mencari cara agar teman-teman mitra bisa dengan mudah memahami data dan informasi apa yang mereka cari untuk menjawab pertanyaan penelitian mereka. Pada pertemuan pertama di Kupang (Maret 2018), karena teman-teman tak kunjung mengembangkan kerangka pikirnya, kami mencoba membantu teman-teman melihat peristiwa kekerasan dari kacamata *progression of disaster*. Sebuah peristiwa kekerasan dianalisis dari sisi enam faktor, yaitu kerentanan, picu, kejadian kekerasan, dampak, penanganan, dan rasa keadilan terhadap penyintas. Keenam faktor inilah yang menjadi pisau-pisau utama bagi teman-teman di YABIKU membedah kasus-kasus KDRT yang mereka data sepanjang tahun 2015-2017.

Soal penguasaan kerangka pikir tidak berhenti di situ. Hanya saja, persoalan ini banyak ditemukan justru ketika pengumpulan data berlangsung. Suka tidak suka, penguatan kerangka pikir hanya bisa dilakukan melalui jarak jauh.

Kalau Tidak Bicara, Bagaimana Bisa Membantu?

Bagi sebagian orang, konsultasi jarak jauh lewat surat elektronik, telepon, atau gawai bisa menambah atau memperkuat pengetahuan. Tetapi bagi beberapa orang, metode tersebut tidaklah cocok. Ada sebagian orang yang perlu tatap muka dan semacam mendapat tutorial langsung untuk memahami satu konsep. Tampaknya, teman-teman mitra adalah tipe yang

seperti itu. Tidak salah, hanya saja kedekatan dan cara komunikasi yang membatasi.

Diskusi jarak jauh, pendalaman lewat email apalagi *Whatsapp* (WA) perlu kecekatan berpikir. Apalagi jika ada orang-orang yang gemar *posting* dan bertanya bertubi-tubi. Layarnya pun kecil, dengan *keyboard* virtual yang juga mungil. Tak mudah bagi sebagian orang untuk berdiskusi virtual.

Meskipun WA memiliki fasilitas *web-apps*, rupanya, mitra belum mengetahui fasilitas ini. Dan saya baru tahu hal ini di Sumba Timur, saat kunjungan pertama saya ke YASALTI (Juni 2018). Wajah mereka terpana waktu saya tunjukkan proses diskusi WA saya dengan Klara menggunakan *web*. Maka, konsultasi pun bertambah, bukan hanya penelitian tetapi juga mengajari bagaimana menggunakan *Whatsapp Web*.

Hal-hal teknis selain urusan koordinasi juga menjadi kendala bagi para mitra. Mitra hanya bisa menggunakan *software* untuk mengetik saja, tetapi tidak bisa mengoptimalkan fasilitas yang ada untuk memudahkan analisis dan penulisan. Pada perangkat pengolah kata, mitra tidak bisa menggunakan fasilitas *style*, catatan kaki, dan juga daftar isi otomatis. Bahkan, mitra mengalami kesulitan menyalin dari pengolah kata ke pengolah tabel (*spreadsheet*, misalnya Excel). Seringkali, saya harus memberikan tutorial jarak jauh bagaimana memanfaatkan fasilitas aplikasi perkantoran secara optimal.

Sedianya, saya berniat untuk juga mengajarkan bagaimana menggunakan fasilitas kutipan dan daftar pustaka otomatis seperti Zotero atau Mendeley. Pun, saya berniat untuk mengajarkan *coding* sederhana menggunakan pengolah tabel. Saya mengurungkan niat ini karena ternyata, kemampuan mitra menggunakan perangkat lunak pengolah kata pun, masih sangat dasar. Menambahkan *plug-in* antar perangkat lunak boleh jadi hanya menambah beban baru bagi mitra.

Mana Bisa Menemukan Barang, Kalau Tidak Jeli

Tetapi rupanya, kerangka pikir yang kami bantu rumuskan pada sesi konsultasi proposal di Kupang (Maret 2018) tidaklah cukup. Teman-teman YABIKU tampaknya mengalami kesulitan atau kurang jeli melihat bahwa faktor-faktor yang saling memengaruhi dalam peristiwa kekerasan adalah sesuatu yang berlapis dan terhubung dari ranah keluarga hingga ranah negara. Maka, tak berapa lama kemudian, meluncurlah terjemahan singkat kerangka pikir relasi sosial ala Naila Kabeer untuk melengkapi

panduan bedah kasus dan wawancara. Harapannya, panduan ini dapat memberikan kejelasan kerangka pikir dan juga mempermudah kawan-kawan dalam membedah dan menganalisis kasus.

Di tempat yang lain, YASALTI memiliki problem yang berbeda, tetapi cukup menantang. Dalam melakukan penelitiannya, YASALTI menggunakan pendekatan etnografi yang mana peneliti perlu melakukan pengamatan atas kegiatan sehari-hari subjek penelitian. Tetapi rupanya, tim peneliti belum sepenuhnya memahami pendekatan etnografi. Boleh jadi, karena beban-beban pekerjaan dari program lainnya, peneliti kemudian tidak menggunakan metode secara semestinya.

Disiplin Ilmu, Ya Harus Disiplin

Beberapa alat bantu yang disediakan oleh kami, selaku konsultan dan fasilitator, tidak digunakan secara ketat. Bahkan temuan lapangan dilaporkan sekenanya, tanpa ada transkrip wawancara yang vital dalam analisis data. Tim peneliti tidak pula membuat jurnal lapangan yang memudahkan kami untuk melihat sejauh mana penelitian telah dilakukan serta bisa memberikan saran jika tim peneliti menemukan kendala. Minimnya data temuan yang tertulis, membuat saya kemudian harus menggali langsung informasi dari tim peneliti.

Pada kunjungan pertama saya ke YASALTI (Juni 2018) sejumlah fakta kemudian terungkap. Untung saja, teman-teman peneliti mencatat dalam buku harian mereka temuan-temuan lapangan dan catatan wawancara dari pelbagai narasumber di lokasi penelitian. Berangkat dari sini pula, kami kemudian membimbing tim peneliti YASALTI melakukan perbaikan laporan temuan sebagai bahan analisis dalam penulisan laporan.

Fakta mengejutkan juga muncul, yaitu seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa warga Desa Lairuru, sebagian besar adalah penganut Marapu. Lebih dari itu, lewat penelitian yang lain, YASALTI menemukan fakta-fakta tentang diskriminasi yang boleh jadi berpengaruh dalam topik penelitian yang sedang diangkat lewat program ini. Sayangnya, fakta ini tidak muncul dalam diskusi pertama di Kupang. Jika fakta ini ditemukan, boleh jadi pertanyaan penelitian akan berubah.

Bagi Sebagian Orang, Menulis Itu Tidak Gampang

Petualangan masih berlangsung. Kali ini tentang menuliskan laporan. Ternyata, bagi sebagian orang menulis bukanlah sesuatu yang mudah.

Barangkali, karena sudah terlalu lama sekolah di Indonesia hanya fokus pada pilihan ganda, maka keterampilan menulis tidak bisa dimiliki secara merata. Sangat nyata, mitra-mitra di NTT memiliki kesulitan untuk menuliskan laporan. Penyusunan kalimat yang panjang, bertele-tele dan berulang, kesalahan pengetikan dan tanda baca, penempatan kata sambung dan imbuhan yang salah, merupakan hal yang umum ditemukan dalam draft laporan.

Kesalahan-kesalahan tata bahasa menyita waktu kami. Selain mengurusi substansi, kami terpaksa harus juga mengurusi tata bahasa yang berantakan. Bagaimanapun, laporan penelitian yang tidak disusun dengan baik, akan menyulitkan pembaca memahami temuan dan pesan penelitian.

Negara dan Kebijakan Itu Ada *lho*, Mereka Punya Pengaruh

Tantangan belum usai. Kali ini berkaitan dengan analisis kebijakan. Program VOICE bermuara pada advokasi kebijakan. Karena itu, dalam penelitian pada program ini, mau tidak mau harus menyertakan bagian dari analisis kebijakan. Rupanya analisis kebijakan juga merupakan titik lemah dari mitra-mitra. Jika pun belum ada bagian analisis kebijakan, seringkali riset menghasilkan temuan-temuan yang mengarah pada aspek tertentu dari kebijakan yang hendak diadvokasi.

Mitra bahkan tidak paham bahwa secara sederhana analisis kebijakan adalah menelaah konsistensi antara tujuan, program, kegiatan, dan indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu pertama. Kedua, analisis kebijakan juga bisa berkaitan dengan telaah terhadap celah antara tujuan, program, dan kegiatan dengan kenyataan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang dilayani. Pada pengertian sesederhana itu pun, nyatanya mitra tidak memahami bahwa salah satu tujuan advokasi adalah mengintervensi agar celah-celah tersebut dapat ditutup.

Maka jurus peningkatan kapasitas singkat kemudian dikeluarkan pada pertemuan tatap muka kedua di Sumba Timur. Saya memberikan tabel sederhana yang berguna untuk memetakan celah antara kebijakan dengan realita lapangan. Mengapa hal ini dipakai? Tentu saja karena penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil fakta lapangan, maka analisis kebijakan harus dikaitkan dengan pertanyaan apakah kebijakan menjawab masalah dan tantangan di lapangan.

Itu di Sumba Timur. Di Timor Tengah Utara, tantangan yang muncul pada saat penulisan laporan adalah tidak tertibnya peneliti dengan kerangka penelitian. Peneliti tidak membahas satu persatu tema-tema yang digunakan untuk membedah kasus. Sangat tampak, para peneliti seperti terburu-buru dan hanya mengandalkan ingatan untuk menulis. Padahal, jika peneliti tertib membahas satu per satu tema yang digunakan untuk melakukan pengkodean, kedalaman analisis akan jauh bisa dicapai. Akhirnya, kami memberikan pancingan berupa pertanyaan-pertanyaan untuk membantu YABIKU menuliskan hasil penelitiannya secara lebih terstruktur.

Belajar Itu Termasuk Membaca

Penuturan di atas tampak seperti sebuah tumpahan *uneg-uneg* mendampingi peneliti pemula. Saya menyadari bahwa proses pendampingan tidak berjalan sesuai dengan skenario. Kendala utama yang dihadapi, saya kira adalah tidak disiplinnya para peneliti mematuhi proses yang disepakati. Pendampingan yang seyogianya bisa dilakukan tahap demi tahap, tidak bisa dilakukan karena peneliti juga melakukan pekerjaan lain yang tidak dikomunikasikan sebelumnya. Lembar-lembar catatan lapangan maupun lembaran kertas kerja yang berisikan data yang hendak dianalisis sangat terlambat disampaikan kepada konsultan dan fasilitator, pun tidak sesuai dengan panduan yang diberikan. Sialnya lagi, peneliti yang sudah dilatih modul CREAME tidak secara cermat membaca modul yang menurut saya mudah dan ringkas untuk digunakan sebagai panduan penelitian.

Dalam pertemuan-pertemuan, maupun komunikasi, seringkali kami harus mengulang materi yang sudah disampaikan lewat pelatihan CREAME. Para peneliti entah bagaimana, enggan membaca modul CREAME. Seringkali ketika disampaikan bahwa apa yang dijelaskan ada di modul CREAME, para peneliti sering tertawa atau tersenyum tersipu-sipu. Pertanyaannya, apa yang membuat peneliti ini enggan membaca kembali modul yang sudah dibuat ringkas padat dan sederhana? Sebuah modul yang memperpendek pembelajaran satu semester di perguruan tinggi bahkan tidak menjadi panduan selama menyusun proposal, metode, analisis, dan penulisan laporan. Selain itu, tak pernah ada pertanyaan yang muncul dari para peneliti berkaitan dengan materi CREAME.

Kaburnya Batas Menjadi Pendamping dan Peneliti

Adalah sulit, ketika peneliti yang didampingi, seperti menempatkan diri sebagai pengambil data atau enumerator belaka. Sementara konsultan seolah-olah menjadi peneliti utama. Ini memunculkan lagi pertanyaan, jangan-jangan, dalam proses pengembangan kapasitas penelitian organisasi masyarakat sipil, proses berjenjang mulai dari enumerator, asisten peneliti, menjadi peneliti pendamping dan akhirnya menjadi peneliti utama adalah hal yang harus dilalui. Barangkali proses berjenjang inilah jalan dalam mengembangkan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk membunyikan bukti menjadi bahan advokasi, tak beda dengan jenjang karir peneliti di bidang akademik.

Jika ada yang bertanya, sejauh ini, apakah ada perubahan yang dialami mitra hingga saat ini, tentu saja perubahan itu ada. Walaupun, perubahan yang dialami oleh mitra boleh jadi tidak seperti yang kami harapkan. Barangkali pula, kami menaruh harapan atas pencapaian mitra terlalu tinggi, sementara mitra adalah peneliti pemula yang harus didampingi lebih intensif yang diawali dengan pembentukan kerangka pikir atas isu yang mereka pilih, kemudian metodologi penelitian dan penulisan laporan.

Penulisan laporan merupakan bagian yang paling mengalami kemajuan. Pada awalnya, mitra menuliskan lebih dari satu pokok pikiran dalam satu kalimat. Kemudian, mitra biasa menulis dengan kalimat yang luar biasa panjang. Masukan-masukan kami, kemudian membuat mitra memahami bagaimana membuat satu tulisan enak dan nyaman dibaca.

Dari sisi kerangka berpikir dan metodologi, kemajuan yang bisa dicapai mitra tidak semaju teknik penulisan. Tampaknya ini penyakit umum organisasi nonpemerintah (ornop) di daerah-daerah. Pendidikan analisis sosial dan teknik dasar penelitian partisipatif sudah lama tidak dilatihkan pada penggiat ornop generasi baru. Kebanyakan, penggiat muda generasi setelah 2000-an terjun langsung ke lapangan tanpa mendapatkan proses refleksi kerangka berpikir yang tajam dan dalam. Karena itu, sering kali muncul, termasuk dalam program ini, cara berpikir yang kurang kritis, atau sebaliknya penuh praduga. Sayangnya, proses pendidikan kritis dan analisis sosial tidak dapat dipenuhi dalam proses ini, hal mana mengakibatkan kerangka berpikir dan metodologi menjadi bagian yang lambat mengalami kemajuan.

***